



# **LISENSI DI BIDANG HAK CIPTA**

## **THESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**S U R A H N O  
NIM. B4A.099.156**

*Pembimbing*

**PROF. DR. SRI REJEKI HARTONO, SH  
NIP.130 368 053**

**PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
S E M A R A N G  
2003**

**UPT-PUSTAK-UNDIP**



LPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:	209/T/MIH/04
Tgl.	29/1/04

## LISENSI DI BIDANG HAK CIPTA

Disusun oleh

SURAHNO  
NIM:B4A.099.156

Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal : 23 Juni 2003

Thesis ini Telah Diterima  
Sebagai Prasarat Untuk memperoleh  
Gelar Magister Ilmu Hukum

Pembimbing

PROF. DR. SRI REJEKI HARTONO, SH  
NIP.130 368 053

Mengetahui :

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. Barda Nawawi Arif, SH  
NIP.130 350 519

## KATA PENGANTAR

Puji syukur patut penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas karunia-Nya , penyusunan thesis dengan judul "LISENSI DI BIDANG HAK CIPTA" ini dapat terselesaikan.

Banyak hambatan yang penulis hadapi dalam menyelesaikan thesis ini, antara lain karena keterbatasan sumber data yang dapat diakses. Namun demikian banyak pihak pula yang telah membantu penulis dengan memberikan data-data, menyediakan dokumen atau sumber informasi, memberikan masukan pemikiran dalam diskusi-diskusi baik formal maupun informal dalam proses penyusunan theis ini. Oleh karenanya, melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Muladi, SH sebagai mantan Menteri Kehakiman yang telah menjalin kerjasama antara Departemen Kehakiman dan HAM RI dengan Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
2. Prof. Dr. Erman Radjaguguk, SH.,LLM sebagai mantan Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan yang telah memprakarsai dan mengusahakan biaya kuliah sehingga penulis dapat mengikuti program ini;
3. Lebih khusus penulis ucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Sri Rejeki Hartono, SH yang telah berkenan untuk menjadi pembimbing dalam penulisan thesis ini;

4. Prof. Zen Umar Purba, SH.,MH sebagai mantan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti program ini;
5. Prof. Abdul Bari Azed, SH.,MH, sebagai Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan Ibu Emawati Junus, SH sebagai Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang yang telah memberi dorongan kepada penulis untuk segera menyelesaikan pendidikan ini;
6. Seluruh staf pengajar pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, yang telah membantu penulis untuk membuka wawasan keilmuan yang lebih luas lagi;
7. Semua pihak yang telah bersedia memberikan data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun thesis ini, khususnya Bapak Rinto Harahap sebagai Ketua Umum dan Bapak Windiaprana Ramelan sebagai Manager Lisensi Yayasan Karya Cipta Indonesia, Bapak James F. Sundah Sebagai Artis dan Pencipta Lagu, Bapak Tomy Suryo Utomo dan Bapak Simon Butt dari Asian Law Group, Ibu Aslam Bustaman dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Bapak Teddy Sukardi dari Ketua Umum Asosiasi Piranti Lunak Indonesia, Bapak Roland Chan dan Mbak Irma dari Bussiness Software Aliance (BSA);
8. Rekan-rekan Pegawai Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, DTLST dan RD, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan HAM RI yang selalu membantu dan mebingatkan untuk menyelesaikan penulisan thesis ini;
9. Rekan-rekan mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Ekonomi dan Tehnologi, khususnya kelas khusus Departemen Kehakiman dan HAM RI yang selama ini telah menjadi pasangan diskusi secara intensif;



10. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan bantuan untuk mengakses data ketika thesis ini dipersiapkan sampai diselesaikan.

Ucapan terima kasih secara khusus pula penulis sampaikan kepada Titi Yulianti, SH, Tania Febriola Rachmawati (Febi) dan Fairus Augustina Rachmawati (Austin), sebagai istri dan anak, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan dan memberikan pengorbanan selama penulis menyelesaikan kuliah.

Dengan penuh kesadaran, penulis memahami bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna dan mempunyai cakupan yang terbatas, oleh karenanya setiap masukan yang akan membawa karya ilmiah ini lebih baik, akan penulis terima dengan tangan terbuka dan senang hati. Pada akhirnya penulis berharap karya ilmiah ini akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan (khususnya ilmu hukum) dan bermanfaat bagi sidang pembaca.

Tangerang, Juni 2003

## RINGKASAN

Lisensi merupakan hak privilege yang bersifat komersial, dalam arti kata memberikan hak dan kewenangan untuk memanfaatkan hak cipta yang dilindungi secara ekonomis dengan pemberian ijin yang dituangkan dalam perjanjian tertulis atau dalam bentuk dokumen. Penerima lisensi berwenang melakukan perbanyakan atau pengumuman untuk memanfaatkan hak cipta yang dilisensikan dan apabila penggunaan tersebut tanpa ijin, maka hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Disamping itu, Lisensi juga merupakan jalan tengah yang diambil pemberi lisensi apabila pemegang hak atas hak cipta tersebut tidak bermaksud mengembangkan sendiri hak ciptanya. Pilihan yang merupakan kompromi antara menguasai sendiri dan melepaskan sama sekali ini membuat proses lisensi menjadi amat sensitive. Pihak-pihak yang terlibat datang dari kepentingan yang berbeda, tiba-tiba harus bersama-sama membagi hak-hak, kewajiban-kewajiban dan resiko dagang secara proporsional selama jangka waktu tertentu untuk kepentingan yang mungkin saling berbeda. Proporsi hak, kewajiban dan resiko dagang tersebut akhirnya membawa dua pihak yaitu pemberi lisensi dan penerima lisensi ke dalam suatu negosiasi dan pembicaraan panjang yang tertuang ke dalam perjanjian kontrak lisensi.

Dengan mengambil judul "**LISENSI DI BIDANG HAK CIPTA**", thesis ini akan melakukan pengkajian mengenai pelaksanaan lisensi hak cipta baik itu menyangkut mekanisme pelaksanaan lisensi, pembayaran imbalan atau royalti, kewajiban pencatatan perjanjian lisensi dan pendaftaran hak cipta serta penyelesaian sengketa lisensi di bidang hak cipta terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pertimbangan yang mendasari pengkajian terhadap hal-hal tersebut adalah belum adanya kesesuaian pengaturan lisensi di dalam undang-undang, di mana lisensi itu mempunyai sifat keperdataan. Di samping itu obyek hak cipta yang dilisensikan terdapat berbagai macam jenis, yang kesemuanya mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga terdapat kesulitan memberikan pengaturan lisensi secara menyeluruh di dalam suatu undang-undang.

Masalah yang menjadi fokus dalam thesis ini adalah bagaimanakah mekanisme lisensi hak cipta terhadap obyek hak cipta yang berbeda dan mengapa kewajiban pemberian royalti dalam perjanjian lisensi hak cipta harus berpedoman kesepakatan organisasi profesi, mengapa perjanjian lisensi hak cipta wajib dicatatkan agar mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, sedangkan pendaftaran hak cipta itu sendiri bukan merupakan suatu kewajiban untuk memperoleh hak dan bagaimana para pihak menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan lisensi. Sedangkan tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui dan memahami mekanisme pelaksanaan lisensi hak cipta, termasuk di dalamnya mekanisme pembayaran royalti, untuk mengetahui pula keberadaan administrasi di bidang Hak Cipta termasuk pengaturan pendaftaran hak cipta dan sinkronisasi pengaturan kewajiban pencatatan lisensi di dalam undang-undang hak cipta dengan hukum perjanjian serta upaya-upaya hukum yang ditempuh terhadap sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan lisensi.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah gabungan antara penelitian normatif dan penelitian sosiologis. Alasan penggabungan dua metode ini semata-mata didasarkan pada sifat rumusan permasalahan dan tujuan penelitian yang berbeda.

Dari hasil penelitian dan analisis data diperoleh temuan-temuan strategis sebagai berikut :

1. Mekanisme lisensi di bidang hak cipta terdapat perbedaan antara obyek hak cipta yang satu dengan obyek hak cipta yang lain. Perbedaan ini, dikarenakan adanya karakteristik yang berbeda-beda. Hak Cipta Lagu/musik sangat erat hubungannya dengan *Neighboring right* (Pelaku, Produser rekaman dan organisasi siaran) dan masalah "*hak mengumumkan*", penerbitan buku lebih menonjolkan pada "*hak memperbanyak*" di samping juga masalah "*hak mengumumkan*", sedangkan di dalam lisensi program komputer lebih menekankan pada "*penggunaan*" program komputer itu sendiri. Di samping itu, lisensi program komputer dan lagu/musik lebih dominan menggunakan perjanjian/kontrak standar atau baku, sedangkan lisensi penerbitan buku tidak selalu menggunakan kontrak standar/baku. Ketiga obyek hak cipta tersebut juga mempunyai perbedaan dalam hal sistem pembayaran royalti;
2. Adanya pertentangan pengaturan kewajiban pencatatan lisensi di dalam UU Hak Cipta dengan ketentuan perjanjian di dalam hukum perdata. Di samping itu, istilah "*pendaftaran hak cipta*" memberikan anggapan masyarakat bahwa timbulnya hak atas hak cipta karena adanya pendaftaran, sehingga memberikan peluang bagi pihak-pihak yang tidak jujur dan beritikad tidak baik untuk memanfaatkan kesempatan tersebut.
3. Kurang tegasnya pengaturan lisensi di dalam UU Hak Cipta, apakah lisensi itu merupakan obyek *pengadilan Niaga* atau *Pengadilan negeri*. Sehingga kurang memberikan kepastian kepada masyarakat dalam mencantumkan klausula "*penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Niaga*" dalam perjanjian yang mereka buat.

Dari hasil temuan strategis penelitian ini, pada akhirnya dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Untuk memberikan pedoman dan kemudahan bagi pemberi dan penerima lisensi, perlu dibuatkan suatu Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) atau Petunjuk Teknis (Juknis) tentang Mekanisme Lisensi di bidang Hak Cipta dan segera dibentuk peraturan pelaksanaan tentang kewajiban pencatatan lisensi; Di samping itu perlu diatur secara rinci satu persatu obyek hak cipta yang dilisensikan;
2. Agar dilakukan revisi atau dihapuskan mengenai ketentuan tentang "*kewajiban pencatatan lisensi dengan alasan agar mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga*" dalam UU Hak Cipta. Disamping itu istilah "*pendaftaran hak cipta*" sebagaimana dianut oleh UU Hak Cipta diganti dengan istilah "*pencatatan hak cipta*"
3. Perlunya pengaturan secara tegas di dalam Undang-undang Hak Cipta, apakah lisensi hak cipta itu merupakan obyek dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Negeri. Hal ini, untuk memberikan kepastian bagi para pihak yang akan membuat suatu perjanjian lisensi khususnya dalam membuat suatu klausula penyelesaian sengketa lisensi melalui pengadilan.

## ABSTRACT

License is a commercial privilege right, it means to give a right and authority in exploiting protected-copyright economically by giving permit in written-contract or in document form. Licensee has an authority to reproduce or to announce in exploiting licenced-copyright, and if its exploitation without permit from the licensee, so that activity is a legal infringement. Besides that, License is also a solution, which is taken by Licensor if the copyright holder has not intended in developing his own-copyright. The option that constitutes compromise between self authorization and to release it which makes the process of license becoming very sensitive. Involving parties have come from the different interest, suddenly, they togetherly should share the rights, obligations and trade risk proportionally in a certain period of time for the interest that maybe different each other. The proportion of right, obligation and trade risk, finally, bring two parties, those are licensee and licensor inside to the negotiation and long speaking that is contained in the agreement of license contract.

By taking the title of **"LICENSE IN THE FIELD OF COPYRIGHT"**, this thesis will do the reasearch on the implementation of license in Copyright whether it is about mechanism of its implementation, the payment of compensation or royalty, obligation in the notification of license contract, and the registration of Copyright, and also the solution of dispute in license of Copyright as refer to the stipulations as regulated in Law No.19 Year 2002 on Copyright. The consideration that is based on this research to those matters where there is no appropriation the rule licenses in this law, and in that license has a nature of civil law. Besides that, Copyright object which is licensed has anykind of types, where all of those have different characteristic, so it has difficulty in giving the rule of license fully in a certain law. The problem of this research is how the mechanism of copyright license to the copyright object which is different and why the obligation in giving the royalty in the contract of license in Copyright should be guided by the agreement of professional association, why the agreement of Copyright License has an obligation to be notified in order to have a law impact for the third party, whereas that Copyright registration itself is not an obligation in having the right and how the parties accomplish the dispute which is happened in license implementation. Whereas, the objective of research to be achieved is for knowing and understanding the mechanism of implementation in Copyright license, including the mechanism of royalty payment, it is also to know the exist of administration in Copyright including the rule of Copyright registration and sinchronization the rule of obligation in the License notification in the Copyright Law with the contract law and also the legal effort which is burst to the dispute which is happened in the implementation of license.

The methodology research is using the combination between normative research and sociological research. The reason of the combination in this two methods are merely based on the nature of problem concept and the objective of research which is different.

From the result and the analysis of research are founded the strategic inventions as follow:

1. There is any differences in mechanism of Copyright license between one of Copyright object with others. This differences are because of differences in characteristic. The Copyright of song/ music is very close connecting to the Neighboring right (performers, sound recording, and broad casting) and the problem in "*publication right*", the book publishing is more concern to the "*reproduction right*" beside of the problem in "*publication right*", whereas in license of computer program is more concern to the "*using*" of the computer program itself. Besides that, the license of computer program and license of song/ music are more dominant in using the agreement/ standar contract or crude, whereas the license of book publishing is not always using the standard contract/ crude. The three object of Copyright as mentioned above, is also having a difference in the system of royalty payment;
2. Any contradiction of regulation in the obligation of licence notification in the Law of Copyright with the stipulation of agreement in Civil Law. Besides that, in term of "*Copyright Registration*" deems to the public that the emerge of right is because of the registration, so it gives the opportunity for the devoted parties, and with bad faith to exploit that opportunity.
3. it is lack of decisive in regulating of license in the Law of Copyright, is that license constitutes object of commercial court or civil court. So it is lack in giving the guarantee to the public in putting the clause of "*the dispute adjudication in civil court or commercial court*" in the agreement which they have made.

From the result of invention in this strategic research, at the end, there are recommendations as follow:

1. To give guideline and facilitation for the licensee and licensor, it is needed to make an Implementation guideline and Technical guideline on the mechanism of license in Copyright, and immediately to be arranged the regulation of implementation on the obligation of license notification; Besides that, it is needed to be detailly arranged one by one the object of Copyright which is licensed;
2. It is suggest to revise or delete on the stipulation about "*obligation in License notification with the reason in order to have the legal impact to the third party*" in the Law of Copyright. Besides that, the term "*Copyright registration*" as stated in the Copyright Law is changed by the term "*the Copyright notification*"
3. It is needed the assertive arrangement in the Law of Copyright, is the Copyright license is object of commercial court or civil court. In this matter, to give the certainty for the party who will make the license contract especially in making a clause the adjudication of license dispute through the court.

## **DAFTAR TABEL/DIAGRAM**

1. Pengelompokan bidang seni
2. Penjabaran Hak Cipta dalam Hak Moral dan Hak Ekonomi
3. Pengumpulan royalti di bidang lagu tahun 2001 di lima negara ASEAN
4. Harta Kekayaan atas Benda dan contoh
5. Alur Pembuatan Kontrak Win-win Solution
6. Pola Kontrak Win-win Solution menurut Bagan Teori Sistem
7. Dasar Perhitungan Tarif untuk General Licensing Tahun 1996
8. Perhitungan tarif baru untuk General Licensing Tahun 2002
9. Permohonan pendaftaran ciptaan tahun 1991 –2002
10. Tenggang waktu penyelesaian melalui Pengadilan Niaga
11. Mekanisme Pencipta dan ciptaannya.

# DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Ringkasan .....	vi
Abstracts .....	viii
Daftar Tabel .....	x
Daftar Isi .....	xi
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	11
C. Kerangka Teoritis .....	12
D. Tujuan Penelitian .....	19
E. Kontribusi Penelitian .....	19
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika .....	25
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 28
A. Hak Cipta Pada Umumnya .....	28
1. Pengertian Hak Cipta dan Unsur-unsurnya .....	28
2. Jenis-Jenis Ciptaan dan Jangka Waktu Perlindungannya .	48
3. Konsep Dasar Perlindungan Hak Cipta .....	56
4. Hak Moral dan Hak Ekonomi dari Hak Cipta .....	63
5. Pengelolaan Administrasi Hak Cipta dan Hak-hak yang Berkaitan .....	71

B. Peralihan Hak dan Perkembangan Pengaturan Hak Cipta ....	79
1. Peralihan Hak Cipta .....	79
2. Perkembangan Pengaturan Hak Cipta di Tingkat Internasional berdasarkan Beberapa Konvensi, Traktat dan Perjanjian .....	88
3. Perkembangan Pengaturan Hak Cipta di Indonesia .....	100
4. Pengaruh Perjanjian TRIP's dan Konvensi Internasional terhadap Pengaturan Hak Cipta di Indonesia .....	109
C. Lisensi Hak Cipta .....	116
1. Pengaturan dan Pengertian Lisensi Hak Cipta .....	116
2. Jenis-Jenis Lisensi .....	121
3. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Lisensi .....	127
4. Lisensi Hak Cipta sebagai Bentuk Perjanjian .....	130
5. Hubungan Hukum Para Pihak .....	138
 BAB. III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	143
A. Hasil Penelitian .....	143
1. Mekanisme Lisensi Hak Cipta .....	143
a. Mekanisme Lisensi .....	143
b. Pelaksanaan Pembayaran Royalti .....	167
2. Pencatatan Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta .....	179
a. Pencatatan Perjanjian Lisensi .....	179
b. Pendaftaran Hak Cipta .....	182
3. Penyelesaian Sengketa Lisensi .....	187
a. Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan .....	188
b. Alternatif Penyelesaian Sengketa .....	195
 B. PEMBAHASAN .....	197



1. Mekanisme Lisensi Hak Cipta .....	197
a. Mekanisme Lisensi .....	197
b. Pelaksanaan Pembayaran Royalti .....	218
2. Pencatatan Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta .....	241
a. Pencatatan Perjanjian Lisensi .....	241
b. Pendaftaran Hak Cipta .....	261
3. Penyelesaian Sengketa Lisensi .....	276
a. Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan .....	279
b. Alternatif Penyelesaian Sengketa .....	292
 BAB IV KESIMPULAN .....	 307
 DAFTAR PUSTAKA .....	 315

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak Cipta adalah merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*) di samping Hak Milik Industri seperti Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman. Hak Cipta tersebut merupakan hak yang sangat pribadi atau eksklusif<sup>1</sup> bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku. Timbulnya hak atas hak cipta adalah secara otomatis, yaitu setelah suatu ciptaan dilahirkan atau setelah adanya perwujudan suatu gagasan dalam bentuk yang nyata tanpa membutuhkan suatu formalitas tertentu, tidak seperti halnya hak milik industri, timbulnya hak harus dengan suatu formalitas tertentu yaitu melalui pendaftaran.

Perwujudan suatu gagasan dalam bentuk yang nyata tersebut merupakan suatu ciptaan sebagai hasil karya pencipta yang mengandung keaslian serta berada dalam lapangan ilmu pengetahuan,

---

<sup>1</sup> Peter Salim, Drs dan Yenny, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer Edisi Pertama*, Penerbit Modern English Press, Jakarta, 1991, memberikan pengertian Eksklusif sebagai suatu yang khusus, terpisah dari yang lain.

Bandingkan juga dengan pengertian hak eksklusif dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa yang dimaksud hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.

seni dan sastra. Ciptaan-ciptaan dalam lapangan ilmu pengetahuan seni dan sastra itu antara lain meliputi buku, program komputer, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik baik dengan atau tanpa teks, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, seni rupa dalam segala bentuk seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase seni terapan, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database dan karya lain dari hasil pengalihwujudan<sup>2</sup>.

Ciptaan-ciptaan tersebut merupakan obyek hak cipta yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi disamping pula terkandung suatu hak moral yaitu suatu hak yang melekat pada diri si pencipta atau pelaku dan tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah beralih atau dialihkan. Pemanfaatan secara ekonomi dari suatu ciptaan tersebut selaras pula dengan sifat dari hak cipta itu sendiri, yaitu bahwa hak cipta itu merupakan benda bergerak yang dapat beralih dan dialihkan baik melalui pewarisan, hibah, wasiat maupun melalui suatu perjanjian seperti jual beli, maupun lisensi.

Hak eksklusif di dalam hak cipta tersebut adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada orang

---

<sup>2</sup> Bandingkan dengan pasal 12 Undang-undang No. 19 Th. 2002 tentang Hak Cipta dan pasal 11 Undang-undang Nomor 12 tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1987.

lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin pemegangnya. Pemanfaatan hak tersebut meliputi kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Di dalam pelaksanaan lisensi dibidang hak cipta mempunyai suatu kesamaan dengan pelaksanaan lisensi pada bidang-bidang hak kekayaan intelektual lainnya seperti paten, merek, desain industri, maupun desain tata letak sirkuit terpadu, yang membedakan hanyalah obyek yang dilisensikan saja. Hal tersebut didasari adanya suatu kesamaan konsep dasar perlindungan hukum hak kekayaan intelektual itu sendiri.

Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual pada dasarnya berintikan pengakuan terhadap hak kekayaan intelektual tersebut dan hak untuk dalam waktu tertentu menikmati atau mengeksploitasi sendiri kekayaan tadi. Selama kurun waktu tertentu orang lain hanya dapat menikmati atau menggunakan atau mengeksploitasi hak tersebut hanya dengan ijin dari pemilik hak, karena perlindungan dan pengakuan tersebut hanya diberikan khusus kepada

orang yang memiliki kekayaan tadi, maka sering dikatakan bahwa hak tersebut eksklusif sifatnya.<sup>3</sup>

Karya-karya intelektual yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia, baik di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra maupun dibidang teknologi memang dilahirkan melalui kemampuan intelektualnya, melalui daya cipta, rasa dan karsanya. Hal ini memberikan pemahaman bahwa karya dibidang hak kekayaan intelektual penting untuk dibedakan dengan jenis kekayaan lain yang juga dapat dinikmati oleh manusia, tetapi tidak tumbuh atau dihasilkan oleh intelektual manusia, misalnya kekayaan yang diperoleh dari alam seperti tanah dan atau tumbuhan berikut hak-hak kebendaan lain yang diturunkannya. Dengan demikian terdapat suatu perbedaan yang nyata mengenai *intellectual property* dengan *real property*<sup>4</sup>.

Timbulnya konsepsi kekayaan di bidang hak kekayaan intelektual, khususnya di bidang hak cipta, akan menimbulkan konsepsi hukum mengenai hak dan kebutuhan untuk melindunginya. Konsepsi hukum tersebut merupakan suatu kebutuhan untuk menumbuhkan sikap dan budaya menghormati dan menghargai hasil karya cipta orang lain. Perlindungan hukum di bidang hak cipta, diharapkan dapat memberikan

---

<sup>3</sup> Bambang Kesowo., *Pengantar Umum mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia*, hlm.10)

<sup>4</sup> Bandingkan dengan Jenny Barmawi,SH.,LLM, *Penelitian Perbandingan Hukum Belanda dalam Hukum Kontinental (Belanda) dan Hukum Inggris/Amerika*, hlm 98, yang menyatakan bahwa :  
“ Menurut hukum Amerika selain pembagian antara real property dan personal property dan pembedaan tangible property yang berarti benda-benda yang berwujud seperti pakain, buku, meja-kursi dan sebagainya, dan intangible property (benda yang tidak berwujud seperti paten hak cipta, desain industri dan lain sebagainya, .....)

rasa aman bagi para pencipta, sehingga akan mendorong kreatifitas untuk menciptakan karya-karya yang bermanfaat bagi sesamanya. Di samping itu perlindungan hukum juga diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat untuk dapat menghargai dan menghormati karya-karya cipta yang dihasilkan oleh para pencipta.

Konsep lahirnya pengakuan hak atas hak cipta adalah sejak suatu gagasan atau ide itu dituangkan atau diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata (*materiil/tangible form*). Pengakuan lahirnya hak cipta tersebut tidak diperlukan atau dibutuhkan suatu formalitas atau bukti tertentu, berbeda dengan bidang hak kekayaan intelektual yang lain seperti paten, merek dan desain industri, timbulnya hak atas bidang-bidang tersebut diperlukan suatu formalitas tertentu yaitu dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pemberian hak kepada negara.

Dengan konsep-konsep dasar tersebut memberikan suatu konsekuensi bagi penciptanya untuk dapat mempertahankan dan melindungi karya ciptanya dari keutuhan maupun gangguan pihak lain, termasuk mengeksploitasinya. Hal ini dikarenakan hanya si penciptanyalah yang mengetahui benar keberadaan karya cipta tersebut dan karena sangat pribadi sifatnya, sehingga dalam lingkungan hukum tergolong ke dalam hukum benda khususnya hukum benda yang bergerak tidak berwujud (*tangible*)<sup>5</sup>. Kekhususan hak cipta dalam

---

<sup>5</sup> Bandingkan dengan Jenny Barmawi, SH.,LLM, ibid hlm. 116, yang menyebutkan bahwa :  
“ Personal property dibagi menjadi dua kategori yaitu : berwujud (*tangible*) dan tidak berwujud (*Intangible*). *Tangible Personal Property* adalah property yang bergerak (*movable*) dapat dirasakan,

lingkungan hukum benda adalah bahwa hak atas hak cipta mempunyai hak moral dan hak ekonomi, dimana apabila hak ekonomi tersebut beralih maka hak moralnya selalu melekat pada ciptaannya. Di samping itu si pencipta atau ahli warisnya dapat melakukan gugatan apabila ciptaan yang sudah beralih tersebut diubah oleh orang lain tanpa terlebih dahulu mendapat ijin pencipta atau ahli warisnya.

Konsep dasar tersebut juga memberikan konsekuensi kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengeksploitasinya<sup>6</sup>, seperti memperbanyak, menjual, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, menterjemahkan atau mengalihwujudkan atau memindahkan hak ekonomi melalui suatu perjanjian lisensi. Pemindahan hak melalui lisensi ini harus dilakukan secara tertulis baik dengan akte otentik atau akte di bawah tangan. Akte penyerahan tersebut lebih dikenal dengan surat kontrak atau surat perjanjian dan berdasarkan pasal 38C ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 disebutkan bahwa agar mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian lisensi wajib

---

dapat diraba dan dapat dilihat, misalnya buku, pena, kotak surat dan sebagainya, sedang intangible personal property adalah property yang tidak dapat dikuasai secara fisik, tidak dapat dipegang oleh tangan manusia, dan yang termasuk dalam kelompok ini adalah paten, hak cipta, account receivable dan corporate goodwill.

<sup>6</sup> Peter Salim, Drs dan Yenny, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer Edisi Pertama*, Penerbit Modern English Press, Jakarta, 1991 memberikan pengertian istilah mengeksploitasi itu adalah mendayagunakan atau memanfaatkan.

dicatatkan di Kantor Hak Cipta. Demikian juga menurut pasal 47 ayat 3 Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002.

Lisensi adalah suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan, yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin. Izin yang diberikan tersebut, merupakan suatu perbuatan pemberi lisensi dalam mengikatkan dirinya dengan penerima lisensi (pasal 1313 KUHPer), tanpa adanya izin tersebut, maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang, yang merupakan perbuatan yang melawan hukum. Ikatan antara pemberi dan penerima lisensi tersebut harus dituangkan dalam bentuk tertulis (kontrak), oleh karenanya, para pihak bebas mengatur sendiri hal-hal yang dikehendaknya dengan memperhatikan syarat-syaratnya suatu perjanjian yaitu, adanya kesepakatan kehendak, kewenangan berbuat, adanya perihal tertentu dan kuasa yang halal (pasal 1320 KUH Perdata).

Lisensi hak cipta pada dasarnya merupakan suatu bentuk pemberian ijin pemanfaatan atau penggunaan hak cipta, yang bukan merupakan pengalihan hak, yang dimiliki oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi dalam jangka waktu tertentu, yang pada umumnya disertai dengan imbalan berupa royalty. Adanya ijin dalam lisensi hak cipta tersebut bersifat mutlak dan ijin yang diberikan harus dituangkan dalam bentuk perjanjian. Hal ini membawa konsekuensi bahwa lisensi...



harus dibuat secara tertulis antara pihak pemberi lisensi yaitu pemegang hak cipta dengan pihak penerima lisensi.

Di samping syarat-syarat tersebut, di dalam mekanisme pemberian lisensi hak cipta juga disyaratkan agar kontrak tidak melanggar unsur itikad baik, kepatutan, kepentingan umum dan kebiasaan (pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata). Walaupun unsur-unsur tersebut bukan merupakan syarat syahnya perjanjian, namun di dalam pelaksanaan perjanjian akan berakibat putusnya perjanjian apabila unsur tersebut dilanggar.

Lisensi itu sendiri sebenarnya merupakan jalan tengah yang diambil pemberi lisensi apabila pemegang hak atas hak cipta tersebut tidak bermaksud mengembangkan sendiri hak ciptanya. Pilihan yang merupakan kompromi antara menguasai sendiri dan melepaskan sama sekali ini membuat proses lisensi menjadi amat sensitive.<sup>7</sup> Pihak-pihak yang terlibat datang dari kepentingan yang berbeda, tiba-tiba harus bersama-sama membagi hak-hak, kewajiban-kewajiban dan resiko dagang secara proporsional selama jangka waktu tertentu untuk kepentingan yang mungkin saling berbeda. Proporsi hak, kewajiban dan resiko dagang tersebut akhirnya membawa dua pihak yaitu pemberi lisensi dan penerima lisensi ke dalam suatu negosiasi dan pembicaraan panjang yang tertuang ke dalam perjanjian kontrak lisensi.

---

<sup>7</sup> Helen Theorupun Ongko, *Kontrak Lisensi Hak Kekayaan Intelektual*, Nopember 1999.

Negosiasi dan pembicaraan tersebut akan membawa suatu perikatan pemberian lisensi di bidang Hak Cipta, yaitu pemberi lisensi memberikan ijin kepada penerima lisensi untuk mengeksploitasi hak ciptanya dan di sisi lain penerima lisensi mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah imbalan (*royalty*) kepada pemegang hak cipta. Namun kewajiban penerima lisensi itu tidak saja membayar imbalan, tetapi penerima lisensi juga harus menjaga terhadap hal-hal yang tidak akan mengakibatkan kerugian baik langsung maupun tidak langsung atas hak cipta yang diperoleh pemanfaatannya melalui pemberian lisensi hak cipta, baik memberikan kerugian moril maupun materiil bagi pemberi lisensi.

Lisensi hak cipta sebagai suatu transaksi yang melahirkan perjanjian, akan selalu melibatkan dua pihak yang berbeda latar belakang kepentingan. Kedua belah pihak tersebut memiliki kepentingan yang berdiri sendiri dan kadangkala bertolak belakang, meskipun secara konseptual kedua belah pihak tersebut yaitu pemberi dan penerima lisensi akan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Keuntungan yang besar inilah yang pada pokoknya menjadi sumber perbedaan kepentingan dan perselisihan yang dapat terjadi di antara kedua belah pihak tersebut.

Di samping itu, ada satu hal yang oleh Keegen dikatakan perlu mendapatkan perhatian yang lebih seksama dari pengusaha yang akan memberikan suatu lisensi. Hal itu berhubungan dengan ketentuan hukum

yang berlaku di negara di mana lisensi akan diberikan atau dikembangkan. Menurut Keegen adakalanya penerima lisensi dapat beralih “wujud” dari mitra usaha menjadi kompetitor. Ini merupakan suatu ancaman yang tidak pelak akan sangat merugikan kepentingan pengusaha yang akan mengembangkan usahanya dalam bentuk lisensi.<sup>8</sup>

Di dalam mekanisme pemberian lisensi khususnya dalam pembuatan perjanjian lisensi harus jelas siapa pemberi dan penerima lisensi, apakah obyeknya memperoleh perlindungan Hak Cipta atau tidak, dasar dari perjanjian lisensi, apakah lisensi itu eksklusif, tunggal atau non eksklusif. Yang perlu diperhatikan adalah suatu lisensi dapat mengandung lebih dari satu hak. Misalnya lisensi itu memberikan hak untuk memproduksi dan mendistribusikan. Ini harus dikemukakan dengan jelas. Hak eksklusif tersebut dapat diubah menjadi hak non eksklusif jika pemegang lisensi tidak memenuhi beberapa persyaratan dalam perjanjian (misalnya, jumlah tertentu dari keuntungan yang diperoleh dari produk tersebut tidak dipenuhi).

Demikian juga mengenai cakupan wilayah geografisnya dapat dibatasi untuk wilayah geografis mana, dan yang tidak kalah penting adalah menyangkut jangka waktu lisensi, dalam hal ini pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian lisensi bebas untuk menentukan. Yang harus diingat adalah bahwa pemegang hak cipta tidak dapat memberikan lisensi atas karyanya dalam jangka waktu yang melebihi jangka waktu

---

<sup>8</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001.hal 5

obyek perlindungan hak cipta yang masih ada. Begitu pula mengenai kompensasi untuk pemberi lisensi, biaya lisensi bebas ditentukan oleh pihak-pihak yang terlibat.

Dari uraian tersebut di atas, terlihat bahwa begitu kompleksnya permasalahan lisensi hak cipta, termasuk di dalamnya menyangkut mekanisme pelaksanaan lisensi, pencatatan perjanjian lisensi dan pendaftaran hak cipta serta pemberian kompensasi diberikannya lisensi berupa royalti termasuk di dalamnya cara penentuan besarnya imbalan dan peran organisasi profesi di bidang hak cipta serta upaya-upaya penyelesaian sengketa yang terjadi diantara para pihak, maka penelitian terhadap lisensi di bidang hak cipta ini penting untuk dilakukan.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian seperti tersebut pada latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme lisensi hak cipta apabila terdapat perbedaan obyek hak cipta yang berbeda dan mengapa kewajiban pembayaran royalti harus berpedoman kesepakatan organisasi profesi?
2. Mengapa perjanjian lisensi hak cipta wajib dicatatkan agar mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, sedangkan pendaftaran hak cipta itu sendiri bukan merupakan suatu kewajiban untuk memperoleh hak ?
3. Bagaimana para pihak menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan lisensi ?

### C. Kerangka Teoritis

Peralihan karya-karya dibidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, karya pertunjukan karya rekaman maupun karya siaran dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Secara umum, peralihan hak tersebut dapat berupa pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara maupun dengan perjanjian yang harus dilakukan dengan suatu akte. Termasuk peralihan dengan perjanjian adalah jual beli dan lisensi.

Lisensi itu sendiri merupakan salah satu cara pengeksploitasian karya-karya dibidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, karya pertunjukan, karya rekaman dan karya siaran. Dalam pelaksanaan lisensi, para pihak baik pemberi lisensi maupun penerima lisensi membutuhkan suatu pengetahuan hukum untuk membuat suatu kontrak. Kontrak ini sangat penting bagi penerima dan pemberi lisensi, karena menyangkut hak dan kewajiban. Di samping itu kontrak juga sebagai pedoman atau dasar bagi pencipta, pemegang hak cipta dan pelaku untuk pengembangan kreatifitas dan aktifitas dibidang seni, sastra dan penerbitan. Bagi penerima lisensi, produser serta pemakai, kontrak penting untuk membuat penjelasan dalam pemakaian, mengamankan investasi serta untuk melawan para pelanggar.

Terhadap karya yang secara individu tidak dapat digunakan atau dieksploitasi sendiri oleh pencipta atau pemegang hak cipta, maka pencipta maupun pemegang hak cipta tersebut memerlukan bantuan pihak lain, karena secara pribadi tidak mempunyai kapasitas untuk memonitor semua penggunaan karya-karya yang dihasilkan, untuk bernegosiasi

dengan para pemakai serta memungut royalti, maka pencipta maupun pemegang hak cipta memerlukan suatu administrator kolektif terhadap hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta.

Untuk mengetahui dan memahami mekanisme pelaksanaan lisensi, ada beberapa teori<sup>9</sup> yang dapat dipergunakan untuk membantu menganalisa permasalahan tersebut di atas. Pasal-pasal yang menyangkut perjanjian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan suatu alat untuk menganalisa permasalahan dan dalam mekanisme pelaksanaan dapat digunakan teori dari aliran struktural fungsional. Di samping itu, diperlukan pula peraturan perundang-undangan yang erat hubungannya dengan permasalahan, karena peraturan perundang-perundangan merupakan salah satu sistem hukum yang menurut Lawrence M. Friedman<sup>10</sup> termasuk dalam substansi hukum, selain struktur dan budaya hukum. Substansi hukum, sebagaimana dipahami oleh beliau, adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum.

---

<sup>9</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, SH., *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan Kedua, 1985 hal. 37, yang menyebutkan bawa :

Syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah teori adalah i) logis dan konsisten yaitu dapat diterima oleh akal sehat dan tidak adanya hal-hal yang saling bertentangan dalam kerangka pemikiran itu. ii) teori terdiri dari pernyataan-pernyataan yang mempunyai inter relasi yang sesuai mengenai gejala tertentu. iii) Pernyataan-pernyataan di dalam sebuah teori mencakup semua unsur-unsur dari gejala yang termasuk ruang lingkupnya; iv) tidak boleh duplikasi dalam pernyataan-pernyataan itu; dan v) teori harus dapat diuji kebenarannya secara empiris.

<sup>10</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System : A Social Science Prespective*, Russel Foundation, 1975 hal 15

Suatu konsep yang memandang hukum sebagai suatu rangkaian peraturan akan menempatkan hukum sebagai suatu lembaga yang otonom, yaitu sebagai suatu subyek tersendiri terlepas dari faktor-faktor diluar peraturan-peraturan tersebut. Sebagai lembaga yang otonom maka hukum tidak menghiraukan nilai-nilai tertentu serta tak berurusan dengan apakah hukum dituntut untuk mencapai tujuan tertentu. Mengacu pada teori tersebut, Undang-undang Hak Cipta sebagai lembaga pengaturan di bidang hak cipta apakah akan mampu memberikan kepastian hukum atas pencipta, pemegang Hak Cipta maupun obyek yang dilindunginya. Hal ini perlu pembahasan lebih lanjut.

Perlindungan hukum dalam perspektif teori sangat diperlukan sebagaimana dijelaskan dalam *reward theory*, bahwa perlindungan yang diberikan kepada pencipta dan ciptaannya, identik dengan penghargaan yang diberikan atas usaha atau upaya seorang pencipta. Penghargaan ini akan memberikan rangsangan bagi seorang untuk menciptakan karya-karya intelektual baru sehingga akan menghasilkan keuntungan sebagaimana dalam *incentive theory*<sup>11</sup>. Ataupun dalam *risk theory*<sup>12</sup> di mana perlindungan terhadap pencipta atau ciptaannya selain sebagai penghargaan juga dipandang sebagai hal yang sudah sewajarnya diterima

---

<sup>11</sup> Peter Drahos, *A Philosophy of Intellectual Property*, Darmonth Publishing, (Aldershot, Brookfield USA, Singapore, Sidney), 1986, hal 122.

<sup>12</sup> Arry Ardanta Sigit, *Perlindungan Paten (Prosedur Permintaan Paten, dampaknya bagi pengembangan Industri nasional, dan peranan penegakan hukum dalam penyelenggaraan system paten)*, Makalah disajikan dalam Pelatihan untuk pengajar HaKI, 1996, hal 3

oleh seorang pencipta atau penemu, karena dalam rangka menghasilkan ciptaan atau temuannya telah melalui berbagai resiko.

Teori tersebut didasarkan pada 4 (empat) prinsip hak kekayaan intelektual pada umumnya yaitu prinsip keadilan, prinsip ekonomi, prinsip kebudayaan dan prinsip sosial<sup>13</sup>. Prinsip keadilan berkaitan dengan penghargaan terhadap pencipta suatu karya intelektual. Penghargaan dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya.<sup>14</sup> Prinsip ekonomi menekankan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikannya seseorang akan mendapatkan keuntungan seperti lisensi, royalti dan sebagainya. Menurut prinsip kebudayaan, karya intelektual manusia dapat menimbulkan suatu gerak hidup, membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan karya intelektual baru. Prinsip sosial berkaitan dengan tujuan pemberian hak atas suatu karya intelektual yang tidak hanya memenuhi kepentingan

---

<sup>13</sup> Soenaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1982, hal 124.

<sup>14</sup> Agus Brotosusilo.,SH.,MA., *Peranan Hukum Nasional dan Budaya Hukum Indonesia dalam Kontrak Internasional di Era Globalisasi*, Makalah disajikan pada seminar Hukum Kontrak Internasional dalam Era Globalisasi, Jakarta, 6 Maret 1997, yang menyebutkan bahwa : Hasil penelitian Soepomo menunjukkan bahwa yang serasi bagi masyarakat Indonesia adalah apabila komunalism lebih dominan dari individualism. Studi lain menunjukkan bahwa bagi sebagian besar masyarakat tersebut yang serasi adalah apabila spiritualism lebih dominan dari materialism. Itulah sebabnya para pencipta motif batik atau pengarang suatu lagu (gending-gending Jawa) memanfaatkan ciptaan mereka, karena mereka cukup menikmati kepuasan batin bila orang lain memanfaatkan hasil karya mereka. Demikian pula agama Islam yang dianut oleh sebagian besar warganegara RI mengajarkan bahwa salah satu dari tiga perihal yang manfaatnya masih dapat dinikmati oleh seseorang bahkan setelah meninggal dunia adalah ilmu yang diamalkan. Keadaan ini tidak akan segera berubah, karena dari hasil penelitian diperoleh keterangan bahwa para pihak yang berkepentingan menyatakan informasi tentang hak cipta, paten maupun merek dagang dari instansi resmi dirasakan kurang sekali.



perseorangan atau badan hukum saja melainkan juga dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Aliran struktural fungsional berpendapat bahwa tindakan seseorang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Teori ini bertolak dari asumsi bahwa masyarakat merupakan suatu system sosial yang terdiri dari bagian-bagian yang menyatu dalam keseimbangan dan stabilitas. Dalam keadaan yang demikian, manusia tidak berada dalam keadaan yang bebas untuk melakukan tindakannya. Tindakan manusia secara normatif diatur dan dikendalikan oleh nilai-nilai dan standar-standar normatif bersama.<sup>15</sup>

Dalam perspektif teori struktural fungsional, peranan nilai dan norma sangat penting terhadap tindakan seseorang, oleh karena itu bagi teori ini semua tindakan selalu berorientasi pada nilai yaitu terkait dengan standar normatif yang mengendalikan pikiran individu-individu.<sup>16</sup> Dengan bertolak dari perspektif teori ini kita dapat mengatakan sementara bahwa tindakan untuk melaksanakan lisensi dibidang hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta sangat ditentukan oleh nilai-nilai budaya yang dipegang oleh pemberi dan penerima lisensi.

Asumsi dasar bahwa nilai dan norma dalam masyarakat menentukan pilihan tindakan manusia sebagaimana dianut oleh teori structural fungsional, dikutip oleh Giddens lewat teori strukturasinya, menurut

---

<sup>15</sup> Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern* , Terjemahan Robert M.Z., Lawang, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 1990, Hal 99-123.

Giddens, pilihan tindakan manusia tidak selalu ditentukan oleh struktur sosialnya (nilai, norma dan kebiasaan) tetapi manusia mempunyai kebiasaan menyimpang dari struktur.<sup>17</sup> Menurut tindakan ini yang dilakukan seseorang berkaitan dengan kegandaan struktur yang bersifat dualistis dan dialektikal tentang manusia.<sup>18</sup> Bagi teori ini tindakan manusia pada satu sisi terbentuk oleh struktur-struktur sosial tertentu, sementara pada sisi lain struktur-struktur masyarakat itu terbentuk karena adanya tindakan manusia.<sup>19</sup>

Pandangan lain berpendapat bahwa perkembangan untung rugi merupakan dasar pilihan tindakan bagi seseorang, menurut teori ini, seseorang selalu memperhatikan keuntungan dan atau kerugian yang akan diperoleh jika suatu pilihan tindakan ditempuh. Inilah asumsi dasar dari teori pertukaran (*Exchange Theory*).<sup>20</sup> Menurut Homens, suatu tindakan adalah rasional apabila keuntungan yang bakal diraih lebih tinggi dari kerugian yang akan menyimpannya. Dengan demikian berdasarkan logika dari teori ini, eksploitasi hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta melalui perjanjian lisensi dapat sangat ditentukan oleh pertimbangan untung rugi yang bakal diterima oleh para pihak, baik itu pencipta dan pemegang hak cipta sebagai pemberi lisensi serta pihak-pihak lain sebagai penerima lisensi. Dalam memanfaatkan hasil karya

---

<sup>16</sup> Gorge Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, terjemahan Alimandan, Rajawali Pers, Jakarta, 1992. Hal. 25 – 30.

<sup>17</sup> Lihat Ritzer, op cit, hal. 369 – 370.

<sup>18</sup> N. Mouzelis, *Restructuring Structuration Theory*, *Sociological Review*, Vol. 7, 1989 hal. 615 – 616.

<sup>19</sup> Giddens, *Control Problem in Social Theory*, Millan Education Ltd., London, 1993 hal. 89.

tersebut, pencipta atau pemegang hak cipta mempunyai pilihan-pilihan tindakan sendiri, termasuk di dalamnya adalah memberikan ijin kepada pihak lain dengan atau tanpa suatu imbalan.

Berdasarkan teori aksi, sekalipun norma-norma, nilai-nilai berfungsi untuk mengendalikan tindakan seseorang, namun norma-norma tersebut tidak menetapkan pilihan tentang cara dan sarana yang terbaik bagi seseorang. Pilihan tentang cara dan sarana yang terbaik untuk mencapai tujuan seseorang ditentukan atas dasar kemampuan para aktor untuk memilih. Kemampuan inilah oleh Parson disebut sebagai teori tindakan Voluntarisme, yakni kemampuan individu melakukan tindakan dalam arti menetapkan cara atau sarana dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan.<sup>21</sup>

Aktor menurut konsep voluntarisme adalah pelaku aktif dan kreatif serta mempunyai kemampuan menilai dan memilih cara bagi tindakannya. Walaupun aktor tidak mempunyai kebebasan total karena adanya kontrak nilai dan norma-norma sosial yang berlaku, namun ia mempunyai kemauan bebas untuk memilih berbagai alternatif tindakan secara aktif, kreatif dan evaluatif.<sup>22</sup>

Berdasarkan teori penawaran dan penerimaan, bahwa pada prinsipnya suatu kesepakatan kehendak baru terjadi setelah adanya penawaran (*offer*) dari salah satu pihak dan diikuti dengan penerimaan tawaran

---

<sup>20</sup> Margaret M. Paloma, *Sosiologi Kontemporer*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1994, hal 51-76.

<sup>21</sup> Ian Craib, *Teori sosial modern ; dari Parson sampai Hebermas*, Rajawali, Jakarta, 1986 hal. 60.

(*acceptance*) oleh pihak lain.<sup>23</sup> Sehingga di dalam pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta teori tersebut merupakan dasar pijakan bagi pemberi dan penerima lisensi dalam memanfaatkan hak cipta, baik dengan cara tertulis yang dituangkan dalam suatu kontrak maupun dengan cara lisan.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme pelaksanaan lisensi hak cipta. Dalam kaitan ini juga hendak dideskripsikan mengenai mekanisme pelaksanaan lisensi hak cipta, oyek-obyek hak cipta yang berbeda dan mekanisme pembayaran royalti dalam pelaksanaan lisensi hak cipta termasuk di dalamnya peran organisasi profesi di bidang hak cipta.
2. Untuk mengetahui dan memahami aspek-aspek hukum yang mewajibkan pencatatan perjanjian lisensi berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta kaitannya dengan kekuatan berlakunya pencatatan lisensi terhadap pihak ketiga serta fungsi pendaftaran hak cipta.
3. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan lisensi hak cipta.

#### **E. Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

---

<sup>22</sup> Gorge Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, terjemahan Alimandan, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hal. 57.

1. Dapat digunakan sebagai acuan bagi para pihak, baik itu para pencipta, pemegang hak cipta dan masyarakat pengguna dalam rangka pelaksanaan pemberian lisensi hak cipta, baik itu menyangkut obyek yang dilisensikan, mekanisme pelaksanaan lisensi di bidang hak cipta, kewajiban pembayaran imbalan (royalti) termasuk di dalamnya peran organisasi profesi di bidang hak cipta;
2. Memberikan sumbangan manfaat secara teoritis berupa konsep pengaturan lisensi hak cipta dalam hukum positif dan juga dapat digunakan sebagai acuan/bahan informasi untuk penelitian lain dalam mengembangkan dan menelaah secara mendalam tentang lisensi hak cipta, termasuk di dalamnya manfaat pencatatan perjanjian lisensi maupun mengenai pendaftaran Hak Cipta;
3. Memberikan sumbangan kepada masyarakat , Direktorat Hak Cipta dan lembaga administrasi kolektif yang bergerak dibidang hak cipta dalam upaya menyelesaikan sengketa lisensi yang terjadi.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu mengungkap dan memberi penjelasan mengenai pelaksanaan lisensi hak cipta ditinjau dari aspek yuridis, baik menyangkut hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemberi lisensi, dalam hal ini pencipta maupun pemegang hak cipta dan dipihak lain adalah pemberi lisensi, dalam hal ini masyarakat pengguna serta

---

<sup>23</sup> Munir Fuady., SH.,MH.,LLM, *Hukum Kontrak dari sudut Pandang Hukum Bisnis*, Penerbit PT.

pihak-pihak terkait yaitu lembaga atau badan administrasi kolektif dibidang hak cipta. Dengan penjelasan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai lisensi hak cipta sehingga diperoleh rumusan-rumusan teoritis yang dapat digunakan sebagai acuan untuk membuat aturan-aturan dalam hukum positif.

Di dalam penulisan ini digunakan metode Normatif dengan pendekatan normatif, yang dimaksudkan untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti dan menjelaskan realita empirik yang terjadi dalam masyarakat serta secara normatif dapat memberikan suatu gambaran bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat dan bagaimana hukum berinteraksi dengan lingkungan dimana hukum tersebut diberlakukan. Sehingga melalui metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran pelaksanaan lisensi hak cipta baik menyangkut penegak hukumnya, budaya hukum, pemberi dan penerima lisensi serta peraturan perundang-undangnya. Untuk mencapai apa yang diharapkan dari penelitian ini akan dikemukakan beberapa hal mengenai pendekatan yang digunakan, metode pengumpulan data, sumber data dan metode analisis data.

#### 1. Pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif. Disamping, dilengkapi pula data empirik yang akan digunakan sebagai bahan perbandingan yang memandang hukum

---

Aditya Bakti Bandung 1999, hal.45.

tidak hanya sebagai peraturan atau kaidah-kaidah saja, akan tetapi juga meliputi bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat serta bagaimana hukum berorientasi dengan lingkungan dimana hukum itu diberlakukan. Disamping itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif, hal ini dipandang perlu untuk menggunakan konsep-konsep yang berpengaruh terhadap model-model kajian hukum. Hal ini dikarenakan konsep dan metode itu adalah merupakan fungsi dari konsep hukum itu sendiri.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, lisensi hak cipta yang diatur dalam hukum positif, tidak saja dipandang sebagai bentuk aturan (*rule*) tetapi juga dikonseptualisasikan sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam proses/mekanisme pelaksanaan lisensi.

## 2. Jenis, Sumber dan Cara Pengumpulan Data

Jenis data yang diperlukan untuk dianalisa, pada dasarnya meliputi jenis data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh penulis langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder<sup>25</sup> adalah data yang telah dikumpulkan dan disistematisir oleh pihak lain.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Bandingkan dengan pendapat Sutandyo Wignyosubroto Hadisuprpto, 1995 : *Metode Noarmatif Dalam penelitian Hukum, Masalah Penataran Metodologi Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dengan Penekanan Bidang Hukum*, Lembaga Penelitian Unsoed, Purwokerto.

<sup>25</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, SH., *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan Kedua, 1985 hal. 24, yang menyebutkan bawa :  
Data Sekunder dapat berupa :

1. Data Sekunder Umum

a. Data sekunder bersifat pribadi yang berupa dokumen pribadi;  
b. Data sekunder yang bersifat publik yang terdiri dari data arsip, data resmi pada instansi pemerintah dan data yang dipublikasikan;

Aadapun cara pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilakukan secara tidak terarah, yaitu tidak tergantung pada suatu daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Penelitian di sini tidak akan memberikan pengarahan-pengarahan yang detail, akan tetapi sepenuhnya akan diserahkan kepada informan untuk memberikan penjelasan menurut kemauannya sendiri. Keuntungan dari wawancara seperti ini adalah (1) Mendekati keadaan yang senyatanya, karena didasarkan atas spontanitas yang diwawancarai; (2) Lebih mudah untuk mengidentifikasi masalah yang diajukan oleh peneliti/pewawancara; (3) Lebih banyak kemungkinannya untuk menjelajah berbagai aspek dari permasalahan yang diajukan.<sup>27</sup> Di samping itu dilakukan pula wawancara terstruktur dan wawancara mendalam<sup>28</sup> dan penelaahan dokumen.<sup>29</sup>

b. Studi Kepustakaan/Dokumen

---

2. Data sekunder di bidang hukum, terdiri dari :

- a. bahan hukum primer;
- b. bahan hukum sekunder dan
- c. bahan hukum tertier.

<sup>26</sup> Stewart David W., 1984, *Secondary Research, Information Source and Methods*, Sage Publications, Newbury Park, London, P. 11 – 12.

<sup>27</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990. Hal.60.

<sup>28</sup> Moleong, Lexy J., 1994, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal.136-139.

<sup>29</sup> Ibid, hal. 163



Penelaahan dokumen dalam penelitian ini akan meliputi pengkajian peraturan dari dokumen lain yang mempunyai hubungan dengan hal-hal lisensi hak cipta.

### 3. Analisa Data

Untuk mencapai tujuan penelitian dengan metode pendekatan normatif empirik akan dipergunakan metode analisis domain dan analisis taksonomis.<sup>30</sup> Yang akan diteliti adalah mekanisme pelaksanaan pemberian lisensi hak cipta dan implementasi peraturan pencatatan lisensi sebagai instrumen yang harus dilaksanakan oleh pemberi dan penerima lisensi.

Di sini terlihat bahwa domain yang akan dianalisis adalah domain regulasi yang mewajibkan pencatatan perjanjian lisensi hak cipta serta domain keberadaan pemberi dan penerima lisensi.

Dari analisa domain ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang bersifat menyeluruh tentang pokok permasalahan yang diteliti. Hasil analisa domain ini akan dipergunakan sebagai titik tolak untuk melakukan penelaahan yang lebih rinci dan mendalam dengan menggunakan analisis taksonomis. Dan pada akhirnya hasil analisis tersebut akan diformulasikan dalam kesimpulan.

Sedangkan terhadap metode pendekatan normatif, data primer dan data sekunder yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis sincronic dan diachronic dengan saling melengkapi.

Sincronic adalah metode analisis hukum yang dilakukan dengan cara membandingkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam periode yang sama, sedangkan diachronic adalah metode analisis hukum yang dilakukan dengan cara membandingkan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hal yang sama tetapi berbeda masa berlakunya.

#### **G. Sistematika Thesis**

Thesis ini di susun ke dalam 4 (empat) bab yang menggambarkan konsistensi pemikiran terhadap permasalahan yang menjadi fokus thesis. Masing-masing bab terdiri dari sub bab, sebagai bagian dari pokok pikiran bab.

BAB I yang berjudul Pendahuluan, berusaha untuk memberikan gambaran secara umum terhadap permasalahan dan kerangka berfikir yang akan dipergunakan untuk mengkaji permasalahan yang menjadi fokus thesis. Oleh karenanya, bagian pendahuluan ini disusun ke dalam urutan sub bab sebagai berikut : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Kerangka Teoritis, Tujuan Penelitian, Kontribusi Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Thesis.

Bab II yang berjudul Tinjauan Pustaka, berusaha untuk memberikan gambaran secara lebih mendalam terhadap kajian teoritis yang akan dipergunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari penelitian. Tinjauan pustaka ini mencakup Hak Cipta Secara Umum

---

<sup>30</sup> Faisal, Sanafiah, 1990, *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi yayasan Asih*, Malang, hal

meliputi Pengertian Hak Cipta dan Unsur-unsurnya, Jenis-Jenis Ciptaan dan Jangka Waktu Perlindungannya, Pengelolaan Administrasi Hak Cipta dan Hak-hak yang Berkaitan, Konsep dasar Lahirnya Hak Cipta, Hak Moral dan Hak Ekonomi dari Hak Cipta, Pengalihan Hak dan Perkembangan Pengaturan Hak Cipta yang meliputi Pengalihan Hak Cipta dan hak yang berkaitan, Perkembangan Hak Cipta di Tingkat Internasional berdasarkan Beberapa Konvensi, Traktat dan Perjanjian, Perkembangan Pengaturan Hak Cipta di Indonesia, Pengaruh Perjanjian TRIP's dan Konvensi Internasional terhadap Pengaturan Hak Cipta di Indonesia.

Di samping itu, di dalam bab ini akan diuraikan pula mengenai Lisensi Hak Cipta yang meliputi : Pengertian Lisensi, Jenis-Jenis Lisensi, Lisensi sebagai bentuk Perjanjian, serta Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Lisensi.

BAB III yang berjudul Hasil Penelitian dan Analisis Data, berusaha untuk melakukan pengkajian secara ilmiah terhadap data-data yang terkumpul selama penelitian dilakukan. Titik tolak adalah melihat data secara empiris dari kaca mata kajian pustaka yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Sub bab yang akan dipaparkan pada Bab III ini meliputi : Mekanisme Lisensi Hak Cipta terhadap Obyek Hak Cipta yang Berbeda, Pencatatan Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta dan Penyelesaian Sengketa lisensi. Pada Bab ini akan diuraikan tentang mekanisme lisensi, obyek-obyek lisensi hak cipta, pembayaran royalty

termasuk di dalamnya peran organisasi profesi dalam menangani masalah royalty.

Bab IV yang berjudul Kesimpulan, berusaha untuk merumuskan secara singkat dan padat terhadap analisis permasalahan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hak Cipta Pada Umumnya

##### 1. Pengertian Hak Cipta dan unsur-unsurnya

Istilah hak cipta pertama kali dicetuskan oleh Prof. Mr. Soetan Moh. Sjah dalam Konggres Kebudayaan-2 yang diselenggarakan oleh Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional (BMKN) di Bandung. Istilah yang dikenal sebelumnya adalah hak pengarang, yang merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda '*auteur*', sedangkan *Auteurswet* 1912 itu cakupannya lebih luas dari pada *auteur* (pengarang) saja, maka diterimalah istilah hak cipta, yang selain mencakup hak pengarang, juga mencakup penggambar, pelukis dan lain-lain.<sup>1</sup>

Saidin juga mengemukakan bahwa istilah hak cipta pertama kali dikemukakan oleh Moh. Syah pada konggres kebudayaan di Bandung tahun 1951, yang kemudian diterima sebagai pengganti istilah hak mengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak mengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah *Auteurs Rechts*. Dikatakan kurang luas karena istilah hak mengarang memberikan kesan ada penyempitan arti. Seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja atau yang ada sangkut pautnya dengan karang-mengarang.

---

<sup>1</sup> Bandingkan JCT. Simorangkir, *Undang-undang Hak Cipta 1982 (UHC 1982)*, hal. 5.

Sehingga pada akhirnya istilah hak cipta yang dipakai dalam Undang-undang Hak Cipta Indonesia.<sup>2</sup>

Amru Hydari Nazif<sup>3</sup> mengemukakan bahwa sumber kesulitan orang untuk dapat memahami dan membedakan istilah dibidang kekayaan intelektual secara baik dan tepat justru ada pada terjemahan ke dalam bahasa Indonesia yang tidak "pas". *Copyright* yang sesungguhnya berarti hak penggandaan di-Indonesiakan menjadi hak cipta. Ini membuat sulit orang untuk memahami apa yang sebenarnya dilindungi. Kalau kita menggunakan bahasa Inggris, buku teks dalam bahasa Inggris yang membahas *Copyright* dengan gamblang mengawali diskusi dan pembahasan dengan mengatakan, pada dasarnya *Copyright is the right to copy*. Atau dalam bahasa Indonesia hak penggandaan ialah hak untuk menggandakan. Sederhana dan benar adanya atau dengan kata lain kita tidak bisa mengatakan "*copyright*" ialah "hak cipta".

Masri Maris dalam menerjemahan buku "*Copyright's highway, from gutenberg to the Celestial Jukebox*" oleh Paul Goldstein ke dalam bahasa Indonesia<sup>4</sup> menyebutkan bahwa Apakah Hak Cipta itu ? Sejak Undang-undang Hak Cipta lahir kira-kira tiga abad yang lalu, arti istilah hak cipta tidak berubah. Hak Cipta berarti, hak untuk memperbanyak suatu karya cipta

---

<sup>2</sup> Lihat Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995 hal.28

<sup>3</sup> Amru Hydari Nazif, *Catatan singkat yang disampaikan ke Direktur Hak Cipta, Desain Industri, DTLST & RD tanggal 15 April 2002*, Karyawan LIPI, Anggota Sentra HKI LIPI.

<sup>4</sup> Paul Goldstein, *Hak Cipta : Dahulu, Kini dan Esok*, Penerjemah Masri Maris, yayasan Obor Indonesia Th. 1997, Hal. 3

tertentu karya cipta mula-mula diartikan karya tulis dan untuk mencegah orang lain membuat salinan karya cipta tanpa izin dari pemilik hak. Menurut Amru Hydari Nazif, dalam terjemahan di atas "*copyright*" (bahasa Inggris) telah diterjemahkan ke "hak cipta" dalam bahasa Indonesia, sehingga menghasilkan terjemahan yang tidak memuaskan. Alangkah nyamannya bila digunakan terjemahan yang lebih tepat dan langsung, yaitu "hak penggandaan (peng-copy-an) sehingga definisi di atas menjadi jelas, gamblang dan mudah dipahami.<sup>5</sup>

Hak Cipta berdasarkan terjemahan *Auteurswet* 1912 didefinisikan sebagai hak tunggal daripada pencipta, atau hak daripada yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan pengetahuan, kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyaknya, dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam Undang-undang.<sup>6</sup> Sebagai perbandingan pengertian Hak Cipta, berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta serta berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi ijin untuk

---

<sup>5</sup> Amru Hydari Nazif., ibid hal 3.

<sup>6</sup> Lihat pasal 1 terjemahan *Auteurswet* 1912, *Undang-undang Hak Cipta* 1912, Stb.1912 Nomor 600, Undang-undang 23 September 1912.

itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Dari rumusan pengertian hak cipta<sup>8</sup> tersebut, terkandung beberapa unsur yang antara lain adalah (1) *hak khusus*, (2) *pencipta*, (3) *ciptaan*, (4) *Penerima hak*, (5) *Mengumumkan dan memperbanyak maupun memberi ijin untuk itu*, (6) *Tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*.

Terhadap unsur yang *pertama* yaitu hak khusus, dijelaskan dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, bahwa dengan hak khusus dari pencipta dimaksudkan bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan ijin pencipta. Hak khusus ini merupakan terjemahan dari *exclusive rights*, sebagaimana definisi hak cipta dalam buku yang diterbitkan oleh *World Intellectual Property Organization (WIPO)* yang berjudul *WIPO Glossary of Terms of the Law of Copyright and Neighboring Right*, disamping juga tercermin dalam pengertian Copyright : "*Intangible property which allows the copyright owner, or those authorised by the copyright owner, the exclusive right to prohibit or to do certain acts.*"<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Lihat pasal *Susunan dalam satu naskah Undang-undang Hak Cipta*, Departemen Kehakiman RI, Direktorat jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek, hal 2.

<sup>8</sup> Bandingkan dengan definisi tentang Hak Cipta dalam buku yang diterbitkan oleh WIPO berjudul *WIPO Glossary of Terms of The Law of Copyrights and Neighboring Rights*, 1980 hlm. 58 yang rumusannya sebagai berikut :

"Generally considered to be exclusive rights granted by law to the Author of a work to disclose it as his own creation, to reproduce it and to distribute or disseminate it to the public in any manner or by any means, and also to authorize other to use the work in specified ways, most distinguish between economic and moral rights, which together constitute copyright.

<sup>9</sup> Peter Butt BA.,LLM, *Concise Australian Legal Dictionary*, Butterworths, Second Edition, hal. 98



**Bambang Kesowo** berpendapat bahwa perlindungan hukum terhadap HAKI pada dasarnya berintikan pengakuan terhadap hak atas kekayaan tersebut dan hak untuk dalam waktu tertentu menikmati atau mengeksploitasi sendiri kekayaan tadi. Selama kurun waktu itu, orang lain hanya dapat menikmati atau menggunakan atau mengeksploitasi hak tersebut atas ijin pemilik hak. Karena perlindungan dan pengakuan tersebut hanya diberikan khusus kepada orang yang memiliki kekayaan tadi, maka sering dikatakan bahwa hak seperti itu eksklusif sifatnya.<sup>10</sup> **Simorangkir** berpendapat bahwa Istilah "*het uitsluitend recht*" dari *Auteurswet 1912*" yang oleh sementara pengarang diterjemahkan menjadi "hak tunggal" agaknya mempunyai daya cakup yang sama dengan "hak khusus" dari pencipta. Tidak ada orang atau badan lain yang dapat melakukan hak cipta itu, misalnya mengumumkan atau memperbanyaknya, kecuali dengan ijin pencipta.<sup>11</sup>

Unsur yang **Kedua** adalah pencipta, pengertian pencipta berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

**Edy Damian** dalam bukunya merumuskan pengertian pencipta yaitu bahwa pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melahirkan suatu ciptaan, selanjutnya dapat pula diterangkan

---

<sup>10</sup> **Bambang Kesowo**, op.cit, hal.11

bahwa yang mencipta suatu ciptaan menjadi pemilik pertama dari hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan. Definisi di atas menjelaskan bahwa pada dasarnya secara konvensional yang digolongkan sebagai pencipta adalah seseorang yang melahirkan suatu ciptaan untuk pertama kali, sehingga ia adalah orang pertama yang mempunyai hak-hak sebagai pencipta yang sebutan ringkasnya untuk kepraktisannya disebut hak pencipta dan lebih ringkas lagi menjadi hak cipta.<sup>12</sup>

Beberapa pengertian tersebut secara tegas menyatakan bahwa seseorang yang melahirkan suatu ciptaan untuk pertama kali di sebut pencipta, namun demikian ada beberapa anggapan yang menyatakan bahwa tidak hanya seseorang yang melahirkan suatu ciptaan untuk pertama kali saja yang disebut pencipta. Hal ini dapat terlihat dari beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hak Cipta Indonesia.

Beberapa ketentuan tersebut, mengatur bahwa seseorang dianggap sebagai pencipta apabila seseorang tersebut namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan dan Pengumuman Resmi tentang pendaftaran pada Departemen Kehakiman serta orang yang namanya disebut dalam suatu ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta, kecuali hal tersebut terbukti sebaliknya. Demikian juga terhadap ceramah yang tidak tertulis dan tidak ada

---

<sup>11</sup> JCT. Simorangkir, SH., *UU Hak Cipta 1982 (UHC 11982)* Penerbit Djambatan, hal. 123

<sup>12</sup> Dr. Edy Damian, SH., *Hukum Hak Cipta menurut beberapa Konvensi Internasional, UU Hak Cipta 1997 dan perlindungan terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, 1999, hal. 125

pemberitahuan siapa penciptanya, maka orang yang berceramah dianggap sebagai pencipta, kecuali terbukti sebaliknya.<sup>13</sup>

Terhadap seseorang atau beberapa orang yang menciptakan suatu ciptaan yang terdiri dari beberapa bagian tersendiri, maka yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau jika tidak ada orang itu orang yang menghimpunnya disebut pencipta, dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya. Demikian juga terhadap suatu ciptaan yang dirancang, diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, maka penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu.<sup>14</sup> Lebih lanjut di dalam penjelasan pasal 7 Undang-undang Hak cipta Nomor 19 Tahun 2002 disebutkan bahwa rancangan yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah gagasan berupa gambar atau kata atau gabungan keduanya yang akan diwujudkan dalam bentuk yang dikehendaki pemilik rancangan, oleh karena itu perancang disebut pencipta apabila rancangannya itu dikerjakan secara detail menurut desain yang sudah ditentukannya, dan tidak sekedar ide saja. Di bawah pimpinan dan pengawasan maksudnya dilakukan dengan bimbingan, pengawasan ataupun koreksi dari orang yang memiliki rancangan tadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

---

<sup>13</sup> Bandingkan dengan pasal 5 Undang-undang Hak Cipta No. 12 tahun 1997.

<sup>14</sup> Bandingkan dengan pasal 6 dan 7 UU Hak Cipta No. 12 Tahun 1997.

Suatu ciptaan yang dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan kerjanya, maka pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan adalah pemegang hak cipta, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pembuat sebagai penciptanya, apabila penggunaan ciptaan itu diperluas ke luar hubungan dinas. Demikian juga sebaliknya, apabila suatu ciptaan dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas, maka pihak yang untuk dan dalam pekerjaannya ciptaan itu dikerjakan adalah pemegang hak, kecuali diperjanjikan lain antara kedua belah pihak. Di samping itu, suatu ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat karya itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak, kecuali diperjanjikan lain oleh kedua belah pihak., lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hubungan dinas adalah hubungan kepegawaian negeri dengan instansinya, sedangkan yang dimaksud hubungan kerja adalah hubungan karyawan dengan pemberi kerja di lembaga swasta.<sup>15</sup>

Di dalam lalu lintas hukum yang disebut subyek hukum adalah orang dan badan hukum, oleh karena itu badan hukum juga dapat dianggap sebagai pencipta, yaitu apabila suatu badan hukum yang mengumumkan bahwa suatu ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang

---

<sup>15</sup> Bandingkan dengan pasal 8 UU Hak Cipta Nomor 12 tahun 1997.

sebagai penciptanya, terkecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya.<sup>16</sup> Anggapan Badan Hukum sebagai pencipta juga diatur di dalam Konvensi Bern, akan tetapi konvensi tersebut hanya mengatur badan hukum yang memperlihatkan namanya pada karya sinematographi, terhadap karya-karya yang lain tidak diatur secara jelas.<sup>17</sup>

Ketentuan pasal 10 undang-undang hak cipta Indonesia, khusus mengatur karya peninggalan pra sejarah, sejarah dan benda budaya nasional, maka negara sebagai pemegang hak ciptanya, akan tetapi terhadap hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti dongeng, cerita, hikayat, legenda, babat, lagu, kerajinan tangan, koreographi, tarian, kaligraphi dan seni lainnya yang dipelihara dan dilindungi negara, maka negara sebagai pemegang hak ciptanya terhadap luar negeri. Dalam hal suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan, maka negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya, kecuali terhadap suatu ciptaan yang telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran penciptanya, maka penerbit memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Bandingkan dengan pasal 9 UU Hak Cipta Nomor 12 tahun 1997.

<sup>17</sup> Lihat pasal 15 ayat (2) *terjemahan resmi Konvensi Bern*, penerjemah CV. Yellow Orchid Creation, Jakarta.

<sup>18</sup> Bandingkan dengan pasal 15 ayat 3 *terjemahan resmi Konvensi Bern*, op cit hal 11 yang menyebutkan bahwa : “ Dalam suatu karya yang menggunakan nama samaran atau tanpa nama, maka penerbit yang namanya tercantum dalam karya itu dianggap mewakili pencipta, kecuali terbukti sebaliknya, dalam kapasitas tersebut penerbit berhak untuk melindungi dan melaksanakan

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 10 disebutkan bahwa dalam melindungi folklore dan hasil kebudayaan rakyat lain, pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin Negara republik Indonesia sebagai Pemegang Hak Cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut. Folklore dimaksudkan sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun, termasuk cerita rakyat, puisi rakyat, lagu-lagu rakyat, musik instrumen tradisional, tarian-tarian rakyat, permainan tradisional, hasil seni antara lain berupa lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.

Unsur *ketiga* adalah ciptaan, di dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang hak cipta Nomor 19 tahun 2002 disebutkan bahwa Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Unsur keaslian tersebut merupakan unsur mutlak yang harus dipenuhi dalam setiap ciptaan guna memperoleh perlindungan hak cipta.

---

hak-hak pencipta. Ketentuan ini menjadi tidak berlaku apabila si pencipta mengumumkan identitas dan mengklaim kepemilikan dari karya tersebut.

Di dalam penjelasan undang-undang hak cipta Indonesia disebutkan bahwa suatu karya cipta harus memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi. Dalam bentuk yang khas artinya, karya tersebut harus telah selesai diwujudkan, sehingga dapat dilihat atau didengar atau dibaca. Termasuk pengertian yang dapat dibaca adalah pembacaan huruf braile, karena suatu karya harus terwujud dalam bentuk yang khas, maka perlindungan hak cipta tidak diberikan pada sekedar ide.<sup>19</sup> Suatu ide pada dasarnya tidak mendapatkan perlindungan hak cipta sebab ide belum memiliki wujud yang memungkinkan untuk dilihat, didengar atau dibaca.

Pengekspresian atau perwujudan ide tersebut, di dalam lingkup perlindungan hak cipta adalah merupakan konsep yang sangat mendasar, walaupun substansinya fiktif belaka. Sebagai contoh adalah Si A menulis suatu cerita dalam bentuk novel atau bentuk lainnya. Cerita tersebut menceritakan perjalanan seorang yang miskin, pekerja keras, ulet, kreatif, dan pintar. Kemudian seseorang tersebut menjadi orang yang sukses dan kaya raya. Novel si A tersebut akan memperoleh perlindungan hak cipta, walaupun ide cerita yang ditulisnya merupakan fiktif belaka dan ide tersebut tidak meniru dari cerita yang sama dari tulisan atau novel orang lain.

---

<sup>19</sup> Bandingkan dengan article 9 (2) *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right*, yang menyebutkan : “.... Copyright protection shall extend to expression and to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such.

Unsur yang **keempat** adalah penerima hak. Berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian melalui pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara dan melalui suatu perjanjian dengan suatu akta. Dari ketentuan tersebut yang menjadi penerima hak adalah para ahli waris pencipta, penerima hibah, penerima wasiat, negara dan pihak-pihak yang melakukan perjanjian, diberikan hak untuk itu. Penerima hak tersebut disebut juga pemegang hak. Adapun pengertian pemegang hak itu sendiri adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari pencipta atau orang lain yang menerima lebih lanjut dari orang tersebut di atas.

Di dalam penjelasan pasal 1 Undang-undang Nomor 12 tahun 1997 diuraikan bahwa pemegang hak cipta pada dasarnya adalah pencipta. Dialah sebenarnya pemilik hak cipta atas karya cipta yang dihasilkannya. Disamping itu, orang-perorangan atau badan hukum yang menerima hak dari pemilik hak cipta adalah juga pemegang hak cipta. Demikian pula orang-perorangan atau badan hukum yang kemudian menerimanya dari pihak yang telah menerima terlebih dahulu hak tersebut dari pencipta.

Unsur yang **kelima** adalah mengumumkan dan memperbanyak maupun memberi ijin untuk itu. Pengertian pengumuman adalah pembacaan, penyuaran, penyiaran atau penyebaran suatu ciptaan, dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu



ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain. Dari pengertian pengumuman tersebut mengandung unsur a) pembacaan yaitu suatu ciptaan yang dibacakan, sebagai contoh adalah sebuah syair dalam suatu pertemuan deklamasi; b). Penyuaran yaitu suatu ciptaan disuarakan, sebagai contoh adalah suatu partitur diperdengarkan dengan alat-alat musik dalam suatu malam konser dan para pendengar dapat mendengarkan hasil ciptaan yang disuarakan tersebut. c). Penyiaran, yaitu suatu ciptaan disiarkan misalnya suatu pidatodisiarkan melalui radio atau televisi, sehingga pendengar/pemirsa dapat mendengar atau melihat ciptaan itu; d). Penyebaran, yaitu suatu ciptaan yang disebarkan, sebagai contoh suatu ciptaan yang sudah dicetak lalu disebarkan melalui pemuatannya dalam surat kabar, sehingga orang lain dapat membaca ciptaan tersebut; e). Dengan menggunakan alat apapun, rumusan ini mempunyai daya cakup yang cukup luas, mencakup segala macam alat yang kini sudah ada maupun mencakup segala macam alat yang masih akan ditemukan atau mungkin masih akan diimport dari luar negeri.<sup>20</sup>

Adapun pengertian perbanyakan adalah menambah jumlah suatu ciptaan, dengan pembuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan alat atau bahan-bahan yang sama maupun tidak sama termasuk mengalihwujudkan sesuatu ciptaan. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 1 angka 5 undang-undang nomor 12

---

<sup>20</sup> Bandingkan dengan J.C.T. Simorangkir, op cit. hal 125.

tahun 1997 dijelaskan bahwa mengalihwujudkan dimaksud tranformasi, seperti patung dijadikan lukisan, ceritera roman menjadi drama, drama bisa menjadi drama radio dan sebagainya.<sup>21</sup>

Pengumuman atau perbanyakan itu dapat dilakukan sendiri, misalnya dicetak sendiri, dinyanyikan sendiri, disebarakan sendiri dan sebagainya. Secara umum boleh dikata, bahwa perbanyakan atau pengumuman suatu ciptaan tidak dilakukan sendiri oleh si pencipta, melainkan ia suruh/minta/memberi ijin kepada orang lain untuk melakukan perbanyakan atau pengumuman ciptaannya itu. Dalam pengertian memberi ijin itu termasuk segala macam persyaratan, yang mengandung hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>22</sup>

Unsur yang *keenam* adalah tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan hak khusus yang dimiliki pencipta maupun pemegang hak cipta, maka pada dasarnya orang lain yang tanpa ijin atau persetujuan pencipta, penerima hak maupun yang memiliki hak cipta tidak dapat mengeksploitasi hak ekonomi dari hak cipta yang bersangkutan. Dengan demikian hanya pencipta dan penerima hak ciptalah yang dapat mengeksploitasinya. Walaupun demikian hak cipta tersebut ada pembatasannya. Pembatasan-pembatasan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>21</sup> Bandingkan Peter Butt BA.,LLM., *Concise Australian Legal Dictionary Second Edition*, 1998, hal.98, yang menyebutkan : "Copy in copyright law, an item derived from copyright material,

Peraturan-peraturan tersebut tidak secara tegas ditentukan dalam bentuk apa, dengan demikian sangat memungkinkan dibuat suatu pembatasan-pembatasan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang secara hirarki di bawah undang-undang, misalnya peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, peraturan daerah atau bentuk peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>23</sup> Namun demikian, di dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 telah diatur ketentuan mengenai pembatasan hak cipta atau yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, baik yang dengan suatu syarat tertentu maupun tanpa suatu persyaratan.

Pembatasan hak cipta atau yang tidak dianggap melanggar hak cipta dengan syarat tertentu dapat dikelompokkan ke dalam :

1. Sumbernya harus disebut atau dicantumkan, seperti :

a. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan

---

either directly or indirectly and which bears a substantial similarity to that material, the similarities not being the result of mere coincidence"

<sup>22</sup> Lihat J.C.T. Simorangkir, Loc. Cit. hal 126.

<sup>23</sup> Bandingkan dengan J.C.T. Simorangkir, SH., Loc. Cit. hal. 152 – 153. " Dalam hal ini dapat dikemukakan suatu persoalan yang agak teoritis. Dapat dinyatakan , apakah mungkin sesuatu hak dibidang hak cipta, yang sudah diberikan kepada seseorang berdasarkan undang-undang Hak Cipta, apakah hak semacam itu dapat "dibatasi" (diubah atau dikurangi) dengan suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden dan sebagainya ? pertanyaan teoritis ini dapat timbul. Sebab dalam teori hukum dianut suatu azas, bahwa sesuatu ketentuan perundang-undangan yang derajatnya sama atau lebih tinggi, tetapi tidak oleh peraturan yang derajatnya lebih rendah . Konkritnya suatu ketentuan undang-undang, boleh diubah/ditiadakan oleh undang-undang lain, atau yang lebih tinggi, tidak boleh oleh misalnya suatu peraturan presiden . Namun karena dalam persoalan pembatasan hak cipta ini sudah ada dasar hukumnya, yakni pasal 2 UUHC itu sendiri, maka hak khusus untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan itu, dapat dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena dasar hukumnya sudah ada dalam undang-undang hak cipta itu sendiri, maka pembatasan hak cipta tersebut tidak jadi persoalan lagi.

kritik dan tinjauan suatu masalah dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;

*Pembatasan ini perlu dilakukan karena ukuran kuantitatif untuk menentukan pelanggaran hak cipta sulit diterapkan. Dalam hal ini akan lebih tepat apabila penentuan pelanggaran hak cipta didasarkan pada ukuran kualitatif. Misalnya, pengambilan bagian yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan, meskipun pemakaian itu kurang dari 10 %. Pemakaian seperti itu secara substantif merupakan pelanggaran hak cipta. Pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat non komersial termasuk kegiatan sosial. Misalnya kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengambilan ciptaan untuk pertunjukan atau pementasan yang tidak dikenakan bayaran. Khusus untuk pengutipan karya tulis, penyebutan atau pencantuman sumber ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Artinya, dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama pencipta, judul atau nama ciptaan, dan nama penerbit jika ada. Yang dimaksud kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta adalah suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.*

- b. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan pembelaan di dalam dan di luar pengadilan;
- c. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan serta pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran;
- d. Perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tuna netra, kecuali bersifat komersial;
- e. Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh

perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan dan pendidikan dan pusat dokumentasi yang non komersial;

- f. Perubahan atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis;
- g. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri;

*Seorang pemilik (bukan pemegang hak cipta) program komputer dibolehkan membuat salinan atas Program Komputer yang dimilikinya, untuk dijadikan cadangan semata-mata untuk digunakan sendiri. Pembuatan salinan cadangan seperti di atas tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.*

2. Pemberian imbalan atau ganti rugi yang layak

- a. Penerjemahan terhadap suatu ciptaan yang dilindungi Hak Cipta, yaitu apabila selama 3 tahun sejak diumumkan belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau diperbanyak di Wilayah Negara Republik Indonesia dan (hanya untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan) dan hanya dilakukan oleh pemerintah dengan persetujuan Dewan Hak Cipta ;
- b. Untuk kepentingan Nasional, pengumuman suatu ciptaan melalui penyiaran radio atau televisi yang diselenggarakan oleh pemerintah tanpa perlu mendapat izin terlebih dahulu dari pemegang hak cipta, dengan ketentuan pemegang hak cipta tersebut mendapat ganti rugi yang layak.

Adapun pembatasan hak cipta atau yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta tanpa syarat tertentu, meliputi :

- a. Perbanyakan dan pengumuman dari lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifat yang asli;
- b. Pengumuman dan perbanyakan dari segala sesuatu yang diumumkan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan;
- c. Pengambilan, baik seluruhnya maupun sebagian, berita dari kantor berita, badan penyiar radio atau televisi dan surat kabar setelah 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung dari surat pengumuman pertama berita itu dan sumbernya harus disebut secara lengkap.

Di dalam Undang-undang Hak Cipta juga ditegaskan bahwa tidak ada Hak Cipta atas :

- a. Hasil rapat terbuka Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara serta Lembaga Konstitusional lainnya;
- b. Peraturan Perundang-undangan;
- c. Putusan Pengadilan dan Penetapan Hakim;
- d. Pidato Kenegaraan dan pidato pejabat Pemerintah;
- e. Keputusan Badan Arbitrase.

Di samping istilah hak cipta dikenal pula istilah hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta. Hak yang berkaitan ini merupakan terjemahan dari *Neighbouring Right* atau *Related Right*. Hak-hak tersebut dinamakan hak yang berkaitan, karena hak –hak tersebut sangat berkaitan dengan hak-hak atas ciptaan seseorang pencipta dibidang seni dan sastra. Di dalam undang–undang hak cipta nasional, hak-hak yang berkaitan diatur khusus dalam Bab

VA pasal 43 C, yang antara lain meliputi pelaku, produser rekaman dan organisasi siaran atau lembaga penyiaran.

Pelaku atau artis (*performing rights artist*) adalah terdiri dari penyanyi, aktor, musisi dan sebagainya yang menyampaikan kepada publik suatu pertunjukan hidup (*live performance*), fiksasi dari pertunjukan dan perbanyakan (reproduksi) dari pertunjukan-pertunjukannya, sedangkan produser rekaman suara (*Producer of Sound Recordings/Phonograms*) menikmati hak-hak tertentu, terutama hak mengontrol produksi rekaman suara yang dibuat oleh pemegang hak cipta. Selanjutnya lembaga penyiaran yang menghasilkan karya-karya siaran menikmati karya-karya siarannya, seperti hak mengontrol siaran ulang, fiksasi dan reproduksi karya siarannya yang dilakukan oleh pemegang hak cipta.

Lebih lanjut di dalam penjelasan undang-undang hak cipta nasional, disebutkan bahwa penambahan ketentuan baru mengenai hak-hak yang berkaitan atau *neighbouring rights* adalah bahwa dalam pengertian pelaku atau performers, menyebutkan aktor, penyanyi, pemusik dan penari menunjukkan profesi pelaku yang pada dasarnya hanya menyatakan sebagai dan mereka yang kegiatannya menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan ataupun memamerkan suatu karya cipta.

Pengertian produser rekaman suara adalah mereka yang melakukan kegiatan perekaman secara langsung atas obyek yang mengeluarkan suara

atau bunyi dengan aransemen yang berbeda dan bukan semata-mata menggandakan atau memperbanyak rekaman yang sudah ada. Adapun karya siaran yang dimaksud dalam pengertian lembaga penyiaran mencakup antara lain suara, gambar atau gambar dan suara. Persyaratan berbentuk badan hukum hanya berlaku bagi lembaga penyiaran swasta.

Terhadap pelaku mempunyai hak khusus untuk memberi ijin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya, membuat, memperbanyak dan menyiarkan suara atau gambar dari pertunjukannya. Terhadap pelaku yang mempertunjukkannya mendapat perlindungan hukum selama 50 tahun terhitung sejak karya tersebut diwujudkan atau dipertunjukkan. Demikian juga, produser rekaman mempunyai hak khusus untuk memberi ijin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak karya rekaman siaran atau bunyi. Produser rekaman suara tersebut mendapat perlindungan hukum selama 50 tahun sejak karya tersebut selesai direkam. Adapun lembaga penyiaran mempunyai hak khusus untuk memberi ijin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak dan menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik lainnya. Lembaga penyiaran yang menyiarkan karya siaran mendapat perlindungan hukum selama 20 tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.

Pelaku itu sendiri adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan,



menyampaikan, mendeklamasikan atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra dan karya seni lainnya. Produser rekaman suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam atau memiliki prakarsa untuk membiayai kegiatan perekaman suara atau bunyi baik dari suatu pertunjukan maupun suara atau bunyi lainnya. Sedangkan lembaga penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran, baik lembaga penyiaran pemerintah maupun lembaga penyiaran swasta yang berbentuk badan hukum yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik lainnya.<sup>24</sup>

## **2. Jenis-jenis Ciptaan dan Jangka Waktu Perlindungannya**

Sebagaimana disinggung dalam latar belakang bahwa hak cipta lahir sejak saat ciptaan selesai diwujudkan. Ciptaan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Hak Cipta adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Dalam kaitan ini sering dipersoalkan masalah yang secara akademik selalu menjadi bahan diskusi mengenai *idea-expression dichotomy*<sup>25</sup>. Pokok-pokok persoalannya menyangkut norma yang selama ini diakui bahwa

---

<sup>24</sup> Pasal 1 angka 8, 9 dan 10 UU No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1987.

<sup>25</sup> Hensry Soelistyo Budi, SH.,LLM, *Beberapa Aspek Hukum Dalam Perlindungan Hak Cipta, makalah disajikan pada Seminar sehari Pekan Seni dalam rangka HUT Institut Kesenian Jakarta (IKJ)*, Jakarta, 30 Juni 1997. Hal. 5

ide (semata) tidak mendapatkan perlindungan hukum. Sebaiknya, yang dilindungi hukum adalah ekspresi atau wujud akhir ciptaan. Ini berarti, untuk mendapatkan pengakuan dan memperoleh perlindungan hukum maka ide tersebut harus telah diekspresikan dalam karya yang nyata sesuai dengan bentuk ciptaan (*fixation*). Selain ide harus bersifat asli atau orisinil dan memberi ciri khas pada ciptaan. Dalam hal ciptaan dibuat tanpa ide di belakangnya, maka yang terjadi sebenarnya adalah peniruan atau perbanyakan serta tidak syah atau yang lazim disebut sebagai pembajakan.

Ciptaan-ciptaan yang dilindungi berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah ciptaan dibidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra, yang mencakup :<sup>26</sup>

- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, seni pahat, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan

<sup>26</sup> Bandingkan dengan article 2 (1) Bern Convention, yang menyebutkan :  
"The expression "literary and artistic works" shall include every production in the literary, scientific and artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression, such as books, pamphlets and other writings; lectures, addresses, sermons and other works of the same nature; dramatic or dramatico-musical works; choreographic works and entertainments in dumb show; musical compositions with or without words; cinematographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to cinematography; works of drawing, painting, architecture, sculpture, engraving and lithography; photographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to photography; works of applied art; illustration, maps, plans, sketches and three-dimensional works relative to geography, topography, architecture or science."

- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni batik;
- j. Fotografi;
- k. Sinematografi;
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan;

Batas-batas pengertian ilmu pengetahuan, seni dan sastra suatu ciptaan sering tidak jelas garis merahnya, apakah essai filsafat tergolong ciptaan bidang ilmu pengetahuan atau ciptaan bidang seni ?, dan termasuk golongan apakah ciptaan sinematographi ? apakah termasuk kedua-duanya atau sama sekali tidak termasuk salah satu darinya. Di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, mengatur pula suatu jenis ciptaan baru yaitu susunan perwajahan karya tulis (*Tipographical arrangement*) yang merupakan ciptaan suatu penerbit yang terwujud dalam buku yang diterbitkannya. Apakah ciptaan jenis ini bukan merupakan seni kalau ditinjau dari segi seni atau estetika pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis ?. Untuk mengatasi ketidakjelasan kriteria yang digunakan ciptaan-ciptaan dari ketiga golongan tersebut, jalan keluarnya adalah dengan cara tidak menganalisis suatu ciptaan dengan hanya menggunakan salah satu dari tiga bidang golongan, melainkan dengan cara memandang suatu ciptaan

**UPT-PUSTAK-UNDIP**

sebagai suatu karya yang memenuhi unsur-unsur ketiga bidang ini dalam satu kesatuan, mencakup bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.<sup>27</sup>

Penggunaan ke-tiga istilah tersebut memang mengandung hambatan konseptual<sup>28</sup> bahwa terminologi yang digunakan untuk menggambarkan karya-karya tersebut diinterpretasikan berbeda-beda di seluruh dunia. Penentuan apakah hasil karya tertentu menjadi bagian dari kategori hak cipta yang diakui memunculkan berbagai hasil yang cukup mengejutkan. Suatu karya sastra, tampaknya harus dianggap sebagai suatu karya yang bersifat sastra, yaitu harus bermutu tinggi. Serupa dengan hal tersebut, segala bentuk karya seni, seperti lukisan, gambar dan sebagainya, memperoleh perlindungan hak cipta melalui pasal 12 ayat 1 (h).

Dibidang seni dapat diekspresikan dalam berbagai bentuk seperti diagram berikut :<sup>29</sup>

Kelompok/ Seni	Bidang Disiplin	Unsur Seni	Bentuk Ekspresi	Pengumuman/ Penyiaran
Seni sastra	❖ Fiksi ❖ Non Fiksi	Kata (verbal)	Buku Naskah Resensi dll	Media Cetak Penerbitan Jurnalistik/Non Jurnalistik
Seni Pertunjukan	Teater/Seni Peran	Aktng Suara/Kata Gerak	Pementasan Teater/Opera	- Langsung - Rekaman Video/LD - Siaran TV - Siaran radio
	Seni Tari	Gerak Bunyi	Pementasan tari	- Langsung - Siaran TV

<sup>27</sup> Dr. Eddy Damian., SH, op cit hal 135)

<sup>28</sup> Indonesia Australia Specialised Training Project Phase II, *Hak Kekayaan Intelektual, Kursus Singkat Khusus Hak Cipta 2002*, hal 20

<sup>29</sup> Wagiono, *Karya Seni Ditinjau dari pandangan seorang Seniman*, makalah disampaikan pada Temu Wicara bagi kalangan Seniman, Ilmuwan dan Organisasi Profesi yang diselenggarakan oleh Dit. Hak Cipta di Jakarta pada tahun September 1998

	Seni Musik	Bunyi (instrumen) Suara	Pagelaran	- Langsung - PH, CD, LD, Kaset - Siaran TV - Siaran Radio
Seni Rupa	Seni Kria	Visual/rupa 2D/3D	Produk Kriya, kayu, keramik, tekstil	Ekspor-Outlet Galeri-Toko
	Seni Murni	Visual/rupa 2D/3D	Karya seni; patung, Lukis, Grafis	Galeri Pameran Lelang 'Auction' Dealer
	Desain	Visual/rupa 2D/3D	Interior Produk/ Industri Busana Grafis	Konstruksi/ Properti/housing Busines/Shops Publikasi Distribution Promotion Jurnalistic
Film & TV	Film	Cahaya Bunyi Peran Gerak Musik Literatur	Ceritera Dokumenter Semi Dokumenter Program Khusus Training	Movie Theaters Broadcast Publication Media/Entertainment Distributor
	Video TV			
	Fotografi		Foto Art Foto Commercial Foto Jurnalism	Galeri Jurnalistic Media Promotion/Advertising
Seni lain- lain	- seni sulap - seni merangkai bunga - seni beladiri	Seni lipat Seni tata boga Seni akrobat Seni rias	Seni tata Rambut	

Jika nilai estetik, artistik atau sastra suatu karya perlu dievaluasi sebelum memperoleh perlindungan hak cipta, lalu penerapan hukum hak cipta akan tergantung pada penilaian subjektif atas nilai karya tersebut. Ini akan menimbulkan interpretasi yang tidak konsisten dan tak menentu

terhadap prinsip-prinsip hak cipta. Seorang hakim mungkin menganggap suatu film memiliki nilai artistik sementara hakim yang lain menganggap suatu film tersebut sebagai sampah. Untuk mengatasi masalah-masalah semacam ini, suatu pendekatan yang diambil adalah untuk memberikan perlindungan hak cipta suatu karya jika si pengarang atau pencipta ingin menciptakan suatu karya dari jenis yang diakui dalam undang-undang. Sebagai contoh adalah suatu karya biasanya dianggap sebagai karya artistik dengan tujuan memperoleh perlindungan hak cipta jika si pencipta menghendaknya sebagai suatu karya artistik

Layaknya karya artistik, suatu karya biasanya dianggap sebagai karya drama, jika karya itu memang dimasukkan untuk dipentaskan. Suatu karya akan tetap menjadi karya drama walaupun karya tersebut dikritik secara luas sebagai karya yang kehilangan nilai dramatik atau jika karya tersebut sebenarnya memang tidak pernah dipentaskan. Penerapan prinsip-prinsip hak cipta hendak menghindari adanya penilaian subyektif mengenai suatu karya, karena itu novel-novel dan lakon buruk serta karya seni lainnya yang dianggap jelek masih dapat memperoleh perlindungan hak cipta. Hambatan konseptual lainnya adalah mengenai perbedaan antara kepemilikan yang berwujud dan tidak berwujud. Pada dasarnya, hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi yang tidak muncul dalam bentuk nyata/ril. Jika seseorang hendak membeli sebuah buku, maka seseorang tersebut membeli kepemilikan pribadi dalam bentuk nyata. Dengan pembelian buku itu,

seseorang tersebut memperoleh hak untuk menyimpan dan meminjamkan buku tersebut sesuai keinginannya. Buku tersebut adalah miliknya, milik pribadi, buku tersebut adalah nyata.

Namun, ketika seseorang tersebut membeli buku, seseorang tersebut tidak memperoleh hak untuk mengkopy ataupun mereproduksi buku yang dibeli dan kemudian menjualnya. Hak tersebut dimiliki oleh pengarang buku tersebut ataupun orang kepada siapa pengarang tadi menjual, menyerahkan atau memberikan lisensi hak cipta atas buku tersebut. . Pemilik hak cipta itu memiliki suatu properti/kepemilikan pribadi dalam bentuk tak nyata. Kepemilikan pribadi ini mengacu pada hak si pemilik untuk mengendalikan penggunaan dan eksploitasi atas hasil karya kreatif asalkan karya kreatif tersebut termasuk kategori karya hak cipta seperti karya sastra, drama, musik, dan artistik atau pertunjukan film, siaran radio dan televisi serta rekaman.

Terhadap jenis-jenis ciptaan tersebut di atas, pada dasarnya Undang-undang Hak Cipta mengenal tiga ketentuan tentang masa berlakunya perlindungan Hak Cipta<sup>30</sup> , yaitu :

---

<sup>30</sup> Bandingkan dengan Henry Soelistyo Budi, op cit hal. 8, yang menyebutkan :  
Pada dasarnya Undang-undang Hak cipta mengenal tiga ketentuan mengenai masa berlakunya Hak Cipta, *Pertama*, selama hidup pencipta ditambah lima puluh tahun setelah pencipta meninggal dunia, yang memperoleh perlindungan selama life + 50 tahun ini adalah jenis-jenis ciptaan yang asli dan bukan turunan (*derevatif*); *kedua*, selama lima puluh tahun sejak pertama kali diumumkan . Jenis-jenis ciptaan ini meliputi ciptaan *derevatif* dan ciptaan yang dimiliki oleh badan hukum, *ketiga*, selama dua puluh lima tahun. Perlindungan yang terpendek ini diberikan untuk karya fotografi.

1. Selama hidup pencipta di tambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Ciptaan ini meliputi :
  - a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
  - b. Drama atau musikal, tari, koreografi;
  - c. Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat dan seni patung;
  - d. Seni batik;
  - e. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
  - f. Arsitektur;
  - g. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lain;
  - h. Alat peraga;
  - i. Peta;
  - j. Terjemahan, tafsir saduran dan bunga rampai
2. Selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Jenis ciptaan yang dilindungi selama 50 tahun ini meliputi:
  - a. Program komputer,
  - b. sinematografi,
  - c. fotografi
  - d. database
  - e. karya hasil pengalihwujudan;
3. Hak Cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan;
4. Hak Cipta yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.
5. Hak Cipta atas ciptaan yang dilaksanakan oleh penerbit berlaku selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan.



6. Jangka waktu perlindungan bagi pelaku, berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;
7. Jangka waktu perlindungan bagi produser rekaman suara, berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut selesai direkam;
8. Jangka waktu perlindungan bagi Lembaga penyiaran, berlaku selama 20 tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.

### **3. Konsep Dasar Lahirnya Hak Cipta**

Perjanjian multilateral, baik itu Berne Convention maupun TRIP's Agreement mengatur tentang konsep dasar perlindungan hak cipta. Salah satu konsep dasar<sup>31</sup> pengakuan lahirnya hak atas hak cipta adalah sejak suatu gagasan itu dituangkan atau diwujudkan dalam bentuk yang nyata (tangible form). Pengakuan lahirnya hak atas hak cipta tersebut tidak diperlukan suatu formalitas<sup>32</sup> atau bukti tertentu, berbeda dengan hak-hak dari pada hak atas kekayaan intelektual lainnya, seperti Paten, merek desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu . Timbulnya atau lahirnya hak

---

<sup>31</sup> Bandingkan dengan article 9 ayat (1) TRIP's Agreement , yang menyatakan :  
"Copyrights protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such"  
Bandingkan juga dengan Dr.. Eddy Damian. SH., Hukum Hak Cipta menurut beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya, Hlm. 99..

"Salah satu prinsip dasar/konsep dasar perlindungan hak cipta adalah suatu ide yang telah terwujud dan asli (original). Salah satu prinsip yang paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak ciptahnya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan, sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya".

<sup>32</sup> Bandingkan dengan Mckeough Stewart, *Intellectual Property in Australia* 2<sup>nd</sup> edition, Butterworth page 125,

tersebut diperlukan suatu formalitas tertentu yaitu dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pemberian hak. Dengan demikian lahirnya hak atas paten, merek, desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu terlebih dahulu melalui suatu permohonan, tanpa adanya permohonan, maka tidaklah ada pengakuan hak terhadapnya. Berbeda dengan hak cipta, hak cipta secara otomatis lahir sejak ciptaan itu diciptakan atau diwujudkan dalam bentuk yang nyata.

Di dalam buku panduan yang dikeluarkan oleh Indonesia Australia Specialised Training Project-Phase II, menyebutkan bahwa<sup>33</sup> salah satu konsep mendasar Undang-undang hak cipta adalah bahwa hak cipta tidak melindungi ide, informasi atau fakta. Hak cipta hanya melindungi wujud ekspresi dimana ide, informasi atau fakta dituangkan. Ini tercermin dalam pasal 9 (2) TRIP's yang menyatakan bahwa perlindungan hak cipta diperluas kepada pengekspresian karya dan bukan kepada ide, prosedur, metode pelaksanaan atau konsep-konsep matematis semacamnya. Hak cipta idealnya tidak hanya berkaitan dengan pembatasan informasi atau pengetahuan dan pencegahan penyebaran ide tersebut. Hak cipta berkaitan dengan perlindungan atas bentuk ekspresi suatu ide. Ide-ide yang dibicarakan dalam tulisan Plato mengenai "Republika" menjadi dasar menuju

---

"There are no formal requirements to obtaining copyright protection in the sense that there is no procedure for registering a copyright interest in the way that a patent, trade mark or design has to be registered in order to be protected".

<sup>33</sup> Indonesia Specialised Training Project Phase II, *Hak Kekayaan Intelektual Kursus Singkat Khusus Hakcipta*, Diselenggarakan oleh Asian Law Group Pty Ltd, Hal.29

pemerintahan demokrasi yang modern. Jika tulisan tersebut memperoleh perlindungan hak cipta, karya tersebut tidak dapat dikopi atau direproduksi. Namun, ide di dalam karya tersebut tetap dapat dibicarakan, diberikan kritik, dianalisa, diformulasi kembali, disaring dan ditulis mengenainya.

Di antara contoh, perbedaan ide dan pengekspresian adalah :

- a. Informasi yang terdapat dalam buku acuan universitas mengenai proses ilmiah tidak memperoleh perlindungan hak cipta. Bagaimanapun, kata-kata yang digunakan pengarang, termasuk gambar dan ilustrasi lainnya, memperoleh perlindungan hak cipta.
- b. Ide untuk meulis biografi orang terkenal, misalnya bintang musik rock, tidak memperoleh perlindungan hak cipta. Tetapi, format kalimat yang digunakan si pengarang dalam biografi tersebut mendapat perlindungan hak cipta.
- c. Ide penulisan dan pementasan suatu drama mengenai suatu kejadian yang mengundang kontroversi di saat ini tidak memperoleh perlindungan hak cipta. Namun, kata-kata, musik dan benda-benda lain yang digunakan dalam drama tersebut dan didasarkan pada ide tadi mendapat perlindungan hak cipta.

Seorang hakim Inggris yang terkenal menggambarkannya seperti ini, jika ada seseorang jatuh dari bis, seseorang tidak dapat menulis tentang kecelakaan tersebut dan memperoleh hak cipta atas fakta bahwa seseorang jatuh dari bis. Setiap orang bebas membuat tulisan mengenai kecelekaan tersebut dan

hasil tulisan mereka akan memperoleh perlindungan hak cipta selama mereka tidak secara substansial menjiplak kata-kata yang digunakan orang lain dalam menggambarkan kecelakaan tersebut.

Di samping prinsip yang paling fundamental tersebut, di dalam perlindungan hak cipta di kenal juga prinsip atas asas orisinalitas (keaslian).<sup>34</sup> Asas orisinalitas ini adalah merupakan suatu syarat adanya perlindungan hukum di bidang hak cipta. Orisinalitas ini tidak bisa dilakukan pengujian seperti halnya *novelty* (kebaruan) yang ada di paten, karena prinsip originalitas adalah tidak meniru ciptaan lain, jadi hanya dapat dibuktikan dengan suatu pembuktian oleh penciptanya. Di dalam penjelasan Undang-undang nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri di jelaskan bahwa orisinal berarti sesuatu yang langsung berasal dari sumber asal orang

---

<sup>34</sup> Bandingkan dengan McKeough Stewart, op cit hlm.138 .....

The meaning of the originality. The separate requirement of originality was not included in previous copyright legislation, and the insertion of the word 'original' as an additional criterion for copyright protection has therefore been addressed by the courts in an attempt to ascertain the meaning of the word for the purposes of the legislation. .... The main requirement of originality was that the work must not be wholly copied from another work, but should originate with the author.

-Bandingkan juga dengan asian Law Group Pty, Indonesia Australia Specialised Training Project Phase II hlm.58 :

" .....suatu karya disebut asli asalkan saja karya tersebut bukan merupakan salinan atau tiruan dan pengarang telah menggunakan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan yang minimal dalam pembuatan karya tersebut.

-Bandingkan pula dengan Chaterine Colston, LLB., LLM., Principles of Intellectual Property Law, Cavendish Publishing Limited London, Sydney, Page 170 :

"..... this judicially initiated principle has two aspects :

a work must emanate from ist author; and the author must have exercise a modicum of 'skill' labour and judgment in the works creation :

First, to be original a work must not be a copy, but this is not a difficult standard to meet (unlike displaying 'novelty' for a patent).

Secondly, works may be regarded as original if an element of skill 'labour and judgment' have been expended in their creation and this remains so event if the work has been derived from other sources.

yang membuat atau yang mencipta atau sesuatu yang langsung dikemukakan oleh orang yang dapat membuktikan sumber aslinya.

Di dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan penjelasan Undang-undang nomor 12 tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1987, pasal 1 menyebutkan bahwa suatu karya cipta harus memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi. Dalam bentuk yang khas, artinya karya tersebut harus telah selesai diwujudkan dalam bentuk yang nyata, sehingga dapat dilihat atau didengar atau dibaca. Termasuk dalam pengertian hal yang dapat di baca adalah pembacaan huruf braille. Karena suatu karya harus terwujud dalam bentuk yang khas, maka perlindungan hak cipta tidak diberikan hanya sekedar ide. Sesuai dengan ketentuan tersebut, suatu ide pada dasarnya tidak mendapatkan perlindungan hak cipta, karena ide belum memiliki wujud yang memungkinkan untuk di lihat, di dengar atau di baca.

Dengan demikian hak cipta itu ada, bersamaan dengan lahirnya suatu ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dengan kata lain hak cipta itu ada sejak ciptaan dituangkan dalam bentuk yang nyata, yang dilindungi adalah perwujudan ide tersebut, sedangkan idenya sendiri tidak

---

dilindungi. Perwujudan ide sebagai hasil karya pencipta<sup>35</sup> dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra diindungi oleh hak cipta. Tentang keaslian atau orisinalitas ini, di dalam buku panduan yang dikeluarkan oleh Indonesia *Australia Specialised Training Project-Phase II*, menyebutkan bahwa<sup>36</sup> Hak cipta hanya melindungi karya-karya asli tetapi tidak mensyaratkan karya tersebut untuk bersifat kreatif. Pengarang dapat memperoleh ide-idenya dari pengetahuan umum. Ini tidak harus membutuhkan waktu lama atau keahlian untuk mencipta. Karya tersebut akan tetap asli, jika karya tersebut tidak merupakan kopi/salinan dari karya lain dan si pengarang telah menggunakan pemikiran, imajinasi, atau keahliannya walau dalam bentuk minimum saat menciptakan karyanya.

Sejumlah pengadilan yurisdiksi lain menganggap bahwa kumpulan informasi atau data berhak memperoleh perlindungan hak cipta jika unsur buruh, keahlian dan modal yang termuat dalam produk tersebut menghasilkan kualitas atau nilai yang tidak dimiliki oleh produk tersebut saat masih berbentuk bahan baku, informasi dalam bentuk kalender atau jadwal kereta atau kumpulan keduanya bukanlah suatu bentuk orisinal. Namun, jika karya tersebut melibatkan pengaplikasian keahlian dan penilaian seperti terlihat dalam struktur, presentasi dan pengaturannya, maka karya tersebut

---

<sup>35</sup> Undang-undang Hak Cipta nomor 19 tahun 2002, menyebutkan bahwa "Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahliannya yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi".

<sup>36</sup> Indonesia Specialised Training Project Phase II, *Hak Kekayaan Intelektual Kursus Singkat Khusus Hakipta*, Diselenggarakan oleh Asian Law Group Pty Ltd, Hal.38

berhak memperoleh perlindungan hak cipta. Pendekatan ini cenderung digunakan oleh yurisdiksi negara seperti Inggris dan Australia.

Pendekatan yang berlaku di Inggris dan Australia mengutamakan standar orisinalitas pada tingkat yang lebih rendah yaitu pemikiran dan keahlian yang minimal untuk menciptakan suatu karya orisinal. Mahkamah Agung Amerika Serikat menerapkan standar orisinalitas dalam tingkat yang lebih tinggi. Dalam kasus *Feist Publications* melawan *Rural Telephone Service* pengadilan meneliti isu mengenai apakah direktori telpon dapat memperoleh perlindungan hak cipta. Pengadilan menemukan bahwa walaupun kumpulan fakta atau informasi cukup layak untuk di dinyatakan keasliannya, kumpulan ini tidak cukup layak memperoleh perlindungan hak cipta karena hanya merupakan penyusunan nama pelanggan telepon menurut abjad. Penyusunan nama secara abjad ini tidak membutuhkan keahlian atau penilaian tertentu yang menjadikannya berhak atas perlindungan hak cipta. Standar orisinalitas dalam yurisdiksi negara-negara di Eropa terlihat lebih tinggi. Di Eropa, bentuk cetak, katalog dan semacamnya tidak memperoleh perlindungan hak cipta. Di daerah tersebut, memperlihatkan pengeluaran tenaga dan keahlian atas suatu karya tidaklah cukup untuk memperoleh perlindungan hak cipta. Hasil karya tersebut juga harus memiliki unsur kreatif.

Kedua unsur atau konsep dasar tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain untuk mendapatkan perlindungan

hak cipta. Si pencipta maupun penerima hak atas hak cipta mempunyai hak khusus (*Exclusive Right*)<sup>37</sup> untuk mengumumkan atau memperbanyak maupun memberi ijin untuk itu terhadap hasil karya ciptannya. Hak khusus yang dimiliki oleh si pencipta maupun penerima hak tersebut mengandung pengertian bahwa orang lain yang akan menggunakan hak cipta tersebut harus terlebih dahulu mendapat ijin dari pencipta maupun penerima hak.

#### 4. Hak Moral dan Hak Ekonomi

Konsep dasar lahirnya hak cipta akan memberikan Perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta yang memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi.

Sifat pribadi yang terkandung di dalam hak cipta melahirkan konsepsi hak moral<sup>38</sup> bagi si pencipta atau ahli warisnya. Hak Moral tersebut dianggap sebagai hak pribadi yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mencegah

<sup>37</sup> Bambang Kesowo.op.cit, hlm 26 menyebutkan :

“.....Hak ini bersifat khusus, karena hak tersebut hanya diberikan kepada pemilik atau pemegang hak yang bersangkutan untuk dalam waktu tertentu memperoleh perlindungan hukum guna mengumumkan, memperbanyak, mengedarkan dan lain-lain hasil karya ciptanya atau memberi ijin kepada orang lain untuk melaksanakannya.

.....dikatakan eksklusif, karena mengenyampingkan orang lain untuk mengumumkan, memperbanyak atau menyebarluaskan dan lain-lain kecuali atas ijin pencipta atau pemegang hak yang bersangkutan.

Bandingkan dengan Henry Soelistyo Budi, SH.,LLM, op cit, hlm. 4, yang menyebutkan bahwa : Sebagai hak khusus (exclusive rights), Hak Cipta mengandung muatan dua esensi hak. Yaitu, hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights). Kandungan hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan dan hak memperbanyak.

<sup>38</sup> Bandingkan dengan FJ. Kase, Copyright thought in countinental Europe : Its Development, legal theories and philosophy, 1995.P2.

“.....The personal rights of author or creators of material in which copyright subsist have included ‘moral right centred around the person of the author ..... The components of moral right included paternity , the right of the author to be made known to the public....., integrity, which prevents distortion of the work.....”

Bandingkan juga dengan article 6 bis Berne Convention 1971



terjadinya penyimpangan atas karya ciptanya dan untuk mendapatkan penghormatan atau penghargaan atas karyanya tersebut. Hak moral tersebut merupakan perwujudan dari hubungan yang terus berlangsung antara si pencipta dengan hasil karya ciptanya walaupun si penciptanya telah kehilangan atau telah memindahkan hak ciptanya kepada orang lain. Sehingga apabila pemegang hak menghilangkan nama pencipta,. Maka pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.

Di samping itu juga pemegang hak cipta tidak diperbolehkan mengadakan perubahan suatu ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya dan apabila pencipta telah menyerahkan hak ciptanya kepada orang lain, maka selama penciptanya masih hidup diperlukan persetujuannya untuk mengadakan perubahan, tetapi apabila penciptanya telah meninggal dunia diperlukan ijin dari ahli warisnya. Dengan demikian sekalipun hak moral itu sudah diserahkan baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain, namun penciptanya atau ahli warisnya tetap mempunyai hak untuk menggugat seseorang yang tanpa persetujuannya :<sup>39</sup> a). meniadakan nama pencipta yang tercantum dalam ciptaan; b). mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya; c). Mengganti atau mengubah judul ciptaan ; dan d). mengubah isi ciptaan.

---

"Independently .....and even after the transfer of the said rights, the author shall have the right to claim authorship of the work and to object to any distortion , mutilation or other modification ..."

<sup>39</sup> Walter Simanjuntak, SH., Perlindungan Hak Cipta di Indonesia, Direktorat hak cipta, Desain tata Letak Sirkuit Terpadu dan Desain Industri.

Dua hak moral utama yang terdapat di dalam undang-undang hak cipta Indonesia adalah :<sup>40</sup>

1. Hak untuk memperoleh pengakuan, yaitu : hak pencipta untuk memperoleh pengakuan publik sebagai pencipta suatu karya guna mencegah pihak lain mengklaim karya tersebut sebagai hasil kerja mereka, atau untuk mencegah pihak lain untuk memberikan pengakuan pengarang karya tersebut kepada pihak lain tanpa seijin pencipta;
2. Hak Integritas, yaitu hak untuk mengajukan keberatan atas perubahan yang dilakukan terhadap suatu karya tanpa sepengetahuan si Pencipta.

Hak moral ini juga diatur di dalam konvensi internasional dibidang hak cipta yaitu *Bern Convention*, yang antara lain menyebutkan bahwa pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas perubahan, pemotongan, pengurangan atau modifikasi lain serta aksi pelanggaran lain yang berkaitan dengan karya tersebut, di mana hal-hal tersebut merugikan kehormatan atau reputasi si pencipta.<sup>41</sup>

Begitu eratnya hubungan pencipta dan ahli warisnya dengan hak moral, maka hak moral tersebut tidak dapat dilepaskan atau melekat pada si pencipta, oleh karena itu hak cipta yang dimiliki oleh pencipta, demikian pula hak cipta yang tidak diumumkan yang setelah penciptanya meninggal dunia

---

<sup>40</sup> Indonesia Australia Specialised Training Project Phase II, *Hak Kekayaan Intelektual Kursus Singkat Khusus Hak Cipta*, 2002, hal 66

<sup>41</sup> Bandingkan dengan pasal 6 bis Bern Convention, yang menyebutkan :  
Independently of the author's economic rights, and even after the transfer of the said rights, the author shall have the right to claim authorship of the work and to object to any distortion,

menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat, tidak dapat di sita kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum<sup>42</sup>, hal ini mengingat Hak Cipta manunggal dengan diri pencipta dan bersifat tidak berwujud, maka pada prinsipnya itu tidak dapat di sita dari padanya.

Dengan demikian hak moral pencipta itu merupakan salah satu pembatasan dari pada hak cipta<sup>43</sup> yang telah diserahkan kepada orang lain daripada pencipta itu sendiri. Orang lain dari pada pencipta itu sendiri, misalnya seorang penerima hak cipta, biarpun padanya telah diserahkan hak cipta seluruhnya atas suatu ciptaan, akan tetapi dengan adanya hak moral pencipta itu, maka jelas ia terikat pada beberapa ketentuan yang tersimpul dalam pengertian hak moral pencipta itu.

Terhadap hak moral ini, walaupun hak ciptanya (hak ekonominya) telah diserahkan seluruhnya atau sebagian, pencipta tetap berwenang menjalankan suatu tuntutan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian terhadap seseorang yang melanggar hak moral pencipta. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Dengan hak moral, pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk :

---

mutilation or other modification of, or other derogatory action action in relation to, the said work, would be prejudicial to his honor or reputation.

<sup>42</sup> Undang-undang hak cipta Nomor 19 Tahun 2002, pasal 4

- a. dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum;
- b. mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi, atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta. Di samping itu tidak satupun dari hak-hak tersebut dapat dipindahkan selama penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Disamping hak moral tersebut, hak cipta juga berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi (*Economic Rights*). Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi di dalam hak cipta tersebut, merupakan suatu perwujudan dari sifat hak cipta itu sendiri, yaitu bahwa ciptaan-ciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia itu mempunyai nilai, karena ciptaan-ciptaan tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan, walaupun bentuknya tidak berwujud (*Intangible*)<sup>44</sup>.

Bagi manusia yang menghasilkannya karya cipta tersebut memang memberikan kepuasan. Tetapi dari segi yang lain karya cipta tersebut

<sup>43</sup> J.C.T. Simorangkir, SH., *Undang-undang Hak Cipta 1982* (UHC 1982), Jakarta 1982, hlm 167

<sup>44</sup> Mengenai kekayaan tidak berwujud (*intangible property*) ini Balck's Law Dictionary, west publishing Co., Centennial edition (1891-1991), abridged fifth edition, 1991, hlm 558, merumuskan definisi sebagai berikut : As used chiefly in the law of taxation, this term means such property as has no intrinsic and marketable value, but is merely the representative or evidence of value, such as certificates of stock, bonds, promissory notes, copyrights, and franchises.

Bandingkan juga dengan BPHN, *Penelitian tentang Perbandingan Hukum Benda dengan Hukum Continental (Belanda dan hukum Inggris/Amerika)*.

.....Intangible personal property adalah property yang tidak dapat dikuasai secara fisik, tidak dapat dipegang oleh tangan manusia dan yang termasuk dalam kelompok ini adalah paten, hak cipta, account receivable dan corporate goodwill.

sebenarnya juga memiliki arti ekonomi. Hal yang terakhir ini rasanya perlu dipahami, dan tidak sekedar menganggapnya semata-mata sebagai karya yang memberi kepuasan batiniah, bersifat universal dan dapat dinikmati oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun juga, apalagi dengan sikap bahwa sepantasnya hal itu dapat diperoleh secara cuma-cuma. Sikap seperti itu terasa kurang adil, sekalipun seringkali mengatasnamakan paham kekeluargaan, kegotongroyongan dan lain-lain yang sejenis dengan itu. Seandainya sang pencipta selaku pemilik hak atas karya cipta dengan sadar dan sengaja membiarkan dan memberikan karyanya dipakai atau ditiru masyarakat dengan cuma-cuma, hal itu pun tetap tidak mengurangi kewajiban setiap orang untuk menghargai dan mengakui hak tersebut.<sup>45</sup>

Memang adakalanya seorang pencipta enggan membicarakan secara terbuka nilai karya ciptanya, bahkan mungkin ada yang tidak bersedia melakukan karena merasa bahwa karyanya tidak bernilai. Sekalipun demikian, kurang juga pada tempatnya bilamana kita mengambil keuntungan dari keadaan seperti itu. Setidaknya sesuai dengan upaya untuk menumbuhkan sikap dan budaya di kalangan masyarakat untuk menghormati jerih payah atau hasil karya seseorang, tumbuhnya sikap untuk selalu mengambil keuntungan cuma-cuma dari jerih payah orang lain perlu dihilangkan.

---

<sup>45</sup> Bambang Kesowo, op. Cit. Hlm.24.

Hak ekonomi tersebut adalah hak yang dimiliki oleh seseorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak Ekonomi pada setiap undang-undang hak cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya, ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut. Secara umumnya setiap negara minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis hak :<sup>46</sup> ...

1. Hak reproduksi atau penggandaan (*Reproduction right*)
2. Hak adaptasi (*Adaptation Right*)
3. Hak Distribusi (*Distribution Right*)
4. Hak Pertunjukan (*Public Performance Right*)
5. Hak Penyiaran (*Broadcasting Right*)
6. Hak Program Kabel (*Cablecasting Right*)
7. Droit de suite
8. Hak Pinjam masyarakat (*Public Lending Right*)

Di dalam Undang-undang Hak Cipta Australia mengatur secara terpisah hak-hak ekonomi berdasarkan hal-hal yang berhubungan dengan bidang-bidang yang di lindungi oleh undang-undang hak cipta. McKeough Stewart dalam bukunya *Intellectual Property in Australia, 2nd edition* menyebutkan bahwa :

*"The Copyright owner has the exclusive right to do all or any of a number of things in relation to the subject matter with respect to a literary dramatic or musical work, copyright is defined in Section 31 (1) (a) as the exclusive right :*  
*(i) to reproduce the work in a material form;*  
*(ii) to publish the work;*  
*(iii) to perform the work;*

<sup>46</sup> Muhamad Djumhana Drs.,SH., dan R. Djubaedillah, SH., *Hak Milik Intelektual, sejarah, teori, dan prakteknya di Indonesia*, hal. 52.

- (iv) *to broadcast the work;*
- (v) *to cause the work to be transmitted to subscribers to a diffusion service;*
- (vi) *to make an adaption of the work;*
- (vii) *to do, in relation to a work that is an adaption of the first – mentioned work, any of the acts specified in relation to the first mentioned work in sub-paragraphs (i) to (v), inclusive.*

*Copyright in artistic works is slightly narrower, consisting of the exclusive right to do all or any of the following acts (S (i) (b) :*

- (i) to reproduce the work in a material form;*
- (ii) to publish the work;*
- (iii) to include the work in a television broadcast;*
- (iv) to cause television program that includes the work to be transmitted to subscribers to a diffusion service.*

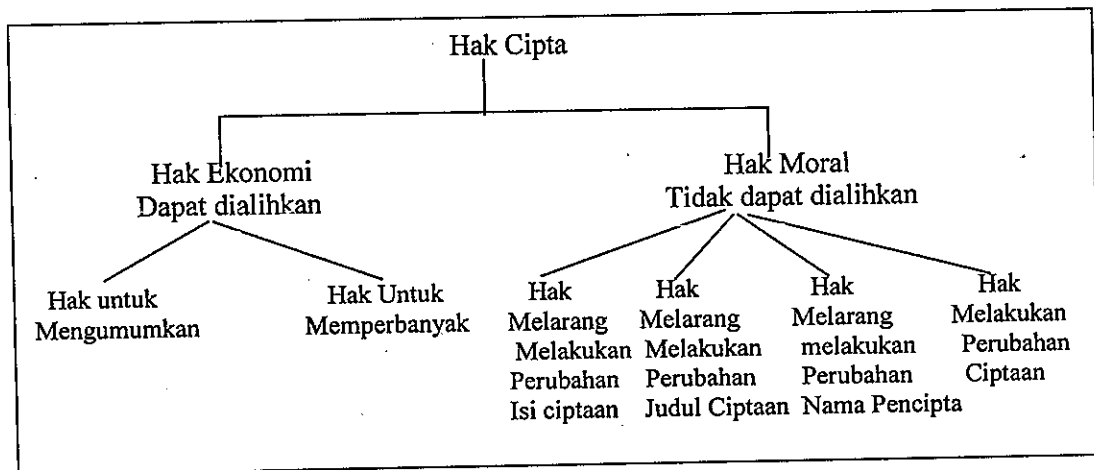
Hak ekonomi (*Economic Rights*) yang terkandung di dalam pasal 1 angka 4 Undang-undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-undang nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1987, meliputi hak untuk mengumumkan dan memperbanyak. Termasuk dalam pengumuman adalah pembacaan, penyuaran, penyiaran dan penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat oleh orang lain, sedangkan yang termasuk dalam memperbanyak adalah menambah jumlah ciptaan, dengan pembuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan suatu ciptaan.

Konsepsi hak ekonomi yang terkandung di dalam hak cipta tersebut mencerminkan bahwa ciptaan-ciptaan sebagai hasil olah pikir manusia dan

yang melekat secara alamiah sebagai suatu kekayaan si pencipta mendapat perlindungan hukum yang memadai karena merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 27 Deklarasi universal hak asasi manusia sebagai berikut :

1. Setiap orang mempunyai hak kemerdekaan berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat, menikmati seni atau mengambil bagian dari kemajuan ilmu pengetahuan dan menarik manfaatnya;
2. Setiap orang mempunyai hak memperoleh perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral dan material yang merupakan hasil dari ciptaan-ciptaan seseorang pencipta dibidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni.

Hak moral dan hak ekonomi dari hak cipta tersebut dapat dijabarkan dalam diagram sebagai berikut :



##### 5. *Pengelolaan Administrasi Hak Cipta dan Hak Yang Berkaitan*

Dalam mengeksploitasi hak ekonomi yang terkandung di dalam hak cipta dan hak yang berkaitan, bagi pencipta, pemegang hak cipta, artis, pemusik, produser rekaman serta lembaga siaran membutuhkan bantuan



pihak lain untuk melakukan pengawasan penggunaan karya ciptanya dan untuk kebutuhan negosiasi dalam pelaksanaan Lisensi serta mengumpulkan royalti sebagai imbalan penggunaan karyanya dari para pemakai. Dengan kata lain, bahwa administrasi kolektif sangat diperlukan di lapangan karena tidak mungkin pemegang hak cipta secara perorangan melakukan sendiri tindakan-tindakan pengawasan, memungut royalti maupun dalam hal kebutuhan lisensi.

Pengadministrasian kolektif di bidang hak cipta ini dilakukan suatu organisasi yang bergerak di bidang Hak Cipta dan keberadaan organisasi profesi ini juga diakui oleh undang-undang hak cipta baik Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 maupun Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang antara lain disebutkan dalam ketentuan tentang Dewan Hak Cipta, bahwa untuk membantu pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pembimbingan serta pembinaan hak cipta di betuk Dewan Hak Cipta. Adapun keanggotaan Dewan Hak Cipta terdiri atas wakil pemerintah, wakil organisasi profesi dan anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang hak cipta yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.

Hukum hak cipta memberikan hak eksklusif bagi pencipta sebagai perorangan. Dalam mengeksploitasi suatu karya cipta tertentu, memang agak efektif apabila yang mengadministrasikan adalah perorangan, sebagai

contoh adalah pada kasus pengarang novel, yang melakukan kontrak dengan penerbitnya. Pengarang tersebut akan cukup memungkinkan untuk melakukan kontrol terhadap eksploitasi novelnya serta pembayaran royaltinya. Demikian pula pada karya cipta patung dan lukisan, pematung dan pelukis dapat mengontrol pemakaian di segala aspek eksploitasi terhadap karyanya.

Pengeksploitasian karya cipta tertentu yang dilakukan oleh perorangan, bagaimanapun tidak praktis dan efektif. Seperti halnya pertunjukan atau pengumuman ke publik untuk karya cipta musik. Contoh lain adalah memperbanyak melalui fotocopy dan reprografi. Terhadap dua hal tersebut, sungguh tidak mungkin bagi komposer perorangan atau pengarang mengetahui siapa yang menampilkan atau mencontoh karyanya, di tempat mana, waktunya kapan dan untuk tujuan apa baik di negaranya sendiri maupun negara lain. Dengan kata lain, sungguh tidak mungkin bagi pencipta secara perorangan, untuk melacak, mengenali dan mengawasi beratus perusahaan seperti Stasiun, radio satelit dan televisi, diskotik, Pub, hotel, tempat karaoke, restoran, pesawat terbang dan lain-lain.

Demikian juga dalam hal pembayaran royalti, sungguh sangat sulit pengarang perorangan mendatangi sendiri ke para pengguna karya ciptanya, di samping memerlukan biaya yang tinggi juga waktu yang dibutuhkan untuk melakukan negosiasi sangat sulit untuk menjangkaunya. Sehingga untuk

mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut dibutuhkan bantuan suatu organisasi administrasi di bidang hak cipta.

Pada tahun 1989, Badan Utama (*World Intellectual Property Organisation (WIPO)*) mengintruksikan Biro Internasional untuk menyiapkan sebuah studi untuk memberikan saran yang tepat guna kepada negara-negara anggota untuk mematuhi administrasi kolektif dibidang hak cipta dan hak yang berkaitan. Studi yang diterbitkan *WIPO* tahun 1990 berisi sejumlah kesimpulan dengan persoalan yang paling mendasar yang berhubungan dengan administrasi kolektif. Penemuan utama dari penelitian tersebut diringkas seperti pada paragraf berikut : <sup>47</sup>

- a) Keberadaan Administrasi kolektif dari hak cipta dan hak -hak yang berkaitan di negara-negara anggota *WIPO* adalah dibenarkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengadministrasian terhadap hal-hal yang berhubungan dengan penggunaan suatu karya cipta. Hal tersebut akan membantu mekanisme pelaksanaan lisensi, pemanfaatan dan pengawasan penggunaan karya cipta;
- b) Administrasi kolektif secara menyeluruh termasuk otoritas penggunaan, monitoring, pengumpulan dan pendistribusian royalti kepada pemegang hak adalah penting, mengingat kompleksnya hak eksklusif dari hak cipta;
- c) Jumlah organisasi administrasi kolektif di suatu negara tergantung kondisi politik, ekonomi dan hukum serta kepentingannya, apakah hanya satu organisasi administrasi kolektif, organisasi kolektif umum atau berbagai organisasi yang terpisah terhadap berbagai macam hak dan kategori dari

---

<sup>47</sup> **Internastional Bureau of WIPO, The Exercise, Administration and Enforcement of Copyright and Neighboring Rights Under WIPO Treaties and TRIP's Agreement, hal. 49**

pemegang hak cipta. Keuntungan dari sebuah organisasi umum adalah lebih mudah menyelesaikan masalah yang timbul dalam penggunaan karya cipta dan mungkin efisien dalam pelaksanaannya. Jika ada organisasi yang paralel, maka yang dibutuhkan adalah kerjasama yang baik antar mereka atau bergabung dalam bentuk koalisi.

- d) Sebagai sebuah aturan, seharusnya hanya ada satu organisasi untuk kategori hak yang sama pada masing-masing negara. Adanya dua atau lebih organisasi administrasi kolektif pada bidang yang sama akan mengurangi atau bahkan menghilangkan keuntungan dari administrasi kolektif itu sendiri;
- e) Bentuk organisasi administrasi kolektif apakah organisasi publik atau swasta kembali lagi akan tergantung pada keadaan politik, ekonomi dan hukum yang berlaku. Umumnya organisasi swasta lebih disukai, namun bagaimanapun membuat organisasi publik diperlukan untuk melindungi kepentingan pemegang hak;
- f) Penjelasan dari kewajiban administrasi kolektif harus dibatasi pada kasus-kasus yang memerlukan tindakan;
- g) Pemberlakuan perlindungan lisensi dijamin organisasi administrasi kolektif yang seharusnya difasilitasi oleh anggapan resmi bahwa organisasi mempunyai kekuatan otorisasi pemakaian seluruh karya yang dilindungi oleh sejumlah lisensi-lisensi dan untuk mewakili seluruh kepentingan yang menyangkut pemegang hak. Pada saat yang sama organisasi administrasi kolektif akan memberikan jaminan yang sesuai kepada pemegang hak dimana lisensi-lisensi yang demikian dibolehkan menghadapi klaim perorangan dari pemegang hak dan akan mengganti kerugian mereka seperti kasus klaim lainnya.
- h) Pengawasan pemerintah yang memadai adalah pentingnya mengenai penegakan dan pelaksanaan dari organisasi administrasi kolektif, misalnya pengawasan harus bergaransi, di mana hanya organisasi-

organisasi tersebut yang dibolehkan beroperasi yang dapat menjamin penyediaan semua perundang-undangan;

- i) Keputusan yang memperhatikan metode dan aturan dari pengumpulan dan pendistribusian royalti dan mengenai aspek umum yang penting dari administrasi kolektif, harus memperhatikan kepentingan pemegang hak atau badan yang mewakili mereka;
- j) Bagi pemegang hak dan organisasi lain (terutama organisasi asing) hak atau repertoar adalah berturut-turut, terdaftar dalam sebuah administrasi kolektif, informasi yang rinci dan teratur harus tersedia sebagai tugas organisasi dalam menjalankan kepentingan pemegang hak;

Organisasi administrasi kolektif telah ada pada karya musik selama beberapa tahun yang lalu dan organisasi tersebut telah membentuk sebuah sistem kontrak mendunia yang saling timbal balik melalui masing-masing organisasi yang dapat mewakili para pencipta untuk memperoleh hak-hak di masing-masing negara.

Hampir di semua negara mempunyai satu Organisasi administrasi kolektif di bidang musik, kecuali Amerika Serikat. Amerika Serikat mempunyai tiga organisasi kolektif di bidang musik, yaitu : *American Society of Composers , Authors and Publishers (ASCAP)*, *Broadcast Music Incorporated (BMI)*, dan *The American Collecting Society for Performing, Rights (SESAC)*. Sedangkan negara-negara Eropa dan Asia, hampir semuanya hanya mempunyai satu organisasi administrasi kolektif di bidang musik. Keberadaan organisasi administrasi kolektif di bidang musik di beberapa negara di Eropa telah berdiri kurang lebih seratus tahun yang lalu, sedangkan di beberapa

negara di Asia baru berdiri kurang lebih 25 tahun yang lalu, kecuali *Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers (JASRAC)* di Jepang telah berdiri sejak 62 tahun yang lalu.<sup>48</sup>

Lima negara anggota ASEAN masing-masing mempunyai satu organisasi administrasi kolektif di bidang musik, yaitu Karya Cipta Indonesia (KCI) untuk Indonesia, the *Music Authors Copyright Protection Berhad* (MACP) untuk Malaysia, the *Filipino Society for Coposers, Authors and Publishers (FILSCAP)* untuk Philipina, the *Composers, Publishers and Authors Society of Singapore (COMPASS)* untuk Singapura dan *Music Copyright of Thailand (MCT)* untuk Thailand.

Ke lima negara anggota ASEAN tersebut selama tahun 2001 masing-masing negara telah mengumpulkan royalty dari lisensi di bidang musik, seperti terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 1 : *Collection for the Year 2001*<sup>49</sup>

Country	CMO	Established	Annual Collections (US Dollars)
1. Indonesia	KCI	1990	621,700
2. Malaysia	MACP	1989	2,700,000
3. Philippines	FILSCAP	1965	370,000
4. Singapore	COMPASS	1987	4,129,000
5. Thailand	MCT	1994	120,593

<sup>48</sup> The International Bureau of WIPO, Possibility of Establishing an ASEAN Regional Copyright Collective Management System, Mei 2002, page 6.

Di Indonesia ada beberapa Organisasi profesi yang bergerak di bidang hak cipta , di samping Karya Cipta Indonesia, yaitu :

- Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI);
- Asosiasi Piranti Lunak Komputer Indonesia (ASPILUKI);
- Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia Asosiasi Importir Rekaman Video Indonesia (ASIREVI);
- Gabungan Perusahaan Produksi Rekaman Video (GAPSIREVI)
- Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI);
- Persatuan Pengarang Indonesia (PEPERINDO);
- Persatuan Perusahaan Film Indonesia/Persatuan Artis Film Indonesia (PPFI/PARFI);
- Persatuan Umum Pusat Produksi Film Negara (PPFN);
- Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI);
- Himpunan Pelukis Jakarta (HIPTA)

Sebagai perbandingan organisasi profesi yang bergerak di bidang hak cipta di Australia<sup>50</sup> adalah :

- *Aboriginal Artists Agency (AAA)*
- *Australasian Performing Right Association (APRA)*
- *Australian Institute of Professional Photography (AIPP)*
- *Australian Music Center (AMC)*
- *Australian Music Publishers Association Limited (AMPAL)*
- *Australian Publishers Association (APA)*

---

<sup>49</sup> The International Bureau of WIPO, Ibid Page 10

<sup>50</sup> <http://www.copyright.org.au/page 10 htm>

- *Australian Record Industry Association (ARIA)*
- *Australian Screen Directors Authorship Collecting Society (ASDACS)*
- *Australian Writers Guild (AWG)*
- *Copyright Agency Limited (CAL)*
- *Craft Australia*
- *Fellowship of Australian Writers (FAW)*
- *Media Entertainment & Arts Alliance (MEAA)*
- *Musicians Union of Australia (MUA)*
- *National Association for the Visual Arts (NAVA)*
- *National Tertiary Education Union (NTEU)*
- *Producers and Directors Guild of Australia*
- *Professional Photographers Association of Australia (PPAA)*
- *Royal Australian Institute of Architects (RAIA)*
- *Screen Producers Association of Australia (SPAA)*
- *Screenrights*
- *Society of Advertising Commercial & Magazine Photographers (ACMP)*
- *VI\$COPY*

## ***B. Peralihan Hak dan Perkembangan Pengaturan Hak Cipta***

### ***1. Peralihan Hak Cipta***

Dengan adanya pengakuan hak yang diatur di dalam deklarasi universal hak-hak asasi manusia tersebut menunjukkan bahwa hukum memberikan penghargaan dan tempat yang tinggi kepada manusia sebagai makhluk pribadi, termasuk ciptaan-ciptaan yang dihasilkan dalam bentuk kekayaan intelektual yang merupakan benda bergerak tidak berwujud sebagaimana diatur pula di dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19



Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang-undang nomor 12 tahun 1997 yang menyatakan bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan immateriil.

Hak cipta sebagai benda bergerak dan tidak berwujud dalam konsepsi hukum perdata merupakan hak milik kebendaan atas benda tidak beregrak. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pemilikan menurut pasal 570 di sebutkan bahwa :

"Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu benda dengan leluasa dan berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang, atau peraturan umum yang ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkan dan tidak mengganggu hak-hak orang lai; kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan pembayaran ganti rugi"

Dari ketentuan pasal 570 KUH Perdata tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap hak milik mempunyai unsur :

1. Kemampuan untuk menikmati atas atas benda atau hak yang menjadi obyek hak milik tersebut;
2. Kemampuan untuk mengawasi, atau menguasai benda yang menjadi obyek hak milik itu, yaitu misalnya untuk mengalihkan hak milik itu kepada orang lain atau memusnahkannya.

Suatu benda dihitung termasuk golongan benda yang bergerak karena sifatnya atau karena ditentukan oleh undang-undang. Suatu benda yang bergerak karena sifatnya, ialah benda yang tidak tergabung dengan tanah atau dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan, jadi barang perabot

rumah tergolong benda yang bergerak karena penetapan undang-undang ialah misalnya penagihan mengenai sejumlah uang atau suatu benda yang bergerak; Surat-surat sero dari suatu perseroan perdagangan, surat-surat obligasi negara dan sebagainya. Selanjutnya dalam *Auteurswet* dan *Octroiwet* ditetapkan bahwa hak atas suatu karangan tulisan (*Auteursrecht*) dan hak atas suatu pendapatan dalam ilmu pengetahuan adalah benda bergerak.<sup>51</sup>

Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan tidak berujud, maka peralihan hak cipta tersebut tidak dapat dilakukan dengan cara lisan, harus dengan ake otentik atau akte di bawah tangan. Persetujuan secara lisan saja tidak diakui oleh undang-undang hak cipta. Hal ini untuk menjaga jangan sampai timbul penyimpangan-penyimpangan terhadap hak dan kewajiban dikemudian hari, sehingga di dalam akte perjanjian harus dibuat sejelas mungkin hak-hak yang dipindahkan atau yang dialihkan serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari para pihak yang membuat perjanjian.

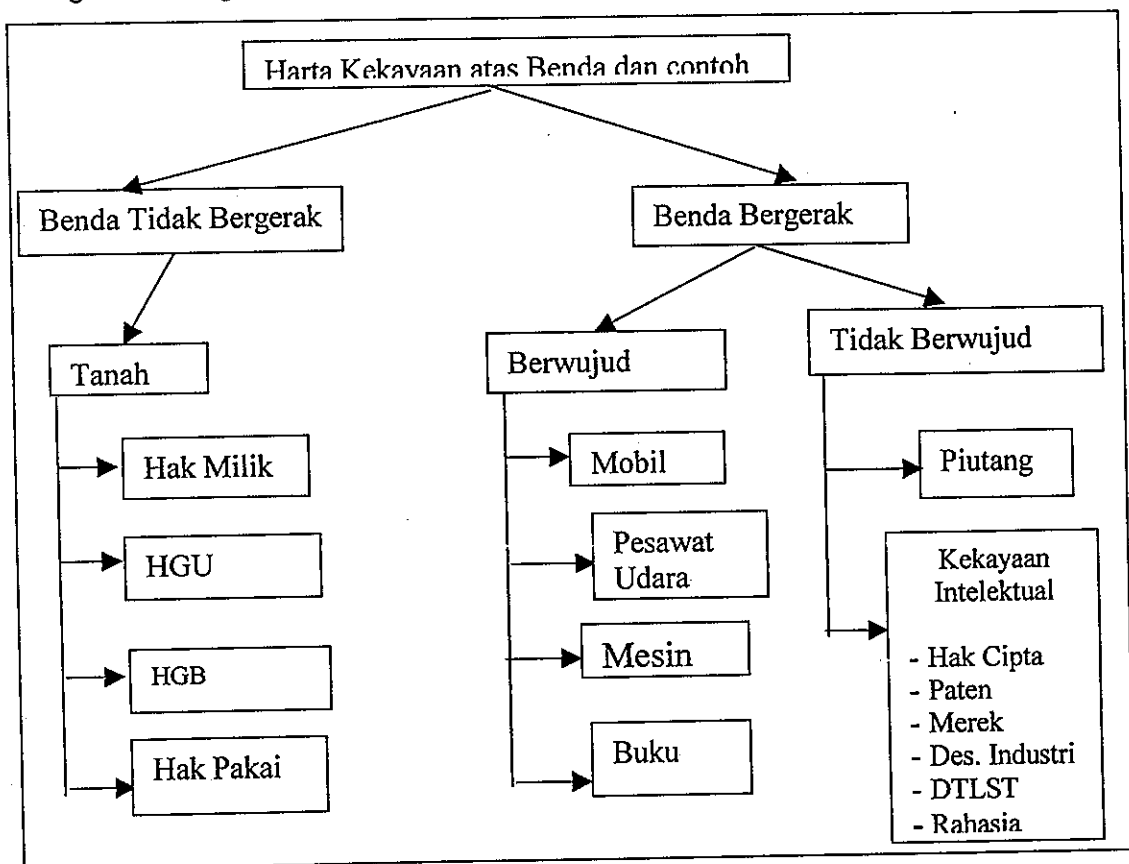
Menurut Mariam Darus badruzaman<sup>52</sup>, bahwa sistem hukum benda mengandung sejumlah asas, antara lain hak kebendaan memberikan wewenang yang kuat kepada pemiliknya, hak itu dapat dinikmati, dialihkan dijaminakan dn disewakan. Dengan adanya asas ini hak cipta dapat dialihkan oleh pencipta seperti halnya benda-benda yang lain, sehingga hak tersebut masuk ke dalam ruang lingkup hukum jaminan sebagaimana dituangkan ke

---

<sup>51</sup> Subekti., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XVI, hal. 62.ta

dalam pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Yang menyebutkan bahwa segala kebendaan debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Konsep hukum kekayaan intelektual khususnya hak cipta yang tergolong sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat terlihat dalam diagram sebagai berikut <sup>53</sup> :



<sup>52</sup> Meriam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Penerbit Alumni 1994, hlm 79

<sup>53</sup> Hak Cipta sebagai kebendaan dapat dijaminkan, sebagaimana dikemukakan Laddie Prescott & Victoria, *The Modern Law of Copyright*, Botterworth, hlm, 361, sebagai berikut :  
A mortgage of copyright is effected by way of assignment with a proviso for reconveyance on repayment of the loan. The Assignment must be in writing and signed by or on behalf of the

Hak cipta dalam ilmu hukum dikenal sebagai hak kebendaan yang bersifat tak berwujud yang dikelompokkan dalam rumpun hak kekayaan intelektual, maka sesuai dengan sifatnya sebagai hak kebendaan, menurut Soedewi Masjhoen Sofwan hak ini dapat memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda untuk dipertahankan terhadap siapapun. Hak kebendaan merupakan hak mutlak yang berarti absolut yang dipertentangkan atau dihadapkan dengan hak relatif yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu.<sup>54</sup>

Dikarenakan hak cipta termasuk sebagai hak kebendaan maka sifatnya mirip dengan hak milik, sehingga jaminan perlindungan hukumnya hampir sama dengan hak milik. Dalam hal ini termasuk jaminan untuk menikmati dengan bebas dan mempertahankannya kepada siapapun, serta mengalihkan baik seluruhnya ataupun sebagian kepada orang lain dengan jajan apapun. Dilakukan dengan melalui perjanjian, diserahkan kepada negara, pewarisan, hibah dan wasiat.

Hak Cipta di golongankan sebagai benda bergerak yang tidak berujud, maka berdasarkan pasal 511 KUH Perdata, Hak Cipta tersebut sebagai kebendaan bergerak karena ketentuan undang-undang harus dianggap :

1. Hak pakai hasil dan hak pakai atas kebendaan bergerak;

---

mortgagor, where the mortgagor is a company any charge on a copyright or an licence under a copyright.

<sup>54</sup> Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm 24.

2. hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan, baik bunga yang diabadikan maupun bunga cagak hidup;
3. Perikatan-perikatan dan tuntutan mengenai jumlah-jumlah uang yang dapat ditagih atau yang mengenai benda-benda bergerak;
4. sero-sero atau andil-andil dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan dagang atau persekutuan perusahaan, sekalipun benda-benda persekutuan yang bersangkutan dan perusahaan itu adalah kebendaan tak bergerak, sero-sero atau andil-andil itu dianggap merupakan kebendaan bergerak, akan tetapi hanya terhadap para pesertanya selama persekutuan berjalan.

Ketentuan peralihan hak dengan akte otentik atau akte di bawah tangan<sup>55</sup> tersebut adalah merupakan suatu upaya untuk memberikan penegasan mengenai hak dan kewajiban para pihak. Berdasarkan pasal 613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan tersebut dilimpahkan kepada orang lain. Dari ketentuan pasal 613 KUHPerd. tersebut jelaslah bahwa hak cipta sebagai benda bergerak dan tidak berwujud dalam peralihannya harus dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan.

Pengalihan hak cipta yang dilakukan hanya dengan persetujuan secara lisan saja tidaklah diakui oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, demikian juga dengan Undang-undang Hak Cipta yang berlaku sebelumnya. Persetujuan secara tertulis akan lebih menjaga

---

<sup>55</sup> Bandingkan dengan J.C.T. Simorangkir *Undang-undang Hak Cipta 1982*, penerbit Djambatan Jakarta 1982, hlm. 72, yang menyebutkan bahwa :

kepastian hukum dan kejelasan dari pada persetujuan secara lisan, apalagi persetujuan yang dilakukan secara diam-diam. Hal ini mengingat terlalu banyaknya kepentingan yang tersangkut dalam persoalan hak cipta, termasuk kepentingan ahli waris di kemudian hari.

Abdulkadir Muhammad<sup>56</sup> mengemukakan bahwa pengalihan hak cipta itu didasari oleh motif ekonomi, yaitu keinginan untuk memperoleh manfaat ekonomi atau keuntungan secara komersial, pencipta mengalihkan hak cipta dengan bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi dari penjualan ciptaan yang dihasilkan dari hak cipta tersebut. Hak cipta suatu ciptaan tetap ada di tangan pencipta selama kepada pembeli ciptaan itu tidak diserahkan seluruh hak ciptanya. Hal ini menegaskan berlakunya asas kemanunggalan hak cipta dengan penciptanya. Hak cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual lagi untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama. Apabila timbul sengketa antara beberapa pembeli hak cipta yang sama atas suatu ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih dahulu memperoleh hak cipta tersebut.

Hak cipta dapat beralih baik seluruhnya maupun sebagian melalui pewarisan, hibah, wasiat dan dijadikan milik negara. Hak-hak eksploitasi dari pemegang hak cipta, seperti misalnya hak reproduksi, hak mempertunjukkan,

---

Bentuk penyerahan/pemindahan/pengalihan hak cipta itu harus berupa akta otentik atau akta di bawah tangan, Jadi bisa dengan akta notaris, tetapi hal itu bukan suatu keharusan, sebab dapat juga dengan akta di bawah tangan.

<sup>56</sup> Abdulkadir Muhammad, SH., Prof., *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. hlm. 187

hak mengadaptasi dan hak menterjemahkan dapat dialihkan secara keseluruhan (secara sekaligus), dapat juga secara satu persatu atau sebagian saja, bahkan dapat juga hanya dalam bentuk tertentu saja, misalnya<sup>57</sup> :

- a. bidang hak reproduksi, yang dialihkan hanyalah hak reproduksi/menerbitkan ciptaan itu dalam bentuk buku, bukan dalam majalah, bukan dalam surat kabar dan sebagainya;
- b. bidang hak mempertunjukkan/memainkan, yang dialihkan hanyalah hak untuk memainkan musik tertentu di Taman Ismail Mardjuki (TIM) Jakarta saja, bukan untuk dimainkan di televisi, radio dan sebagainya;
- c. bidang hak adaptasi, yang dialihkan adalah hak untuk membuat film dari ciptaan yang bersangkutan bukan untuk di sandiwarakan;
- d. bidang hak terjemahan, yang dialihkan adalah hak untuk menterjemahkan karangan yang bersangkutan hanya dalam bahasa Jepang, bukan dalam bahasa Spanyol atau bahasa Rusia, dan sebagainya.

Hak cipta menjadi milik negara yaitu apabila suatu ciptaan sama sekali tidak diketahui penciptanya. Hal ini berarti bahwa harus telah didahului dengan upaya untuk mengetahui dan menemukan pencipta yang bersangkutan, baru setelah benar-benar diyakini bahwa ciptaan yang bersangkutan tidak diketahui atau tidak ditemukan penciptanya, maka hak cipta atau ciptaan tersebut ditetapkan dipegang oleh negara. Tetapi apabila dikemudian hari ada pihak yang dapat membuktikan sebagai pencipta atau

---

<sup>57</sup> J.C.T. Simoragkir op cit, hal. 74

adanya pencipta tersebut, maka negara akan menyerahkan kembali hak cipta kepada yang berhak. Disamping itu hak cipta juga dapat dialihkan baik sebagian maupun seluruhnya melalui jual-beli maupun dengan perjanjian lisensi.<sup>58</sup>

Pengalihan hak eksploitasi/hak ekonomi suatu ciptaan biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Ada dua cara pengalihan hak ekonomi yang dikenal dalam praktek,<sup>59</sup> yang pertama adalah pengalihan hak eksploitasi/hak ekonomi dari pencipta kepada pemegang hak cipta dengan memberikan ijin atau lisensi (*Licence/Licentie*) berdasarkan suatu perjanjian yang mencantumkan hak-hak pemegang hak cipta dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan pembuatan-pembuatan tertentu dalam kerangka eksploitasi ciptaan yang tetap dimiliki oleh pencipta. Untuk pengalihan hak eksploitasi ini pencipta memperoleh suatu jumlah uang tertentu sebagai imbalannya.

Berdasarkan pasal 45 ayat 3 disebutkan bahwa pelaksanaan pemberian lisensi disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi, kecuali diperjanjikan lain. Adapun

---

<sup>58</sup> Bandingkan dengan bunyi pasal 3 ayat (2) Undang-undang Hak Cipta Indonesia, yang menyatakan bahwa :

Hak Cipta dapat beralih dan dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena :

- a. Pewarisan
- b. Hibah
- c. Wasiat

- d. Dijadikan milik negara

- e. Perjanjian, yang harus dilakukan dengan akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut di dalam akta itu.

<sup>59</sup> Dr. Eddy Damian, SH., op .Cit. hlm 113



jumlah royalti yang wajib dibayarkan tersebut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi (pasal 45 ayat 4). Cara yang kedua pengalihan hak ekonomi adalah assignment yang dapat di Indonesiakan dengan istilah penyerahan.

Dalam masalah pengalihan hak ini juga di kenal "*transfer*" dan "*assignment*", transfer mengacu pada pengalihan yang berupa /berisikan pelepasan hak kepada pihak lain, pengalihan itu dapat dalam bentuk atau karena pewarisan, hibah, wasiat atau pun karena perjanjian jual-beli. Sedangkan assignment mengacu pada pengalihan yang berupa/berisikan pemberian persetujuan atau ijin untuk memanfaatkan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya assignment mengambil bentuk perjanjian lisensi.<sup>60</sup>

## **2. Perkembangan Hak Cipta di Tingkat Internasional berdasarkan beberapa Konvensi, Traktat dan Perjanjian**

Perlindungan kekayaan intelektual telah menjadi tujuan penting di banyak negara, termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama , semua anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) diharuskan memiliki hukum yang efektif dan mekanisme-mekanisme penegakan hukum untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (Persetujuan TRIP's). Kedua, Pemerintah ingin meningkatkan

---

<sup>60</sup> Bambang Kesowo, loc. Cit., hlm 61 - 62

daya cipta, dan investasi dalam industri yang bergerak di bidang kekayaan intelektual, yang mana dewasa ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam setiap sistem perekonomian modern. Ketiga, pemerintah merasa khawatir terhadap semakin maraknya praktek-praktek pembajakan, menimbulkan distorsi ekonomi dan menurunkan investasi di bidang penelitian dan pengembangan.<sup>61</sup>

Perkembangan pengaturan Hak Cipta di dalam suatu peraturan perundang-undangan nasional tidak dapat terlepas dari pengaruh konvensi-konvensi internasional di bidang hak cipta, terutama adalah Konvensi Bern yang lahir di Swiss pada tahun 1886 yang kemudian dikenal dengan nama *International Convention for The Protection of Literary and Artistic Works* dan kemudian disusul dengan lahirnya suatu konvensi hak cipta universal atau *Universal Copyrights Convention* yang lahir pada tahun 1952.

Jauh sebelum lahirnya Konvensi Bern 1886, persoalan hak cipta sudah mulai diidentifikasi. Pada zaman sebelum ditemukan teknologi mesin cetak dalam bentuknya yang paling sederhana berdasarkan suatu catatan kuno ditemukan data tentang suatu perkara hak cipta pada tahun 567 *Anno Dominum* (AD)<sup>62</sup>. Pada tahun ini, seorang biarawan *Columba* secara diam-diam menyalin tanpa izin kitab mazmur yang merupakan ciptaan yang dimiliki

---

<sup>61</sup> Departemen Kehakiman dan HAM RI, Direktorat Jenderal HKI, Materi dasar Hak kekayaan Intelektual, Oktober 2001, Hal.1

<sup>62</sup> Paul Goldstein (I), *Copyrights Highway, The Law and Lore of Copyright from Gutenberg to to the Celestial Jukebox*, Hill and-Wang, 1994 Hlm.39; Baca juga catatan kaki No. 21 hal 46 dari Eddy Damian,SH.,Dr, *Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional*, UU Hak Cipta 1997 dan *Perlindungan Penerbitan Buku*

gurunya *Abbot Finian*. Ketika raja pada waktu itu, bernama *King Diarmid* mengetahui hal ini, ia memerintahkan *Columba* menyerahkan kitab mazmur yang disalinnya tanpa izin kepada *Abbot Finian* dan melarang melakukannya lagi dengan menggunakan kata-kata bersayap :

***To every cow her calf, and to every book its copy***

Yang terjemahan bebasnya kira-kira adalah sebagai berikut :

***Sapi betina punya anak sapi, sebuah buku punya salinannya.***

Kata-kata bersayap ini, sebenarnya mempunyai arti yang lebih mendalam arti harafiah dari tindakan itu sendiri yang berupa tindakan menyalin suatu karya tulis tanpa izin atau tindakan yang sekarang dikenal dengan istilah penjiplakan. Maksud lebih mendalam yang terkandung di dalamnya adalah menunjukkan bahwa telah sejak lama, jauh sebelum kelahiran undang-undang hak cipta pertama, telah ada kesadaran untuk melindungi ciptaan seorang pencipta berdasarkan alasan moral (moral impulse).

Hal semacam ini juga tercermin dari suatu peristiwa yang terjadi jauh sebelum tahun 567 A.D. yaitu pada zaman Romawi, ketika seorang penyair *Martial*, mengecam keras seseorang yang membacakan sajak-sajaknya dimuka umum tanpa seizinnya. *Martial* menamakan perbuatan orang ini sebagai *plagium*. Arti sebenarnya dari plagium ini, adalah adanya ide hubungan atau keterkaitan (bond) antara pencipta dengan ciptaannya.

Sebelum diketemukan mesin cetak, alasan moral adalah satu-satunya alasan yang dijadikan sebagai dasar untuk melindungi hak cipta seorang pencipta. Hal ini terjadi pada waktu itu, karena sebelum ditemukannya mesin cetak, seorang penjiplak yang menjiplak ciptaan karya tulis seorang pencipta, melakukannya hanya dengan tulisan tangan yang pada hakikatnya dianggap juga melakukan pekerjaan fisik yang sama yaitu menyalin dengan menggunakan juga tulisan tangan. Baik pencipta maupun penjiplak sama-sama tidak mengeluarkan biaya untuk suatu ciptaan yang sama. Keduanya menggunakan tenaga dan fisik yang sama, yaitu menulis dengan tenaga tangan dan tidak ada biaya yang harus dikeluarkan.

Baru setelah mesin cetak ditemukan, timbul permasalahan karena adanya nilai ekonomi (economic value) suatu karya tulis yang diperbanyak dengan cara mencetak menggunakan mesin cetak sebagai alat. Suatu karya tulis dapat diperbanyak dalam jumlah besar untuk para pembacanya. Makin banyak suatu karya tulis dicetak, membuka kemungkinan makin banyak para pembaca yang membelinya. Ini berarti membuka peluang pula untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat pada suatu karya tulis yang diperbanyak dengan cara menggunakan mesin cetak.

Setelah diketemukannya teknis mencetak dengan jumlah besar dengan menggunakan mesin cetak yang ditemukan oleh Gutenberg, timbul suatu masalah yang mengemuka. Dengan timbulnya permasalahan-permasalahan

tersebut, oleh raja Inggris King Richard III tahun 1483 dan tahun-tahun berikutnya, Inggris membuka pintunya lebar-lebar bagi peredaran buku-buku yang berasal dari luar negeri. Pada akhir abad ke-16, untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri, hak paten diberikan kepada penemuan baru di bidang industri, termasuk penemuan mesin cetak. Dengan memberikan hak eksklusif, yang pada waktu itu disebut paten kepada yang menemukan mesin cetak, pemerintah kerajaan akan mendapat sumber dana dan pengikut-pengikut yang setia kepada kerajaan dari mereka yang mendaftarkan mesin cetaknya. Pada tahun 1518 kerajaan memberikan monopoli mencetak kepada *Rihard Pynson*, pimpinan badan usaha percetakan kerajaan bernama *Stationers Company*. Dengan monopoli yang dipunyainya, pencetakan dan penerbitan karya tulis dalam bentuk buku hanya boleh dilakukan perusahaan ini atau percetakan-percetakan lain yang terdaftar sebagai anggota *Stationers Company*. Pencipta atau penulis, hak-haknya untuk memperbanyak karya tulis sama sekali diabaikan. Hak untuk memperbanyak hanya ada pada percetakan.<sup>63</sup>

Pada tahun 1695, sistem monopoli yang berlaku bagi barang-barang cetakan di Inggris ini berakhir setelah maraknya pembajakan pelbagai barang cetakan yang dimonopoli kerajaan pada waktu itu. Untuk mengatasi pembajakan yang sangat merugikan para pencipta, khususnya para penulis, pada tahun 1709 diundangkannya suatu undang-undang hak cipta yang

---

<sup>63</sup> Eddy Damian, SH.,DR., Op cit. hal. 49

pertama di dunia yaitu *Statute of Anne*. Undang-undang ini secara berarti mengubah status seorang pencipta karya tulis mempunyai hak khusus dan kebebasan mencetak.

*Statute of Anne* besar pengaruhnya terhadap kedudukan seorang pencipta yang mencipta karya tulis berdasarkan kemampuan intelektualnya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia seorang pencipta diakui secara sah mempunyai hak cipta atas ciptaannya yang tidak boleh diperbanyak dengan cara apapun oleh orang lain tanpa izinnnya.

Semenjak diundangkannya undang-undang hak cipta yang pertama di dunia pada tahun 1709, sampai dua abad kemudian yaitu abad ke-20 sekarang ini, bidang cakupan ciptaan-ciptaan yang tergolong hak cipta dari waktu ke waktu selama dua abad makin luas adanya. Di Inggris setelah *Statute of Anne*, sebagai susulan diundangkan kemudian : *Engraving Copyright Act 1734* yang melindungi ukiran-ukiran yang diciptakan seorang pengukir; *Sculpture Copyright Act 1814*; *Fine Arts Copyright Act 1862*; *Dramatic Copyright Act 1833*. Pelbagai ciptaan ini yang mendapat perlindungannya secara sendiri-sendiri, pada tahun 1911 dikodifikasikan dalam suatu *Copyright Act 1911*.

Perkembangan di Inggris berproses demikian cepatnya dalam memberikan perlindungan hukum pelbagai ciptaan yang dilahirkan sebagai hasil kerja intelektual manusia, mendorong masyarakat internasional untuk juga memberikan perlindungan hukum yang sifatnya mendunia terhadap

ciptaan-ciptaan tertentu. Pada tahun 1886 di Swiss didirikan organisasi internasional *Bern Copyright Union*, yang menangani/mengadministrasi dan melindungi pelbagai ciptaan manusia yang mencipta dibidang sastra (*Literary*) dan Seni (*Artistic*).

Konvensi Bern 1886 tersebut telah mengalami beberapa perubahan, yaitu diperbarui di Berlin pada tanggal 13 Nopember 1908, kemudian dilengkapi lagi di Bern pada tanggal 10 Maret 1914, diperbarui di Roma pada tanggal 2 Juni 1928 dan diperbarui kembali di Brussel pada tanggal 26 Juni 1948 dan Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967 dan terakhir direvisi pada tanggal 24 Juli 1971 di Paris, Perancis. Konvensi ini mendasarkan pada tiga prinsip dasar dan memuat serangkaian ketentuan yang menetapkan perlindungan minimum yang harus diberikan dan juga ketentuan khusus bagi negara-negara berkembang yang ingin mempergunakannya. Tiga prinsip dasar tersebut adalah :

a. Prinsip National Treatment

Ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian (yaitu ciptaan seorang warga negara, negara peserta perjanjian, atau suatu ciptaan yang pertama kali diumumkan di salah satu negara peserta perjanjian) harus mendapat perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti diperoleh seorang pencipta warga negara sendiri;

b. Prinsip automatic protection

Pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun (must not be conditional upon compliance with any formality)

c. Prinsip independence of protection

Suatu perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal pencipta.

Di samping Bern Convention, konvensi yang erat hubungannya dengan hak cipta adalah Konvensi Roma 1961. Konvensi ini mengatur tentang perlindungan pelaku, produser rekaman dan lembaga penyiaran atau sering disebut juga kelompok hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta (Neighboring Rights/Related Rights). Hak-hak ini sangat berkaitan dengan hak cipta karena hak-hak ini sangat berkaitan dengan hak –hak atas ciptaan seorang pencipta dibidang seni dan sastra dan malahan dibeberapa undang-undang hak cipta nasional merupakan bagian yang terintegrasi dalam undang-undang hak ciptanya.

Hak-hak yang berkaitan tersebut meliputi hak-hak para pelaku atau artis (performing artist) yang terdiri dari penyanyi, aktor, musisi dan sebagainya yang menyampaikan kepada publik suatu pertunjukan hidup (live performance), fiksasi dari pertunjukan demikian dan perbanyakan (reproduksi) dari pertunjukan-pertunjukannya. Juga para produser rekaman suara (producer of sound recordings/phonograms) menikmati hak-hak tertentu, terutama hak mengontrol reproduksi rekaman suara yang dibuat



oleh pemegang hak cipta. Selanjutnya, lembaga-lembaga penyiaran yang menghasilkan karya-karya suaranya, seperti hak mengontrol siaran ulang, fiksasi dan reproduksi karya suaranya yang dilakukan pemegang hak cipta.<sup>64</sup>

Maksud tujuan utama diadakannya Konvensi ini adalah menetapkan pengaturan secara internasional perlindungan hukum tiga kelompok pemegang hak cipta atas hak-hak yang berkaitan yang sampai sekarang ini hanya terdiri dari tiga kelompok (kemungkinan dikelak kemudian hari berkembang lebih), yang masing-masing mempunyai hak-hak tersendiri yang dinamakan hak-hak yang berkaitan (Neighboring Rights/Related Rights). Tiga kelompok dimaksud adalah .<sup>65</sup>

1. Artis-artis pelaku (performings artist) yang terdiri misalnya penyanyi, aktor, musisi, penari dan lain-lain pelaku yang mempertunjukkan karya-karya cipta sastra dan seni;
2. Produser-produser rekaman (Producers of Phonogram);
3. Lembaga-lembaga Penyiaran (Broadcasting Organisations).

Dalam perkembangannya ternyata Rome Convention kurang memberikan perlindungan yang memadai terhadap produser rekaman. Hal ini terasa bahwa pembajakan masih saja berlangsung dan usaha-usaha untuk memberantasnya masih saja tidak efisien, yang terutama disebabkan masih sedikitnya negara-negara yang menjadi peserta konvensi. Untuk merespon

---

<sup>64</sup> Eddy Damian, Dr., Sh., Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta nasional 1997 dan perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya, Catatan Kaki Nomor 47 hal, 73.

makin berkembangnya industri rekaman suara pada waktu itu, WIPO dan UNESCO menyelenggarakan suatu pertemuan yang dihadiri para ahli dari berbagai negara dan kemudian mendirikan suatu komite para ahli, pada bulan Maret 1971 di Paris, dan kemudian pada bulan Oktober 1971 di Geneva di selenggarakan suatu konferensi diplomatik yang berhasil menerima suatu rancangan Phonogram Convention dan kemudian menerimanya sebagai suatu konvensi yang pada tanggal 1 Januari 1996 peserta-pesertanya telah melonjak menjadi 50 negara.

Konvensi menetapkan suatu kewajiban setiap negara peserta konvensi untuk melindungi produser rekaman suara yang merupakan warga dari negara peserta lain konvensi terhadap pembuatan duplikasi (perbanyakan) tanpa persetujuan dari Produser. Selain itu negara peserta konvensi berkewajiban juga untuk melarang pengimporan segala bentuk rekaman suara yang penggandaan atau perbanyakan dilakukan tanpa seizin produser yang berhak. Penggandaan atau pengimporan rekaman suara yang tidak sah, biasanya dilakukan dengan tujuan menyebarkanluaskannya kepada umum/publik untuk mendapat keuntungan materiil (uang) tidak secara sah.

Di dalam perkembangan aturan-aturan dibidang perlindungan hak kekayaan intelektual ada suatu peristiwa penting yang terjadi baru-baru ini, yaitu penandatanganan persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual termasuk Barang-barang Palsu. Apa yang dinamakan

---

<sup>65</sup> Eddy Damian, Dr.,Sh, op cit. Hal,75

persetujuan TRIP's adalah bagian tak terpisahkan dari persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang ditandatangani di Marrakech, Maroko pada tanggal 15 April 1994 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995.

Persetujuan TRIP's menetapkan standar minimum yang harus dipenuhi oleh para anggota WTO untuk memberikan hak-hak dalam rangka melindungi kekayaan intelektual dan melaksanakan hak-hak tersebut. Terdapat syarat-syarat minimum secara terpisah yang harus diberlakukan oleh semua negara tentang hak cipta, hak-hak terkait, merek, indikasi geografis, desain industri, paten, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang. Persetujuan TRIP's juga menetapkan standar untuk mengawasi sirkuit terpadu dan rahasia dagang yang bersifat anti persaingan. Selanjutnya, persetujuan TRIP's menetapkan standar untuk mengawasi praktek-praktek anti persaingan dalam lisensi kontrak.

Tujuan utama persetujuan TRIP's tercantum di dalam pembukaannya, yang memperbanyak tujuan-tujuan dasar negosiasi putaran Uruguay yang ditetapkan dalam bidang kekayaan intelektual oleh Deklarasi Punta del Este Tahun 1986 dan Mid-Term Reviews tahun 1988/1989. TRIP's bertujuan untuk mengurangi gangguan dan hambatan terhadap perdagangan internasional, meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual secara efektif dan memadai dan menjamin bahwa langkah-langkah dan prosedur-prosedur penegakan

hukum hak atas kekayaan intelektual itu sendiri tidak menjadi hambatan bagi perdagangan yang sah.

Persetujuan TRIP's menjadi penting karena dua alasan . Pertama, TRIP's memasukkan melalui referensi (kecuali ketentuan tentang "hak moral" dalam Konvensi Bern) semua ketentuan pokok konvensi-konvensi penting dari WIPO dan Konvensi Paris serta Konvensi Bern ke dalam versi terakhirnya., yang kemudian menjadi kewajiban dalam persetujuan TRIP's di antara anggota WTO. Kedua, TRIP's memberikan sejumlah kewajiban tambahan mengenai hal-hal yang tidak dibicarakan di dalam konvensi-konvensi yang ada atau dipandang tidak memadai. Hal ini meliputi prinsip-prinsip dasar tentang "*National Treatment*" dan "*Most-Favored Nation*" yang memberikan dasar bagi sistem GATT/WTO dan ketentuan-ketentuan lengkap dan khusus tentang prosedur dan upaya hukum bagi penegakan hukum hak atas kekayaan intelektual pada tataran nasional dan penyelesaian sengketa masalah-masalah kekayaan intelektual pada tataran internasional.

Kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam persetujuan TRIP's berlaku sama bagi semua anggota WTO. Semua anggota wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan TRIP's melalui undang-undang, peraturan dan prosedur administrasinya. Akan tetapi, negara-negara sedang berkembang diberi kesempatan sampai 1 Januari 2001 untuk melaksanakan sebagian besar ketentuan (dengan pengecualian khusus pada national treatment dan MFN treatment yang segera dilaksanakan).

Pengembangan aturan-aturan di bidang hak kekayaan intelektual tidak berhenti dengan ditandatanganinya persetujuan TRIP's. Di bidang Hak Cipta, pada tanggal 20 Desember 1996, Konferensi Diplomatik WIPO tentang persoalan Hak Cipta dan Hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta mengesahkan dua perjanjian Hak Cipta WIPO (WIPO Copyrights Treaty/WCT) dan Perjanjian Pertunjukan dan Rekaman Suara WIPO (WIPO Performance and Phonograms Treaty/WPPT).

Perjanjian Hak Cipta WIPO (WCT) memasukkan ketentuan tentang perlindungan hak cipta program-program komputer dan data base dan hak untuk mengedarkan, menyewakan dan menyampaikan ciptaan kepada masyarakat. Perjanjian pertunjukan dan Rekaman Suara (WPPT) memasukkan ketentuan tentang hak-hak minimum yang diberikan kepada pelaku pertunjukan dan produser rekaman termasuk hak untuk memperbanyak, mengedarkan dan menyewakan. Kedua perjanjian ini juga memasukkan ketentuan untuk menjamin keamanan langkah-langkah perlindungan teknologis dan informasi manajemen elektronik yang sangat diperlukan untuk melaksanakan hak-hak dalam lingkungan digital secara efisien.

### **3. Perkembangan pengaturan Hak Cipta di Indonesia**

Perkembangan pengaturan hak cipta di Indonesia secara formal sudah dimulai sejak tahun 1912, yaitu didasarkan pada peraturan Auteurswet 1912 stb. 1912 Nomor 600 yang mulai berlaku tanggal 23 September 1912.

Indonesia sebagai koloni Kerajaan Belanda, kedudukannya dalam hubungan internasional dan pengaturan hukum nasionalnya sebagai negara jajahan ditentukan dan bergantung sepenuhnya kepada Kerajaan Belanda. Dengan kondisi yang sedemikian ini, hukum positif tentang hak cipta secara formal berlaku di Indonesia adalah peraturan Hak Cipta Kerajaan Belanda.

Setelah Belanda mengakhiri penjajahannya di Indonesia, maka setelah Proklamasi Kemerdekaan, perkembangan pemikiran mengenai hak cipta dan perhatian masyarakat terhadap hak cipta boleh dikatakan mengalami pasang surutnya, ada kalanya sangat menonjol, tetapi ada juga masanya seolah-olah tidak ada persoalan mengenai hak cipta. Di kala para penerbit sangat merasa dirinya dirugikan oleh banyak buku-bukunya dicaplok secara tidak sah oleh pihak-pihak tertentu dengan maksud dan tujuan tertentu pula, maka persoalan hak cipta dan pelanggaran hak cipta merupakan pembicaraan umum. Tatkala para komponis dan para pengarang melihat hasil karyanya diperbanyak semaunya saja oleh pihak-pihak yang tidak berhak, baik dalam maupun luar negeri, maka kembali persoalan hak cipta dan pelanggaran hak cipta dipersoalkan lagi dan mendapat perhatian umum. Tetapi ada juga kalanya dimana tidak ada satu surat kabar pun atau masalah, demikian pula melalui siaran TVRI atau RRI, tidak seorang pun yang menyebutkan atau mengomentari persoalan hak cipta.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Simorangkir., JCT., SH., Undang-undang Hak Cipta 1982, Penerbit Djambatan, Hal 3.

Pada saat awal berlakunya tertib hukum nasional, Auteurswet 1912 masih tetap diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pasal II Aturan Peralihan menetapkan bahwa *"Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang dasar ini.* Untuk menguatkan dan menjelaskan pelaksanaan aturan Peralihan ini oleh Presiden pada waktu itu dianggap perlu menetapkan Peraturan Presiden Nomor 2 tanggal 10 Oktober 1945 yang kutipan pertamanya berbunyi *"Segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya R.I. pada tanggal 17 Agustus 1945 sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang dasar ini masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan UUD tersebut"*.

Auteurswet 1912 tersebut berlaku sampai dengan tahun 1982, yaitu setelah Indonesia mengundangkan Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Pencabutan berlakunya Auteurswet tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam mukadimah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982, yaitu :

- 1. Dalam Pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaksud dalam Garis-garis Besar haluan Negara (Ketetapan Majelis permusyawaratan Rakyat No. IV/MPR/1978), serta untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu pengetahuan, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa dalam Wahana Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, maka perlu disusun undang-undang tentang hak Cipta;**

2. *Berdasarkan hal tersebut pada huruf 1 di atas maka pengaturan tentang hak cipta berdasarkan Auteurswet 1912 perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita hukum Nasional.*

Di samping dasar pertimbangan tersebut, di dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta juga disebutkan bahwa :

1. *Dalam rangka pembangunan dbidang hukum demi mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan, kecerdasan kehidupan bangsa perlu dibentuk Undang-undang tentang Hak Cipta. Undang-undang tentang Hak Cipta Auteurswet 1912 Staatsblat no. 600 tahun 1912, perlu diganti karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita hukum nasional.*
2. *Dalam undang-undang ini selain dimasukkan unsur baru mengingat perkembangan tehnologi, diletakkan pula unsur kepribadian Indonesia yang mengayomi baik kepentingan individu maupun masyarakat sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kedua kepentingan dimaksud. Walaupun di dalam pasal 2 ditentukan bahwa hak cipta adalah hak khusus tetapi sesuai dengan jiwa yang terkandung di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, maka ia mempunyai fungsi sosial dalam arti ia dapat dibatasi untuk kepentingan umum.*

Lima tahun perjalanan Undang-undang Hak Cipta Nomor 6 tahun 1982 , tepatnya pada tahun 1987 dilakukan suatu perubahan Undang-undang Hak Cipta yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta, dengan pertimbangan hukum yang termuat dalam mukadimahny, yaitu :

1. *Pemberian perlindungan hukum terhadap hak cipta pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra;*



2. *Di tengah kegiatan pelaksanaan pembangunan nasional yang semakin meningkat, khususnya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, ternyata telah berkembang pula kegiatan pelanggaran hak cipta, terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan;*
3. *Pelanggaran hak cipta tersebut telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat untuk mencipta khususnya;*
4. *Untuk mengatasi dan menghentikan pelanggaran hak cipta dipandang perlu untuk mengubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan dalam undang-undang nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta.*

Demikian juga, Undang-undang Nomor 7 tahun 1987, setelah berjalan 10 tahun dilakukan suatu perubahan juga dengan suatu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1987. Adapun dasar pertimbangan penyempurnaan dan penambahan ketentuan undang-undang tersebut adalah .<sup>67</sup>

1. *Untuk memperbaiki kelemahan yang dirasakan dalam praktek di lapangan selama pelaksanaan undang-undang;*
2. *Untuk menyesuaikan dengan konvensi internasional di bidang hak cipta;*
3. *Untuk menyesuaikan dengan norma-norma yang diatur dalam persetujuan mengenai Aspek-aspek dari Hak Kekayaan Intelektual (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRIP's)*

---

<sup>67</sup> Direktorat Hak Cipta, Perlindungan Hak Cipta di Indonesia, hal.12

Undang-undang Nomor 12 tahun 1997 ini juga hanya bertahan selama lima tahun, tepatnya pada tanggal 29 Juli 2002 telah diundangkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, menggantikan Undang-undang Nomor 12 tahun 1997, namun berlakunya undang-undang baru tersebut ditundamasa berlakunya yaitu selama 12 (dua belas) bulan sejak diundangkannya.

Terhadap Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tersebut Henry Soelistyo Budi<sup>68</sup> memberikan komentar bahwa betapapun harus diakui, UU Hak Cipta 2002 hampir seluruhnya mengkonsolidasikan ketentuan-ketentuan yang masih valid dalam UU Nomor 6 tahun 1982, UU Nomor 7 tahun 1987 dan UU Nomor 12 tahun 1997 dengan beberapa perubahan dan penambahan. Selain pengaturan mengenai *neighboring right*, introduksi *rental right* diatur kembali untuk ciptaan program komputer dan karya sinematografi. Beberapa ketentuan prinsip mengalami revisi redaksional tanpa mengubah substansi. Sedangkan penambahan aturan baru antara lain meliputi elaborasi mekanisme Lisensi Wajib (*Non Voluntary License*) dan penetapan *end user piracy* sebagai tindakan yang secara kronologis merupakan pelanggaran Hak Cipta.

Pelanggaran manajemen informasi dan sarana kontrol teknologi pengaman ciptaan yang diserap dari Traktat Hak Cipta juga dikukuhkan

---

<sup>68</sup> Henry Soelistyo Budi, SH.,LLM.,Beberapa Catatan Menyambut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, makalah disampaikan pada seminar hukum hak kekayaan intelektual (undang-undag Hak Cipta Tahun 2002, tanggal 15 Agustus 2002, hal 1

sebagai norma dan klausula yang disertai ancaman pidana. Selebihnya, sama seperti pada sistem paten dan merek, sengketa perdata yang terkait dengan Hak Cipta diarahkan penyelesaiannya melalui pengadilan niaga. Hal itu tidak mengurangi kebebasan para pihak untuk memilih opsi arbitrase atau menggunakan forum alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*). Selanjutnya untuk keperluan memperoleh dan mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan pelanggaran, UU Hak Cipta 2002 mengatur peluang mendapatkan putusan sementara pengadilan dari pengadilan niaga. Ini merupakan hal baru yang di negara lain sudah lama diterapkan dengan sebutan populer *Anton Piller Order*.

Salah satu dasar pertimbangan dilakukannya penggantian undang-undang hak cipta tersebut adalah bahwa walaupun undang-undang nomor 12 tahun 1997 telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan TRIP's namun masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang hak cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya masyarakat Indonesia. Dari beberapa konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia masih terdapat beberapa hal yang sepatutnya dimanfaatkan. Selain itu, perlu pula dilakukan penegasan dan pemilahan kedudukan hak cipta di satu pihak dan hak terkait di lain pihak dalam memberikan perlindungan bagi karya intelektual yang bersangkutan secara lebih jelas.

Adapun ketentuan-ketentuan baru yang dimuat dalam undang-undang hak cipta 2002 tersebut antara lain meliputi :

1. *database* merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi,
2. penggunaan alat apa baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik (*optical disk*) melalui media audio, media audiovisual, dan/atau secara telekomunikasi;
3. penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa;
4. penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak;
5. batas waktu proses perkara perdata di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung;
6. pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi;
7. pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi;
8. ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait;
9. ancaman pidana dan denda minimal;
10. ancaman pidana terhadap perbanyakan pengumuman Program Komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum

Perlindungan hukum di bidang hak cipta di Indonesia , di samping diatur di dalam undang-undang hak cipta seperti telah diuraikan di atas, dilengkapi pula peraturan pelaksanaannya, yaitu

1. ***Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah***

**Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Dewan Hak Cipta;**

- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan;**
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1988 tentang Pengesahan Persetujuan mengenai Perlindungan Hak Cipta atas Rekaman Suara antara Republik Indonesia dengan Masyarakat Eropa;**
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan mengenai Perlindungan Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat;**
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan mengenai Perlindungan dan Penegakan Hukum Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Australia;**
- 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan mengenai Perlindungan Hak Cipta antara Republik Indonesia dan Inggris;**
- 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Bern (Bern Convention for The Protection of Literary and Artistic Works);**
- 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty;**
- 9. Peraturan Menteri kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Hak Cipta;**

10. Keputusan Menteri kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04.PW.07.03 Tahun 1988 tentang Penyidik Hak Cipta;
11. Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1990 tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak Cipta;
12. Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02.HC.03.01 Tahun 1991 tentang Kewajiban Melampirkan NPWP dalam Permohonan Pendaftaran Ciptaan dan Pencatatan Pemindahan Hak Cipta Terdaftar.

### 3. Pengaruh Perjanjian TRIP's terhadap Pengaturan Hak Cipta di Indonesia.

Di tingkat internasional, perjanjian multilateral yang terbaru di bidang hak kekayaan intelektual khususnya di bidang hak cipta adalah perjanjian mengenai aspek-aspek dagang dari pada hak kekayaan intelektual termasuk perdagangan barang-barang tiruan (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeit Goods* atau TRIP's). Perjanjian multilateral tersebut dikelola oleh badan perdagangan dunia atau *World Trade Organization* yang semula disebut *Multilateral Trade Organization*. Badan ini dibentuk berdasarkan salah satu persetujuan dalam paket persetujuan umum tentang perdagangan dan tarif (*General Agreement on Tariff and Trade/GATT*)<sup>69</sup> di mana persetujuan umum tentang tarif dan

<sup>69</sup> Sudargo Gautama, Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual., resco, bandung 1990, hlm.18, menyebutkan Bahwa :  
Dengan adanya desakan negara maju, maka masalah perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dimasukkan ke dalam kerangka GATT yang telah disepakati pada bulan Desember tahun 1993.

perdagangan tersebut bertujuan menciptakan perdagangan bebas, perlakuan yang sama dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan manusia.

Di dalam persetujuan TRIP's dimuat norma-norma dan standar perlindungan bagi karya intelektual manusia dan menetapkan perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual sebagai dasar. Di samping itu persetujuan tersebut mengatur pula aturan pelaksanaan penegakan hukum di bidang hak kekayaan intelektual secara ketat. Oleh karena itu sebagai negara pihak penandatangan persetujuan Uruguay, Indonesia telah meratifikasi paket persetujuan tersebut dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tanggal 2 Nopember 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*).

Sebagai konsekuensi dari telah diratifikasinya persetujuan Uruguay tersebut, termasuk di dalamnya perjanjian mengenai aspek-aspek dagang dari pada hak kekayaan intelektual dan barang-barang tiruan, maka

---

GATT GATT merupakan forum utama perundingan perdagangan internasional yang bentuk pada tahun 1947 dan pada persiapan putaran Uruguay masalah utama yang dibicarakan adalah masalah pengaturan HKI yang sesungguhnya telah ddiwadai oleh WIPO. Di dalam perundingan Uruguay tersebut negara-negara berkembang memegang pendirian bahwa pengaturan perlindungan HKI agar tetap di berada di bawah WIPO dan tidak dikaitkan dengan perdagangan yang dinaungi oleh GATT. Menurut negara berkembang GATT tidak berkompeten dan tidak mempunyai pengalaman untuk menentukan apakah suatu barang dianggap mengandung unsur peniruan atau tidak, tetapi WIPO mempunyai mekanisme bagi perlindungan HKI. Sebaliknya pihak-pihak negara maju berpendirian bahwa sebaiknya GATT yang mengatur masalah-masalah perdagangan juga merundingkan masalah perdagangan juga merundingkan masalah perdagangan yang berkaitan dengan HKI, sehingga perlu ada suatu perjanjian Multilateral untuk menghindarkan tiap negara secara sepihak mengambil tindakan-tindakan pembalasan terhadap dikurangnya hak kekayaan intelektual negara-negara mereka.

Indonesia harus melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta yang sesuai dengan standar yang ditentukan di dalam TRIP's.

Dengan ditematkannya perjanjian internasional di bidang Hak Cipta sebagai pedoman, maka pada dasarnya TRIP's bukan merupakan peraturan tunggal dan mandiri yang mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perlindungan HKI, tetapi TRIP's mempunyai keterkaitan yang erat dengan konvensi-konvensi dan perjanjian yang sudah ada yang berada di bawah administrasi WIPO, juga dalam hal tertentu membuat ketentuan-ketentuan standar pengaturannya. Dengan demikian WIPO harus tetap di pandang sebagai organisasi internasional yang bersifat publik. Karena itu sepanjang mengenai *basic prinsip* dari HKI harus diatur dalam konvensi-konvensi internasional di bawah WIPO, hal ini di dalam rangka mengakomodasi pandangan negara berkembang yang menghendaki agar standar minimum HKI di atur oleh WIPO.

Ketentuan-ketentuan TRIP's yang mengatur masalah-masalah hak cipta adalah sebagai berikut :

Menempatkan konvensi Bern 1971 sebagai standar pengaturan yang harus diikuti oleh semua negara peserta.

- a. Para peserta wajib memenuhi pasal 1 – 21 dan appendix Konvensi Bern 1971 ( pasal 9 ayat 1 TRIP's);



- b. Perlindungan hak cipta hanya berlaku terhadap hak-hak yang diungkapkan dan tidak terhadap ide, prosedur, metode operasi atau konsep matematika (pasal 9 ayat 2 TRIP's);
- c. Program komputer baik dalam bentuk bahan maupun objek harus dilindungi sebagai karya sastra berdasarkan konvensi Bern 1971 (pasal 10 ayat 1);
- d. Kompilasi Data atau bahan lain, baik berbentuk mesin yang dapat dibaca atau bentuk lainnya, yang karena melalui seleksi atau penyusunan isinya menunjukkan adanya kreasi intelektual harus dilindungi sebagai karya cipta. Perlindungan demikian tidak berlaku terhadap data atau bahannya sendiri, tanpa mengabaikan hak cipta yang melekat dalam data atau bahan itu sendiri;
- e. Untuk program komputer dan karya sinematografi, anggota akan memberikan izin atau melarang penyewaan komersial kepada masyarakat umum atas karya hak cipta yang aslinya atau salinannya, (pasal 11);
- f. Jangka waktu perlindungan terhadap suatu karya yang bukan karya sinematografi atau karya seni terapan dihitung berdasarkan usia orang., jangka waktu itu tidak boleh kurang dari 50 tahun sejak akhir tahun kalender publikasi resmi atau jika tidak ada publikasi resmi di dalam 50 tahun sejak karya itu dibuat, 50 tahun kalender karya itu dibuat;
- g. Mengatur perlindungan terhadap artis (Performer), Producer of Phonogram (Produser rekaman) dan organisasi siaran.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan TRIP's tersebut serta mengingat Indonesia telah menerima dalam keikutsertaan dalam persetujuan tentang aspek-aspek dagang hak kekayaan intelektual dan sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam TRIP's , khususnya dalam ketentuan umum pasal 1 ayat (1), yaitu anggota akan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian TRIP's dan anggota bebas untuk menentukan cara yang sesuai untuk memasukkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini ke dalam sistem dan praktek hukum masing-masing, maka untuk melaksanakan kewajiban tersebut Indonesia telah menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang Hak Cipta.

Di samping penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan TRIP's ke dalam hukum positif, yang perlu dilakukan adalah peningkatan usaha untuk lebih menanamkan pemahaman masyarakat mengenai hak cipta kepada para penegak hukum dan aparat pemerintah pada umumnya. Selain daripada itu sudah barang tentu pembangunan aspek administrasi yang mendukungnya terutama peningkatan tata kerja dan kualitas pelayanan oleh Direktorat jenderal Hak kekayaan Intelektual harus terus dilakukan dan bahkan dipercepat.

Adapun penyesuaian peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta yang telah dilakukan oleh Indonesia adalah diubahnya Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, yang antara lain meliputi materi :

- a. berupa penyempurnaan,

yang mencakup ketentuan-ketentuan perlindungan terhadap ciptaan yang tidak diketahui penciptanya, pengecualian pelanggaran terhadap hak cipta, jangka waktu perlindungan ciptaan, hak dan wewenang menggugat dan ketentuan mengenai PPNS;

b. Penambahan, yang meliputi ketentuan mengenai :

- Penyewaan ciptaan (*rental rights*) bagi pemegang hak cipta atas rekaman Video, film dan program komputer;
- Hak yang berkaitan dengan hak cipta (*Neighboring rights*) yang meliputi perlindungan bagi pelaku, produser rekaman dan organisasi siaran;

c. Pengaturan baru mengenai lisensi hak cipta.

Setelah Undang-undang Nomor 12 tahun 1997 diberlakukan, masih dirasa kurang mampu mengakomodasi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh TRIP's Agreement, oleh karena itu Pemerintah Indonesia melakukan upaya penyesuaian terhadap perjanjian internasional tersebut, dengan mengundangkan Undang-undang baru di bidang hak cipta pada tanggal 29 Juli 2002, yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang ditunda selama 12 bulan masa berlakunya. Hal ini dimaksudkan agar undang-undang tersebut dapat disosialisasikan terutama kepada pihak-pihak yang terkait dengan Hak Cipta, misalnya perguruan tinggi, asosiasi-asosiasi di bidang Hak Cipta dan lain-lain.

Di dalam undang-undang baru tersebut, memuat ketentuan-ketentuan sebagaimana dikehendaki oleh TRIP's Agreement, antara lain menyangkut masalah *database* , database ini merupakan ciptaan baru yang dilindungi di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Di samping itu ketentuan-ketentuan baru yang dimuat dalam Undang-undang tersebut, meliputi :

- a. penggunaan alat apa pun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik (*optical disk*) melalui media audio, media audiovisual, dan/atau secara telekomunikasi;
- b. penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa;
- c. penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak;
- d. batas waktu proses perkara perdata di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung;
- e. pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi;
- f. pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi;
- g. ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait;
- h. ancaman pidana dan denda minimal;
- i. ancaman pidana terhadap perbanyakan pengumuman Program Komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum

## C. Lisensi Hak Cipta

### 1. Pengaturan dan Pengertian Lisensi

Disamping pengertian Hak Cipta dan Hak Yang Berkaitan dengan Hak Cipta, di sini perlu juga diberikan uraian tentang pengertian Lisensi. Istilah lisensi diambil dari bahasa Inggris yang berasal dari kata *License* yang artinya surat ijin. Pengertian Lisensi menurut WIPO adalah :<sup>70</sup>

***"A License Agreement in general terms, an agreement whereby the licensor, for an agreed upon remuneration grants to the licensee certain right with respect to the Intellectual Property"***

***"The licensee is a legal agreement between two parties that sets out the privileges exchanged between the parties and the limitations (acceptable under law placed on them in the exercise of these principle."***

Gunawan Widjaya<sup>71</sup> menuliskan pengertian lisensi yang diambil dari Black's Law Dictionary, bahwa *Licensing* adalah :

***The sale of license permitting the use of patents, trademark, or the technology to another firm.***

Atau dapat dikatakan bahwa lisensi merupakan hak privilege yang bersifat komersial, dalam arti kata memberikan hak dan kewenangan untuk memanfaatkan hak kekayaan intelektualnya yang dilindungi secara ekonomis. Apabila dibandingkan dengan pengertian lain tentang lisensi, sebagaimana yang dirumuskan dalam Law Dictionary karya PH Collin, pengertian lisensi didefinisikan :

<sup>70</sup> Wipo, licensing Guide for Development Countries, Genewa : WIPO Publication, 1977.

<sup>71</sup> Gunawan Widjaja, Lisensi, Seri Hukum Bisnis, PT. Raja Grafindo Persada, 2001 hal.7

***Official document which allows someone to do something or to use something dan Permission given by someone to do something which would otherwise be illegal.***

Rumusan tersebut lebih menekankan pada pemberian ijin yang dituangkan dalam perjanjian tertulis atau dalam bentuk dokumen untuk melakukan sesuatu atau untuk memanfaatkan sesuatu dan apabila penggunaan tersebut tanpa ijin, maka hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum.

Lebih lanjut Betsy Ann Toffler dan Jane Imber dalam *Dictionary of Marketing Terms*, memberikan definisi lisensi sebagai berikut :

***Contractual agreement between two business entities in which licensor permits the licensee to use a brand name, patent, or other proprietary right, in exchange for a fee or royalty.***

***Licensing enables the licensor to profit from the skills, expansion capital, or other capacity of the licensee.***

***Licensing is often used by manufacturers to enter foreign markets in which they have no expertise.***

***The licensee benefits from the NAME RECOGNITION and creativity of the licensor.***

Menurut Gunawan Widjaya bahwa pengertian lisensi lebih lanjut senantiasa melibatkan suatu bentuk perjanjian (kontrak tertulis) dari pemberi lisensi dan penerima lisensi . Perjanjian ini sekaligus berfungsi sebagai dan merupakan bukti pemberian ijin dari pemberi lisensi kepada penerima lisensi untuk menggunakan hak kekayaan intelektual. Pemberian hak untuk menggunakan Hak atas kekayaan Intelektual ini disertai dengan imbalan

dalam bentuk pembayaran royalty oleh penerima lisensi kepada pemberi lisensi. Rumusan tersebut melihat dua sisi keuntungan yang diperoleh, baik dari sisi pemberi lisensi maupun penerima lisensi. Bagi pemberi lisensi, dikatakan bahwa lisensi memungkinkan pemberi lisensi memperoleh manfaat dari keahlian, modal dan kemampuan penerima lisensi, sebagai mitra usaha yang mengembangkan usaha yang dimiliki oleh pemberi lisensi. Selanjutnya penerima lisensi dapat memanfaatkan nama besar pemberi lisensi serta Hak atas Kekayaan Intelektual dan kreatifitas pemberi lisensi, tanpa penerima lisensi sendiri harus mengembangkannya dari awal.

Berdasarkan Undang-undang Hak Cipta Lithuania Bab I Ketentuan

Umum angka 19 disebutkan bahwa <sup>72</sup> "License" means :

**The permission of the author or his successor in title, or the owner of related rights (Licensor) granting to the user of the work or the object of related rights (licensee) the right to exploit the original or copies of the work or the object of related rights (license matter) within the specified territory in the way and under the conditions agreed upon in the copyrights licensing agreement. Licenses may be either exclusive or non-exclusive. A non-exclusive license means that the licensor grants the right to the licensee to use the license matter while retaining the right to grant such right to other licenses, too, and exploit the license matter himself. An Exclusive license means that the licensor, upon granting the right to the licensee to exploit the license matter, loses the right to grant similar licenses to other persons and has no right himself to exploit the protected subject matter with regard to the rights transferred to the licensee.**

---

<sup>72</sup> Lithuania, Law on Copyright and Related Rights (No.VIII-1185 of May 18, 1999, as amended by Law No.VIII-1886, of July 20, 2000)

Di dalam perundang-undangan bidang Hak Kekayaan Intelektual, masing-masing memberikan pengertian Lisensi sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang diatur dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka (5), menyebutkan :

**“Lisensi” adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Rahasia Dagang yang diberi perlindungan dalam jangka tertentu dan syarat tertentu**

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri diatur dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka (11), menyebutkan :

**“Lisensi” adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Desain Industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Industri yang diberi perlindungan dalam jangka tertentu dan syarat tertentu.**

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka (13), menyebutkan :



**“Lisensi” adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu**

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten diatur dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka (13), menyebutkan :

**“Lisensi” adalah izin yang diberikan oleh pemegang Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.**

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek diatur dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka (13), menyebutkan :

**“Lisensi” adalah izin yang diberikan oleh Pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.**

6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta diatur dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka (14), menyebutkan :

**Lisensi” adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk**

mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu

## 2. Jenis-Jenis Lisensi

Dari berbagai kepustakaan dapat diketahui bahwa ada dua macam lisensi yang dikenal dalam praktek pemberian lisensi, yaitu <sup>73</sup>

1. Lisensi Umum;
2. Lisensi paksa, lisensi wajib (*compulsory license, non voluntary license, other use without the authorization of the right holder*).

Yang dimaksud dengan lisensi umum adalah lisensi yang dikenal secara luas dalam praktek, yang melibatkan suatu bentuk negosiasi antara pemberi lisensi dan penerima lisensi.

Di dalam undang-undang hak cipta Nomor 19 tahun 2002 tidak secara tegas menyebutkan jenis-jenis lisensi, tetapi hanya dimuat suatu ketentuan-ketentuan baik mengenai lisensi wajib maupun lisensi.

Tentang Lisensi wajib tersebut diatur dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, yang antara lain menyebutkan :

- (1) Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan terhadap ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra, Menteri setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat :
  - a. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau perbanyak ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;

---

<sup>73</sup> Gunawan Widjaja, Lisensi, Seri Hukum Bisnis, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 17

- b. mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri atau melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
  - c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau memperbanyak Ciptaan tersebut dalam hal pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (2) Kewajiban untuk menerjemahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Ciptaan dibidang ilmu pengetahuan, dan sastra selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- (3) Kewajiban untuk memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah lewat jangka waktu :
- j. 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya buku dibidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;
  - k. 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang ilmu sosial dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;
  - l. 7 (tujuh) tahun sejak diumumkan buku di bidang seni dan sastra dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (4) Penerjemahan atau perbanyakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk pemakaian di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak untuk diekspor ke wilayah negara lain.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disertai pemberian imbalan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (6) Ketentuan tentang tata cara pengajuan permohonan untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pengaturan tentang lisensi wajib di dalam undang-undang hak cipta tersebut terbatas pada penerjemahan buku, dengan demikian terhadap ciptaan-ciptaan lain yang merupakan obyek hak cipta tidak dapat dilakukan lisensi wajib. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan diatur mengenai pelaksanaan dan/atau perbanyakan, penilaian tentang kepentingan dan perlunya dilakukan penerjemahan dan/atau perbanyakan, Tata Cara pemberitahuan permintaan dan pembebanan biaya serta imbalan yang harus diberikan kepada pemegang Hak Cipta.

Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut, menentukan bahwa Menteri Kehakiman setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta menetapkan besarnya imbalan yang harus diberikan kepada Pemegang Hak Cipta. Adapun besarnya imbalan dilakukan dengan memperhatikan komponen atau unsur biaya dan tata cara perhitungannya yang lazim digunakan dalam lisensi penerbitan buku.

Adapun mengenai Lisensi secara umum diatur tersendiri di dalam Bab V pasal 45, pasal 46, dan pasal 47 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Lisensi secara umum ini, di dalam buku Indonesia

Australia Specialised Training Project-Phase II disebutkan bahwa Lisensi dibagi dalam tiga macam, yaitu : <sup>74</sup>

a. Lisensi eksklusif (*Exclusive Licenses*)

Melalui perjanjian lisensi, pemegang hak cipta dapat menyerahkan/mentransfer keseluruhan atau sebagian dari hak-hak eksklusif mereka kepada orang lain. Si pemberi lisensi biasanya tidak lagi berhak mengeksploitasi/melaksanakan hak ciptanya sendiri selama jangka waktu perjanjian lisensi. Perjanjian Lisensi ini disebut lisensi khusus.

b. Lisensi tunggal (*Sole Licenses*)

Pemegang hak cipta dapat memberikan hak-haknya atas suatu karya kepada orang lain, dan tetap menahan hak-hak tersebut untuk keperluan mereka sendiri. Perjanjian lisensi semacam ini disebut lisensi tunggal.

c. Lisensi non eksklusif (*Non-Exclusive Licenses*)

Pemegang hak cipta dapat juga membuat perjanjian non-eksklusif dengan memberikan hak-haknya kepada dua pihak atau lebih atas materi hak cipta yang dimilikinya.

Pemilihan bentuk lisensi, baik lisensi eksklusif, tunggal, maupun non-eksklusif seringkali tergantung pada posisi tawar dari pemegang hak cipta dan penerima lisensi. Pemegang hak cipta dapat menyetujui penyerahan hak-haknya atas suatu karya. Penyerahan hak ini layaknya sebuah penjualan. Begitu hak-hak tersebut diserahkan, pemegang hak cipta tidak berhak lagi atas karya tersebut. Hal ini jarang terjadi karena tidak banyak

---

<sup>74</sup> Indonesia Australia Specialised Training Project Phase II, Hak Kekayaan Intelektual, Kursus singkat

pemegang hak cipta yang bersedia kehilangan kontrol atas karya mereka. Pemberian lisensi lebih umum dilakukan karena si pemegang lisensi hanya memperoleh hak-hak atas suatu karya untuk jangka waktu tertentu. Setelah jangka waktu ini berlalu, hak-hak tadi dikembalikan kepada pemilik hak cipta.

Menurut Insan Budi Maulana, bahwa lisensi itu dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu :<sup>75</sup> lisensi secara eksklusif dan lisensi non eksklusif. Kedua jenis lisensi tersebut mempunyai karakteristik khusus tersendiri. Undang-undang paten Amerika mempunyai pengertian tersendiri mengenai perjanjian lisensi paten secara eksklusif, yaitu suatu perjanjian lisensi eksklusif yang hanya sekedar menambahkan janji lebih lanjut dari pemberi lisensi untuk tidak mengadakan perjanjian yang serupa dengan pihak lain manapun, atau memaksakan hak untuk menggunakan paten atas namanya sendiri. Dan pemberian lisensi eksklusif, secara implikasi melarang pemberi lisensi untuk memberi lisensi-lisensi lain. Juga penerima lisensi eksklusif dapat mengajukan tuntutan hukum atas nama pemberi lisensi tanpa memerlukan izin dari pemberi lisensi. Selain itu, seorang penerima lisensi eksklusif dapat mengadakan perjanjian sub-lisensi dengan pihak ketiga.

Dalam hal perjanjian lisensi paten non eksklusif, penerima lisensi tidak mempunyai hak terhadap pihak ketiga, dan penerima lisensi tidak dapat mengadakan perjanjian sub-lisensi. Perjanjian lisensi secara non eksklusif tidak mempunyai dasar undang-undang dan hanya merupakan kebebasan

---

khusus Hak Cipta, 2002, hal. 60

terhadap pemilik paten untuk mengadakan perjanjian lisensi seperti tersebut di atas, selain itu pemilik paten atau pemegang paten yang mengadakan perjanjian lisensi non eksklusif tetap dapat dengan bebas memberikan atau mengadakan perjanjian lisensi kepada pihak-pihak lain, apabila ketentuan larangan untuk mengadakan perjanjian itu tidak dicantumkan pada perjanjian lisensi paten non eksklusif sebelumnya.. Kemudian hak untuk mengadakan tuntutan apabila terjadi pelanggaran paten tetap berada pada pemberi lisensi dan penerima lisensi harus menyampaikan harus menyampaikan informasi mengenai adanya pelanggaran paten itu kepada pemberi lisensi. Hak untuk melakukan tuntutan dapat dilakukan oleh penerima lisensi apabila pemberi lisensi memberikan kewenangan untuk melakukannya.

Menurut Gunawan Widjaja<sup>76</sup>, bahwa suatu lisensi dikatakan bersifat eksklusif, jika lisensi tersebut diberikan dengan kewenangan penuh untuk melaksanakan, memanfaatkan atau mempergunakan hak atas kekayaan intelektual yang diberikan perlindungan oleh negara. Eksklusifitas itu sendiri tidaklah bersifat absolut atau mutlak, melainkan juga dibatasi oleh berbagai hal, misalnya hanya diberikan untuk suatu jangka waktu tertentu, wilayah tertentu, atau produk tertentu dengan proses tertentu. Selanjutnya pemberian lisensi yang tidak memberikan kewenangan penuh di sebut juga dengan *non-exclusive*.

---

<sup>75</sup> Insan Budi Maulana, *Lisensi Paten*, hal. 9

<sup>76</sup> Gunawan Widjaja, *loc cit*, hlm. 21

Dalam prakteknya jarang sekali ditemui pemberian lisensi yang eksklusif, dan jikalau pemberian lisensi tersebut eksklusif biasanya pemberian lisensi masih dikaitkan dengan *time exclusivity*, *territorial exclusivity*, atau *product exclusivity*, seperti disebutkan di atas.

### **3. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Lisensi**

Hak dan kewajiban pemberi dan penerima lisensi ini dituangkan dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Hak dan kewajiban tersebut antara lain dapat digambarkan sebagai berikut :

#### **Kewajiban pemberi lisensi meliputi :**

- a. memberikan segala macam informasi yang berhubungan dengan hak cipta yang dilisensikan, yang diperlukan oleh penerima lisensi untuk melaksanakan lisensi yang diberikan tersebut;
- b. memberikan bantuan pada penerima lisensi cara pemanfaatan dan atau penggunaan hak cipta yang dilisensikan tersebut;

#### **Hak Pemberi Lisensi, meliputi :**

- a. melakukan pengawasan jalannya pelaksanaan dan penggunaan atau pemanfaatan lisensi oleh penerima lisensi;
- b. memperoleh laporan-laporan secara berkala atas jalannya kegiatan usaha penerima lisensi yang mempergunakan hak cipta yang dilisensikan;
- c. melaksanakan inspeksi pada daerah kerja penerima lisensi guna memastikan bahwa hak cipta yang dilisensikan telah dilaksanakan sebagai mestinya;



- d. mewajibkan penerima lisensi, dalam hal tertentu, untuk membeli barang-barang lainnya dari pemberi lisensi;
- e. mewajibkan penerima lisensi untuk menjaga kerahasiaan hak cipta yang dilisensikan;
- f. mewajibkan agar penerima lisensi tidak melakukan kegiatan yang sejenis, serupa, ataupun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dengan kegiatan usaha yang mempergunakan hak cipta yang dilisensikan;
- g. menerima pembayaran royalti dalam bentuk, jenis dan jumlah yang dianggap layak olehnya;
- h. meminta dilakukannya pendaftaran atas lisensi yang diberikan kepada penerima lisensi;
- i. atas pengakiran lisensi, meminta kepada penerima lisensi untuk mengembalikan seluruh data, informasi maupun keterangan yang diperoleh penerima lisensi selama masa pelaksanaan lisensi;
- j. atas pengakiran lisensi, melarang penerima lisensi untuk memanfaatkan lebih lanjut seluruh data, informasi maupun keterangan yang diperoleh penerima lisensi selama masa pelaksanaan lisensi ;
- k. atas pengakiran lisensi, melarang penerima lisensi untuk tetap melakukan kegiatan yang sejenis, serupa ataupun yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan dengan mempergunakan hak cipta yang dilisensikan;
- l. Pemberian lisensi tidak menghapuskan hak pemberi lisensi untuk tetap memanfaatkan, menggunakan atau melaksanakan sendiri hak cipta yang dilisensikan tersebut.

**Kewajiban Penerima Lisensi adalah :**

- a. melaksanakan seluruh seluruh instruksi yang diberikan oleh pemberi lisensi kepadanya guna melaksanakan hak cipta yang dilisensikan;

- b. memberikan keleluasaan bagi pemberi lisensi untuk melakukan pengawasan maupun inspeksi berkala maupun secara tiba-tiba, guna memastikan bahwa penerima lisensi telah melaksanakan hak cipta yang dilisensikan dengan baik;
- c. memberikan laporan-laporan baik secara berkala maupun atas permintaan khusus dari pemberi lisensi;
- d. menjaga kerahasiaan atas hak cipta yang dilisensikan, baik selama maupun setelah berakhirnya masa pemberian lisensi;
- e. melaporkan segala pelanggaran hak cipta yang ditemukan dalam praktek;
- f. tidak memanfaatkan hak cipta yang dilisensikan selain dengan tujuan untuk melaksanakan lisensi yang diberikan;
- g. melakukan pendaftaran lisensi bagi kepentingan pemberi lisensi dan jalannya pemberian lisensi tersebut;
- h. tidak melakukan kegiatan yang sejenis, serupa, ataupun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan dengan kegiatan usahayang mempergunakan hak cipta yang dilisensikan;
- i. melakukan pembayaran royalty dalam bentuk,jenis dan jumlah yang telah disepakati secara bersama;
- j. atas pengakhiran lisensi, tidak memanfaatkan lebih lanjut seluruh data, informasi maupun keterangan yang diperoleh oleh penerima lisensi selama masa pelaksanaan lisensi;

**Hak Penerima Lisensi :**

- a. memperoleh segala macam informasi yang berhubungan dengan hak cipta yang dilisensikan, yang diperlukan olehnya untuk melaksanakan lisensi yang diberikan;
- b. memperoleh bantuan dari pemberi lisensi atas segala macam cara pemanfaatan dan atau penggunaan hak cipta yang dilisensikan.

#### 4. Lisensi Sebagai Bentuk Perjanjian

Peralihan hak cipta khususnya melalui Lisensi, pada dasarnya adalah merupakan suatu izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada penerima lisensi dengan suatu imbalan tertentu yang dilakukan melalui suatu perjanjian (kontrak tertulis). Perjanjian ini berfungsi sebagai dan merupakan bukti pemberian izin untuk mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan.

Ditinjau dari makna perjanjian secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian lisensi itu termasuk dalam jenis perjanjian timbal balik. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1313 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti<sup>77</sup> memberikan pengertian tentang perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Demikian pula Rinitami Njatrijani<sup>78</sup> memberikan pengertian mengenai kontrak atau perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih yang melahirkan suatu kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal.

---

<sup>77</sup> Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, 1987, cetakan ke-11, PT. Intermasa, Jakarta, Hlm. 1

<sup>78</sup> Rinitami Njatrijani, *Pembangunan Hukum dalam Rangka Menuju Era Industrialisasi (Khususnya Bidang Hukum Kontrak)*, yang dimuat dalam Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang berjudul Masalah-masalah Hukum Edisi IV/Januari-Maret 1999.

Dari rumusan yang ada dalam pasal 1313 KUH Perdata dan rumusan Rinitami Njatrijani mengandung makna bahwa dari suatu perjanjian timbul suatu kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih pihak (orang) kepada satu atau lebih pihak (orang) lainnya. Adapun peristiwa yang disebutkan oleh Subekti dalam pengertian perjanjian tersebut, akan menimbulkan suatu hubungan antara dua orang yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menimbulkan perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau di tulis.

Suatu perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian mempunyai dua sudut : sudut kewajiban-kewajiban yang dipikul oleh suatu pihak dan sudut hak-hak atau manfaat yang diperoleh oleh lain pihak, yaitu hak-hak untuk menuntut dilaksanakannya sesuatu yang disanggupi dalam perjanjian. Perkataan mengikatkan diri ditujukan pada sudut kewajiban-kewajiban, sedangkan perkataan minta ditetapkan suatu janji ditujukan pada sudut hak-hak yang diperoleh dari perjanjian.<sup>79</sup>

Didasarkan pada hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian, maka perjanjian Lisensi itu merupakan perjanjian timbal balik, di mana para pihak yang melakukan perjanjian dalam posisi yang seimbang, baik menyangkut hak-hak maupun kewajiban-kewajiban. Menurut Satrio<sup>80</sup>,

---

<sup>79</sup> Subekti., *Hukum Perjanjian*, Penerbit Intermasa, Cet. 17, Jakarta 1998, hlm.29

<sup>80</sup> Satrio J., *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Buku I, 2001, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, hlm 43.

bahwa perjanjian timbal balik sering kali disebut sebagai perjanjian bilateral (perjanjian dua pihak). Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban-kewajiban (dan karenanya hak juga) kepada kedua belah pihak, dan hak dan kewajiban itu mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Hak dan kewajiban harus seimbang. Yang termasuk dalam perjanjian timbal balik adalah perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, perjanjian lisensi dan sebagainya.

Pengaturan Lisensi sebagai bentuk perjanjian atau kontrak, tidak secara khusus diatur di dalam sistem hukum perdata di Indonesia<sup>81</sup>. Namun,

---

Bandingkan dengan Subekti, ibid hal. 29, yang menyebutkan :

Lazimnya suatu perjanjian adalah timbal balik atau bilateral, artinya suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu, juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikannya dari hak-hak yang diperolehnya, dan sebaliknya suatu pihak yang memiliki kewajiban-kewajiban juga memperoleh hak-hak yang dianggap sebagai kebalikannya kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya itu. Apabila tidak demikian halnya, yaitu apabila pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu tidak dibebani dengan kewajiban-kewajiban sebagai kebalikannya dari hak-hak itu, atau apabila pihak yang menerima kewajiban-kewajiban tidak memperoleh hak-hak sebagai kebalikannya maka perjanjian yang demikian itu adalah unilateral atau sepihak.

<sup>81</sup> Bandingkan dengan : Munir Fuady.,SH.,MH.,LLM, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1999, hlm. 16, yang menyebutkan Bahwa : Disamping kontrak-kontrak tertentu yang disebutkan dalam KUH Perdata seperti kontrak jual-beli, tukar menukar dan lain-lain, masih banyak kontrak-kontrak tertentu lain yang tidak termasuk ke dalam kontrak-kontrak tertentu versi KUH Perdata, misalnya kontrak leasing, franchise, lisensi, sewa-beli dan lain-lain.

Bandingkan juga dengan Rinitami Njatrijani, ibid hal. 39, yang menyebutkan bahwa : Bila dilihat dari jumlah pasalnya, menimbulkan kesan seolah-olah perangkat hukum tentang kontrak pada khususnya dan perikatan pada umumnya sudah lengkap, pada hal justru sebaliknya yang terjadi. Dalam KUHPerdata khususnya bagian tentang hukum kontrak, tidak akan ditemukan ketentuan tentang misalnya kontrak baku, tying contract, exclusive contract dan sebagainya. Kecuali itu, dalam KUH Perdata juga tidak ditemukan ketentuan-ketentuan khusus tentang jenis-jenis kontrak yang sekarang ini lazim terjadi dalam dunia bisnis, misalnya kontrak tentang leasing, licensing, franchising dan sebagainya. Biasanya para praktisi hukum dan para pengusaha selalu berlindung dibalik isi pasal 1338 KUH Perdata yang dianggap sebagai refleksi dari prinsip kebebasan berkontrak untuk mengesahkan semua jenis kontrak-kontrak baru yang dibuatnya. Namun sayangnya pasal 1338 KUH Perdata tersebut tidak diimbangi dengan pasal-pasal yang mengatur pemakaian prinsip kebebasan berkontrak, akibatnya banyak terjadi kontrak-kontrak bisnis yang merugikan kepentingan umum dan merugikan prinsip keadilan.

Pengaturan perjanjian atau kontrak secara umum di dalam sistem hukum perdata di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu dalam Buku III dari pasal 1233 sampai dengan pasal 1864. Tidak diaturnya perjanjian lisensi dalam sistem hukum perdata di Indonesia, maka dalam perkembangannya, lisensi hak cipta masuk dalam kelompok kontrak-kontrak transaksi bisnis.

Menurut Munir Fuady<sup>82</sup>, bahwa kerjasama bisnis secara kontraktual merupakan suatu bentuk kerjasama yang berlandaskan atas kontrak-kontrak yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dalam praktek nasional maupun internasional, kontrak-kontrak yang melandasi kerjasama untuk perluasan bisnis tersebut sangat banyak macamnya. Diantaranya yang paling sering digunakan adalah kontrak lisensi, kontrak *franchise*, kontrak distribusi, kontrak agensi dan kontrak-kontrak lainnya.

Lisensi itu sendiri merupakan suatu proses dimana pemilik dari suatu hak milik intelektual, yaitu *licensor*, memberikan keizinan kepada pihak lain, yaitu *licensee* untuk memakai hak milik intelektual dimaksud, dengan imbalan pembayaran *royalty* kepada *licensor*. Hak milik Intelektual yang dapat dilisensikan dapat berupa paten, merek, hak cipta, atau rahasia dagang yang tidak dipatenkan.

---

<sup>82</sup> Munir Fuady, SH., MH., LLM., *ibid*, hlm. 173

Dalam transaksi bisnis tersebut Erman Rajaguguk<sup>83</sup>, mengemukakan bahwa banyak masalah-masalah hukum dalam transaksi bisnis internasional tidak jauh berbeda dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh para pihak dalam transaksi bisnis domestik. Namun demikian terdapat beberapa masalah yang unik dalam transaksi bisnis internasional yang semakin berkembang pada era perdagangan bebas. Masalah-masalah pada umumnya timbul karena resiko-resiko tambahan tertentu dan karena adanya penerapan peraturan hukum yang berbeda.

Peran hukum kontrak<sup>84</sup> dalam perdagangan bebas tidak hanya bergantung kepada harmonisasi dan standarisasi berbagai aturan dan praktek, tetapi keberhasilan kontrak tersebut bergantung pula kepada budaya hukum masing-masing pihak terutama antara Barat dan Timur. Masyarakat Barat terutama Amerika Serikat, memandang hukum itu sebagai *rights* (hak), sehingga menegakkan hukum kontrak adalah menegakkan hak, yang merupakan kewajiban bagi pihak lain. Kontrak adalah dokumen hukum. Jika timbul sengketa para pihak harus kembali kepada kontrak yang tertulis. Masyarakat Timur, seperti Cina, Jepang dan Korea secara tradisional

---

<sup>83</sup> Erman Rajaguguk., *Peran Hukum Kontrak Internasional dalam Perdagangan Bebas.*, Makalah disampaikan pada Seminar tentang kesiapan hukum nasional menghadapi perdagangan bebas, Jakarta 5 Maret 1997.

<sup>84</sup> Bandingkan dengan Rinitami Njatrijani, op cit, hlm. 34, menyebutkan bahwa :  
Hukum kontrak merupakan suatu pranata hukum yang mempunyai peran amat penting dalam kegiatan bisnis modern, tetapi dalam praktek ditemukan kontrak-kontrak bisnis yang mengganggu kepentingan dan mengganggu ketertiban umum sebagai legalisasi dari tindakan para pengusaha yang melakukan prinsip unfair competition. Kontrak dan praktek bisnis semacam itu tidak saja merugikan pihak-pihak yang secara langsung berhubungan dengan praktek tersebut dan bahkan

menganggap hukum itu *order* (perintah) dari penguasa untuk menjaga ketertiban.

Walaupun tidak secara khusus diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, namun agar suatu kontrak atau perjanjian lisensi oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak, maka kontrak tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat sahnya kontrak tersebut dapat digolongkan sebagai berikut :

(1) Syarat sah umum

(a) Syarat sah umum berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, yang terdiri :

- (i) Kesepakatan kehendak;
- (ii) Wewenang berbuat;
- (iii) Perihal tertentu;
- (iv) Kuasa yang legal.

(b) Syarat sah umum berdasarkan pasal 1338 dan 1339

KUH Per yang terdiri :

- (i) Syarat itikad baik;
- (ii) Syarat sesuai dengan kebiasaan
- (iii) Syarat sesuai dengan kepatutan;
- (iv) Syarat sesuai dengan kepentingan umum

(2) Syarat sah yang khusus, yang terdiri :

- (a) syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu;
- (b) Syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu;

---

merugikan masyarakat secara umum, sehingga dapat mengganggu ketertiban, kesejahteraan dan



- (c) Syarat akta pejabat tertentu (yang bukan notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu;
- (d) Syarat izin dari yang berwenang.

Keseimbangan para pihak yang melakukan perjanjian lisensi yang dituangkan dalam kontrak merupakan konsep dasar yang tidak dapat ditawar, meski pada dasarnya para pihak mempunyai kebebasan dalam berkontrak. Karena itu dalam diri para pihak yang melakukan perjanjian yang dituangkan dalam kontrak harus terdapat pemahaman dan penghormatan terhadap hak masing-masing. Konsep keseimbangan “yin” dan “yang” dalam filosofi Cina atau mengambil konsep Jawa sebagaimana terpancar dari mutiara kata pujangga R.M. Sosrokartono, “Nglurug tanpo bolo, sugih tanpo bondo, menang tanpo ngasorake”, kiranya dapat dipahami sebagai pondasi hubungan para pihak yang bermakna win-win solution.<sup>85</sup>

Pola interaksi yang selama ini berkembang di masyarakat sehubungan dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak, di mana dalam berkontrak para pihak hadapkan sebagai “lawan kontrak”, adalah pola pikir yang harus dihilangkan, khususnya dalam dunia bisnis. Pemikiran “lawan kontrak” pada

---

kepentingan umum.

<sup>85</sup> Agus Yudha Hernoko., *Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Standar (Pengembangan Konsep Win-win Solution sebagai Alternatif Baru dalam Kontrak Bisnis)*, diedit oleh Dr. Sarwirini, SH., MS dan L. Budi Kagramanto, SH, MH., MM dalam *Puspa Ragam Informasi dan Problematika Hukum*, Penerbit Karya Abditama, Surabaya 2000, hal.99.

Agus Yudha Hernoko, menyebutkan bahwa : Untaian kata mutiara yang sarat makna filosofis tersebut, terutama “menang tan ngasorake” merupakan embrio moralitas konsep win-win solution yang seharusnya senantiasa membingkai pemahaman para pihak dalam berkontrak, artinya tidak ada sikap atau pikiran untuk menang sendiri. Dalam mutiara kata itu tersimpul pesan bahwa dalam berkontrak senantiasa diarahkan pada keseimbangan, tidak ada kalah menang, tapi semuanya adalah pemenang dalam kemitraan para pihak.

dasarnya secara psikis (sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja) akan mewarnai pola pikir, sikap dan tindakan para pihak yang kesemuanya itu muncul, berkembang dan tertuang dalam penyusunan kontrak yang mereka buat. Hal ini dapat dicermati dalam pola kontrak-kontrak standar yang cenderung berat sebelah.

Apa yang terjadi di lapangan merupakan konsekuensi logis dari pola pikir dan pemahaman yang salah kaprah mengenai azas kebebasan berkontrak. Sehingga dengan demikian para pihak berusaha semaksimal mungkin untuk mengamankan dirinya (menguntungkan dirinya) dalam berhadapan dengan lawan kontraknya, dan ia berusaha untuk membentengi dirinya dengan mencoba membuat kontrak yang isinya cenderung menguntungkan dirinya sendiri, tanpa menghiraukan pihak lawan, bahkan kalau perlu menjerat pihak lawan dengan klausula-klausula yang mematikan. Apabila azas kebebasan berkontrak digunakan sebagai dasar para pihak pada posisi yang seimbang, maka azas ini tidak menempatkan para pihak untuk saling berhadapan, menjatuhkan dan mematikan sebagai - lawan kontrak – justru sebaliknya azas ini menempatkan para pihak sebagai partner kontrak. Dengan demikian alangkah ideal dan mulianya apabila konsep konsep ini dapat dikembangkan diantara para pihak, sehingga akan menjadi suatu hubungan yang *simbiosis mutualisma*.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Agus Yudha Hernoko., Op cit. Hal.100.

Sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam suatu sistem, maka penerapan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara . harus juga dikaitkan dengan kerangka pemahaman pasal-pasal/ketentuan-ketentuan yang lain, seperti :

1. Pasal 1337 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum;
2. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, yang menetapkan bahwa persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik (*contractus bonafidei* – kontrak berdasarkan itikad baik). Maksudnya perjanjian itu dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Menurut *Hoge Raad*, itikad baik adalah ketentuan yang menyangkut ketertiban umum dan kesusilaan yang tidak boleh dikesampingkan oleh para pihak. Persetujuan tidak hanya ditetapkan oleh kata-kata yang dirumuskan oleh para pihak , melainkan juga oleh keadilan dan itikad baik.
3. Pasal 1339 KUHPerdara menunjuk terikatnya perjanjian kepada sifat, kebiasaan dan undang-undang. Kebiasaan yang dimaksud adalah bukan kebiasaan setempat, akan tetapi ketentuan-ketentuan yang dalam kalangan tertentu selalu diperhatikan.
4. Pasal 1347 KUHPerdara mengatur mengenai hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya disetujui untuk secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian.

#### 5. Hubungan Hukum Para Pihak

Undang-undang Hak Cipta, yakni undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7

Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, memuat beberapa ketentuan yang secara khusus mengandung unsur-unsur yang khas apabila ditinjau dari hukum perdata dan hukum dagang, antara lain mengenai :<sup>87</sup>

- ❖ Pengakuan, perolehan dan pendaftaran Hak Cipta oleh seorang pencipta;
- ❖ Peralihan Hak, hubungan hukum para pihak;
- ❖ Penyalahgunaan dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Hak Cipta sebagai benda bergerak yang pada awalnya diperoleh dan dimiliki oleh pencipta, dapat dialihkan kepada pihak-pihak lain sesuai dengan kemauan atau keinginan pencipta. Yang dianggap sebagai benda bergerak tidak lain adalah suatu ciptaan yang merupakan hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Pada setiap peralihan hak selalu melibatkan dua pokok, yaitu pihak yang mengalihkan dan pihak yang menerima peralihan. Hubungan hukum yang terjadi diantara para pihak pada dasarnya bergantung pada jenis dan sifat dari peralihan itu sendiri. Peralihan hak yang didasarkan pada alas hak pewarisan, hibah atau wasiat hanya memberikan keuntungan sepihak dari pihak penerima hak. Penerima hak dapat menikmati atas hak yang

---

<sup>87</sup> Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, DTLST & RD, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta di Indonesia*, makalah disampaikan dalam rangka Bimbingan dan Konsultasi HKI bagi para Pengusaha UKM Indag di Bandung, hlm. 18.

diperolehnya melalui berdasarkan warisan, hibah, atau wasiat. Prosedur peralihannya sendiri pada dasarnya ditentukan oleh prosedur dan persyaratan bagi suatu warisan, hibah atau wasiat.

Hubungan hukum antara pewaris atau penerima wasiat menjadi satu hubungan hukum yang sepihak dalam arti tidak ada hak dan kewajiban yang timbal balik antara para pihak, karena hak dan kewajibannya secara sepihak ditentukan oleh pewaris, pemberi hibah atau pemberi wasiat. Peralihan hak cipta karena perjanjian, biasanya atas perjanjian jual beli. Peralihan hak cipta dengan cara ini harus dilakukan secara tertulis, dengan syarat-syarat yang jelas sebagai pernyataan kata sepakat diantara para pihak. Peralihan hak karena perjanjian, melahirkan suatu hubungan hukum diantara para pihak dengan hak dan kewajiban yang seimbang, sesuai dengan syarat yang telah disepakati. Oleh karena itu di dalam akta perjanjian peralihan hak dimaksud, hendaknya diatur dengan rinci, sehingga dengan jelas segera dapat diketahui apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak antara lain .<sup>88</sup>

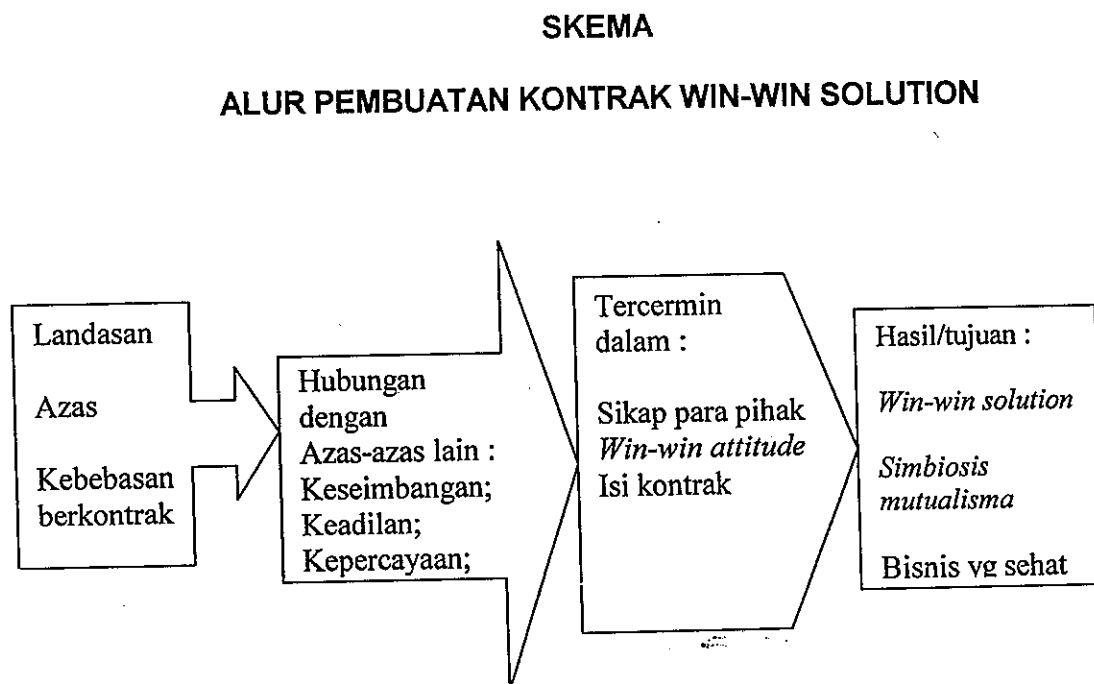
- a. Hak-hak apa saja yang diperoleh pihak yang satu terhadap pihak yang lain;
- b. Kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh pihak satu terhadap pihak yang lain;
- c. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para pihak;

---

<sup>88</sup> Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, DTLST dan RD, ibid hal. 21

d. Berapa lama perjanjian berlaku dan kapan akan diakhirinya.

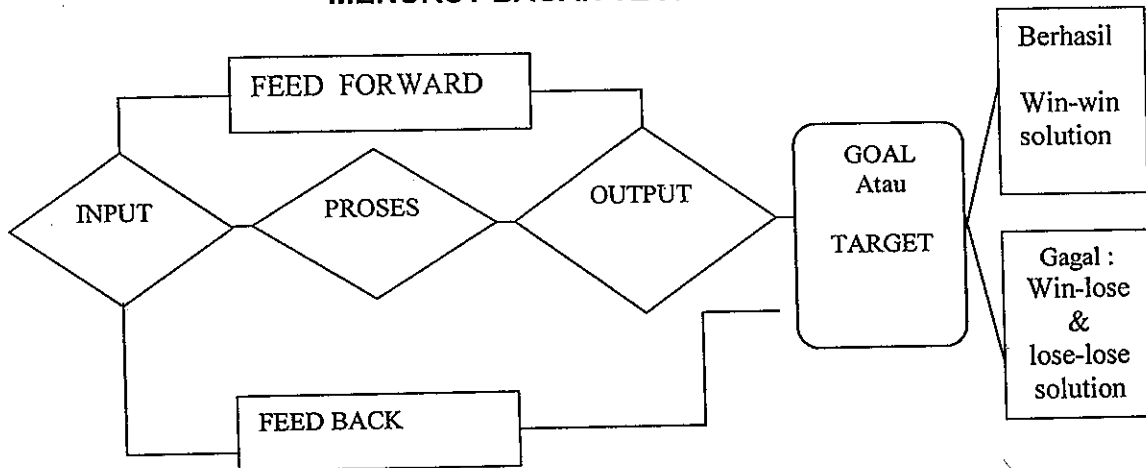
Secara sederhana dapat diuraikan alur pola hubungan para pihak dalam penyusunan kontrak yang berlandaskan pada azas kebebasan berkontrak, dimana pada akhirnya akan menghasilkan suatu kontrak "*win-win solution*" bagi para pihak, yaitu sebagai berikut :<sup>89</sup>



<sup>89</sup> Agus Yudha Hernoko, Loc Cit., hal.108

## POLA KONTRAK WIN-WIN SOLUTION

### MENURUT BAGAN TEORI SISTEM



#### Keterangan :

<b>INPUT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pelaku bisnis</li> <li>- kebutuhan/maksud para pihak</li> </ul>	
<b>PROSES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pembuatan perjanjian, mengacu pada azas kebebasan berkontrak</li> <li>- adanya unsur keseimbangan</li> <li>- adanya unsur keadilan</li> <li>- adanya unsur kepercayaan</li> <li>- etika bisnis</li> </ul>	
<b>OUTPUT</b>	Hasil kontrak	
<b>GOAL</b> atau <b>TARGET</b>	Berhasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kontrak <i>win-win solution</i></li> <li>- <i>simbiosis mutualisme</i></li> <li>- bisnis yang sehat</li> </ul>
	Gagal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kontrak <i>win-lose solution</i></li> <li>- kontrak <i>lose-lose solution</i></li> <li>- salah satu/para pihak mengalami kerugian</li> <li>- penyalahgunaan keadaan</li> </ul>
<b>FEED FORWARD</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kontrak harus mengacu azas kebebasan berkontrak</li> <li>- azas lain yang berhubungan</li> </ul>	
<b>FEED BACK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sebagai bahan evaluasi apakah kontrak itu sesuai dengan azas kebebasan berkontrak atau tidak</li> </ul>	

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan penelitian, maka bab ini akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan terhadap data yang menjadi fokus penulisan thesis. Garis besar penyajian data dan analisis data dapat dipilah menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu **pertama**, mekanisme lisensi terhadap obyek hak cipta yang berbeda meliputi mekanisme lisensi hak cipta dan pelaksanaan pembayaran royalti, **kedua**, pencatatan perjanjian lisensi dan pendaftaran hak cipta, **ketiga**, penyelesaian sengketa lisensi yang meliputi penyelesaian melalui pengadilan dan alternatif penyelesaian sengketa.

Atas dasar ketiga fokus tersebut, bagian berikut ini akan disajikan berturut-turut sesuai dengan sistematika tersebut.

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Mekanisme Lisensi Hak Cipta

###### a. Mekanisme Lisensi

Windiaprana Ramelan<sup>1</sup> Manager Lisensi Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) mengemukakan bahwa mekanisme lisensi hak cipta di bidang lagu itu meliputi :

1. *Licensing Executive* (LE) mendatangi tempat yang menggunakan musik dan mendata pemakaiannya (misalnya untuk restoran yang memakai hanya background music, dihitung jumlah kursinya);

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Windiaprana Ramelan, seorang manager lisensi di Yayasan Karya Cipta Indonesia dan secara tertulis yang bersangkutan mengirim E-mail dengan alamat pengirim [wramelan@kci.or.id](mailto:wramelan@kci.or.id) kepada penulis dengan alamat [surahno@yahoo.com](mailto:surahno@yahoo.com). pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2002.



2. LE mengirim surat standar pertama ke pimpinan tempat tersebut yang isinya menjelaskan mengenai Karya Cipta Indonesia (KCI) dan kewajiban mereka untuk memiliki lisensi dan membayar royalty. Disertakan pula formulir aplikasi lisensi.
3. *User* (pemakai) mengisi aplikasi lisensi yang diberikan dan menyerahkan kembali ke Karya Cipta Indonesia dengan data yang sesuai;
4. LE membandingkan data yang diterima dengan formulir survey yang telah dilakukan sebelumnya, jika perbedaan tidak terlalu jauh, maka proses dilanjutkan. Pada saat ini biasa juga terjadi proses negosiasi mengenai data, tariff dan pembayaran;
5. Jika telah dicapai kesepakatan, Karya Cipta Indonesia mengeluarkan *invoice*;
6. *User* (pengguna) membayarkan royalty dengan cara transfer bank kemudian mengirimkan bukti pembayaran ke karya Cipta Indonesia;
7. Jika pembayaran telah diterima, KCI mengeluarkan sertifikat Lisensi Pengumuman musik beserta perjanjian lisensi dengan masa berlaku satu tahun;
8. Satu bulan sebelum masa lisensi berakhir, LE menghubungi kembali user (pengguna) tersebut dan menanyakan apakah ada perubahan data;
9. Selanjutnya dilakukan seperti semula.

Windiprana Ramelan lebih lanjut memberikan contoh draf perjanjian yang dibuat antara Yayasan Karya Cipta Indonesia dengan PT. Indosiar Visual Mandiri dalam mengumumkan sebuah lagu atau musik yaitu sebagai berikut :

**DRAFT PERJANJIAN  
PENGUMUMAN MUSIK  
antara  
YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA  
dan  
PT. INDOSIAR VISUAL MANDIRI**

---

No: BA005/02030

Pada hari ini Jum'at tanggal satu bulan Februari tahun duaribu dua, yang bertanda tangan dibawah ini :

#### ANTARA

1. **YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta, Golden Plaza Fatmawati, Blok C-12, Jalan R.S. Fatmawati No.15, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **DAHURI, S.E.** selaku General Manager Yayasan Karya Cipta Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Karya Cipta Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian Yayasan yang dibuat di Jakarta, dihadapan Notaris Lindasari Bachroem, S.H, tertanggal 29 Oktober 1999, Nomor : 31, perubahan Anggaran Dasar Yayasan Karya Cipta Indonesia Nomor : 159 yang dibuat Jakarta di hadapan Notaris Lindasari Bachroem, S.H., dan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 53 tentang perubahan pengurus Yayasan Karya Cipta Indonesia serta Surat Kuasa tertanggal 4 November 1996 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

#### DAN

2. **PT. INDOSIAR VISUAL MANDIRI**, berkedudukan di Jakarta, Wisma Indocemet, Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Jakarta 12910, dalam hal ini diwakili oleh **HANDOKO ADIWINOTO** dalam kedudukannya selaku Direktur Utama, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Perseroan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Para pihak dalam hal ini :

#### MENIMBANG

- a. Surat Perjanjian dan Surat Kuasa dari para pencipta/pemegang hak cipta Indonesia yang memberi hak kepada KCI untuk mengelola hak ekonomi pengumuman musik di wilayah Indonesia dan diluar negeri.
- b. Untuk dapat mengumumkan musik di wilayah Indonesia, maka dibutuhkan Sertifikat Lisensi yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- c. Bahwa berdasarkan Hak Khusus yang mempunyai kekuatan hukum tertera dalam butir a, **PIHAK KEDUA** sebagai pihak yang mengumumkan musik dalam bentuk siaran televisi harus memperoleh izin pencipta, yang berdasarkan kekuatan hukum yang tertera dalam butir a dan b, berarti lisensi yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** adalah mutlak sifatnya.

## MENGINGAT

- a. berlakunya Undang Undang No. 7 tahun 1987 tentang perubahan atas Undang Undang No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta.
- b. *Affiliated Agreement* antara KCI dengan DE VERENIGING BUMA yang memberi hak kepada KCI untuk mengelola hak ekonomi pengumuman musik karya pencipta asing diwilayah Indonesia.

Selanjutnya para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian ini dengan ketentuan sebagai berikut :

### Bagian Pertama

#### Arti Beberapa Istilah

##### Pasal 1

1.1. Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

- a. **Pengumuman Musik** adalah penyuaran, penyiaran atau penyebaran musik, termasuk lirik/syair yang terdapat didalamnya, dengan mempergunakan alat transmisi suara dan gambar secara wireless sehingga musik tersebut dapat didengar oleh orang lain melalui pesawat televisi;
- b. **Hak Ekonomi Mengumumkan Musik** adalah hak ekonomi pencipta/pemegang hak cipta yang tercantum dalam Undang Undang Hak Cipta Republik Indonesia (UUHC RI) beserta peraturan pelaksanaannya, ketentuan mana terpisah dari hak-hak lain yang dilindungi didalamnya seperti Hak Moral Pencipta (Moral Right), Hak Memperbanyak Ciptaan (Mechanical Rights) maupun Hak Cipta Rekaman Suara (Sound Recording Rights);
- c. **Repertoire** adalah seluruh karya cipta musik yang diserahkan oleh para pemegang hak cipta untuk dikelola baik dalam maupun luar negeri kepada **PIHAK PERTAMA** untuk dikelola hak ekonomi pengumuman musiknya;
- d. **Segala Bentuk Penyiaran dan Acara Televisi** adalah segala acara televisi yang mempergunakan musik, termasuk musik yang dipergunakan sebagai ilustrasi film/drama/sinetron dan sebagainya termasuk musik tune.

- e. **Royalti** adalah sejumlah uang yang merupakan imbalan hak ekonomi pencipta/pemegang hak cipta musik jika karyanya diumumkan oleh pihak lain.
- 1.2. Penyuaran, penyiaran atau penyebaran daripada judul musiknya saja tanpa melodi/lirik dari musik tersebut dalam segala bentuk penyiaran televisi bukan merupakan pengertian dari **Pengumuman Musik** dalam Perjanjian ini.

## **Pasal 2**

Bahwa perjanjian ini, dengan memperhatikan segala ketentuan yang ada didalamnya serta ketentuan-ketentuan tambahan diluar Perjanjian ini yang telah dan akan dibuat, bukan merupakan Lisensi Pengumuman Musik. Lisensi Pengumuman Musik akan diberikan oleh **Pihak Pertama** dalam bentuk Sertifikat Lisensi Pengumuman Musik, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

## **Bagian Kedua**

### **Kewajiban PIHAK PERTAMA**

## **Pasal 3**

- 3.1. **PIHAK PERTAMA** wajib menyerahkan Sertifikat Lisensi kepada **PIHAK KEDUA** segera setelah **PIHAK KEDUA** membayar sejumlah uang royalti lunas dengan tunai. Masa berlakunya Sertifikat Lisensi tersebut sesuai dengan periode pembayaran royalti.
- 3.2. Bahwa terhadap perjanjian ini berlaku suatu Sertifikat Lisensi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

## **Pasal 4**

Dengan diberikannya Sertifikat Lisensi oleh **PIHAK PERTAMA** kepada para pihak, maka :-

- a. **PIHAK PERTAMA** memberi hak kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengumumkan seluruh repertoire yang dimiliki **PIHAK PERTAMA** dalam segala bentuk acara penyiaran televisi diwilayah Indonesia.
- b. **PIHAK PERTAMA** sebagai pengelola hak ekonomi mengumumkan musik dari para pencipta/pemegang hak cipta dalam dan luar negeri yang karyanya diumumkan oleh **PIHAK KEDUA** tidak akan menggugat **PIHAK KEDUA**

mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak ekonomi mengumumkan musik, sejauh **PIHAK KEDUA** mentaati ketentuan-ketentuan dalam perjanjian Pengumuman Musik ini.

- c. **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas segala gugatan dari para pencipta lagu/pemegang hak cipta/karya cipta yang terdapat dalam repertoire **PIHAK PERTAMA**, baik yang merupakan peserta **PIHAK PERTAMA** maupun pihak lain yang berafiliasi dengan **PIHAK PERTAMA** sepanjang yang menyangkut hak ekonomi Pengumuman Musik dalam dan luar negeri kepada **PIHAK KEDUA** terhitung sejak tanggal berlakunya Perjanjian ini.

### **Bagian Ketiga**

#### **Hak yang Diperoleh PIHAK KEDUA**

##### **Pasal 5**

**PIHAK KEDUA** berhak mengumumkan repertoire yang dimiliki **PIHAK PERTAMA** dalam segala bentuk penyiaran acara televisi seperti tersebut dalam pasal (1) a,b di seluruh wilayah Indonesia, terhitung sejak tanggal yang tertera pada Sertifikat Lisensi Pengumuman Musik dari **PIHAK PERTAMA**.

##### **Pasal 6**

**PIHAK PERTAMA** menjamin **PIHAK KEDUA** membebaskan dari segala gugatan pihak yang merupakan peserta **PIHAK PERTAMA** sepanjang yang menyangkut hak ekonomi mengumumkan musik, terhitung sejak tanggal yang tertera pada Sertifikat Lisensi Pengumuman Musik dari **PIHAK PERTAMA**.

##### **Pasal 7**

Dengan memperhatikan pengertian yang disepakati pada pasal 1 ayat (1) a dan b, maka tidak termasuk dalam perjanjian ini:

- a. Lisensi untuk mengumumkan musik dalam bentuk acara/pergelaran di hadapan penonton yang bersifat komersial, baik dengan memperjual-belikan karcis maupun tidak.
- b. Hak moral pencipta, hak memperbanyak ciptaan (Mechanical Right, termasuk hak sinkronisasi) hak atas cetakan maupun hak cipta rekaman suara.

### **Bagian Keempat**

## Kewajiban PIHAK KEDUA

### Pasal 8

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membayar royalti pengumuman musik kepada para pencipta/pemegang hak cipta melalui **PIHAK PERTAMA** secara teratur setiap tahun dengan cara yang ditentukan pasal 9.
- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyediakan laporan penggunaan musik dalam hal ini bagian **PROGRAMMING PIHAK KEDUA**, berupa daftar nama lagu, nama artis, frekwensi masing-masing lagu, durasi lagu, pencipta lagu (bila ada) atas nama :
  1. Filler
  2. In house production
  3. In programSetiap bulan sepanjang tahun.

### Pasal 9

- (1) **PIHAK KEDUA** melaksanakan pembayaran royalty kepada **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan pentarifan yang ditetapkan berdasarkan prosentase dari pendapatan iklan pertahun setelah dikurangi komisi agen.
- (2) **PIHAK KEDUA** menyetujui besarnya pembayaran royalty pertahun sebesar 1% dari pendapatan iklan pertahun setelah dikurangi komisi agen. Namun untuk mencapai nilai tersebut akan dicapai dalam jangka waktu 5 tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Tahun 2002 sebesar 0,2 %
  - Tahun 2003 sebesar 0,4 %
  - Tahun 2004 sebesar 0,6 %
  - Tahun 2005 sebesar 0,8 %
  - Tahun 2006 sebesar 1,0 %
- (3) Pembayaran tersebut dalam pasal 9 (1) Perjanjian ini termasuk PPh pasal 23 yang mengatur mengenai pajak penghasilan sebesar 15% (lima belas persen).
- (4) **PIHAK KEDUA** menerima tanda bukti penerimaan pembayaran pada saat **PIHAK PERTAMA** menerima pembayaran royalti tersebut.
- (5) **PIHAK KEDUA** membayar dan menyerahkan sejumlah uang royalti kepada **PIHAK PERTAMA** untuk tiap-tiap periode yang dilakukan setiap awal triwulan, termin I pada tanggal 1 Maret tahun X (X=tahun pembayaran yang ditentukan), termin II pada tanggal 1 Juni tahun X, termin III pada tanggal 1 September tahun X dan termin IV pada tanggal 1 Desember tahun X sebesar masing-masing 25% ke rekening Yayasan Karya Cipta Indonesia pada BANK CENTRAL ASIA cabang pembantu Gatot Subroto A/C No. 145-3-50303-1.

- (5) Atas setiap termin diberikan tenggang waktu 14 hari setelah tanggal pembayaran hal mana atas setiap keterlambatan setelah itu dikenakan pembayaran tambahan sebesar 1 per mil dari nilai kontrak.

#### **Bagian Kelima**

#### **Jangka Waktu dan Ruang Lingkup**

##### **Pasal 10**

- (1) Perjanjian ini terhitung sejak tanggal 1 Februari 2002 sampai dengan tanggal 31 Januari 2003.
- (2) Lisensi Pengumuman Musik yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui Sertifikat Lisensi berlaku untuk satu stasiun penyiaran yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** di Indonesia, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak manapun kecuali disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** secara tertulis, sebelumnya.

#### **Bagian Keenam**

#### **Penyelesaian Perselisihan**

##### **Pasal 11**

- 11.1 Perselisihan yang timbul akibat Perjanjian ini akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah dan mufakat.
- 11.2 Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka para pihak sepakat untuk memilih domisili yang tetap dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyelesaikannya.

#### **Bagian Ketujuh**

#### **Hal-hal yang belum diatur**

##### **Pasal 12**

Hal-hal yang belum dan belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian berdasarkan para pihak yang akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan.

#### **Bagian Kedelapan**

## **Berakhirnya Perjanjian**

### **Pasal 13**

Perjanjian ini dapat berakhir disebabkan oleh hal-hal seperti tersebut dibawah ini :

- a. **PIHAK KEDUA** penerima lisensi melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
- b. **PIHAK KEDUA** penerima lisensi menutup dan menghentikan kegiatannya.
- c. Izin operasi dari **PIHAK KEDUA** penerima lisensi tidak diperpanjang lagi oleh yang berwenang.
- d. Kegiatan **PIHAK KEDUA** penerima lisensi dihentikan oleh Pemerintah.
- e. Adanya keputusan Pengadilan yang menghentikan kegiatan **PIHAK KEDUA** penerima lisensi.
- f. Oleh karena adanya kejadian seperti perang, bencana alam atau force mayeur lainnya yang tidak dapat dielakkan baik oleh **PIHAK KEDUA** maupun oleh **PIHAK PERTAMA**.
- g. **PIHAK PERTAMA** dibubarkan sehingga tidak berfungsi lagi dan segala pembayaran yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** akan diperhitungkan secara proporsional dengan cara yang akan disepakati para pihak.
- h. Diadakannya perubahan-perubahan besar dan ketentuan Hukum yang besar mengenai **PIHAK KEDUA**, seperti perubahan anggaran dasar perusahaan dan perubahan bentuk kegiatan usaha.

Demikian Perjanjian Pengumuman Musik ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani oleh para pihak di Jakarta pada tanggal yang tertera di halaman muka.

**PIHAK PERTAMA**

**YAYASAN KARYA CIPTA  
INDONESIA**

**DAHURI, S.E.**  
General Manager

**PIHAK KEDUA**

**PT. INDOSIAR VISUAL  
MANDIRI**

**HANDOKO ADIWINOTO**  
Direktur Utama



Menurut *James F. Sundah*<sup>2</sup> mengemukakan bahwa mekanisme pemberian lisensi di bidang hak cipta khususnya dibidang musik atau lagu adalah sangat kompleks. Hal ini dikarenakan banyaknya pihak-pihak yang terlibat di dalam proses pembuatannya. Sebagai contoh dapat dikemukakan proses pembuatan lagu lilin-lilin kecil. Lagu lilin-lilin kecil ini diciptakan oleh James F. Sundah dinyanyikan oleh Crise dan direkam oleh Sony Music. James F. Sundah Sebagai Pencipta Lagu memberikan ijin kepada Crise untuk menyanyikan lagu tersebut, demikian pula Sony Music untuk merekamnya memerlukan ijin dari James F. Sundah dan Crise.

Berdasarkan Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 James F. Sundah sebagai pencipta lagu mendapat perlindungan hukum selama hidup ditambah 50 tahun setelah meninggal dunia<sup>3</sup>, sedangkan ijin yang diberikan kepada Chrisye memberikan konsekuensi yuridis dari Undang-undang Hak Cipta, yaitu dalam kelompok hak yang terkait dengan hak cipta, Crise sebagai *pelaku*<sup>4</sup> yang mendapatkan perlindungan hukum selama 50 tahun sejak Chrisye menyanyikan lagu tersebut. Demikian pula Sony Music dalam kelompok hak yang terkait masuk dalam *produser rekaman*<sup>5</sup> yang mendapatkan ijin dari James F. Sundah dan Chrisye

---

<sup>2</sup> Wawancara langsung pada tanggal 06 Juni 2002 dengan James F. Sundah, seorang Artis, pencipta lagu dan seorang Wakil Ketua dari Persatuan Artis Pencipta Lagu Rekaman Indonesia (PAPRI). James F. Sundah dan Penulis pernah bersama-sama sebagai peserta dalam Pelatihan singkat khusus Hak Cipta selama dua minggu dari tanggal 20 Mei 2002 sampai dengan 07 Juni 2002 Yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bekerja sama dengan Pemerintah Australia dalam program *Indonesia Australia Specialised Training Project Phase II*.

<sup>3</sup> Undang-undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002 pasal 29 huruf e, ibid

<sup>4</sup> Undang-undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002 pasal 50 huruf a, ibid

<sup>5</sup> Undang-undang Hak Cipta nomor 19 tahun 2002 pasal 50 huruf b, ibid

mendapatkan perlindungan hukum selama 50 tahun sejak lagu lilin-lilin kecil tersebut selesai direkam.

Karya Cipta Indonesia (KCI) sebagai penerima kuasa dari para seniman musik Indonesia, menurut *Rinto Harahap*<sup>6</sup> bahwa Karya Cipta Indonesia didirikan sebagai realisasi dari manfaat perlindungan hak cipta secara nyata terhadap kehidupan ekonomi seniman musik Indonesia. Saat ini Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) mengelola 2 (dua) juta pemegang hak cipta musik Indonesia dan asing. Karya Cipta Indonesia telah memberikan lisensi kepada ribuan pengguna musik dan lagu di Indonesia, termasuk restoran, kafe, karaoke, diskotik, hotel, stasiun radio dan televisi, pengelola bandara, *airlines* bahkan internet. Dari hasil pemberian ijin tersebut Yayasan Karya Cipta Indonesia telah berhasil mendistribusikan royalti kepada para pencipta musik dan lagu.

Sebagai perbandingan dalam penelitian mengenai mekanisme lisensi hak cipta dapat penulis sajikan pula tentang perjanjian penerbitan buku dengan lisensi eksklusif. Proses terbentuknya hak cipta buku ini diperlukan suatu proses yang panjang. Mula-mula suatu karya tulis biasanya diciptakan oleh seorang penulis yang mengalihkan ciptaan tulisannya kepada suatu penerbit buku untuk dieksploitasi hak-hak

---

<sup>6</sup> Wawancara langsung dengan *Rinto Harahap* (Ketua Umum yayasan Karya Cipta Indonesia) pada tanggal 03 Pebruari 2003, yang mengemukakan latar belakang didirikannya Karya Cipta Indonesia, yaitu :

Bahwa Karya Cipta Indonesia adalah lembaga nirlaba pengelola hak cipta musik secara kolektif yang memperoleh kuasa dari para pemegang hak cipta musik Indonesia maupun asing. Karya Cipta Indonesia (KCI) didirikan oleh para seniman musik Indonesia pada tahun 1990 sebagai perwujudan dari upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam melindungi dan mendorong penciptaan dan penyebaran karya cipta, khususnya karya cipta musik. Karya Cipta Indonesia

ekonominya. Penerbit buku yang akan mengeksploitasi hak-hak ekonomi penulis dengan cara menerbitkan dalam bentuk buku berdasarkan kerja sama ini pada suatu perjanjian penerbitan buku.

Langkah awal yang dilakukan penerbit buku setelah suatu perjanjian penerbitan buku disepakatinya dengan penulis merupakan pekerjaan editing yang dilakukan editor yang bekerja penuh sebagai tenaga tetap penerbit buku. Jenis pekerjaan ini merupakan pekerjaan mempersiapkan naskah menjadi siap cetak dengan memperhatikan segi-segi ejaan, diksi (pilihan kata yang tepat dan selaras), tata bahasa, menyusun dengan memotong atau memperbesar atau memperkecil dan memadukan foto-foto yang menjadi bagian dari karya tulis dan lain-lain.

Para editor melakukan pekerjaan editing<sup>7</sup> dengan hasil ciptaan susunan perwajahan karya tulis<sup>8</sup> dalam kapasitas sebagai seorang yang mempunyai hubungan kerja tetap dengan penerbit buku. Oleh karena itu dalam praktek dunia penerbitan buku, sewajarnya jika ciptaan susunan perwajahan karya tulis yang dihasilkan oleh editor, dianggap yang menjadi

---

didirikan sebagai realisasi dari manfaat perlindungan hak cipta secara nyata terhadap kehidupan ekonomi seniman musik Indonesia.

<sup>7</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, SH., *Studi Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hal 80.

<sup>8</sup> Susunan perwajahan karya tulis merupakan suatu jenis ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002, pasal 12 menyebutkan bahwa Dalam undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang mencakup :

- a. buku, program komputer, pamflet perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.
- b. ....

Adapun yang dimaksud dengan perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan "*typographical arrangement*", yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas. Berdasarkan pasal 30 UU No. 19

pemegang hak cipta susunan perwajahan karya tulis itu adalah penerbit buku.

Setelah pekerjaan editing yang disusul dengan perencanaan desain sampul atau kulit buku selesai dilakukan, dikerjakan penyusunan huruf dengan menggunakan perangkat keras dan lunak komputer. Tipografi huruf, *lay-out* desain halaman-halaman isi dan desain sampul buku yang cocok digunakan untuk suatu karya tulis ditentukan oleh editor. Jika penyusunan huruf telah tuntas dikerjakan, pekerjaan selanjutnya yang dilakukan penerbit adalah mencetak dan menjilid hasil cetakan dalam bentuk buku disuatu percetakan.

Suatu perjanjian penerbitan buku yang tergolong sebagai perjanjian lisensi eksklusif mengatur di dalamnya beberapa hal tentang pengalihan atau transformasi hak cipta dari penulis kepada penerbit buku. Pada suatu pengalihan hak cipta dengan perjanjian penerbitan buku yang tergolong perjanjian lisensi eksklusif, kepada penerbit hanya diberikan ijin untuk memperbanyak atau penggandaan karya tulis dalam bentuk buku<sup>9</sup>. Walaupun ijin memperbanyak diberikan kepada penerbit, hak cipta tetap berada di tangan penulis.<sup>10</sup>

---

Tahun 2002 hak cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.

<sup>9</sup> Edy Damian, *Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungan terhadap Buku serta perjanjian Penerbitannya*, loc cit. Hal 219-223

<sup>10</sup> Bandingkan dengan uraian-uraian tentang isi Perjanjian Penerbitan Buku oleh J.C.T. Simorangkir, *Hak Cipta*, Penerbit Djambatan, 1973, hlm58-79 dan Zarkasyi Nurdin, *Kearah standarisasi Pembuatan Surat perjanjian Penerbitan*, artikel dimuat dalam Majalah Dwi bulanan: Berita Buku No.44 Tahun V Juli 1993, IKAPI, hlm 28.

Dalam kaitannya dengan masalah penerbitan buku dalam praktek, akta pengalihan hak cipta dituangkan dalam suatu surat perjanjian penerbitan. Pada umumnya penerbit yang sudah profesional sudah mempunyai suatu standard kontrak tersendiri. Biasanya dalam surat perjanjian penerbitan itu dicantumkan apa hak-hak dan kewajiban-kewajiban pengarang dan penerbit. Oleh karena itu dalam penerbitan buku terdapat 2 (dua) pihak yang berkepentingan yaitu pengarang sebagai pihak pemilik hak cipta utama dan penerbit sebagai pemegang hak cipta dalam arti sempit. Disebut demikian karena pihak penerbit hanya berhak untuk memperbanyak dan mempublikasikan hasil karya pengarang. Jadi dalam hal-hal tertentu tulisan yang tertera dalam kulit sebuah buku "hak cipta ada pada penerbit" dapat dibenarkan sepanjang yang dimaksudkan adalah mengenai hak terbitannya. Lain halnya kalau memang sudah diserahkan hak ciptanya secara keseluruhan. Untuk mengetahuinya perlu dilihat isi perjanjian secara lengkap, baru dapat dipastikan.<sup>11</sup>

Disamping mekanisme lisensi lagu/musik dan penerbitan buku, penulis sajikan pula tentang mekanisme lisensi hak cipta dibidang program komputer. Mekanisme lisensi perangkat lunak ini penulis peroleh dari suatu perusahaan yang bernama *Autodesk* yaitu suatu perusahaan yang mengembangkan produk-produk perangkat lunak komputer. Produk-produk dari *Autodesk*, antara lain seperti *Autocad*, *mechanical desktop*,

---

<sup>11</sup> Sentosa Sembiring., *Aspek-aspek Yuridis Dalam Penerbitan Buku*" Bina Cipta, Bandung, 1987, hal. 74-75

*architectural Dekstop, Civil Design, MapGuide, Autodesk Symbol dan lain-lain* . Mekanisme lisensi perangkat lunak komputer yang dikeluarkan oleh Perusahaan Autodesk menggunakan perjanjian atau kontrak yang sudah baku atau kontrak standar. Bagi calon penerima lisensi perangkat lunak komputer ini sebelum menyetujui pemberian lisensi terlebih dahulu harus membaca beberapa hal menyangkut hak dan kewajiban para pihak.

Perjanjian baku lisensi program komputer yang di keluarkan oleh Autodesk tersebut seperti contoh berikut :

### **KONTRAK LISENSI SOFTWARE AUTODESK**

**Untuk Asia, Pacific dan semua negara lain<sup>12</sup>**

**PENTING, AGAR DIBACA DAHULU. INI ADALAH KONTRAK LISENSI**

*Autodesk* bersedia mengizinkan anda pribadi menggunakan software terkait asalkan anda menyatakan setuju mematuhi semua ketentuan kontrak beserta ketentuan tambahan dan yang bersifat khusus yang tercantum di dalamnya ("Kontrak")

BACA DENGAN TELITI TENTANG PERSYARATAN DAN KETENTUAN KONTRAK SEBELUM MEMILIH TOMBOL "**I ACCEPT**" DI BAGIAN BAWAH HALAMAN INI. PERSETUJUAN TERSEBUT BERARTI ANDA SANGGUP MEMATUHI SEMUA PERSYARATAN DAN KETENTUAN KONTRAK LISENSI, DAN SOFTWARE YANG AKAN DIPASANG. KONTRAK INI DAPAT ANDA PRINT DENGAN MEMILIH TOMBOL PRINT DI BAWAH.

KALAU ANDA TIDAK MAU TERIKAT DENGAN KONTRAK INI DAN TIDAK SANGGUP MEMATUHI SEMUA PERSYARATAN DAN KETENTUAN, PILIH SAJA "**I REJECT**" - YANG MEMBATALKAN

---

<sup>12</sup> Contoh lisensi ini dikirim kepada penulis melalui E-mail tertanggal 20 Mei 2003 oleh Business Software Alliance (*Asosiasi Bisnis Piranti Lunak*)/ BSA . BSA adalah suatu Organisasi Dunia yang aktif di 65 Negara di dunia yang mewakili perusahaan-perusahaan industri piranti lunak multinasional dan lokal. BSA dibentuk pada tahun 1988 sebagai organisasi yang tidak mencari keuntungan (non-profit organization). BSA menyediakan sarana untuk kegiatan bersama oleh para anggotanya.

PENGISIAN SOFTWARE - DAN, DALAM 30 (TIGA PULUH) HARI, KEMBALIKAN PAKET SOFTWARE INI DAN BARANG LAIN DI DALAMNYA, DENGAN TANDA TANGGAL PEMBELIANNYA, KE TEMPAT PEMBELIAN UNTUK MENERIMA KEMBALI SELURUH HARGA PEMBELIAN. PENGGUNAAN SOFTWARE OLEH ANDA MEMBUKTIKAN PULA BAHWA ANDA MENYANGGUPI UNTUK TERIKAT PADA KETENTUAN LISENSI YANG TERCANTUM.

MENG-COPY PROGRAM DARI KOMPUTER INI ATAU MENGGADAKAN, KECUALI DENGAN MEMILIKI LISENSI RESMI, MERUPAKAN PELANGGARAN HAK CIPTA DI NEGARA ANDA. JIKA ANDA MENG-COPY PROGRAM DARI KOMPUTER INI TANPA SEIZIN DARI *AUTODESK*, ANDA MELANGGAR HUKUM, ANDA DAPAT DIKENAKAN PEMBAYARAN GANTI RUGI KEPADA *AUTODESK* DAN ANDA DAPAT DIPERKARAKAN UNTUK SEBAGAI PERBUATAN KRIMINAL.

### **1. Pemberian Lisensi**

*Autodesk, Inc* ("*Autodesk*") memberikan anda non exclusive dan tidak dapat dialihkan, untuk menggunakan program terkait ("*Software*"), buku petunjuk serta perlengkapan lain ("*Documentation*") dengan peralatan milik anda atau berada di bawah pengawasan anda, menurut persyaratan dan ketentuan kontrak lisensi. Kontrak mengizinkan pemakai tunggal memasang dan menggunakan softwarena hanya pada satu komputer saja, di satu tempat pada saat apapun. Tetapi, jika *Software* memiliki lisensi yang digunakan pada network (hanya produk tertentu yang ditandai sebagai versi Network) , maka anda dapat menggunakan software untuk pemasangan bagi multiple user, dengan :

- i. pemakai bersama tidak lebih dari 1 (satu) sehingga software dapat diakses oleh lebih dari satu orang, tetapi pada satu saat hanya satu orang saja yang boleh memakainya, atau
- ii. pemakai bersama adalah 2 (dua) atau lebih, dalam hal mana anda harus membeli paket *Software* lengkap yang pertama, disertai sejumlah lisensi tertentu untuk pemakai tambahan bersama.

#### **Versi untuk Pendidikan dan Versi untuk Pelajar :**

Jika softwarena ber-versi pendidikan, anda hanya boleh menggunakannya untuk maksud pengajaran dan latihan, dan tidak untuk maksud lain. Untuk versi pelajar, hanya boleh dipakai oleh pelajar yang memesannya, dan hanya untuk belajar. Kedua versi software tersebut tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial.

#### **Back-Up Copy :**

Terlepas dari jenis versi yang anda peroleh, Lisensi hanya mengizinkan anda membuat satu back-up copy dari setiap software. Back-up copy tersebut tidak boleh diinstall pada komputer lain,. kecuali komputer lain

tersebut merupakan bagian drive dari server yang hanya boleh digunakan oleh pemakai yang berwenang. Bagaimanapun, back up copy tidak boleh dipakai atau di-install selama copy software sudah di-install pada satu komputer. Kalau dokumentasinya dalam bentuk tercetak, tidak boleh di-copy. Jika dalam bentuk elektronik, anda boleh mem-print-out satu copy dan tidak boleh di-copy lagi.

### **Upgrade:**

Jika software ditandai sebagai upgrade dari lisensi yang telah anda miliki sebelumnya, anda harus menghancurkan semua copy software yang telah anda miliki sebelumnya setelah diganti dengan software yang di-upgrade, termasuk mengembalikan hardware lock atau hard disk drive, jika ada, yang dilesensikan kepada anda agar dikembalikan (kecuali jika Autodesk menyatakan secara tegas bahwa hardware lock tetap digunakan pada software yang di-upgrade), dalam waktu enam puluh hari setelah software didapat. Autodesk dapat menggunakan haknya yang mewajibkan anda untuk membuktikan bahwa copy software sebelumnya, benar-benar telah dihapus. Jika hardware lock tidak dikembalikan dalam waktu yang telah ditetapkan, Autodesk pasti akan menuntut denda terhadap anda yang harus dibayar, yaitu selisih harga antara harga lisensi upgrade dan harga eceran yang akan ditetapkan untuk software ini. Jika ada Software patches yang diberikan kepada anda oleh Autodesk atau pihak ketiga yang berwenang, sehubungan dengan software yang dilisensikan kepada anda berdasarkan kontrak ini, akan dikenakan ketentuan kontrak lisensi, kecuali ditetapkan secara lain saat penyerahan barang.

### **Lab Pack Lisensi:**

Jika Software yang dilisensikan kepada anda adalah Paket Laboratorium Software (hanya pada produk-produk tertentu) dan anda telah membayar biaya lisensi. untuk Paket Laboratorium, maka anda boleh meng-install Software pada komputer dan membuat nomor copy Dokumentasi sebagai pemegang lisensi Paket Laboratorium Software. Bagaimanapun, jumlah copy software yang boleh digunakan tetap dibatasi seperti yang telah ditetapkan dalam Paket Lab ini.

### **Authorization Code:**

Jika Software ini harus menggunakan authorization code, anda harus mendaftarkan pembelian software ini kepada Autodesk sebelum authorization code diserahkan kepada anda

## **2. LARANGAN: Anda tidak boleh**

1. Meng-copy software atau dokumentasi, selain yang telah anda buat menurut lisensinya.
2. mengubah desain, susunan atau bentuk software, sejauh masih dibenarkan menurut ketentuan hukum karena terpaksa dilakukan untuk memperoleh



informasi yang dibutuhkan dalam program pengoperasian bersama, ciptaan sendiri dengan software atau program lain, sedangkan informasi tersebut tidak bisa didapatkan dari Autodesk atau sumber lain. Software tidak boleh diubah susunannya, informasi yang dibutuhkan bisa didapatkan dari Autodesk Software Developer's Kit melalui agen Autodesk resmi di tempat anda.

3. menyalurkan, menyewakan, meminjamkan, menjual, melisensikan kembali Atau dengan cara lain mengalihkan seluruh atau sebagian software, dokumentasi atau suatu hak yang telah diperoleh secara sah, kepada orang lain tanpa seizin tertulis dari Autodesk.
4. menghapus, mengubah atau menutupi petunjuk, label atau merek pada software atau dokumentasinya.
5. menyesuaikan, menerjemahkan, mencocokkan, mengatur atau meniru operasi software atau dokumentasi untuk tujuan lain.
6. memanfaatkan peralatan, perangkat, software atau sarana lain apapun untuk menghindari atau meniadakan perlindungan atas hak cipta yang digunakan Autodesk sehubungan dengan softwarenya, atau mengoperasikan melalui hardware lock, authorization code, serial number, atau sarana pengaman hak cipta yang tidak berasal langsung dari pihak Autodesk atau agen resminya.
7. menggunakan software atau dokumentasi di luar negara tempat pembelian.
8. meng-export software atau dokumentasi dengan menyalahi peraturan yang berlaku di A.S. atau peraturan lain yang berlaku.

### **3. Hak Cipta (Copyright)**

Kepemilikan dan hak cipta atas software, dokumentasi dan perlengkapannya serta copy-copy buatan anda tetap berada pada pihak Autodesk. Pembuatan copy dari software atau dokumentasi tanpa izin atau tidak mematuhi larangan tersebut di atas akan berakibat dicabutnya lisensi ini.

### **4. Garansi Terbatas / Garansi tahun 2000 Autodesk menjamin:**

- (1) untuk jangka waktu 90 hari, terhitung sejak hari penyerahan Software kepada anda yang tertulis di tanda terima, software akan menyediakan kemudahan dan berfungsi sebagaimana tercantum di dalam dokumentasi dan bahwa sarana pendukung software, dokumentasi yang menyertai software, dan hardware lock atau alat pengaman copy lainnya yang menyertai software, semuanya akan bebas dari cacat material dan pembuatan dan dalam pemakaian normal, dan
- (2) bahwa dalam pemakaian normal software pasti mampu memproses tanggal dan data waktu dari, memasuki dan setelah tahun 2000, termasuk kalkulasi untuk tahun kabisat.

**SELAIN GARANSI TERBATAS RESMI TERSEBUT, AUTODESK TIDAK**

MEMBERIKAN DAN ANDA TIDAK MENDAPAT GARANSI YANG NYATA, LANGSUNG, DIJANJIKAN ATAU DIKOMUNIKASIKAN DENGAN ANDA, DAN AUTODESK JELAS MENYANGGAH GARANSI LAIN APAPUN TERMASUK ANGGAHAN ADANYA GARANSI BAHWA BARANGNYA PASTI LAKU DAN COCOK UNTUK MAKSUD TERTENTU. AUTODESK TIDAK MENJAMIN BAHWA PENGGUNAAN SOFTWARE AKAN BEBAS DARI GANGGUAN ATAU BEBAS DARI KESALAHAN.

Pengecualian tersebut mungkin tidak akan merupakan masalah bagi anda karena ada aturan hukum yang melarang penyisihan garansi tidak langsung. Selain hak garansi tersebut, mungkin anda memiliki hak lain pula yang menunjukkan perbedaan menurut bidang hukum masing-masing.

Tanggung jawab keseluruhan dari Autodesk dan kemungkinan bagi anda sendiri untuk mengatasi masalahnya menurut Kontrak Lisensi ini tergantung dari kebijaksanaan Autodesk, untuk mengadakan perbaikan atau mengatasi kesalahan, mengganti media yang cacat, dokumentasi atau sarana pengaman copy, atau untuk mengembalikan biaya lisensi dan mengakhiri lisensinya. Dalam hal ini maka media yang cacat, dokumentasi atau alat pengaman copy serta copy tanda terima anda harus dikembalikan kepada kantor Autodesk setempat atau kepada Penyalur Resmi Autodesk, dari siapa barangnya diperoleh dalam 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal penyerahannya kepada anda.

Setelah berakhirnya jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari, Autodesk akan mengganti perangkat pengaman copy yang cacat atau rusak atas pembayaran biaya sebesar jumlah penggantian harga perangkat ditambah ongkos kerja dan ongkos kirim.

## 5. Sanggahan

*COMPUTER -AIDED DESIGN SOFTWARE DAN TECHNICAL SOFTWARE* LAIN ADALAH PERANGKAT YANG LAYAK DIGUNAKAN OLEH TENAGA TRAMPIL DAN BERPENGALAMAN. BUKAN PENGGANTI KEMAMPUAN ANDA UNTUK MENILAI SESUATU SECARA ILMIAH. *COMPUTER-AIDED DESIGN SOFTWARE DAN TECHNICAL SOFTWARE* LAIN DIMAKSUDKAN UNTUK MEMUDAHKAN KEGIATAN MEMBUAT DESAIN BARANG DAN BUKAN ALAT PENGGANTI UNTUK MENGUJI PEMBEBANAN, KEAMANAN DAN KEGUNAAN PRODUK. KARENA SOFTWARENYA BISA DIGUNAKAN UNTUK BERBAGAI TUJUAN, BELUM SEMPAT DIUJI BENAR UNTUK SEGALA MAKSUD TERSEBUT. BAGAIMANAPUN, AUTODESK TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS HASIL YANG DICAPAI DENGAN MENGGUNAKAN SOFTWARE. PEMAKAI SOFTWARE BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENGAWASAN, PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN SOFTWARE. TANGGUNG JAWAB MELIPUTI, TETAPI TIDAK TERBATAS PADA, MENENTUKAN PENGGUNAAN YANG TEPAT, DAN

MEMILIH SOFTWARE DAN PROGRAM LAIN UNTUK MENCAPAI HASIL YANG DIKEHENDAKI. PEMAKAI SOFTWARE BERTANGGUNG JAWAB PULA ATAS PENETAPAN KELAYAKAN BERBAGAI PROSEDUR TERTENTU UNTUK MENGUJI HANDALNYA DAN TEPATNYA HASIL PROGRAM, TERMASUK SEGALA BARANG YANG DIDESAIN DENGAN MENGGUNAKAN SOFTWARE.

#### 6. PEMBATAAN TANGGUNG JAWAB

AUTODESK TIDAK WAJIB BERTANGGUNG JAWAB ATAS KEHILANGAN ATAU KERUSAKAN JENIS APAPUN, TERMASUK HILANGNYA DATA, KEUNTUNGAN YANG LENYAP, BIAYA PENJAMINAN ATAU KERUSAKAN TERTENTU, TIDAK TERDUGA, DIAKIBATKAN ATAU YANG BERSIFAT TIDAK LANGSUNG KARENA PENGGUNAAN ATAU KURANG MAMPU MENGGUNAKAN SOFTWARE ATAU DOKUMENTASINYA, BAGAIMANAPUN TERJADI DAN MENURUT TEORI TANGGUNG JAWAB APAPUN. PEMBATAAN INI BERLAKU, SEKALIPUN JIKA AUTODESK ATAU PENJUAL ULANG AUTODESK PERNAH MENERIMA PERINGATAN TENTANG KEMUNGKINAN TERJADINYA KEHILANGAN ATAU KERUSAKAN TERSEBUT. ANDA MEMAHAMI BAHWA HARGA LISENSI MENCERMINKAN ADANYA PEMBAGIAN RESIKO INI.

Autodesk tidak bertanggung jawab atau wajib menanggung apapun atas kehilangan atau pencurian software atau perangkat pengaman copy yang menyertai penyerahan software. Terutama, Autodesk tidak diwajibkan mengganti software atau perangkat pengaman copy yang hilang atau dicuri. Anda sendiri yang bertanggung jawab menjaga software dan perangkat pengaman copy terhadap kemungkinan hilang atau dicuri, dan melindungi investasi anda dengan asuransi atau cara lain. Pembatasan tersebut mungkin tidak berlaku bagi anda dengan adanya yurisdiksi yang melarang pembatasan atau penyempitan tanggung jawab atau kerugian insidental atau konsekwensial.

#### 7. Hak Terbatas untuk Instansi Pemerintah Amerika Serikat

Software dan dokumentasi disertai dengan HAK YANG DIBATASI untuk Instansi Pemerintah Amerika Serikat. Penggunaan duplikasi, atau pengungkapan oleh Instansi Pemerintah Amerika Serikat terkena pembatasan sebagaimana diuraikan dalam FAR 12.212 (Commercial Computer Software - Restricted Rights) dan DFAR 227.7202 (Rights in Technical Data and Computer Software) yang berlaku. Pembuat barangnya adalah Autodesk, Inc. 111 McInnis Parkway, San Rafael, California 94903.

#### 8. Penjualan di Kanada

Bila anda membeli produk ini di Kanada, anda menyetujui ketentuan berikut. Kedua belah pihak menetapkan keinginannya agar kontrak ini serta dokumen yang berkaitan

lainnya, termasuk surat informasi, telah menggunakan dan hanya akan menggunakan Bahasa Inggris. Catatan: Isinya sama tetapi menggunakan Bahasa Perancis dan tidak diterjemahkan karena akan merupakan ulangan dari yang tersebut di atas.

- A. Lisensi akan berakhir tanpa pemberitahuan dari Autodesk jika anda, pemegang lisensi, jatuh pailit, mengadakan penyelesaian dengan kreditor anda tau membubarkan perusahaannya.
- B. Kontrak ini tidak berdasarkan "Konvensi PBB tentang Kontrak Penjualan Barang", tetapi menggunakan hukum Negara Bagian California, AS., beserta Kode Komersial Standar tanpa prinsip pertentangan hukum sebagai rujukan. Kontrak ini merupakan perjanjian keseluruhan antara kita saja, dan menggantikan kesepakatan lain ataupun iklan tentang software serta dokumentasinya. Jika masih ada pertanyaan, silahkan menghubungi Authorized Autodesk Reseller anda
- C. Kalau ada ketentuan lisensi ternyata cacat hukum atau tidak dapat diberlakukan, maka ketentuan lainnya akan tetap berlaku sepenuhnya, dan kedua belah pihak akan terikat pada kewajibannya masing-masing yang paling mendekati kekuatan ketentuan yang kedapatan cacat hukum atau tidak dapat diberlakukan, tanpa ketentuan lainnya itu ikut menjadi cacat hukum atau tidak dapat diberlakukan.
- D. Kalau masih ada pertanyaan lain, sebaiknya sampaikan secara tertulis kepada Autodesk, Inc. 111 McInnis Parkway, San Rafael, California 94903.

*Autodesk* memberikan lisensi/ijin untuk menggunakan program kepada pengguna yang membeli versi asli program komputernya. Sebelum lisensi tersebut dapat diaktifkan, pengguna harus menerima syarat-syarat dan ketentuan perjanjian lisensi perangkat lunak yang akan tampil di layar komputer ketika perangkat lunak tersebut di instal ke dalam *Personal Computer* (PC). Lisensi yang diberikan oleh *Autodesk* dengan tegas hanya diperuntukkan bagi penggunaan perangkat lunak sesuai dengan ketentuan perjanjian lisensi yang sudah ada. Pengguna senantiasa harus membaca ketentuan perjanjian lisensi perangkat lunak dengan teliti, karena di dalamnya terdapat ketentuan mengenai apa-apa

saja yang diijinkan dan yang dilarang dalam penggunaan perangkat lunak tersebut.

Hal-hal yang harus diperhatikan oleh para pihak penerima lisensi perangkat lunak komputer dari perusahaan *Autodesk* adalah sebagai berikut :

1. Non eksklusif/tidak dapat ditransfer (*non transferable*);
  - a. pengguna tidak berhak memperbanyak program komputer kecuali mendapat ijin dari perusahaan *Autodesk*;
  - b. pengguna tidak berhak mentransfer kepemilikan lisensi;
2. Penggunaan pada komputer dalam jumlah tertentu
  - a. Lisensi untuk satu komputer *Personal Computer* - satu pengguna -- satu lokasi
  - b. Beberapa pengguna dalam lingkungan jaringan (kantor)
3. Salinan (*copy*) cadangan
  - a. Lisensi mengijinkan pengguna untuk memiliki copy cadangan. Hanya digunakan jika program aslinya hilang, rusak, atau tidak dapat digunakan;
  - b. Hanya diperbolehkan untuk membuat satu saja copy cadangan dari program komputer dan dokumen elektroniknya;

Disamping hal-hal tersebut di atas, terdapat pula pembatasan penggunaan perangkat lunak komputer yang harus diperhatikan oleh para penerima lisensi perangkat lunak komputer ini, yaitu :

1. Tidak mengkopi perangkat lunak/dokumentasinya kecuali sesuai dengan yang diijinkan oleh pemberi lisensi;
2. Tidak menyewa, meminjam, mengontrak, mendistribusikan, merekayasa, mengubah, mengadaptasi, menghindari alat pelindung-copy, dan lain-lain;
3. Hanya untuk penggunaan di dalam negara di mana perangkat lunak tersebut dibeli.

Dalam mekanisme lisensi perangkat lunak komputer yang dituangkan dalam kontrak standar disebutkan juga klausula tentang tujuan penggunaan misalnya untuk kepentingan komersial, pendidikan, pelajar maupun evaluasi. Kontrak standar tersebut mengatur pula tentang peringatan yang berhubungan dengan perlindungan hak cipta, yaitu bahwa judul dan hak cipta dari perangkat lunak komputer, dokumentasi dan materi lain yang menemani (yang terdapat dalam paket) serta salinan manapun yang dibuat oleh penerima lisensi, tetap dipegang oleh pemberi lisensi (*Autodesk*). Peng-copy-an dari perangkat lunak ataupun dokumentasinya, maupun kegagalan untuk mengikuti ketentuan pembatasan-pembatasan yang dituangkan dalam kontrak standar tersebut di atas akan mengakibatkan pemutusan perjanjian lisensi secara otomatis.

Klausula kontrak standard yang dikeluarkan oleh *Autodesk* menentukan pula hal-hal tentang *upgrade* ,yaitu meminta pengguna untuk menghapus perangkat lunak *Autodesk* versi sebelumnya dari *hard disk* dalam waktu 60 hari setelah penerima perangkat lunak *upgrade*. *Autodesk*

juga dapat meminta pengguna untuk mengembalikan piringan (*disk*), kunci perangkat keras terdapat dalam paket dari versi sebelumnya. Disamping itu *Autodesk* juga menghimbau kepada para pengguna bahwa jika membeli sebuah perangkat lunak *Autodesk* asli, pengguna harus selalu menyimpan hal seperti berikut :

- Perjanjian lisensi Perangkat Lunak Asli;
- Piringan (*disk*) asli;
- Faktur (*invoice*) pembelian;
- Petunjuk penggunaan (*manual*)/kotak kemasan (jika mungkin);
- Catatan pendaftaran (*registrasi*)-nomor seri, kunci CD (*CD-key*), kode otorisasi.
- Para pengguna agar mendaftarkan perangkat lunak yang digunakan ke *Autodesk*, dengan pendaftaran ini pengguna akan memperoleh manfaat sebagai pengguna yang berlisensi dan pengguna akan menerima informasi perkembangan terbaru, dukungan teknis, verifikasi untuk *upgrade* perangkat lunak.

Menurut Roland Chan<sup>13</sup> dari BSA, bahwa ketika seseorang membeli program komputer, di dalamnya selalu terdapat lisensi yaitu berupa sebuah perjanjian hukum yang dilengkapi dengan syarat dan ketentuan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan program komputer. Lisensi tersebut biasanya berlaku untuk penggunaan satu program komputer untuk satu personal komputer. Akan tetapi terdapat berbagai jenis lisensi dari produsen program komputer yang berbeda-beda, dan beberapa dari mereka ada juga yang menyertakan lisensi untuk penggunaan lebih dari satu. Ada banyak jenis lisensi penggunaan (*multiple*), yaitu seperti penggunaan bersama (*concurrent*), untuk situs (*site*), untuk perusahaan swasta (*enterprise*), penggunaan

---

<sup>13</sup> Beberapa pertanyaan yang penulis dikirimkan ke BSA dan dijawab oleh Roland Chan (BSA Regional Marketing Manager Asia Pasific) yang dikirimkan pada tanggal 25 Mei 2003.

untuk jangka waktu terbatas (*limited term*) dan dalam pelaksanaan lisensi tersebut tidak dapat disamaratakan terhadap semua jenis perjanjian proram komputer, karena syarat dan ketentuan yang terperinci senantiasa diatur langsung oleh pemilik program komputer.

Menurut Teddy Sukardi<sup>14</sup> (Ketua Umum Asosiasi Piranti Lunak Indonesia (ASPILUKI), mengatakan bahwa penjualan program komputer juga dimungkinkan dilakukan tanpa pola lisensi yang pada gilirannya akan berpotensi membawa masalah pada saat diperlukan perlindungan hak ciptanya. Satu cara yang dapat digunakan adalah dengan memberi kesempatan untuk calon pembeli untuk membaca perjanjian lisensi secara *online* dan memberikan persetujuannya sebelum program komputer tersebut dipindah-tangankan. Tentu saja persetujuan ini dilakukan secara *on-line* seperti lazim ditemukan adalah dengan melakukan "klik" pada tombol setuju untuk menyatakan persetujuan atas persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh pemilik program komputer. Lebih lanjut Tedy Sukardi mengemukakan bahwa di dalam pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta program komputer 99,9% adalah lisensi untuk menggunakan saja.

#### **b. Pelaksanaan Pembayaran Royalti**

Menteri Kehakiman sebagai Ketua Dewan Hak Cipta, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986, dalam usahanya mendorong perkembangan hasil ciptaan serta meningkatkan perlindungan hukum bagi para pencipta, mempunyai tugas memberikan bimbingan serta pembinaan tentang hak cipta. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Hak Cipta mempunyai fungsi antara lain memberikan

---

<sup>14</sup> Wawancara langsung dengan Teddy Sukardi -Ketua Umum Asosiasi Piranti Lunak Indonesia (ASPILUKI) pada tanggal 10 Juni 2003 di Plaza Bapindo, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta, pada tanggal tersebut Bapak Teddy Sukardi sebagai Nara Sumber pada Seminar Sehari tentang



pertimbangan dan pendapat kepada pencipta dan masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak cipta.

Ketua Dewan Hak Cipta, melalui suratnya yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Karya Cipta Indonesia Nomor M.UM.01.06-12 tanggal 13 Januari 1993 perihal Pengelolaan Hak Cipta Musik, mengemukakan bahwa Hak khusus dari pencipta atau penerima hak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Hak Cipta wajib dihormati, oleh karena itu setiap orang atau badan menggunakan karya cipta musik dan atau lagu baik sebagai usaha maupun sebagai bagian dari usaha yang bersifat komersial, harus memperoleh ijin dan membayar ganti rugi (royalti) kepada pencipta atau penerima hak.

Lebih lanjut dalam surat tersebut dikemukakan bahwa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum kepada para pencipta atau penerima hak serta untuk lebih menjamin hasil guna dan daya guna dalam pemberian perijinan dan penerimaan ganti rugi, para pencipta musik dan atau lagu telah membentuk Yayasan Karya Cipta Indonesia yang berfungsi sebagai Badan Pengelola Hak Cipta (*Collecting Society*). Berdasarkan kuasa yang diberikan oleh para pencipta, Yayasan Karya Cipta Indonesia diberi wewenang memberikan ijin tentang pengumuman dan perbanyakan hak cipta, serta mengumpulkan ganti rugi dari para pengguna (*users*) karya cipta musik dan atau lagu.

---

Lisensi di bidang Program Komputer, yang diselenggarakan Direktorat Jenderal HKI, Departemen kehakiman & HAM RI bekerjasama dengan BSA dan Microsoft Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman tentang pengelolaan perijinan dan kewajiban membayar ganti rugi terhadap pengumuman dan perbanyakan hak cipta musik atau lagu, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :<sup>15</sup>

1. Setiap orang atau badan yang mengumumkan atau memperbanyak hak cipta musik dan atau lagu orang lain baik sebagai usaha maupun sebagai bagian dari usaha yang bersifat komersial wajib meminta ijin dan membayar ganti rugi kepada pencipta atau penerima hak cipta;
2. Termasuk orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 terutama pemilik atau pengusaha :
  - a. life music, konser;
  - b. Hotel, hostel, wisma;
  - c. Bioskop;
  - d. Night club, pub, diskotik;
  - e. Restoran, bar;
  - f. Karaoke.
3. Pemberian ijin, pengumpulan pembayaran ganti rugi, dan pembagian hasil pungutan yang dilakukan oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia ditentukan berdasarkan perjanjian kuasa antara pencipta atau penerima hak cipta dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia;
4. Besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 ditentukan berdasarkan

---

<sup>15</sup> Ismail Saleh sebagai Menteri Kehakiman selaku Ketua Dewan Hak Cipta, Surat Nomor H.U.M.01.06-12 tanggal 13 Januari 1993 perihal Pengelolaan Hak Cipta Musik.

persetujuan antara pemakai hak cipta dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik nasional maupun Internasional.

Lebih lanjut Rinto Harahap mengemukakan bahwa, dalam praktek proses pemberian ijin dan penarikan royalti tersebut tidaklah selalu berjalan dengan lancar, terutama dikarenakan tidak adanya tarif resmi di Indonesia yang bisa dijadikan patokan. Sudah barang tentu hal ini sangat merugikan para anggota Karya Cipta Indonesia (KCI) karena dengan tidak adanya patokan resmi tersebut Karya Cipta Indonesia seringkali menemui kesulitan dalam memberikan ijin dan menetapkan royalti. Namun untuk penghitungan besarnya royalti yang harus dibayar oleh para pengguna musik, untuk sementara digunakan dasar perhitungan yang dibuat oleh Karya Cipta Indonesia dengan dasar perhitungan yang digunakan oleh Organisasi-organisasi kolektif di tingkat Internasional, yaitu sebagai berikut :

#### DASAR PERHITUNGAN TARIF UNTUK *GENERAL LICENSING* TAHUN 1996

##### 1. DASAR

Dasar penentuan besarnya tarif royalti adalah suatu rumus standar yang berlaku di Lembaga Collecting Society Internasional yaitu sejumlah prosentase tertentu dari Pendapatan Kotor.

##### 1. BASIC EXPENDITURE for ENTERTAINMENT (BEE)

Adalah pengeluaran rata-rata seseorang satu kali ke tempat hiburan. Dianggap sebagai Gross Income pengelola tempat hiburan 1 pengunjung. Tahun 1996 sebagai dasar BEE sebesar **Rp. 4.000,-** (Empat ribu rupiah)

## **2. INTERNATIONAL UNQUOTED ACCEPTANCE (IUA)**

Adalah dasar %-tase yang telah disetujui/diterima secara universal sebagai berikut.:

**Feature Music                      6 % - 10 % dari Gross Income**

- Live Concert
- Disco
- Karaoke
- Radio

**A. Entertainment Music    3 % - 6 % dari Gross Income**

- Live di Restaurant, Caffee
- TV

**B. Background Music            1 % - 2 % dari Gross Income**

- Mechanical Music

**3. OCCUPANCY RATE        = 45 %**

Adalah jumlah tingkat pemakaian/kunjungan

**4. WORKING DAYS                      = 313 days**

Adalah jumlah hari kerja

## **2. FORMULA**

**A. IUA X OCCUPANCY RATE X WORKING DAYS X  
BEE**

**CONTOH : BACKGROUND MUSIC**

$$1,3 \% \times 45 \% \times 313 \text{ DAYS} \times \text{Rp. } 4.000,- = \text{Rp. } 7.324,-$$
$$\text{DIBULATKAN} = \text{Rp. } 7.500,-/\text{Seat}$$

**PERHITUNGAN TARIF BARU  
UNTUK GENERAL LICENSING TAHUN 2002**

**1. DASAR**

**1.1. BASIC EXPENDITURE for ENTERTAINMENT (BEE)**

Adalah pengeluaran rata-rata seseorang satu kali ke tempat hiburan. Dianggap sebagai Gross Income pengelola tempat hiburan 1 pengunjung. Tahun 1990 sebagai dasar BEE sebesar **Rp. 2.500,-** (Dua ribu lima ratus rupiah). Dari tahun 1990 s/d tahun 2000 tingkat inflasi sebesar 400 % (Data BPS)

$$\text{Jadi BEE Tahun 2000} = 400 \% \times \text{Rp. } 2.500,- = \text{Rp. } 10.000,-$$

**1.2. INTERNATIONAL UNQUOTED ACCEPTANCE (IUA)**

Adalah dasar %-tase yang telah disetujui/diterima secara universal sbb.:

<b>Feature Music</b>	<b>6 % - 10 % dari Gross Income</b>
- Live Concert	
- Disco	
- Karaoke	
- Radio	
<b>A. Entertainment Music</b>	<b>3 % - 6 % dari Gross Income</b>
- Live di Restaurant, Caffee	
- TV	
<b>B. Background Music</b>	<b>1 % - 2 % dari Gross Income</b>
- Mechanical Music	

**1.3. OCCUPANCY RATE = 50%**

Adalah jumlah tingkat pemakaian/kunjungan

1.4. WORKING DAYS = 313 days

Adalah jumlah hari kerja

## 2. FORMULA

B. IUA X OCCUPANCY RATE X WORKING DAYS X  
BEE

### CONTOH : BACKGROUND MUSIC

1,3 % X 50 % X 313 DAYS X Rp. 10.000,- = Rp. 20.345,-  
DIBULATKAN = Rp. 20.000,-/Seat

## 3. APLIKASI

### 1. BACKGROUND MUSIC

1,3 % X 50 % X 313 DAYS X Rp. 10.000,- = Rp.  
20.345,-  
Pembulatan = Rp. 20.000,-/Seat

### 2. DISCOTIQUE

6 % X 50 % X 313 DAYS X Rp. 10.000,- = Rp. 93.900,-  
Pembulatan = Rp. 100.000,-/m2  
room size

### 3. LIVE MUSIC

3 % X 50% X 313 DAYS X Rp. 10.000,- = Rp. 46.950,-  
Pembulatan = Rp. 50.000,-/Seat

### 4. KARAOKE REGULER

6 % X 50 % X 313 DAYS X Rp. 10.000,- = Rp. 93.900,-  
Pembulatan = Rp. 100.000,-  
Per Table = 5 orang x Rp. 100.000,- = Rp. 500.000,-  
/table

## 5. KARAOKE VIP

Per Room = 5 orang : 2 x Rp. 500.000,- = Rp.  
1.000.000,-/vip room

6. TV/VIDEO SCREEN (SBG BACKGROUND MUSIC) = Rp.  
150.000,-/Screen

## 7. FITNESS AND AEROBIC CLASSES

BEE = Rp. 16.500,- (tiket masuk sekali pakai)

1,3 % X 40 % X 300 DAYS X Rp. 16.500,- = Rp. 25.740,-  
Pembulatan = Rp. 25.000,-/m2  
floor area

## 8. KONSER MUSIC

<i>Ticket Price</i>	<i>Rp. 0,- s/d Rp.50.000,-</i>	<i>Rp. 50.001,- s/d Rp.100.000,-</i>	<i>Diatas Rp. 100.000,-</i>
<i>Capacity</i>			
<b>1 s/d 50 orang</b>	Rp. 900.000,- /show	Rp. 1.500.000,-/show	Rp. 2.000.000,- /show
<b>51 s/d 100 orang</b>	Rp. 1.500.000,- /show	Rp. 2.000.000,- /show	Rp. 2.500.000,- /show
<b>Diatas 100 orang</b>	Rp. 2.500.000,- /show	Rp. 3.250.000,- /show	Rp. 4.000.000,- /show

## 9. FASHION SHOW

<i>Ticket Price</i>	<i>Rp. 0,- s/d Rp.50.000,-</i>	<i>Rp. 50.001,- s/d Rp.100.000,-</i>	<i>Diatas Rp. 100.000,-</i>
<i>Capacity</i>			
<b>1 s/d 50 orang</b>	Rp. 450.000,- /show	Rp. 675.000,-/show	Rp. 1.000.000,- /show
<b>51 s/d 100 orang</b>	Rp. 675.000,- /show	Rp. 900.000,-/show	Rp. 1.250.000,- /show
<b>Diatas 100 orang</b>	Rp. 1.000.000,- /show	Rp. 1.250.000,- /show	Rp. 2.000.000,- /show

## 10. MEDICAL CENTER AND HOSPITAL

BEE = Rp. 50.000,- (Tarif kelas III PI)

1,3 % X 40 % X 300 DAYS X Rp. 50.000,- = Rp. 101.725,-  
Pembulatan = Rp. 100.000,-/tv room

#### 11. PAMERAN

<i>Lama Acara Duration of Events</i>	<i>Low Density Tariff (Background Music)</i>	<i>High Density Tariff (Live Music usage)</i>
<b>1 s/d 2 hari/days</b>	Rp. 300.000,-	Rp. 450.000,-
<b>3 s/d 6 hari/days</b>	Rp. 200.000,-	Rp. 350.000,-
<b>Lebih dari 7 hari</b>	Rp. 150.000,-	Rp. 200.000,-
<b>Video Wall (48 – 64 mini screen)</b>		Rp. 1.500.000,-

#### 12. OFFICE AND MUSIC ON HOLD OVER TELEPHONE

<i>Music Usage</i>	<i>Parameter</i>	<i>Annual Rate</i>
<b>Space size of premises</b>	1 s/d 1000 M2	Rp. 450.000,-
	Each Add. 1.000 M2	Rp. 250.000,-/1000 m2
<b>Music on Hold Telephone</b>		Rp. 15.000,-/line per year

#### 13. SHOPPING CENTER, MALL, PLAZA AND DEP. STORE

<i>Music Usage</i>	<i>Parameter</i>	<i>Annual Rate</i>
<b>Space size of premises</b>	1 s/d 1000 M2	Rp. 900.000,-
	1001 s/d 5000 M2	Rp. 675.000,-/1000 m2
	5001 s/d 10.000 M2	Rp. 505.000,-/1000 m2
	10.001 s/d 20.000 M2	Rp. 370.000,-/1000 m2
	Each Add. 1.000 M2	Rp. 175.000,-/1000 m2
<b>Video Wall Facility</b>		Rp. 1.500.000,-

UPT-PUSTAK-UNDIP



#### 14. ICE SKATING

BEE = Rp. 15.000,- (tiket masuk sekali pakai)

WORKING DAYS = working hours/24 x 313

Working Hours = 13,5 hours per day

$1,3 \% \times 50 \% \times 176 \times \text{Rp. } 15.000,- = \text{Rp. } 17.160,-$   
Pembulatan = **Rp. 17.000,-/m<sup>2</sup> floor area**

#### 15. MINIMUM PAYMENT

Apabila kapasitas penggunaan musik Users baik Background atau dan Live music dibawah nilai Rp. 500.000,- maka dikenakan Royalti sebesar **Rp. 500.000,-**

Di dalam penerbitan buku, bagi seorang pengarang pemula masalah honorarium atau royalty tidaklah terlalu dipermasalahkan, dengan diterbitkannya hasil karyanya saja sudah merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Lain halnya bagi pengarang yang sudah senior atau professional, masalah honorarium adalah hal yang penting, karena kelangsungan hidupnya digantungkan kepada hasil karyanya atau royalty dari hasil ciptaannya yang diterbitkan oleh penerbit, baik itu berupa harian umum, majalah ataupun yang sudah menjadi naskah ilmiah.

Masalah honorarium yang harus diterima oleh pencipta atau pengarang karya tulis yang akan diterbitkan dalam sebuah buku, terdapat berbagai faktor yang harus diperhitungkan, baik ia dilihat dari sudut pengarangnya maupun dari penerbitnya. Dalam praktek ada kalanya penerbit berani membayar lebih dahulu honorarium pengarang walaupun buku belum jadi, hal ini disebabkan pengarangnya sudah cukup dikenal. Di lain pihak ada pula pengarang ingin agar honornya

lebih tinggi dari honor biasa karena ia beranggapan bahwa bukunya pasti laku karena nama sudah dikenal. Sehingga secara umum dapat dibagi klasifikasi/system pembayaran honorarium pengarang sebagai berikut :<sup>16</sup>

1. Dengan sistem prosentase

Pengarang mendapat honorarium dari penerbit sekian persen dari harga netto yang telah terjual, biasanya untuk karangan asli berkisar antara 10-20%, sedangkan untuk terjemahan atau penghimpun berkisar antara 10-17,5% per buku. Penghitungan honorunya adalah Harga Jual, mis Rp.1.000,- penghitungannya adalah Harga netto per buku =  $40\% \times \text{Rp.1.000,-} = \text{Rp.600,-}$  maka Honor pengarang =  $20\% \times \text{Rp.600,-} + \text{Rp.120,-}$  Jadi honor pengarang per buku yang laku adalah sebesar Rp.120,- (seratus dua puluh rupiah). Biasanya pembayaran honorarium dilakukan setahun 2 kali tergantung dari perjanjian antara kedua belah pihak. Atas honorarium yang diterima oleh pengarang tersebut, kemudian dipotong pajak penghasilan sebesar 15%, maka jumlah bersih yang diterima adalah  $\text{Rp.120,-} \times 15\% = \text{Rp.112,-}$  (seratus dua belas rupiah) per buku.

2. Sistem Termin

Pembayaran honorarium kepada pengarang tidak digantungkan kepada laku tidaknya buku, melainkan sudah ditentukan jangka waktu pembayarannya. Misalnya setelah buku terbit honor dibayar sebanyak 40% dari nilai buku secara keseluruhan, sisanya dibayar 6 bulan atau 12 bulan kemudian. Keuntungan dari system ini pengarang lebih cepat menikmati haknya. Kerugiannya ia tidak mengetahui secara pasti berapa eksemplar bukunya laku.

3. Sistem bagi hasil

---

<sup>16</sup> Sentosa Sembiring., *Op. cit*, hal. 42-46

Pada system ini pengarang mendapat honorarium bukan berupa uang, akan tetapi sejumlah buku dari yang dicetak dia mendapat bagian, misalnya 20%.

#### 4. Sistem lepas atau penjualan hak cipta

Dalam system ini pengarang menjual hak ciptanya kepada penerbit sehingga ia tidak terlalu lama menunggu honorariumnya seperti dalam sistem-sistem tersebut di atas. Sistem seperti ini pun agak jarang ditemui dalam praktek khususnya untuk karangan asli, karena resikonya cukup tinggi baik bagi penerbit maupun bagi pengarang. Resikonya bagi penerbit kalau buku laku, maka ia untung tetapi kalau tidak ia rugi. Sedangkan bagi pengarang apabila buku tidak laku ia mendapat untung karena honorarium sudah diterima walaupun buku tidak laku. Kerugiannya apabila buku laku ia tidak mendapat honorarium lagi. Namun kerugiannya lebih banyak ada pada penerbit sebab ia tidak dapat menilai buku tersebut apakah betul-betul dibutuhkan oleh pembaca, sedangkan pihak pengarang dapat mengarang buku yang mungkin hampir sama dengan buku yang sudah dijual hak ciptanya.

Menurut Roland Chan<sup>17</sup> dari BSA, bahwa tidak ada yang dinamakan pembayaran Royalti dalam perjanjian Lisensi di bidang program komputer, ketika sebuah program komputer dibeli, si pembeli hanya membeli hak untuk menggunakan program komputer tersebut, dan bukan kepemilikannya. Karena itu, penggunaan program komputer tersebut diatur oleh syarat dan ketentuan yang tertuang dalam lisensinya. Terhadap para distributor program komputer secara khusus mendapatkan hak eksklusif tertentu untuk menjual produk di sebuah negara. Dan beberapa pemilik hak cipta program komputer bahkan telah menempatkan distributor-distributor program komputer mereka

---

<sup>17</sup> Beberapa pertanyaan yang penulis dikirimkan ke BSA dan dijawab oleh Roland Chan (BSA Regional Marketing Manager Asia Pasific) yang dikirimkan melalui E-mail pada tanggal 25 Mei 2003.

sendiri di suatu daerah. Akan tetapi distributor-distributor tersebut bukanlah pemilik hak cipta program komputer, melainkan hanya menerima wewenang untuk menjual program komputer saja.

## 2. Pencatatan Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta

### 2.1. Pencatatan Perjanjian Lisensi

Pengaturan pelisensian menurut penambahan pasal baru (pasal 38A) Undang-undang Hak Cipta Tahun 1997, dimaksudkan untuk memberikan landasan pengaturan bagi praktek pelisensian yang berlangsung di bidang hak cipta. Pada dasarnya, perjanjian lisensi<sup>18</sup> hanya bersifat pemberian izin atau hak dituangkan dalam akta perjanjian untuk dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta. Perjanjian lisensi lazimnya tidak dibuat secara khusus. Artinya pemegang hak cipta tetap dapat melaksanakan hak ciptanya atau

---

<sup>18</sup> Bandingkan dengan Sanusi Bintang, SH., ILM. *Hukum Hak Cipta.*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1998, hlm 41, yang menyebutkan bahwa :  
Lisensi berasal dari kata "license" yang berarti izin. Di sini pencipta sebagai pemberi lisensi (*licensor*) memberikan izin kepada penerima lisensi (*Licensee*) untuk dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta. Jadi, berbeda dengan peralihan sebagaimana diatur dalam pasal 3 UUHC, lisensi ini sifatnya terbatas. Pada dasarnya UUHC menganut sisten lisensi non eksklusif, di mana walaupun pemberi lisensi sudah memberikan lisensi kepada penerima lisensi tertentu berdasarkan perjanjian lisensi (*license agreement*), pemberi lisensi masih tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak penerima lisensi lainnya untuk melaksanakannya (mengumumkan dan memperbanyak ciptaan). Namun, ketentuan ini dapat disimpangi dengan mengatur secara berlainan di dalam perjanjian lisensi. Jadi sistem lisensi non eksklusif itu tidak dipegang secara ketat, karena masih ada kesempatan untuk memilih sistem lisensi eksklusif. Kalau sistem lisensi eksklusif yang dipilih oleh para pihak, maka penerima lisensi adalah satu-satunya yang berhak, dan pemberi lisensi tidak dapat melaksanakan lagi sendiri atau melisensikan lebih lanjut kepada pihak ketiga lainnya selama jangka waktu tertentu sebagaimana disepakati bersama di dalam perjanjian. Perjanjian lisensi eksklusif ini lebih menguntungkan pihak penerima lisensi, karena memperoleh kekuasaan yang besar terhadap ciptaan. Kekuasaan tersebut kalau digunakan dengan itikad jahat dapat merugikan kepentingan pencipta dan perekonomian negara, misalnya melalui penggunaan hak monopoli untuk menghilangkan sistem persaingan sehat di pasar.

memberikan lisensi yang sama kepada pihak ketiga. Perjanjian lisensi dapat pula dibuat secara khusus atau eksklusif, yang berarti secara khusus hanya diberikan kepada satu orang penerima lisensi.

Perjanjian lisensi yang bersifat eksklusif seperti ini pada dasarnya dapat disalahgunakan untuk memonopoli pasar, atau meniadakan persaingan sehat pasar. Sebagai contoh hal itu dapat terjadi apabila pemegang lisensi secara sengaja tidak memanfaatkan atau mengeksploitasi ciptaan yang dilisensikan. Hal itu dilakukan agar ia dapat menguasai pasar dengan produk lain atau ciptaannya sendiri. Cara demikian jelas akan merugikan hak pencipta dan bahkan dapat mengganggu pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dengan memperhatikan kemungkinan seperti itu Undang-undang hak cipta memberikan arahan bahwa perlisensian dapat dilaksanakan sepanjang tidak merugikan perekonomian Indonesia.

Di dalam pembuatan perjanjian lisensi, para pihak harus memperhatikan ketentuan larangan sebagaimana diatur pasal 47 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu bahwa perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban lebih lanjut yang harus dilakukan oleh para pihak terhadap perjanjian lisensi yang telah dilakukan adalah mencatatkan perjanjian

lisensi tersebut ke Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar perjanjian lisensi tersebut mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Ketentuan kewajiban pencatatan perjanjian lisensi, menimbulkan pertanyaan bagi Edy Damian<sup>19</sup>, yaitu apakah dalam prakteknya keharusan mencatatkan ke Kantor Hak Cipta tidak akan menjadi suatu beban tambahan bagi pencipta atau pemegang hak cipta yang belum mengenal kewajiban seperti ini sampai sekarang ?

Windiaprana Ramelan<sup>20</sup> mengemukakan, menurut undang hak cipta memang benar bahwa agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian lisensi wajib dicatatkan di Kantor Hak Cipta. Namun pada pasal yang sama menyatakan bahwa : Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian lisensi termasuk tata cara pencatatannya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Dan sejauh ini kami belum mendapatkan peraturan pemerintah yang mengatur hal tersebut.

Lebih lanjut Windiaprana Ramelan mengemukakan bahwa pemegang hak cipta berhak memberi lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UUHC (Mengumumkan dan Memperbanyak suatu ciptaan), maka kami berpendapat bahwa hal

---

<sup>19</sup> Edy Damian, *Op Cit*, hlm 190

<sup>20</sup> Windiaprana Ramelan, *ibid*

dengan cara yang kami lakukan ini saja sudah mempunyai kekuatan hukum. Dan perjanjian yang kami buat formatnya sama dengan perjanjian biasa yang juga mempunyai kekuatan hukum.

## **2.2. Pendaftaran Hak Cipta**

Di dalam Pasal 35 ayat (4) Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 secara tegas disebutkan bahwa pendaftaran suatu ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta, oleh karena itu pendaftaran Hak Cipta tidak mutlak harus dilakukan oleh si pencipta, karena tanpa didaftarkanpun suatu ciptaan tetap dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta. Hal ini dapat menunjukkan bahwa pendaftaran ciptaan adalah bersifat "FAKULTATIF", maksudnya pencipta boleh mendaftarkan ciptaannya atau boleh juga tidak mendaftarkan ciptaannya.

Akan tetapi walaupun menurut hukum tidak diwajibkan untuk mendaftarkan suatu ciptaan, namun perlu diketahui bahwa tujuan pendaftaran ciptaan adalah untuk memudahkan pembuktian bilamana terjadi sengketa dikemudian hari, kemudian perlu diingat bahwa apabila ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya maka pihak yang dapat membuktikan sebaliknya itulah yang mendapat perlindungan hukum.

Mengingat Pasal 35 Undang-undang Hak Cipta telah mengatur tentang pendaftaran ciptaan dan negara telah pula menyiapkan pelayanan Administrasi pendaftarannya, sehingga para pencipta suatu

karya cipta perlu mendaftarkan ciptaannya guna memperoleh bukti awal bagi pemilikan haknya. Kemudian untuk pendaftaran Hak Cipta tersebut Menteri Kehakiman Republik Indonesia telah mengeluarkan suatu peraturan yaitu :

Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.01-HC.03.01 tentang Pendaftaran Ciptaan. Adapun Prosedur Pendaftaran ciptaan sebagaimana ditegaskan dalam peraturan tersebut adalah bahwa permohonan pendaftaran ciptaan dapat diajukan kepada Menteri Kehakiman RI melalui Direktorat Hak Cipta, dengan syarat sebagai berikut :

1. Dengan surat rangkap dua ;
2. Ditulis dalam bahasa Indonesia ;
3. Diketik di atas kertas folio berganda ;
4. Lembar pertama dibubuhi Materai Rp. 6000,- ;
5. Ditandatangani oleh pemohon atau pemohon-pemohon atau kuasanya.

Surat permohonan Pendaftaran Ciptaan tersebut berisi sebagai berikut :

1. Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta ;
2. Nama, Kewarganegaraan dan alamat pemegang Hak Cipta ;
3. Nama, Kewarganegaraan dan alamat kuasa ;
4. Jenis dan judul ciptaan yang domohonkan;
5. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau diluar wilayah Indonesia;;
6. Uraian ciptaan ;



Disamping prosedur pendaftaran ciptaan sebagaimana diuraikan diatas pemohon harus juga melampirkan syarat-syarat pendaftaran sebagai berikut :

**1. Contoh ciptaan atau penggantinya ;**

Jumlah contoh ciptaan yang harus dilampirkan tergantung dari jenis ciptaan yang diajukan, misalnya : Untuk ciptaan "Seni Logo", sebanyak 10 lembar, dan untuk ciptaan Buku sebanyak 2 (dua) Eksemplar.

**2. Surat Kuasa ;**

Bilamana suatu permohonan diajukan melalui Kuasa, maka harus melampirkan "Surat Kuasa Khusus".

**3. Bukti tertulis tentang Kewarganegaraan ;**

Bukti ini misalnya : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku baik oleh Pencipta maupun kuasanya, Pasport, dan lain-lain.

**4. Salinan Resmi Pendirian Badan Hukum ;**

Bilamana pemohon adalah suatu Badan Hukum harus melampirkan turunan Akte Pendirian Badan Hukum tersebut (pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Kehakiman RI) ;

**5. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;**

Walaupun didalam Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan tidak diatur untuk melampirkan NPWP dalam pengajuan permohonan pendaftaran ciptaan, akan tetapi NPWP tersebut berdasarkan Surat Edaran Menteri Kehakiman RI Nomor.M.02-HC.03.1 Tahun 1991 tentang kewajiban melampirkan NPWP dalam permohonan pendaftaran ciptaan dan pencatatan pemindahan Hak Cipta terdaftar.

Surat edaran tersebut hanya berlaku khusus bagi pemohon/pencipta yang berasal dari dalam negeri saja.

#### **6. Membayar Biaya Permohonan Pendaftaran ;**

Besarnya biaya Pendaftaran ciptaan adalah sebesar Rp.75.000,- dan Rp. 150.000 Khususnya untuk program komputer,- (PP No.26 tahun 1999) dan biaya tersebut hanya berlaku untuk satu permohonan ciptaan.

Setelah pemohon menyampaikan permohonan pendaftaran ciptaan dengan memenuhi syarat sebagaimana tersebut di atas, maka kepada pemohon diberikan tanda terima dan berkas permohonan pendaftaran tersebut akan dilakukan pemeriksaan formalitas administrasi. Apabila surat permohonan pendaftaran ciptaan tidak memenuhi syarat-syarat formal, Direktorat Hak Cipta akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon agar supaya memenuhi kekurangan persyaratan tersebut. Apabila dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal surat pemberitahuan, pemohon tidak memenuhi atau melengkapi syarat-syarat formal, maka permohonan pendaftaran ciptaan menjadi batal demi hukum.

Permohonan pendaftaran hak cipta yang sudah mendapatkan persetujuan daftar atau tolak, selanjutnya akan diterbitkan surat pendaftaran ciptaan terhadap permohonan yang di daftar dan akan diberikan surat pemberitahuan penolakan terhadap permohonan yang ditolak. Permohonan yang dikabulkan atau didaftar dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan dan diumumkan dalam Tambahan

Berita Negara, sedangkan permohonan yang ditolak tidak dicatat dalam daftar umum ciptaan.

**C. PERMOHONAN PENDAFTARAN CIPTAAN  
TAHUN 1991 s/d 2002<sup>21</sup>**

TAHUN	PERMOHONAN PENDAFTARAN CIPTAAN			CIPTAAN TERDAFTAR		CIPTAAN DITOLAK	
	Dalam Negeri	Luar Negeri	Jumlah	Dalam Negeri	Luar Negeri	Dalam Negeri	Luar Negeri
1991	2785	50	2835	1551	33	1182	16
1992	2887	93	2980	1919	69	939	20
1993	3591	128	3719	2356	121	1055	7
1994	3738	209	3947	2366	143	1093	61
1995	4373	184	4557	3134	114	1245	70
1996	4646	294	4940	2869	195	1147	38
1997	2065	120	2185	594	42	223	5
1998	580	26	606	311	6	222	20
1999	684	14	698	686	14	138	0
2000	1026	23	1049	608	10	5	0
2001	1501	34	1535	992	13	6	0
2002	1856	21	1877	1186	0	14	0
<b>JUMLAH</b>	<b>29.732</b>	<b>1196</b>	<b>30.928</b>	<b>18.572</b>	<b>760</b>	<b>7263</b>	<b>237</b>

<sup>21</sup>. Sumber diperoleh dari Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan HAM RI.

#### **4. Penyelesaian Sengketa Lisensi**

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa lisensi sebagai suatu transaksi yang melahirkan perjanjian selalu melibatkan dua pihak. Kedua belah pihak tersebut memiliki kepentingan yang berdiri sendiri dan kadangkala bertolak belakang, meskipun secara konseptual dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak tersebut, yaitu pemberi lisensi dan penerima lisensi akan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Maksud untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya inilah yang pada pokoknya menjadi sumber perbedaan kepentingan dan perselisihan yang dapat terjadi diantara kedua belah pihak tersebut.

Hal-hal lain yang mungkin akan menimbulkan adanya perselisihan dalam pelaksanaan lisensi hak cipta perlu diantisipasi benar oleh para pihak, baik itu menyangkut obyek yang diperjanjikan (apakah obyeknya benar-benar milik pemegang hak cipta, apakah jangka waktu perlindungannya masih ada), kewajiban pembayaran imbalan atau royalti, maupun hal-hal lain yang di sepakati bersama yang di tuangkan dalam perjanjian.

Untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan lisensi tersebut, para pihak dapat menempuh upaya-upaya hukum, baik itu melalui pengadilan maupun melalui alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase.

### 3.1. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan

Di dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 mengatur penyelesaian sengketa yang menyangkut suatu ciptaan atau obyek yang diperjanjikan termasuk di dalamnya hak moral. Pasal 55 mengatur tentang pelanggaran atas hak moral yaitu bahwa penyerahan Hak Cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat tanpa persetujuannya :

- a. meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu;
- b. mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;
- c. mengganti atau mengubah judul ciptaan; atau
- d. mengubah isi ciptaan.

Gugatan yang dilakukan pencipta atau ahli warisnya terhadap hak moral tersebut berupa gugatan ganti rugi (Pasal 58) dan diajukan ke Pengadilan Niaga (pasal 56). Selain gugatan terhadap hak moral pemegang hak cipta juga berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu. Di samping itu pemegang hak cipta juga berhak memohon kepada pengadilan niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari hasil pelanggaran hak cipta.

Gugatan yang dilakukan oleh pencipta, ahli waris maupun pemegang hak cipta ke pengadilan niaga harus diputus dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak gugatan

didaftarkan di Pengadilan Niaga yang bersangkutan (pasal 59).

Adapun tenggang waktu penyelesaian melalui pengadilan niaga

tersebut dapat diperinci sebagai berikut :

No.	Pasal	Uraian	Jumlah Hari
1	60 (1)	Gugatan diajukan ke Ketua pengadilan Niaga	A hari
2	60 (3)	Panitera menyampaikan gugatan ke Ketua pengadilan Niaga	A + 2 hari
3	60 (4)	Pengadilan Niaga Mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang	A + 3 hari
4	60 (5)	Sidang pemeriksaan	A + 60 hari
5	61 (1)	Pemanggilan para pihak	A + 7 hari
6	61 (2)	Putusan	A + 90 hari
7	61 (2)	Perpanjangan putusan dengan persetujuan Mahkamah Agung	A+90+30 hari
8	61 (4)	Penyampaian isi putusan kepada para pihak	A+90+14 hari
9	62 (2)	Permohonan kasasi	1s/d14 hari= B
10	63 (1)	Memori kasasi	B+14 hari = C
11	63 (2)	Panitera menyampaikan permohonan dan memori kasasi ke termohon	C + 7 hari = D
12	63 (3)	Kontra memori kasasi oleh termohon	D+ 14 hari = E
13	63 (3)	Panitera menyampaikan kontra memori kasasi ke pemohon kasasi	E + 7 hari = F
14	63 (4)	Panitera mengirimkan berkas perkara kasasi ke Mahkamah Agung	F +14 hari = G
15	64 (1)	MA Menetapkan hari sidang	G + 7 hari
16	64 (2)	Sidang Pemeriksaan oleh MA	G +60 hari
17	64 (3)	Putusan permohonan kasasi	G +90 hari = H
17	64 (5)	Panitera MA menyampaikan salinan putusan	H + 7 hari = I
18	64 (6)	Juru Sita menyampaikan salinan putusan kepada pemohon kasasi & termohon kasasi	I + 7 Hari

Hak mengajukan gugatan terhadap pelanggaran hak moral sebagaimana diatur dalam pasal 55 dan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta seperti diatur dalam pasal 56 serta upaya alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase tersebut di atas tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak cipta. Di samping upaya gugatan ganti rugi terhadap pelanggaran hak cipta, bagi pemegang hak atau pihak-pihak yang dirugikan dapat mengajukan *Penetapan Sementara Pengadilan* ke Pengadilan Niaga.

Penanganan penyelesaian sengketa hak cipta yang juga menyangkut lisensi, pernah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas gugatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum Amerika Serikat yang bernama "**MICROSOFT CORPORATION**" terhadap Ny. **MERLINA LEE/HM KOMPUTER** yang beralamat di Dusit Mangga Dua Lantai Dasar No. 12, Jl. Arteri Mangga Dua Raya Jakarta Pusat 10730. Penggugat menyampaikan surat gugatannya tertanggal 6 Pebruari 2001 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Jakarta Pusat di bawah nomor register 40/PDT.G/2001/PN.JKT.PST.

Penggugat adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang penciptaan, penelitian, pengembangan dan penjualan berbagai macam sistem perangkat lunak (*software*) untuk komputer, di mana salah satu hasil ciptaan penggugat tersebut adalah sistem **WINDOWS 98** dan hasil ciptaan lainnya adalah **MICROSOFT 2000** Edisi Professional yang

di dalamnya meliputi sekumpulan sistem aplikasi antara lain *MICROSOFT WORD, MICROSOFT EXCEL, MICROSOFT ACCES, MICROSOFT OUTLOOK, MICROSOFT FRONT PAGE dan MICROSOFT POWER POINT* yang selanjutnya di sebut *MICROSOFT OFFICE 2000*. *MICROSOFT SOFTWARE* tersebut dilengkapi juga dengan program imaji-imaji (*image*), fotografi, animasi, video, audio dan musik.

*MICROSOFT SOFTWARE* tersebut telah dipromosikan, dijual dan dilisensikan hampir ke seluruh dunia. Dengan melihat kecanggihan, fungsi dan kegunaan dari *MICROSOFT SOFTWARE* tersebut, maka hampir pengguna komputer di dunia ini memakai dan menggunakan *MICROSOFT SOFTWARE* yang merupakan hasil karya penggugat. Sistem perangkat lunak (*software*) sebagaimana *WINDOWS* adalah sistem yang mutlak diperlukan dalam mengoperasikan komputer, tanpa suatu perangkat lunak maka suatu komputer tidak dapat dioperasikan. Aplikasi bisnis seperti *MICROSOFT OFFICE 2000* sangatlah penting dan merupakan perangkat bisnis yang sangat bernilai dan memudahkan sebuah bisnis untuk dijalankan dengan lebih efisien.

Di pihak tergugat, Ny. MERLINA LEE/HM KOMPUTER adalah pemilik dari suatu badan usaha yang melakukan penjualan eceran perangkat keras komputer melalui unit usahanya Toko HJ Komputer. Tergugat dalam menjalankan usahanya yaitu dalam menjual perangkat keras komputer digugat selalu memberikan bonus berupa pemasangan *MICROSOFT SOFTWARE* dengan cara menginstal/memasang salinan



dari *MICROSOFT SOFTWARE* di setiap unit komputer yang terjual. Pemberian bonus tersebut dilakukan oleh tergugat tanpa ijin dan tanpa lisensi dari penggugat.

Perkara gugatan *MICROSOFT SOFTWARE* tersebut ditangani oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh *H. Herri Swantoro, SH* yang di bantu dua orang sebagai Hakim anggota yaitu *Amiruddin Zakaria, SH* dan *Saparuddin Hasibuan, SH* dengan Panitera Pengganti *Hadi Sukma*, memberikan putusan pada hari Kamis tanggal 27 September 2001 Nomor 40/PDT.G/2001/PN.JKT.PT sebagai berikut <sup>22</sup>:

1. Tergugat dinyatakan terbukti tanpa ijin/lisensi melakukan pemasangan terhadap setiap unit komputer yang dijualnya dengan cara menginstal sistem *MICROSOFT SOFTWARE*, di mana microsoft software tersebut adalah milik dari penggugat.
2. Tindakan-tindakan Tergugat juga dinyatakan dilakukan dengan kesengajaan yaitu menginstal *MICRSOFT SOFTWARE* ke dalam komputer yang dijualnya, karena pada dasarnya dalam Adagium, tiap orang dianggap telah mengetahui hukum sehingga sudah seharusnya Tergugat menyadari tindakannya tersebut melanggar hak pihak lain dan melanggar hukum/melawan hukum.
3. Tindakan tergugat telah memenuhi 4 (empat) unsur dari suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan tersebut melawan hukum, menimbulkan

---

<sup>22</sup> Sumber diperoleh dari *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Putusan 40/PDT.G/2001/PN.JKT.PST.*

kerugian, dilakukan dengan kesalahan dan adanya kausalitas antara perbuatan dengan kerugian, dengan demikian tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 yaitu dengan cara memperbanyak Hak Cipta *MICROSOF SOFTWARE* melalui cara penginstalan secara tanpa hak, khususnya program *WINDOW 98 MICROSOFT OFFICE 2000* ke dalam komputer yang dirakit dan telah dijual oleh dan di toko milik Tergugat.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar US\$ 892.050 (delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima puluh Dolar Amerika Serikat), dengan perhitungan bahwa Tergugat telah melakukan usahanya terhitung sejak tanggal 28 September 1998 yang sampai dengan perkara ini di putus adalah 3 tahun, sehingga jumlah ganti rugi sebanyak  $3 \times 313 \text{ hari} \times 2 \text{ unit}$  (dalam satu hari terjual 2 unit komputer)  $\times (\text{US\$ } 365 + \text{US\$ } 110)$  yang merupakan harga *MICROSOFT OFFICE 1997 DAN PROGRAM WINDOWS*) sehingga berjumlah US\$ 892.050 (delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima puluh Dollar Amerika Serikat).

Dalam kasus lain tentang pemberian lisensi Michael Jackson dan the Beathles (diambil dari majalah WHO) edisi Australia tanggal 14

Januari 2001 dengan judul Membagi Jalur Uang<sup>23</sup>, disebutkan bahwa kesempatan terbaik Michael Jackson untuk bernyanyi dengan group the Beathles adalah saat ia berduet dengan salah satu personilnya, Paul McCartney dalam lagu "*The Girl is Mine*" pada tahun 1982 dan "Say Say Say" pada tahun 1983. Tapi, hal ini tidak menahannya memperoleh US\$17 sen untuk setiap CD yang terjual. Royalti pemutaran di radio dan kompilasi tembang hits the Beathles. Bagaimana Michael Jackson dapat mengklaim hak-haknya atas karya the Beathles termasuk album yang menduduki tangga lagu pertama di Australia selama 9 minggu dan telah terjual lebih dari 20 juta kopi di seluruh dunia itu? Pada tahun 1985, Michael Jackson membeli hak atas sejumlah besar lagu the Beathles dalam transaksi bernilai US\$ 47,5 juta. "Ini benar-benar merupakan suatu transaksi yang luar biasa", kata Jeff Brabec, eksekutif perusahaan rekaman lagu-lagu tersebut. Adalah kenyataan bahwa pewaris paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr dan John Lennon, para personil group the Beathles, memperoleh hampir US\$ 3 untuk setiap CD, karena masih memegang hak atas rekaman suara lagu-lagu Beathles. Tapi, apakah langkah bisnis Michael Jackson yang lihai ini memang benar-benar memberi hasil US\$3,4 juta kepadanya sejak dirilisnya CD tersebut tanggal 14 Nopember 2001?

---

<sup>23</sup> Indonesia Australia Specialised Training Project-Phase II, Khursus Singkat Khusus Hak Cipta, *Op.cit.* hal.64

### 3.2. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pranata Penyelesaian Sengketa Alternatif, termasuk di dalamnya pranata Arbitrase di Indonesia saat ini telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tersendiri, yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut, obyek perjanjian arbitrase atau dalam hal ini adalah sengketa yang akan diselesaikan di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase (dan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya) adalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Tidak ada suatu penjelasan resmi mengenai apa yang dimaksud dengan pernyataan "di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai" sebagaimana dikatakan dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) undang-undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut.

Di dalam penjelasan pasal 66 huruf b Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan Arbitrase internasional disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum perdagangan adalah kegiatan-kegiatan antara lain bidang : ***Perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal,***

***industri dan hak kekayaan intelektual*** . Gunawan Widjaja<sup>24</sup> lebih lanjut mengemukakan bahwa makna perdagangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) seharusnya juga memiliki makna yang laus, sebagaimana halnya penjelasan pasal 66 huruf b Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tersebut. Hal ini sejalan juga dengan ketentuan selanjutnya dalam pasal 5 ayat (2) yang memberikan perumusan negatif, dimana dikatakan bahwa sengketa-sengketa yang dianggap tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat dilakukan perdamaian.

Dengan adanya ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal 66 huruf b Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut, maka sengketa yang berhubungan dengan pemberian lisensi Hak Kekayaan Intelektual dapat diselesaikan melalui pranata Alternatif Penyelesaian Sengketa termasuk Arbitrase. Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut, dapat ditemui sekurangnya ada enam macam tata cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu :

1. Konsolidasi;
2. Negosiasi;
3. Mediasi;
4. Konsiliasi;
5. Pemberian pendapat hukum;
6. Arbitrase.

---

<sup>24</sup> Gunawan Widjaja, op cit hal. 122

Di dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, disebutkan pula bahwa selain penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam pasal 55 dan pasal 56, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Dari penjelasan pasal 65 disebutkan bahwa yang dimaksud alternatif penyelesaian sengketa adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

## **B. PEMBAHASAN**

Dari uraian hasil penelitian tersebut di atas dapat penulis sajikan pembahasan dan analisa dari beberapa permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut :

### **1. Mekanisme Lisensi Hak Cipta**

#### **1.1. Mekanisme Lisensi**

Dari hasil penelitian tentang mekanisme lisensi di bidang hak cipta tersebut ternyata terdapat perbedaan mekanisme dalam pelaksanaan pemberian lisensi antara obyek hak cipta yang satu terhadap obyek hak cipta yang lain, baik antara lisensi lagu atau musik, lisensi penerbitan buku maupun lisensi komputer program atau piranti lunak program komputer. Di samping itu, di dalam mekanisme lisensi hak cipta, menyangkut pembuatan perjanjian lisensi ada yang menggunakan kontrak baku dan ada pula yang tidak. Di dalam

mekanisme lisensi pengumuman lagu atau musik, perjanjian lisensinya dibuat setelah para pengguna (*user*) mengumumkan lagu atau musik terlebih dahulu dan itupun ditagih oleh kuasa dari para pencipta atau pemegang hak cipta lagu atau musik.

Mekanisme pelaksanaan Lisensi di bidang hak cipta harus dibedakan dengan mekanisme pemindahan hak. Keduanya terdapat kemiripan yang kadang-kadang sulit untuk dibedakan. Ada perbedaan penting antara penyerahan hak atau pemindahan hak dengan lisensi suatu ciptaan yang menjadi obyek hak cipta<sup>25</sup>, yaitu apabila pemegang hak cipta menyerahkan hak ciptanya, ia pada dasarnya menyerahkan pengawasan ekonomi atas ciptaan itu kepada pembeli hak cipta berdasarkan perjanjian secara tertulis. Sebaliknya jika pemegang hak cipta memberi lisensi atas hak ciptanya, pada dasarnya ia dapat mengontrol pengawasan ekonomi atas ciptaan itu.

Berdasarkan perjanjian lisensi pemegang hak cipta dapat mengalihkan haknya kepada orang lain yaitu hak ekonomi<sup>26</sup> dari hak

---

<sup>25</sup> **Indonesia Australia Specialised Training Project-Phase II Auasaid, *Intellectual Property Rights Elementary*, 2001, Conducted by Asian Law Group Pty.Ltd. hal.139**

<sup>26</sup> **Bambang Kesowo, *Op.cit* hal. 24 yang menyebutkan bahwa :**  
Secara umum setiap negara minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis :

1. Hak reproduksi atau penggandaan (*Reproduction right*)
2. Hak adaptasi (*Adaptation Right*)
3. Hak Distribusi (*Distribution Right*)
4. Hak Pertunjukan (*Public Performance Right*)
5. Hak Penyiaran (*Broadcasting Right*)
6. Hak Program Kabel (*Cablecasting Right*)
7. Droit de suite
8. Hak Pinjam masyarakat (*Public Lending Right*)

cipta itu sesuai lisensi. Sebagai pengganti lisensi, penerima hak diminta untuk membayar royalti. Lisensi dapat membatasi sifat, lingkup, waktu atau wilayah dari hak khusus yang dialihkan. Bahkan setelah penyerahan hak ekonomi atas suatu ciptaan, pencipta dapat memilih untuk mempertahankan hak moralnya<sup>27</sup> atas ciptaan tersebut.

Kompleksnya mekanisme lisensi dibidang hak cipta sebagaimana diungkapkan oleh James F. Sundah tersebut , juga

---

Bandingkan juga dengan *Penjelasan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta* yang menyebutkan bahwa :

Hak cipta itu terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk hak terkait. Yang termasuk hak ekonomi adalah mengumumkan dan memperbanyak. Dalam pengertian mengumumkan dan memperbanyak adalah termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apapun. Bandingkan juga dengan buletin yang dikeluarkan oleh KCI, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud kegiatan-kegiatan mengumumkan adalah menyiarkan (melalui radio/televisi) menyiarkan (dengan cara memutar kaset, Copact Disc, lainnya atau membawakan dalam suatu pertunjukan), menyebarkan maupun membacakan lagu-lagu. Sedangkan yang dimaksud dengan memperbanyak adalah menggandakan lagu dalam bentuk kaset, Compact Disc atau alat pemutar lainnya.

<sup>27</sup> Bandingkan dengan *Indonesia Australia Specialised Training Project-Phase II, Intellectual Property Rights Elementary*, Khursus Singkat tentang Hak Cipta, 2002, hal.67-68, yang menyebutkan bahwa :

Tidak jelas apakah hak-hak moral di Indonesia akan interpretasikan secara sempit atau luas oleh pengadilan. Hak-hak moral di Indonesia tidak terlihat mendalam seperti yang terdapat di seluruh negara eropa. Misalnya, di negara-negara seperti Perancis, seorang pengarang dapat mencegah karyanya untuk dipertunjukkan secara tidak layak walaupun telah menjual hak cipta atas karya tersebut kepada pihak lain. Si pencipta mungkin berhak menuntut bahkan kalau karyanya untuk misalnya dipamerkan di pameran tertentu atau diperlihatkan di atas kaos/T-shirt.

Pendekatan yang digunakan di kebanyakan negara yang menganut sistem hukum common law difokuskan kepada nilai komersial dari hak cipta karya tersebut dibanding hak-hak moral pencipta. Jika seorang pengarang menjual hak cipta buku mereka tanpa prasarat tertentu, pengarang tersebut akan memperoleh kesulitan untuk mengklaim bahwa hak-hak moral mereka telah melanggar karena sampul buku tersebut. Karena itu hak-hak moral tersebut selama ini tidak diakui dalam sistem hukum Anglo saxon.

Isu yang sangat diperdebatkan adalah apakah si pengarang dapat memberikan lisensi atas hak moral mereka. Di sejumlah negara, seperti Kanada dan Inggris , pengarang dan pencipta dapat menjual hak moral atas karya mereka. Dengan demikian, mereka mungkin dapat memperoleh imbalan uang yang lebih besar dibanding jika mereka hanya memberikan lisensi hak-hak lain atas karya mereka. Kekurangan pendekatan ini adalah kurangnya posisi tawar pencipta dan seniman lokal yang menyebabkan mereka terpaksa menjual atau memberikan lisensi atas hak moral mereka dengan imbalan yang sedikit. Ini menjadikan hak moral tak berguna.



dikarenakan banyaknya pihak-pihak yang terlibat sebagai pemegang hak dalam ciptaan lagu atau musik. Dalam bidang lagu atau musik, pemegang hak cipta adalah mereka yang tersebut di bawah ini <sup>28</sup>:

1. Pencipta melodi lagu (komposer), yaitu orang yang menciptakan melodi dari suatu lagu atau musik;
2. Pencipta lirik lagu (lirikus), yaitu orang yang menciptakan teks atau lirik dari suatu lagu atau musik;
3. Penata musik (*arranger*), yaitu orang yang mengubah lagu atau musik ciptaan orang lain sampai ke tingkat tertentu, atau menambah sedemikian rupa, sehingga dengan kontribusi kreatifnya karya lagu atau musik tersebut diwarnai dimensi yang khas dan bersifat pribadi;
4. Pengadaptasi lirik (sub-lirikus), yaitu orang yang menciptakan teks atau lirik baru atau menterjemahkan lirik asli dari suatu karya musik yang diterbitkan kembali di wilayah Indonesia;
5. Publisher dan sub-publisher, badan hukum yang diberi kuasa oleh pencipta untuk menjadi pemegang hak cipta dan oleh sebab itu memiliki kepentingan terhadap seluruh karya lagu atau musik tersebut.

Apabila hak cipta diumumkan oleh pihak lain, misalnya oleh pemakai (*user*), maka *user* harus minta ijin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta. Biasanya dalam masalah perizinan

---

<sup>28</sup> Yayasan Karya Cipta Indonesia, *Pedoman singkat untuk anggota*, Jakarta.

pencipta atau pemegang hak ciptanya diwakili oleh suatu badan pemungut royalti. Pemakai (*user*) wajib membayar royalti kepada organisasi pemungut royalti. Di Indonesia baru ada organisasi pemungut royalti yang mewakili pencipta atau pemegang hak cipta bidang musik atau lagu, sedangkan untuk karya cipta yang lain belum ada.<sup>29</sup>

Lebih lanjut, Hendra Tanu Admadja menguraikan bahwa selain pemberian ijin atau lisensi untuk perbanyakan atau penggandaan, yang sebenarnya sama pentingnya tetapi tampaknya belum lama dikenal luas adalah pemberian ijin atau lisensi untuk memakai ciptaan. Bentuk yang lazim ditemui adalah penggunaan ciptaan dalam pertunjukan atau penyiaran dalam kegiatan komersial. Dalam praktek tampaknya eksploitasi "*performing right*" ini kurang memperoleh pemahaman yang memadai di kalangan para pencipta, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya.

Kendala terbatasnya waktu dan tenaga apabila dihadapkan dengan luasnya wilayah penyebaran penggunaan ciptaan musik atau lagu (sekali pun dibatasi pada kegiatan usaha tertentu seperti hotel, restoran, pub, café, music room, perusahaan jasa angkutan), memang tidak sederhana bagi seorang pencipta maupun oleh kalangan pengguna ciptaan dalam kegiatan usaha mereka. Ada baiknya memperhatikan dengan sungguh-sungguh pengembangan lembaga

---

<sup>29</sup> Hendra Tanu Admadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Promosi Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Maret 2003, Catatan Kaki Nomor 450, hal.309

penunjang dalam rangkaian kegiatan eksploitasi hak ekonomi dari hak cipta tersebut. Diantaranya adalah lembaga penerbit musik atau "*music publisher*", serta lembaga pengumpul royalti atau "*collecting society*" atau *collecting administration* untuk bidang-bidang hak cipta lainnya, seperti buku, film dan sebagainya.<sup>30</sup>

Lisensi KCI merupakan ijin untuk mengumumkan atau memperbanyak lagu milik pemegang Hak Cipta Indonesia dan Asing yang dikelola oleh Karya Cipta Indonesia. Sistem ini menghindarkan para pengguna dari kewajiban mencari, meminta ijin, bernegosiasi dan membayar royalti kepada pemegang Hak Cipta satu persatu. Adapun mekanisme pemberian lisensi hak mengumumkan dilakukan dengan cara "*Blanket License*" yaitu lisensi diberikan untuk memutar atau memainkan seluruh *repertoire*<sup>31</sup> yang dikelola Karya Cipta Indonesia (KCI), yaitu jutaan lagu sedunia dalam satu paket. Ijin tidak diberikan lagu perlagu. Dalam sistem ini royalti dibayar di muka, sesuai dengan konsep umum perijinan dan pengguna tinggal melaporkan *reportiere* yang dipergunakan kepada KCI. Sedangkan mekanisme pemberian lisensi hak memperbanyak dilakukan tidak menggunakan sistem "*Blanket License*", melainkan ijin untuk per lagu dengan tarif untuk

---

<sup>30</sup> Hendra Tanu Admadja, *ibid*, hal.310

<sup>31</sup> *Repertoire* adalah seluruh karya cipta musik yang diserahkan oleh para pemegang hak cipta untuk dikelola baik dalam maupun luar negeri kepada Karya Cipta Indonesia untuk dikelola hak ekonomi pengumuman musiknya

merekam ,lagu dalam akset, CD, VCD, DVD, dan sebagainya dipergunakan presentase dari harga jual *dealer*.<sup>32</sup>

Mekanisme pemberian lisensi hak cipta lagu atau musik seperti tersebut di atas berawal dari pemberian kuasa oleh para pencipta/pemegang hak cipta lagu kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia, berdasarkan surat kuasa tersebut YKCI melaksanakan pengumpulan/penarikan royalti dengan mekanisme seperti diutarakan oleh Manajer Lisensi dari KCI tersebut diatas. Dari uraian mekanisme pemberian lisensi musik atau lagu tersebut terlihat bahwa lisensi hak cipta lagu/musik yang dikeluarkan oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia sebagai kuasa dari pencipta/pemegang hak cipta, diberikan kepada pihak kedua(pemakai/pengguna) tidak terlebih dahulu melalui suatu negosiasi perjanjian kedua belah pihak, tetapi perjanjian lisensi akan dikeluarkan sertifikat lisensi setelah para pengguna/pemakai musik tersebut menggunakan musik dan membayarkan royaltinya.

Pengeksploitasian hak cipta lagu/musik dengan cara pengumuman yang dilakukan oleh para pengguna/pemakai tersebut tidak terlebih dahulu mendapat ijin atau lisensi dari pencipta atau pemegang hak, namun ijin/lisensi itu baru muncul apabila pembayaran royalti diterima oleh YKCI dan YKCI mengeluarkan sertifikat lisensi pengumuman musik beserta perjanjian lisensi yang berlaku satu tahun. Proses tersebut didahului adanya pendataan yang dilakukan oleh

---

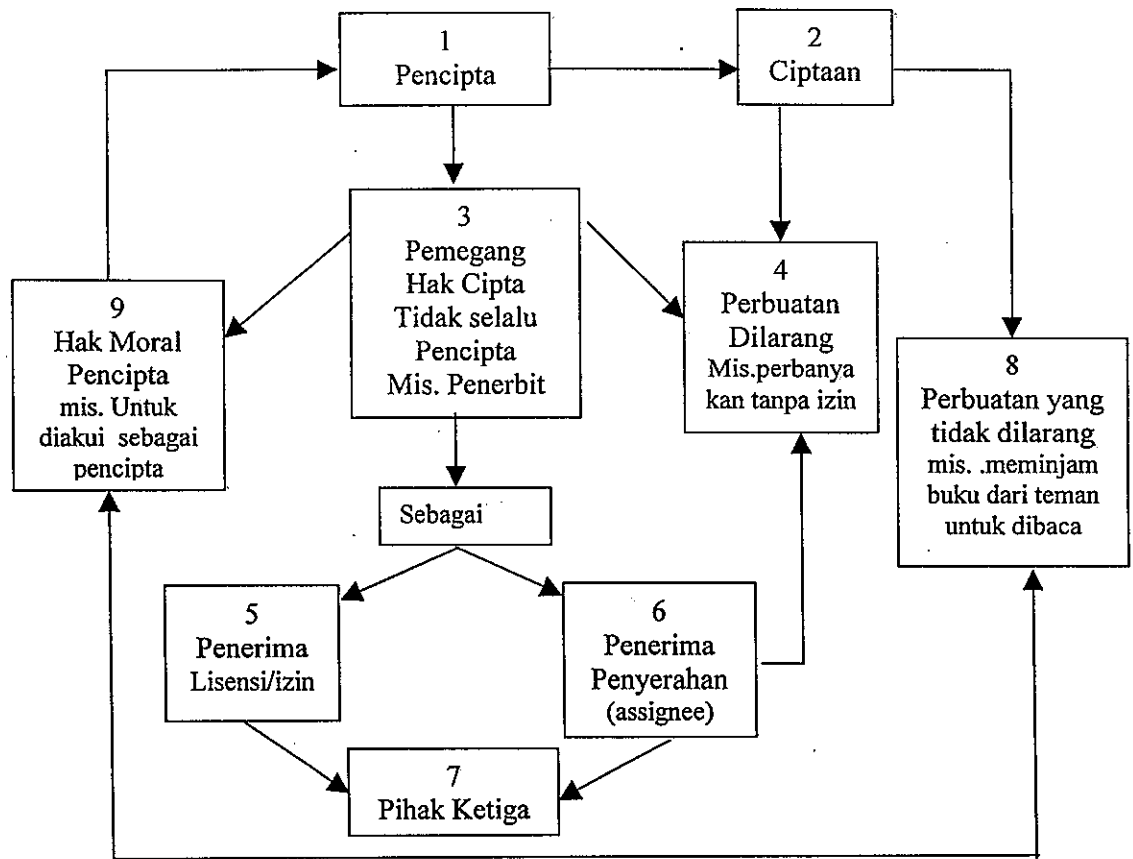
<sup>32</sup>, [www.kci.or.id](http://www.kci.or.id), *Lisensi Hak Cipta Sedunia* hal. 22

Yayasan Karya Cipta Indonesia kemudian para pengguna/pemakai mengirimkan data penggunaan lagu kepada YKCI dan apabila terjadi kesepakatan mengenai data, tarif dan pembayaran timbullah hak dan kewajiban para pihak.

Kebenaran akan data seperti Jenis pemakaian musiknya seperti apa (BM,LM,karaoke,Diskotik,TV,Video screen dan lain-lain), kapasitasnya atau luasnya tempat, jenis usahanya apa, alamat lengkapnya, pimpinannya siapa, nama badan usahanya apa serta organizernya apa, tergantung dari kejujuran para pengguna/pemakai musik/lagu yang mengisi formulir yang disampaikan ke YKCI. Hal ini juga diakui oleh Winidaprana Ramelan dari Yayasan Karya Cipta Indonesia. Kebenaran data tersebut akan berpengaruh terhadap perhitungan pembayaran royalti yang harus dibayar oleh para pengguna/pemakai, sehingga dengan demikian hak para pencipta atau pemegang hak cipta lagu khususnya dalam pengeksplotasian lagu melalui pengumuman sangat ditentukan oleh etiket baik dan kejujuran para pengguna/pemakai.

Untuk menganalisa mekanisme lisensi penggunaan lagu/musik seperti diuraikan di atas dapat penulis sajikan satu hubungan antara pencipta dan ciptaannya beserta timbulnya hukum hak cipta yang melindungi suatu ciptaan, yaitu seperti tergambar dalam diagram sebagai berikut :

Diagram : Mekanisme Pencipta dan Ciptaannya<sup>33</sup>



Penjelasan Diagram :

1. Pencipta adalah seorang yang melahirkan suatu ciptaan;
2. Ciptaan merupakan perwujudan dari ide pencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dilindungi Undang-undang Hak Cipta;
3. Suatu ciptaan yang memperoleh hak-hak ekonomi dapat dieksploitasi sendiri oleh pencipta atau dialihkan hak-hak ekonominya untuk dieksploitasi oleh pihak lain yang akan

<sup>33</sup> Eddy Damian, Op.Cipt, Hal. 122, Bandingkan juga dengan David Bainbridge, Intellectual Property, Fourth Edition, Page 75.

bertindak sebagai pemegang hak cipta berdasarkan perjanjian lisensi (*Licence Agreement*) atau perjanjian penyerahan (*Assignment Agreement*);

4. Terhadap ciptaan yang dilindungi Undang-undang Hak Cipta, tanpa persetujuan pencipta, seseorang tidak diperkenankan atau dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, seperti melakukan perbanyakan atau pengumuman;
5. Pemegang hak cipta berdasarkan perjanjian lisensi, memperoleh hak untuk melakukan sebagian atau keseluruhan dari tindakan-tindakan yang dilarang, misalnya memperbanyak ciptaan sejumlah yang ditentukan dalam suatu jangka waktu tertentu. Setelah waktunya selesai, hak-hak ekonomi yang dieksploitasi olehnya harus dikembalikan kepada pencipta;
6. Atau, pemegang hak cipta berdasarkan perjanjian penyerahan mempunyai hak memperbanyak ciptaan tanpa perlu mengembalikan hak-hak eksploitasi ciptaan kepada pencipta. Dalam perjanjian penyerahan, hak-hak ekonomi atas ciptaan telah beralih dari pencipta kepada pemegang hak cipta;
7. Terhadap perbuatan-perbuatan tertentu yang digolongkan sebagai perbuatan yang layak (*fair use/dealing*), baik pencipta atau pemegang hak cipta tidak dapat melarang dilakukannya oleh pihak ketiga.

8. Setiap orang dapat melakukan perbuatan-perbuatan menggunakan ciptaan yang digolongkan sebagai perbuatan yang tidak dilarang oleh Undang-undang, seperti meminjamkan sebuah buku kepada seorang kawan, atau memperbanyak sebuah buku untuk keperluan penelitian;
9. Siapapun juga, baik pemegang hak cipta yang berlisensi atau pemegang hak cipta yang mengambil alih hak-hak ekonomi suatu ciptaan dari pencipta berdasarkan perjanjian penyerahan harus menjunjung tinggi dan memberi respek atau rasa hormat hak-hak moral yang dipunyai pencipta dengan syarat bahwa pencipta telah dengan jelas menyatakan identitas dirinya sebagai pencipta.

Dari diagram tersebut terlihat bahwa mekanisme lisensi itu dilaksanakan oleh pencipta sebagai pemegang hak cipta atau pihak lain sebagai pemegang hak cipta yang menerima hak dari pencipta kepada penerima lisensi. Oleh karena tindakan Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam pemberian lisensi musik/lagu seperti proses tersebut di atas sangatlah menyimpang dari kemauan ketentuan Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Hal ini dikarenakan tindakan pengumuman hak cipta lagu yang dilakukan oleh para pengguna untuk keperluan komersial yang tidak terlebih dahulu mendapat izin dari pencipta lagu atau musik.



Mekanisme pengumuman musik/lagu sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang hak cipta adalah bahwa sebelum para pengguna tersebut mengeksploitasi dengan cara pengumuman suatu lagu/musik harus terlebih dahulu mendapatkan ijin secara tertulis dari para pencipta lagu/musik. Hal ini selaras dengan ketentuan pasal 66<sup>34</sup> dan pasal 72 Bab XIII Ketentuan Pidana Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yaitu bahwa Negara mempunyai kewenangan untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta.

Ditinjau dari Teori Struktural fungsional yang dikutip oleh Giddens bahwa tindakan manusia terbentuk oleh struktur-struktur sosial tertentu (nilai, norma dan kebiasaan). Mekanisme pengumpulan royalti dibidang lagu atau musik ditinjau dari , nilai, norma dan kebiasaan yang terjadi baik ditingkat internasional maupun di tingkat nasional dilakukan oleh suatu perkumpulan kolektif. Oleh karena itu tindakan Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam mekanisme pemberian lisensi seperti diuraikan pada proses di atas dapatlah dibenarkan, walaupun bersimpangan dengan kemauan Undang-undang hak cipta.

Disamping itu ditinjau dari teori pertukaran (*exchange Theory*) yang menekankan bahwa untung rugi merupakan dasar pilihan tindakan manusia, maka sangatlah rasional apabila seorang pencipta lagu memberikan kuasa kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia untuk menarik royalti sekaligus memberikan lisensi kepada para pengguna

---

<sup>34</sup> Pasal 66 Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 menyatakan bahwa Hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, pasal 56 dan pasal 65 tidak

musik/lagu untuk kepentingan komersial. Keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh para pencipta lagu/musik secara perorangan untuk melacak, mengenali, mengawasi beribu perusahaan (seperti stasiun bumi, radio satelit, televisi, diskotik, hotel, karaoke, karnaval, restoran, pub, lounge, pesawat terbang dan lain-lain) merupakan alasan bagi seorang pencipta lagu/musik untuk memberikan kuasa kepada organisasi kolektif pengumpul royalti. Disamping itu secara individual seorang pencipta lagu/musik tidak mempunyai kapasitas untuk memonitor semua penggunaan tersebut, untuk bernegosiasi dengan para pemakai sekaligus memungut royalti.

Dalam pemberian kuasa yang dilakukan oleh para pencipta lagu/musik kepada organisasi administrasi kolektif yang sudah mempunyai sistem kerja yang sudah mapan akan lebih menguntungkan para pencipta lagu/musik. Keuntungan para pencipta lagu/musik adalah mereka tidak memerlukan modal, tenaga maupun waktu dalam memperoleh royalti. Semua mekanismenya, dilaksanakan oleh organisasi kolektif yang ditunjuk, baik proses memonitor penggunaan lagu/musik, negoisasi dengan calon pemakai, memberikan lisensi dengan bayaran yang sesuai maupun memungut bayaran tertentu maupun mendistribusikannya kepada para pencipta atau pemegang hak.

---

mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak cipta.

Di bidang sastra, seorang sastrawan sebagai pemilik ide cerita yang merupakan embrio karya sastra tidak mempunyai modal, manajerial, tenaga dan mesin. Penerbit tidak mempunyai ide cerita, tetapi memiliki modal, manajerial, tenaga dan mesin. Hubungan antara sastrawan dan penerbit saling membutuhkan. Akan tetapi, penerbit mempunyai posisi yang lebih menguntungkan dari pada sastrawan. Meskipun ide cerita merupakan unsur yang sejajar dengan unsur modal, manajerial, tenaga dan mesin, tetapi dalam perjanjian antara sastrawan dengan penerbit, sastrawan dalam posisi lemah, sedangkan pihak penerbit dalam posisi yang sangat kuat. Beberapa kelemahan pihak sastrawan antara lain <sup>35</sup>:

1. penandatanganan kontrak berdasarkan sistem royalti, ketika ide cerita eksemplar sastrawan hanya menerima 25% dari jumlah buku yang dicetak. sudah dibukukan dan dicetak sekian ribu Royalti yang menjadi haknya tidak langsung diterimakan, tetapi harus menunggu selama satu semester (enam bulan), lain halnya dengan unsur kertas dan karyawan dapat langsung dibayarkan haknya;
2. kontrak berdasarkan sistem pelepasan sebagian hak cipta yang dimiliki sastrawan kepada penerbit dibayar dimuka dengan harga yang disepakati bersama (mirip dengan sistem flat), apabila buku laku keras dan dicetak ulang sastrawan tidak mendapat bagian;
3. Sastrawan dibebani pajak penghasilan sebesar 15 % dan harus dibayar dimuka.

Setelah terjadi kerjasama antara sastrawan dengan penerbit lahirlah karya sastra berupa buku. Karya sastra dalam bentuk buku menjadi tanggung jawab bersama, sedangkan hak cipta tetap

---

<sup>35</sup> Purwantini dan Tubiyono., *Karya Sastra sebagai Suatu Karya Cipta yang dilindungi.*, makalah disampaikan dalam Temu Wicara Hak Cipta, Departemen Kehakiman RI, tanggal 21 dan 22 September 1998 di Jakarta, hal.7 - 8.

dipegang oleh sastrawan. Apabila terjadi pelanggaran hak yang dirugikan tidak saja sastrawan, tetapi juga pihak penerbit.

Di dalam mekanisme lisensi di bidang penerbitan buku, pada awalnya juga dimulai dengan dibuatnya suatu perjanjian penerbitan buku. Suatu perjanjian penerbitan buku yang tergolong sebagai perjanjian lisensi eksklusif mengatur di dalamnya beberapa hal tentang pengalihan atau transpormasi hak cipta dari penulis kepada penerbit buku. Pada suatu pengalihan hak cipta dengan perjanjian penerbitan buku yang tergolong perjanjian eksklusif, kepada penerbit hanya diberikan izin untuk perbanyakkan atau penggandaan karya tulis dalam bentuk buku.<sup>36</sup>

Adapun isi perjanjian penerbitan buku yang tergolong sebagai perjanjian lisensi perlu diperhatikan tentang keharusan adanya paling tidak lima pokok yang perlu dimuat dalam perjanjian penerbitan buku. Kelima pokok yang dimaksud meliputi :

**Pertama : Judul Perjanjian**

Setiap perjanjian selalu memakai judul yang dicantumkan sebagai kalimat pertama untuk penerbitan buku, judul yang lazim digunakan adalah ***Perjanjian Penerbitan Buku***.

**Kedua : Komparasi**

Pada bagian ini disebutkan para peserta atau para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian penerbitan buku. Umumnya pencipta karya tulis yang merupakan orang perorangan dicantumkan sebagai pokok pertama. Atau yang

---

<sup>36</sup> Edy Damian, *Loc Cit.*, hal 223

menjadi pokok pertama dapat juga merupakan suatu lembaga misalnya yayasan atau pusat studi atau lembaga swadaya masyarakat yang bertindak sebagai pemegang hak cipta karya tulis. Yang menjadi pihak kedua dalam perjanjian dengan sendirinya adalah penerbit buku yang biasanya merupakan suatu persekutuan perdata (Firma, CV, ) atau badan hukum seperti Koperasi, Yayasan dan Perseroan Terbatas (PT).

**Ketiga :** Premisse atau pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan secara ringkas dasar-dasar dan maksud tujuan utama diadakannya perjanjian penerbitan buku yang tiada lain adalah mengalihkan hak cipta karya tulis pencipta (pihak Pertama). Pengalihan dilakukan untuk dieksploitasi hak-hak ekonomi karya tulis penulis oleh penerbit (pihak kedua) dalam bentuk buku.

**Keempat :** Batang tubuh (isi perjanjian)

Di dalam batang tubuh ini sekurang-kurangnya diuraikan secara otentik jenis-jenis hak cipta karya tulis yang dialihkan dari pencipta kepada pemegang hak cipta; jangka waktu berlakunya perjanjian; hak-hak dan kewajiban-kewajiban pihak dan penyelesaian sengketa.

Menurut **Suyud Margono**,<sup>37</sup> Lisensi hak cipta tidak dapat begitu saja lepas dari lapangan hukum kontrak. Bagaimanapun juga, lisensi dari hak cipta meliputi kontrak yang berisikan ketentuan-ketentuan detail yang mengatur tentang hak dan kewajiban dari setiap hak. Terhadap pemberi atau penerima lisensi hak cipta, harus

---

<sup>37</sup> **Suyud Margono**., *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003, Hal. 76-79

mempertimbangkan masalah-masalah atau isu-isu dari dokumen dalam suatu kontrak lisensi hak hak cipta, yaitu :

a. *Para pihak (parties),*

Dalam hal ini harus jelas para pihak yang akan menandatangani kontrak lisensi tersebut;

b. *Pemegang hak cipta (Copyright Holder),*

Perjanjian harus menyebutkan nama dari pemegang hak cipta;

c. *Gambaran material hak cipta yang akan dilisensikan,*

Material dimana hak yang akan diberikan harus selalu secara jelas disebutkan dan dapat teridentifikasi;

d. *Pemberian hak (Rights Granted),*

Perjanjian lisensi harus menyebutkan secara jelas bahwa Licensor telah memberikan hak kepada Licensee untuk melaksanakan haknya dalam perjanjian lisensi;

e. *Jangka waktu (Duration),*

Perjanjian harus menyebutkan berapa lamakah hak lisensi itu diberikan;

f. *Wilayah (Territory),*

Perjanjian harus menyebutkan dimana Lisensi hak Cipta tersebut dapat digunakan;

g. *Pembayaran (Payment),*

Terdapat beberapa cara di dalam melakukan pembayaran, misalnya : uang muka atau dengan prosentase atas pendapatan penjualan karya cipta (royalties);

h. *Kewajiban untuk mempublikasikan dan memasarkan Obligation to publish & Market),*

Penerima lisensi harus mempublikasikan dan memasarkan karya cipta dalam kurun waktu tertentu;

i. *Keuangan dan inspeksi (Accounting & Inspection),*

Apabila pembayaran dengan sistem royalti, maka penerima lisensi harus memberikan informasi keuangan secara reguler. Perjanjian ini harus memperbolehkan *Licensor* untuk memeriksa perhitungan yang relevan, biasanya inspeksi ini tentang berapa banyak *income* yang diperoleh, berapa copy barang yang sudah diproduksi dan terjual dalam masa periode perhitungan tertentu ;

j. *Jaminan (Warranty)*,

Dalam perjanjian harus mengikutsertakan sebuah jaminan dari *licensor* bahwa karya cipta tersebut adalah asli (*original*) dan bukan merupakan pelanggaran dari pihak lain;

k. *Pembubaran (Termination)*,

Dalam perjanjian harus ditentukan, kebutuhan untuk memberikan catatan, peringatan dalam rangka pembubaran, misalnya penerima lisensi berhenti mempublikasikan dan memasarkan karya cipta dalam hal ia melanggar klausul dari kontrak.;

l. *Arbitrase (Arbitration)*,

Dalam perjanjian harus mempertimbangkan sebuah klausul yang menyediakan lembaga arbitrase atau mediasi dalam hal terdapat sengketa.

Di dalam mekanisme lisensi hak cipta di bidang program komputer, sangat berbeda dengan mekanisme lisensi hak cipta lagu/musik dan penerbitan buku. Seperti diuraikan pada permasalahan tersebut di atas, bahwa lisensi hak cipta selalu menggunakan perjanjian lisensi secara baku, terutama yang dikeluarkan oleh para pemilik program komputer. Lisensi hak cipta di bidang program komputer sangat ditentukan oleh kehendak pemilik program komputer, sedangkan bagi penerima lisensi program komputer hanya dapat diberikan lisensi untuk menggunakan saja dengan peruntukan satu

program komputer untuk satu *Personal Komputer* (PC) saja. Para penerima lisensi ini sering disebut sebagai pengguna (*end user*).

Perbedaan mekanisme lisensi antara obyek hak cipta yang dilisensikan, dikarenakan adanya karakteristik yang berbeda-beda dari masing-masing obyek hak cipta (Lagu/musik, Penerbitan buku maupun Program komputer). Di dalam Lagu/musik dan penerbitan buku lebih menonjolkan nilai komersialisasi sedangkan di dalam program komputer menekankan pada penggunaan program komputer. Mengingat masalah lisensi yang secara umum diatur di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka untuk memberikan pedoman dan kemudahan bagi pemberi dan penerima lisensi, perlu dibuatkan suatu Petunjuk pelaksanaan (Juklak) atau Petunjuk Teknis (Juknis) tentang Mekanisme Lisensi di bidang Hak Cipta. Di dalam Petunjuk Pelaksanaan maupun Petunjuk Teknis tersebut diperinci satu-persatu tentang jenis-jenis lisensi eksklusif atau non eksklusif, hak dan kewajiban para pihak dan syarat-syarat minimum yang harus dituangkan dalam perjanjian terhadap obyek-obyek hak cipta sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Para penerima lisensi program komputer dibatasi oleh hal-hal yang menyangkut perbanyakan/penggandaan, pengumuman dalam pengertian menjual kembali program komputer yang pernah diperoleh melalui lisensi. Penerima lisensi hanya diperbolehkan membuat satu



cadangan program komputer sebagai backup saja tidak untuk yang lain-lain. Penerima lisensi hanya membayar sekali sebesar sejumlah harga yang ditawarkan dan menggunakan program komputer tersebut selama batas waktu yang tidak ditentukan, sehingga besarnya harga sangat ditentukan oleh pemberi lisensi.

Dari ketiga jenis ciptaan yaitu baik lagu/musik, penerbitan buku maupun program komputer, walaupun terdapat perbedaan tetapi masing-masing juga mengandung kesamaan dalam hal penggunaan perjanjian baku, namun demikian hak cipta bidang lagu/musik dan penerbitan buku tidak selalu menggunakan perjanjian baku. Model kontrak standar/baku yang berkembang selama ini sebenarnya merupakan respon yang wajar terhadap interaksi yang terjadi diantara para pelaku bisnis. Mereka menuntut adanya lembaga yang mampu memediasi dan memfasilitasi transaksi diantara mereka. Dari kacamata bisnis, model kontrak standar merupakan model yang ideal karena pada umumnya sudah matang tersaji. Hal ini sesuai dengan dalil-dalil efisiensi dan efektifitas yang mereka harapkan.<sup>38</sup>

<sup>38</sup> Menurut Paul H. Brietzke sistem hukum kontrak yang ideal adalah yang paling murah dan efisien. Periksa Paul H. Brietzke, *The Relevance of American Contracts Law in Indonesia*, Lokakarya ELIPs Projects-Materi Perbandingan Hukum Perjanjian, Kerjasama FH Unair dengan FH UI, Hotel Sahid Surabaya, 1993, hal 17  
Bandingkan pula dengan Agus Yudha Hernoko., *Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Standar (Pengembangan Konsep Win-win Solution sebagai Alternatif Baru dalam Kontrak Bisnis)*, diedit oleh Dr. Sarwirini, SH., MS dan L. Budi Kagramanto, SH, MH., MM dalam *Puspa Ragam Informasi dan Problematika Hukum*, Penerbit Karya Abditama, Surabaya 2000, hal.97 yang menyatakan bahwa :

“ Bahwa model kontrak yang tercipta diantara para pihak demikian beragam. Salah satu model kontrak yang berkembang seiring dengan kebutuhan pelaku bisnis modern adalah model kontrak standar/kontrak baku. Melalui model kontrak standar (yang sudah dalam bentuk baku) para pihak tinggal mengisi beberapa hal yang mereka sepakati. Model *instant* ini merupakan pilihan yang ideal bagi para pelaku bisnis karena dianggap lebih akomodatif bagi

Dari kacamata hukum pun ternyata model kontrak standar masih sering diperdebatkan (bahkan menjadi polemik). Bagi pihak yang mendukungnya, keberadaan kontrak standar dipandang sebagai bagian dari dinamika perkembangan masyarakat modern. Pada sisi lain, pihak yang mempermasalahkan keberadaan kontrak standar ini dilatarbelakangi oleh fenomena masih banyaknya model kontrak standar yang berat sebelah, pincang dan tidak seimbang. Seringkali dirasakan kontrak kontrak standar yang dibuat memberikan pembatasan-pembatasan serta prasarat yang dipaksakan, tercermin dari klausula-klausula kontraknya, sehingga dianggap berat sebelah dan serta merugikan kepentingan salah satu pihak.<sup>39</sup>

Mengenai keabsahan dari kontrak standar ini, paling tidak ada dua pendapat yang berkembang, yaitu :<sup>40</sup>

- a. Pendapat yang menyatakan kontrak yang demikian itu sah.

Pendapat ini antara lain didukung oleh **Stein** yang mengemukakan bahwa kontrak demikian itu merupakan "*de fictie van will vertrouwen*" yang membangkitkan kepercayaan para pihak untuk mengikatkan diri.

---

dunia bisnis, mengingat sifatnya sederhana, cepat, murah dan efisien adalah salah satu latar belakang itu. Pada dasarnya kontrak standar tidak bertentangan dengan azas kebebasan berkontrak yang menjadi pondasi hubungan para pihak. Mengingat azas kebebasan berkontrak memberi peluang dan kemudahan bagi para pihak untuk menuangkan kehendaknya ke dalam bentuk perjanjian baik secara lisan maupun tulisan (bahkan model kontrak standar/baku)."

<sup>39</sup> Agus Yudha Hernoko., *Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Standar (Pengembangan Konsep Win-win Solution sebagai Alternatif Baru dalam Kontrak Bisnis)*, diedit oleh Dr. Sarwirini, SH, MS dan L. Budi Kagramanto, SH, MH, MM dalam *Puspa Ragam Informasi dan Problematika Hukum*, Penerbit Karya Abditama, Surabaya 2000, hal.99.

<sup>40</sup> Agus Yudha Hernoko., *Op cit*, hal. 103

- b. Pendapat yang menyatakan kontrak itu tidak sah. Hal ini didukung antara lain **Pitlo**, yang menyatakan kontrak standar sebagai "*dwang contract*".

## 1.2. Pembayaran Royalti

Hak cipta merupakan suatu karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum. Jika pihak lain ingin menggunakannya sepatutnya minta ijin kepada pemilik hak cipta. Pembayaran royalti merupakan konsekuensi dari menggunakan jasa/karya orang lain. Sebagai contoh, karya cipta musik, dalam kehidupan sehari-hari musik merupakan salah satu sarana penunjang dalam kegiatan usaha misalnya dari restoran atau diskotik sampai usaha penyiaran.

Hak cipta musik adalah merupakan salah satu sarana yang mutlak ada untuk mendukung berlangsungnya kegiatan-kegiatan usaha seperti usaha hiburan Diskotik, Karaoke, konser dan sebagainya), akan tetapi ada juga beberapa kegiatan usaha tanpa musik pun masih tetap bisa berlangsung. Alasan-alasan tersebut dipergunakan untuk membedakan besarnya tarif yang harus dibayar oleh para pengguna musik, jadi tergantung dari *intensitas* (peranan) dan *ekstensitas* (lamanya) musik dipergunakan. Oleh karena itu pihak lain yang menggunakan karya cipta musik seberapa banyakpun, dan pihak tersebut memperoleh manfaat komersial maka sudah sepantasnya si Pencipta Lagu dimintakan ijin dan dihargai dengan peranannya.

Lain halnya apabila seseorang membeli kaset untuk didengarkan di mobil pribadi atau di rumah, tidak perlu membayar royalti, tetapi jika orang tersebut adalah seorang pengusaha Rumah Makan dan memutar lagu/kaset yang dibelinya tersebut di tempat usahanya maka dia wajib meminta izin kepada pencipta dengan imbalan membayar royalti. Sebagai contoh lain, apabila seseorang sedang berjalan-jalan di pasar sambil bernyanyi, maka kegiatan tersebut tidak perlu minta izin, tetapi apabila orang tersebut diminta oleh promotor untuk berpentas dan promotor tersebut menjual karcis maka kembali kepada prinsip yang dianut di dalam penggunaan karya cipta secara komersial.

Dengan kata lain Jika seseorang membeli kaset/CD/VCD dan sebagainya yang berisi lagu atau musik, tidak berarti seseorang tersebut memiliki hak cipta atas lagu dalam kaset/CD tersebut, ia boleh menikmatinya untuk kepentingan pribadi, tetapi tidak boleh mendengarkannya di tempat-tempat umum atau kegiatan usaha tanpa izin terlebih dahulu (hak mengumumkan), juga tidak boleh memperbanyak rekaman tersebut tanpa izin (hak memperbanyak)<sup>41</sup>.

Pencipta, pemegang hak cipta, artis, pemusik, produser rekaman maupun organisasi siaran dalam mengeksploitasi karya ciptanya secara maksimal membutuhkan bantuan pihak lain yaitu organisasi profesi yang menangani secara khusus masalah itu. Mereka

---

<sup>41</sup> [www.kci.or.id](http://www.kci.or.id), *Lisensi Hak Cipta Musik Sedunia*, hal. 1

secara perorangan tidak mungkin mendatangi ke setiap penyelenggara satu persatu, seperti konser, radio, diskotik, organisasi penyelenggara siaran televisi, hotel maupun tempat-tempat umum yang menggunakan lagu atau musik dalam kegiatan komersial<sup>42</sup>, untuk mengambil hasil eksploitasi hak ekonomi karya cipta pencipta atau pemegang hak cipta.

Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) sebagai suatu organisasi profesi yang mengelola pengadministrasian kolektif khususnya dibidang lagu atau musik sangat berperan dalam pengeksploitasian hak cipta lagu atau musik bagi pencipta, pemegang hak cipta, artis organisasi siaran maupun produser rekaman, terutama dalam pemungutan dan pembagian royalti atas hak pengumuman (*performing right*).

Mekanisme pengadministrasian kolektif merupakan sarana manajemen eksploitasi hak cipta dengan cara mengelola hak cipta (hak mengumumkan atau hak memperbanyak) lagu atau musik dalam arti pemungutan *fee* atau royalti atas pemakaian hak cipta untuk

---

<sup>42</sup> Bandingkan dengan Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Perundang-undangan DKI Jakarta Nomor W7-UM.01.10-415 tanggal 6 Maret 2000, yang menyebutkan bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak pencipta, maka dihimbau agar : Bagi para pemilik/pimpinan/pengelola Restoran, bar, pub, café, diskotik, karaoke, night club, supermaket, pertokoan, dept. store, mall, plaza, perkulakn, hipermaket, minimarket, kolam renang, tempat biliar, tempat senam, fitness center, healt center, griya pijat, ransportasi & terminal darat, laut, udara, perkantoran, bank rumah sakit, penyelenggara konser musik, fashion show, pameran, seminar, taman rekreasi, taman hiburan rakyat dan sebagainya, yang memutar, menayangkan, memperdagangkan atau mempertunjukkan lagu/musik dengan atau tanpa syair yang terdapat di dalamnya sedemikian rupa sehingga dapat di dengar oleh orang lain, baik dalam bentuk kaset, piringan hitam, compact disk, laser disk, DVD, radio televisi atau perangkat bunyi (phonogram). Dalam bentuk background musik, live musik, diskotik karaoke, video screen, musik ditelpon, siaran radio di internet maupun teknologi baru lainnya , *wajib meminta ijin dan membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta.*

kepentingan komersial baik berupa pertunjukan maupun penyiaran (*performing right*) dan penggandaan melalui media cetak atau alat mekanik (*mechanical right*), serta pendistribusian kolektif yang diawali dengan pemberian kuasa oleh pencipta atau pemegang hak cipta lagu atau musik kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia untuk memungut *fee* atau royalti hak mengumumkan atas pemakaian hak ciptanya oleh orang lain untuk kepentingan yang bersifat komersial dan untuk mengelola hak memperbanyak *repertoire* lagu atau musik. Setelah itu membagikan hasil pemungutan *fee* atau royalti tersebut kepada yang berhak (para pencipta atau pemegang hak cipta) setelah dipotong biaya administrasi<sup>43</sup>.

Dalam melaksanakan tugas sebagai penerima kuasa dari para pencipta atau pemegang hak cipta musik/lagu, Yayasan Karya Cipta Indonesia melakukan pengawasan dan pengamatan yang kemudian mencatat lagu-lagu yang akan diputar di diskotik tertentu, sebagai parameter, contoh sebuah kota memiliki 30 buah diskotik, enam diantaranya (20% dari jumlah tersebut) dipakai sebagai parameter yang dapat mewakili 24 sisanya, dengan pertimbangan adanya kecenderungan memutar lagu yang sama juga dilakukan untuk restoran.

Yayasan Karya Cipta Indonesia atas nama pencipta/pemegang hak cipta, memberikan ijin kepada semua pihak yang ingin

---

<sup>43</sup> Hendra Tanu Admadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Promosi Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Maret 2003, Catatan Kaki Nomor 450, hal.315

menggunakan lagu, khususnya untuk kegiatan mengumumkan atau memperbanyak (walaupun yang terakhir ini terbatas). Untuk memperoleh ijin Karya Cipta Indonesia, para pemakai (*users*) membayar royalti untuk penggunaan 1 (satu) tahun dimuka. Setelah membayar, Karya Cipta Indonesia akan memberikan *Sertifikat Lisensi pengumuman Musik (SLPM)* yang memperbolehkan pemakai untuk menggunakan lagu apa saja dalam kegiatan usahanya dan membebaskan pemakai dari segala tuntutan/gugatan dari pencipta Karya Cipta Indonesia. Setiap bulan Maret suatu tahun tertentu Yayasan Karya Cipta Indonesia mendistribusikan royalti kepada pencipta lagu yang lagunya digunakan selama kurun waktu pemantauan bulan Januari hingga Desember tahun sebelumnya.

Bagi para pemakai yang menggunakan atau memutar lagu serta mempertunjukkan lagu tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat komersial, maka mereka wajib meminta ijin dan membayar royalti, namun tidak terbatas pada daftar yang tertera pada surat Menteri Kehakiman selaku Ketua Dewan Hak Cipta, akan tetapi juga termasuk pihak-pihak yang menggunakan lagu seperti misalnya Radio, Televisi, perusahaan penerbangan, transportasi serta tempat-tempat hiburan lainnya

Pembayaran terhadap pengalihan hak ekonomi pencipta biasanya dilakukan dengan dua cara, yaitu, ***sistem royalti*** dan ***sistem***

*flat pay*.<sup>44</sup> Selama ini pencipta lagu mendapatkan honor yang dinilai secara "*Flat pay*", tanpa memperhitungkan jumlah unit kaset, VCD dan CD yang dijual yang diiringi dengan "bonus", jika lagunya terpilih di urutan pertama sampul kaset dan mendapat honor tambahan, jika dijadikan seleksi, kompilasi, dan lain-lain. Sistem royalti ini jika dibandingkan dengan cara *flat* berbeda dalam hal besarnya uang yang diterima di muka. Dengan cara *flat*, uang muka yang diterima lebih besar dibandingkan dengan sistem royalti. Sebaliknya, sistem royalti memberikan kemungkinan pencipta mendapat imbalan yang lebih besar di kemudian hari, jika kaset tersebut laku dijual.

*Royalty Sistem* tidak membedakan sebuah lagu menjadi andalan atau tidak, karena penilaian harga adalah berdasarkan pada seberapa banyak lagu yang diputar. Dampak paling penting dari diberlakukannya sistem ini adalah kesejahteraan pencipta lagu yang akan terjamin sepanjang akhir hayatnya, bahkan jika ia meninggal dunia sekalipun, dapat diturunkan kepada ahli warisnya.

Sistem royalti memang baru dikenal dalam beberapa tahun terakhir di industri musik tanah air. Karena itu, tak heran kalau masih banyak musisi, pencipta lagu atau penyanyi yang masih kurang paham bagaimana sebenarnya sistem tersebut. Masih banyak musisi lebih suka memakai sistem bayar putus (*flat pay*) atau dibayar di muka. Padahal dengan sistem royalti memungkinkan seorang pencipta lagu

---

<sup>44</sup> Hendara Tanu Admadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Catatan kaki Nomor 463, yang menyebutkan bahwa Flat Pay ialah pembayaran sekali lunas dan tidak ada tambahan lagi, satu



dapat memperoleh penghasilan lebih baik. Melihat kondisi ini, lembaga *publiser music* atau lebih dikenal sebagai penerbit musik pun bermunculan. Lembaga ini diharapkan menjadi wakil dari para pencipta lagu agar bisa melakukan kontrak dengan pihak produser dengan sistem royalti. Tak dapat dipungkiri bahwa sampai kini, masih ada produser yang memanfaatkan ketidakpahaman para pencipta lagu atas hak royaltinya, jadi kalau tidak ditagih pencipta, produser pun pura-pura tidak tahu.<sup>45</sup>

Pembayaran *Flat pay* ini memang lebih disenangi oleh para pencipta lagu, dengan alasan pencipta itu tidak bisa mengontrol pemasaran pihak produser. Perusahaan rekaman internasional yang sudah berada di Indonesia, biasanya melakukan kontrak dengan pencipta lagu, penyanyi dan pemusik berdasarkan royalti dengan mengacu pada *mechanical rights*.<sup>46</sup>

Dalam sistem pembayaran *flat pay* dan royalti, menarik untuk diikuti sengketa yang terjadi di Indonesia antara **Bimbo** melawan **Remaco**, No.164.G/1999/PN.,Jak.Sel., yaitu sebagai berikut :

Penggugat adalah pencipta lagu sekaligus penyanyi pop Indonesia yang tergabung dalam sebuah group bernama Bimbo, sedangkan Tergugat I adalah PT. Remaco, yang merekam musik dan lagu Penggugat. Tergugat II Eugene Tomothy, mantan produser Bimbo

---

kali bayar untuk selamanya.

<sup>45</sup> Buletin Karya Cipta Indonesia, *Edisi Khusus Mechanical Rights*, Nomor 4, Edisi Nopember 1998.

<sup>46</sup> Buletin Karya Cipta Indonesia, Nomor 3, Edisi Maret 1998.

selaku pribadi. Mulai dari tahun 1973 sampai dengan 1978 antara Penggugat dan Tergugat telah menandatangani beberapa kesepakatan kerjasama dalam rekaman, penerbitan dan pengedaran lagu-lagu ciptaan Penggugat dalam bentuk kaset dan piringan hitam. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam beberapa perjanjian, antara lain perjanjian induk bertanggal 3 April 1973, Perjanjian Kerjasama bertanggal 6 April 1977, Surat Perjanjian bertanggal 4 April 1978, Surat Perjanjian bertanggal 16 Oktober 1978. Dalam kerjasama tersebut, Bimbo mengatakan tidak pernah melakukan penjualan putus (*flat Pay*) atas master-master rekaman mereka kepada Tergugat. Oleh karena itu, Jika tergugat ingin melakukann perekaman ulang, penerbitan atau pengedaran ulang atas kaset kaset musik dan ciptaan Bimbo, harus mendapatkan ijin sebelumnya dari Bimbo. Bimbo berhak atas royalti dari setiap kaset yang dijual atau diedarkan. Demikian juga, dalam hal Tergugat ingin mengubah desain label kaset, mengkonversi musik dan lagu dari kaset atau piringan hitam ke dalam bentuk CD, VCD, membuat album seleksi , mengubah aransemen musik atau lagu milik Bimbo, terlebih dahulu harus meminta ijin kepada Penggugat. Demikian gugagatan Bimbo.

Sejak tahun 1979, Tergugat telah melakukan rekaman ulang, menggandakan dan mengedarkan secara luas, membuat transaksi dengan pihak ketiga dengan memperdagangkan ciptaan Penggugat, membuat album seleks, mengubah aransemen dari musik pop ke

dalam jenis musik dangut, merekam, mengedarkan lagu Penggugat dalam bentuk CD, VCD, mengubah desain cover album dan mengedarkannya. Tergugat tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Bimbo, dan tidak tercantum dalam klasula perjanjian yang disepakati bersama. Bahkan lebih mengejutkan lagi, Pengugat menjumpai album atau lagu-lagu Bimbo yang diedarkan dan diperdagangkan oleh Tergugat I dan Tergugat II di pasaran luar negeri. Ciptaan Penggugat yang diedarkan dan diperdagangkan di pasaran luar negeri tersebut, antara lain, adalah lagu Indonesia yang berjudul *Ever Green Hits*, yang berisi "Seruni di Noda", "Dosa dan Noda", "Balada Gadis Desa", "Salam Sayang", dan " Dengan Puisi Aku Bernyanyi".

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, antara lain, mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian. Selanjutnya, menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, supaya membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.42.118.000.000,- (Empat Puluh Dua Miliar Seratus Delapan Belas Juta Rupiah) dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepulu juta rupiah) untuk setiap

kali kelalaian, terhitung sejak Putusan Pengadilan dalam perkara ini, telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti.

Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Eksepsi pada tanggal 11 Mei 1999, antara lain, sebagai berikut :

*Pertama*, perjanjian yang ada hanya antara Penggugat dengan PT. Remaco Ltd., dan tidak ada antara penggugat dengan Eugene Timoty.

*Kedua*, Eugene Timoty bertindak selaku Direktur PT. Remaco Ltd., dalam membuat perjanjian dengan Penggugat, dan sama sekali tidak bertindak selaku pribadi, dan hal tersebut sesuai dengan kewenangan yang ada, sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Anggaran Dasar atau Akte Pendirian PT. Remaco Ltd.

*Ketiga*, Eugene Timoty selaku pribadi tidak mempunyai kualitas hukum untuk dijadikan Tergugat II dalam perkara ini, karena yang mempunyai kualitas hukum untuk membuat perjanjian dengan Penggugat adalah Tergugat I, dan untuk itu, mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*) dan salah alamat.

Selanjutnya, jawaban gugatan Tergugat I dan Tergugat II Dalam Pokok Perkara menyebutkan, antara lain, Perjanjian induk yang dikatakan oleh Penggugat, tanggal 3 April 1973, telah diselesaikan pembayarannya dengan baik oleh Tergugat I dengan pembayaran *flat pay* (jual lepas), dan karenanya, berdasarkan pasal 25 Undang-

undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta dan Yurisprudensi Putusan Kasasi No.4415 K/Pdt/1986, tanggal 25 Nopember 1987, halaman 4 baris 18 sampai 26, Tergugat I sah sebagai pemilik dan Pemegang Hak Cipta Penggugat. Oleh karenanya, tuntutan kerugian Penggugat baik Kerugian Material maupun Kerugian Moril/Immaterial harus ditolak, karena sama sekali tidak mempunyai dasar hukum, dan tanpa ada bukti perhitungan yang nyata sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang dan Yurisprudensi.

Ditambahkan pula oleh para Tergugat, Penggugat mempunyai maksud dan itikad yang tidak baik, mulai tahun 1998 hingga sekarang, telah menyebarkan hal-hal yang sangat negatif terhadap Tergugat I dan Tergugat II melalui media cetak maupun media elektronik, yang mencemarkan nama baik Tergugat I dan Tergugat II, atas sesuatu yang belum ada kepastian hukumnya, dan menggugat balik Penggugat untuk kerugian secara moril dan immateriel sebagai pengusaha yang dinilai dengan uang sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar).

Para Tergugat, minta pula pada Pengadilan agar mereka dinyatakan tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat, dan agar Pengadilan menyatakan lagu-lagu ciptaan Penggugat yang telah dibeli Tergugat I dan Tergugat II dengan cara pembayaran *flat pay* atau jual lepas menjadi Hak Cipta milik Tergugat, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982.

Menanggapi jawaban dan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, kemudian Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 18 Mei 1999, yang menyebutkan antara lain, Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat, karena dalam Perjanjian tertanggal 3 April 1978 Penggugat tidak pernah dan tidak tertulis bahwa Penggugat menjual secara *flat pay* (jual lepas) ciptaannya. Selanjutnya, dalam Perjanjian bertanggal 4 April 1978, yang kemudian diperbaharui dengan perjanjian bertanggal 16 Oktober 1978 tidak ada klausul yang mengatur sistem pembayaran secara *flat pay*, malahan sistem pembayaran diatur dengan royalti.

Menanggapi Replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik yang menyebutkan, antara lain, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mempunyai perjanjian tertanggal 3 April 1978 dengan Penggugat, karena itu, mohon agar Penggugat membuktikan, dan hal tersebut membuktikan pula bahwa gugatan Penggugat kabur, dan karenanya wajar ditolak. Tergugat I dan Tergugat II tetap menolak dalil Penggugat, mengingat pula Penggugat mengetahui dengan persis bahwa Penggugat telah menerima pembayaran secara *flat pay*, sesuai bukti-bukti Tergugat I yang ada, dan pula diperlakukan sama terhadap beberapa orang pencipta lagu seperti Penggugat.

Dalam persidangan, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1. sampai dengan P.124, dan juga mengajukan

seorang saksi bernama R. Sri Yuniah Hasanah, SH. Saksi adalah selaku pengacara dari *Disco Record* milik Yanti Lisda, dan mengatakan, kelompok Bimbo (Penggugat) tidak ada atau sebagai pihak dalam perkara tersebut. Bimbo ataupun personilnya juga tidak sebagai saksi dalam perkara tersebut.

Di samping itu, Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan bukti-bukti berupa surat yang diberi tanda T.I, II-1 sampai dengan T.I, II – 52 & 53, dan juga mengajukan beberapa saksi.

Saksi Yessy Wenas, menyatakan, sepengetahuan saksi, perkara yang dihadapi kedua belah pihak adalah masalah lagu-lagu ciptaan Bimbo, dimana Bimbo merasa mempunyai hak terhadap lagu-lagu tersebut yang direkam atau diproduksi oleh PT. Remaco. Pada waktu saksi menyerahkan lagu-lagu kepada PT. Remaco untuk direkam, tidak ada perjanjian, tetapi ada dua penawaran yaitu *flat pay* (jual putus) atau dengan sistem royalti. Setahu saksi, semua pencipta memilih *flat pay* (jual putus) yang pada tahun 1968 umumnya begitu. Selanjutnya, saksi Zaenal Arifin, menyatakan, saksi tidak tahu menahu perjanjian apa dan dalam bentuk bagaimana antara P.T. Remaco dengan Bimbo. Pada waktu itu, cara yang ditawarkan adalah 2 (dua) pilihan, yaitu *flat pay* (jual putus) atau dengan sistem royalti. Saksi sebagai pencipta lagu memilih *flat pay* (jual putus). Jika suatu lagu sudah dibeli oleh Remaco kemudian oleh Remaco lagu tersebut dijual

lagi ke pihak lain, saksi tidak dapat bagian apa-apa lagi, karena dijual *flat pay*.

Saksi ahli Candra N. Darusman, Pengurus Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), menerangkan bahwa dalam dunia rekaman dikenal dua macam pembayaran, yaitu, *flat pay* dan *non flat pay*. *Flat pay* adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus lunas sesuai dengan besar kecilnya yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak (kesepakatan harga), sedangkan *Non flat pay*, adalah suatu pembayaran yang terkait dengan besar kecilnya penjualan. Dalam perjanjian *Non flat pay*, ada pembatasan-pembatasan, yaitu pembatasan wilayah pemasaran, waktu dan format suatu lagu yang dijanjikan, jika dalam perjanjian ada pembatasan-pembatasan, maka produser rekaman, apabila menghendaki dan mengubah aransemen suatu lagu, harus mendapat ijin dari pencipta atau penyanyi, jika dinyanyikan memang harus mendapat ijin, juga demikian kalau mau diubah. Perbedaan antara royalti dengan *flat pay* adalah royalti dibayarkan kepada pemilik karya lagu atau pencipta lagu, yang dikaitkan dengan besar kecilnya penjualan, sedangkan *flat pay* dibayarkan kepada pemilik karya lagu atau pencipta lagu secara sekaligus tunai, yang besar kecilnya disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam pembayaran dengan sistem *flat pay*, hak pencipta lagu tidak ada lagi dalam master rekaman, baik dalam hak ekonomi



maupun dalam hak moral dalam master tersebut. Perjanjian dalam dunia rekaman mengenai kaidah dalam waktu tertentu, pencipta lagu tidak boleh menjual lagu yang sama kepada produser lain selama 6 (enam) bulan, baik itu royalti maupun *flat pay*. Hak Cipta juga diperuntukkan dan dimaksudkan Hak atas *Master* yang dimiliki produser, karena master induknya menjadi milik produser. Suatu ciptaan lagu yang sudah dibayar dengan cara *flat pay*, produser berhak menjual, menggandakan, dan memproduksi sesuai dengan kemajuan teknologi yang berkembang, baik dalam bentuk kaset, CD, VCD dan lain-lain. Dalam menggandakan, pemegang hak "*master*", baik penggandaan dalam bentuk kaset maupun CD, tidak perlu mendapat ijin dari pencipta lagu, kecuali jika ada perubahan atas "*syair*" lagu itu sendiri, maka harus ada ijin dari pencipta lagu. Selama saksi bekerja di Yayasan Karya Cipta Indonesia, Pengalaman dan pengetahuan saksi dalam membedakan antara produk asli (*original*) dengan yang bukan asli menyangkut 3 (tiga) hal, yaitu, **Pertama** , kalau yang tidak asli, biasanya tidak ada sticker, **kedua**, ciri-ciri "*cover*" tidak sebagus yang asli, **ketiga**, hasil bajakan semakin sulit dibedakan. Menurut pasal 3 Undang-undang Hak Cipta, Hak Cipta dapat beralih yaitu, dengan warisan, hibah, wasiat, yang dibuat dengan akte otentik, dan perjanjian pengalihan hak dan lain-lain sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Selanjutnya, saksi ahli Stanislus Widyanarto, menerangkan, bahwa saksi menjabat salah satu Ketua ASIRI (Asosiasi Industri rekaman Indonesia). Pembayaran di dunia rekaman dikenal dalam 2 (dua) cara, yaitu : dengan *flat pay* dan royalti. Cara pembayaran dengan sistem royalti, karena sulit perhitungannya. Biasanya Produser titip jual kaset kepada penjual dalam waktu tertentu, dan kalau tidak laku kaset dikembalikan lagi. Sedangkan cara *flat pay* yang dipilih, lazimnya tidak perlu ada perjanjian, hanya dalam bentuk kwitansi tanda terima lunas saja. Umumnya tidak ada syarat-syarat dalam cara *flat pay*, yang penting ada kata-kata *flat pay*. Dan dalam sistem *flat pay* "*Master Riil*" sesudah rekaman menjadi milik produser sekaligus pemegang Hak Cipta, di mana produser bisa menjual, menggandakan, merekam dalam bentuk tertentu misalnya, kaset, CD dan kemungkinan lain sesuai kemajuan teknologi. Tidak ada keharusan untuk menentukan apakah dengan cara *flat pay* atau royalti. Penggunaan salah satu atau kedua cara itu tergantung kesepakatan para pihak (pencipta lagu dan produser). Pemilihan pembayaran dengan cara *flat pay*, *Master Riil* menjadi milik produser dan produser rekaman mempunyai hak ekonomi terhadap *master riil* yaitu , untuk menjual, menggandakan dan memproduksi dalam bentuk CD dan lain-lain. Menurut kesepakatan bersama (MoU) antara ASIRI dengan PAPPRI, apabila seorang pencipta lagu sudah bekerjasama dengan salah satu produser, maka yang bersangkutan tidak boleh lagi bekerjasama

dengan produser lain untuk lagu yang sama sebelum lagu beredar selama 6 (enam) bulan.

Sebelum menjatuhkan putusan terhadap Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan pertimbangan hukumnya, antara lain, Pengadilan tidak menemukan bukti Penggugat yang secara jelas dan tegas tentang perumusan "perjanjian" dengan cara pembayaran sistem royalti, meskipun disinggung dan dimuat dalam bukti P-2. Namun, kedua belah pihak tidak mentaatinya secara konsisten. Penggugat tidak dapat membuktikan sejak kapan kaset lagu-lagu yang diajukan dalam tuntutan (dalil gugatan) diproduksi, sehingga dapat dipastikan keberadaannya, kaset-kaset tersebut sudah lama dan bukan merupakan produksi baru, (kecuali terhadap beberapa produk rekaman yang secara nyata diakui Tergugat I), dan yang telah diselesaikan masalahnya sesuai dengan yang tersurat dan tersirat di dalam surat Pernyataan tertanggal 23 Februari 1979. Penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat I maupun Tergugat II bekerjasama dengan perusahaan rekaman lainnya untuk produk-produk yang didalilkan dalam gugatannya. Penggugat tidak dapat membuktikan kaset-kaset yang didalilkannya dalam gugatan adalah produk rekaman Tergugat I, maka pengadilan mengkostatir beberapa kaset-kaset bajakan yang sukar dilacak produser dan pengedarnya yang sebenarnya. Semua kwitansi pembayaran yang diterima Penggugat dari Tergugat I dalam bentuk tertulis cara pembayarannya

atas dasar "*flat pay*", dan tidak ada satu pun yang menyebut-nyebut atas dasar royalti. Hal yang menarik dan lebih akurat adalah, Putusan Mahkamah Agung RI, dalam putusan tersebut dapat diambil suatu abstraksi hukum bahwa lagu-lagu yang ada dalam *Master Riil* ditegaskan adalah milik PT. Remaco, termasuk di dalamnya lagu-lagu ciptaan Bimbo Group. Hal ini "mengukuhkan" bagaimana sistem pembayaran *flat pay* memberi legitimasi hukum berpindahnya hak kepemilikan, hak ekonomi terhadap suatu ciptaan lagu.

Pertimbangan hukum selanjutnya adalah, bahwa adanya kesesuaian 2 (dua) saksi ahli dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi-saksi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II, tentang mengapa cara *flat pay* lebih populer dan disukai oleh para pencipta lagu, karena selain menguntungkan juga lebih cepat mendapatkan uang dalam jumlah besar, dibandingkan *sistem royalti*, yang berdasarkan tahapan pembayaran menurut jumlah banyak sedikitnya kaset-kaset yang terjual. Hal ini sangat sulit perhitungannya, karena pemasaran dalam sistem titip jual kaset pada penjual dalam waktu tertentu, sulit dikontrol volume penjualannya sehingga pencipta lagu tidak sabar menunggu hasilnya. Tanggung jawab hukum perseroan adalah tanggung jawab mandiri. Selaku Badan Hukum (PT), tanggung jawab Direksi dapat diperluas menjadi tanggung jawab pribadi, jika ada itikat buruk dalam menjalankan atau yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 1

Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 85 ayat (2) yang menegaskan, "setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi, apabila yang bersangkutan bermasalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Dalam pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta, bahwa kedua belah pihak tidak dapat melakukan hak-hak dan kewajibannya dalam memenuhi perjanjian bertanggal 6 April 1977. Dengan terjadinya perselisihan dapat dikatakan hal demikian terjadi sesuai dengan keterangan saksi ahli yang mengatakan bahwa *sistem royalti*, sangat tergantung pada tahapan-tahapan pembayaran, menurut jumlah banyak sedikitnya kaset-kaset yang terjual, dan mengalami kesulitan penghitungan haknya masing-masing, karena pemasarannya dengan cara titip jual kaset pada pengecer atau grosir sulit dikontrol "omzet" yang terjual. Pencipta lagu "bosan dan tidak sabar menunggu hasilnya". Sesuai dengan analisis surat-surat bukti di muka, bahwa konsekuensi dari pembayaran dengan cara *flat pay*, maka *master* rekaman menjadi sepenuhnya milik produser rekaman. Pemiliknya berhak menggandakan, memproduksi, mengedarkan, menjual bahkan memberi lisensi termasuk produk-produk yang disesuaikan dengan kemajuan teknologi seperti CD dan lain-lain, oleh karena itu, tidak perlu izin dari pencipta lagu (penggugat).

Dari bukti-bukti di atas, ternyata bahwa Pengugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi memberikan keterangan pers melalui media cetak, yang beberapa bagian seperti yang termuat dalam majalah DR (Detektif dan Romantika) halaman 72 (bukti T.I, T.II-49) antara lain dikutip bagian-bagian tertentu sebagai berikut :

*"Selain album rekaman yang diluncurkan tanpa ijin, ada juga soal lagu yang dirusak, misalnya didangdutin atau diubah ke musik lain. Tapi, lagi-lagi protes saya tak ditanggapi pemerintah, Eugene pernah sesumbar, semua alat negara sudah di tangannya, jadi ia sangat arogan sampai pengusaha cina yang lain ketakutan. Kemudian era CD muncul, Remaco membuat CD berisi rekaman lagu-lagu Bimbo. Menurut perkiraan, ada 10 volume Bimbo sendiri dan 5 (lima) volume gabungan dengan Koes Plus dan favorite. Peluncuran album CD itu seperti sebelumnya, tidak meminta ijin, hal ini diketahui setelah ada orang Bandung pulang dari Amerika."*

Menyimak isi pemberitaan tersebut dapat dikategorikan sebagai "menyerang kehormatan", nama baik, kata berdebah" .... suatu penghinaan", hal ini tidak perlu dibuktikan melalui perkara pidana, sebab sebagaimana sudah diuraikan di muka, pasal 1372 KUHP, dapat ditetapkan untuk menuntut ganti rugi dari pihak si "pencemar" , si penghina yang merendahkan martabat dan kehormatan seseorang, dalam hal ini adalah Penggugat Rekonpensi.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, Pengadilan Negeri Jakarta selatan memberikan pertimbangan hukum, yaitu, dengan merujuk Undang-undang Hak Cipta *Auteurswet 1912*, pasal 14, hal memperbanyak dirumuskan sebagai berikut "yang dimaksud dengan memperbanyak ciptaan, yang dapat dikecap dengan pendengaran adalah juga pembuatan-pembuatan rol-rol, piringan hitam dan alat-alat

lain, dengan maksud untuk memperdagangkan seluruhnya atau sebahagian daripada dari sesuatu ciptaan dengan jalan mekanis". Jika dibandingkan dengan ketentuan Undang-undang Hak Cipta Tahun 1987 jo pasal 25 UUHC tahun 1982, yang menegaskan "Produser Rekaman" mempunyai hak-hak ekonomi (*economic rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mengumumkan dan memperbanyak. Perbanyak adalah menambah jumlah suatu ciptaan, dengan perbuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut, dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalih wujudkan suatu ciptaan.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat I dan II Konpensi telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya Rekonpensinya. Selanjutnya, dasar tuntutan ganti rugi pencemaran nama baik adalah pasal 1372 KUHPdata, bahwa kepada hakim diberikan "kewenangan", sekaligus merupakan suatu keharusan untuk memperhatikan berat ringannya penghinaan, dengan mempertimbangkan pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan pertimbangan keadaan lingkungan sosial ekonomi atau kondisi ekonomi secara umum.

Kata-kata dan ungkapan Tergugat Rekonpensi menyangkut diri Eugene Timothy di dalam media (Bukti T.I. T.II-49, T.II-50, T.II-52 dan T.I., T.II-53) seperti "Eugene perbah sesumbar, semua alat negara

ditangannya”, “Mungkin ada kolusi antara Eugene dan aparat”, dan “bedebah”, menurut penilaian Pengadilan dipandang sebagai “pencemaaean nama baik”, yang berdampak luas terhadap pribadi dan keluarganya, usaha dan reputasinya, termasuk dampak psikologis dalam pergaulan di masyarakat luas, yang sukar dinilai dengan angka matematik, berapa kerugian yang diderita yang bersangkutan dari pernyataan-pernyataan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tersebut.

Menurut Pengadilan lagi, karena kelompok pemusik Bimbo (Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi) sudah sangat terkenal di seluruh pelosok tanah air, bahkan lagu-lagu ciptaannya sudah beredar di manca negara, pemusik ini dipastikan sosial ekonominya lebih dari cukup, oleh dan karena itu, memiliki kemampuan secara ekonomi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat I dan II Konpensi.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya pada tanggal 15 September 1999, menyatakan dalam Pokok Perkara, menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Selanjutnya, Dalam Rekonpensi, menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I dan II Konpensi untuk sebagian, dan Trgugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama baik/penghinaan. Kemudian menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi



membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat I dan II Konpensi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara kontan tanpa bunga dan menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pengadilan Tinggi Jakarta, dalam tingkat banding, dalam pertimbangan hukumnya, antara lain, mengatakan bahwa segala alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya, diambil alih oleh pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Jakarta dalam putusannya tanggal 21 Pebruari 2000 menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Perkara ini sampai sekarang masih dalam tingkat kasasi.

Dari kasus tersebut yang patut disimak adalah keterangan saksi ahli Chandra N. Darusman, pengurus YKCI, yang menyatakan bahwa dalam pembayaran *flat pay* , hak pencipta lagu tidak ada lagi dalam *master* rekaman, baik dalam hak ekonomi maupun dalam hak moral dalam *master* tersebut. Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, khususnya dalam Penjelasan Umum yang menyatakan bahwa Hak cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta

produk hak terkait. Sedangkan Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.

## 2. Pencatatan Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta

### 2.1. Pencatatan Perjanjian Lisensi

Kewajiban pencatatan lisensi di bidang hak cipta di Indonesia mempunyai alasan untuk melindungi pihak ketiga dan juga untuk mengontrol apabila ada hal-hal yang dapat merugikan perekonomian Indonesia. Sebagai contoh adalah **Pertama**, penggunaan bahan baku alat proses harus milik pemberi lisensi., **kedua**, penentuan royalti secara sepihak, **Ketiga**, hak dan kewajiban yang tidak seimbang serta, **keempat**, adanya pembatasan-pembatasan yang menghambat pengembangan penguasaan teknologi.<sup>47</sup>

<sup>47</sup> Wawancara dengan Ansori Sinungan., Seorang Kepala Sub Direktorat Pelayanan Hukum, Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan HAM RI, pada tanggal 06 Januari 2003.

Bandingkan juga dengan Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1999, Hal. 173-174, yang menyebutkan bahwa :

“Lisensi itu merupakan suatu proses di mana pemilik dari suatu hak milik intelektual, yaitu licensor, memberikan keizinan kepada pihak lain, yaitu licensee untuk memakai hak milik intelektual dimaksud, dengan imbalan pembayaran royalti kepada licensor. Hak milik intelektual yang dilisensikan dapat berupa paten, merek, hak cipta atau rahasia dagang yang tidak dipatenkan. Adapun elemen-elemen utama dari perjanjian lisensi adalah sebagai berikut :

a. Secrecy clause

Hampir dalam setiap kontrak lisensi ditemukan secrecy clause, yakni klausula yang melarang pihak licensee untuk membuka rahasia mengenai produk yang dilisensikan kepada pihak manapun;

b. Jangka waktu

Lisensi biasanya diberikan dalam jangka waktu yang relatif lama;

c. Reputasi bisnis

Adapun yang perlu diperhatikan dalam perjanjian lisensi adalah :<sup>48</sup>

1. Nama dan alamat para pihak;
2. Objeknya harus jelas dan tegas disebutkan berikut nomor-nomor registasinya;
3. Masa berlaku lisensi, tidak lebih lama dari sisa masa perlindungan;
4. Harus jelas jenis lisensinya : Eksklusif<sup>49</sup>, tunggal<sup>50</sup> atau non-eksklusif;<sup>51</sup>
5. Dapat-disublisensikan atau tidak;
6. Apakah ada pasal-pasal yang dapat merugikan perekonomian;
7. Jumlah dan cara pembayaran royalti;
8. Dapat diperpanjang atau tidak;
9. Batas wilayah berlakunya perjanjian lisensi.

Di dalam buku panduan Hak Kekayaan Intelektual kursus singkat khusus hak cipta, disebutkan bahwa pihak-pihak dari perjanjian dapat menuangkan apa saja yang mereka inginka dalam perjanjian. Walau demikian, ada beberapa hal yang harus disertakan dalam hampir semua perjanjian lisensi, yaitu <sup>52</sup>:

### 1. Subyek Lisensi

---

Reputasi bisnis dari licensor dipertaruhkan dengan adanya perjanjian lisensi ini. Karena itu, licensor sangat berkepentingan terhadap kualitas produk. Karena itu pula, seringkali lisensi diberikan dengan pengontrolan yang relatif kuat dari pihak licensor.

<sup>48</sup> Ansori Sinungan, SH.,LLM., *Penegakan Hukum, Litigasi dan Lisensi HKI*, makalah disampaikan pada Training of The Trainer (TOT), Pengelola Gugus HKI Perguruan Tinggi Semarang, 12 Juli 2000, Hal. 15

<sup>49</sup> Ansori Sinungan, *Ibid*, Hal. 10 menyebutkan bahwa Lisensi Eksklusif (*Exclusive Licences*) adalah Tidak ada pihak lain bahkan pemilik hak boleh melaksanakan kecuali penerima lisensi.

<sup>50</sup> Ansori Sinungan, *Op.cit*, Hal. 10, menyebutkan bahwa Lisensi Tunggal (*sole licences*) adalah pemberi lisensi berjanji tidak akan memberikan lisensi kepada pihak lain namun pemilik hak tetap tidak melaksanakan haknya

<sup>51</sup> Ansori Sinungan, *Op.cit*, Hal. 10, menyebutkan bahwa *Non-Exclusive Licences* adalah pemberi lisensi boleh memberikan lisensi kepada beberapa pihak dan pemilik tetap berhak melaksanakan haknya.

Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian-siapa pemberi lisensi (pemilik hak cipta yang memberikan hak-haknya atas suatu karya) dan siapa pemegang lisensi itu nantinya (pihak yang mendapat hak-haknya atas suatu karya).

## 2. Dasar dari perjanjian lisensi

Apakah lisensi itu eksklusif, tunggal atau non eksklusif harus dinyatakan dengan dengan jelas. Hak-hak yang diserahkan harus dikemukakan secara jelas. Yang perlu diperhatikan adalah suatu lisensi dapat mengandung lebih dari satu hak. Misalnya, lisensi itu memberikan hak untuk memproduksi dan mendistribusikan karya tersebut. Hak-hak yang diberikan tersebut juga dimungkinkan untuk diubah menjadi hak eksklusif dan beberapa lainnya menjadi hak non eksklusif. Karena itu, pemegang lisensi dapat memperoleh hak eksklusif untuk memproduksi dan hak non eksklusif untuk mendistribusikan produk tersebut. Ini harus dikemukakan secara jelas. Hak eksklusif tersebut juga dapat diubah menjadi hak non eksklusif jika pemegang lisensi tidak memenuhi beberapa persyaratan dalam perjanjian. (misalnya, jumlah tertentu dari keuntungan yang diperoleh dari produk tersebut tidak dipenuhi).

## 3. Cakupan geografis dari lisensi

Lisensi dapat dibatasi cakupannya hanya pada daerah geografis tertentu, misalnya, penerbit hanya memiliki hak untuk mendistribusikan suatu karya di Jakarta dan tidak di seluruh Indonesia (hak ini mungkin telah diberikan kepada pihak lain). Cakupan geografis ini harus dipastikan, atau dengan menggunakan peta yang memperlihatkan tempat dimana lisensi itu berlaku.

## 4. Jangka waktu lisensi

Dalam hal ini, pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian lisensi bebas untuk menentukan. Yang harus diingat adalah bahwa pemilik hak cipta tidak dapat memberikan lisensi atas karyanya dalam jangka waktu yang melebihi jangka waktu perlindungan karya di bawah undang-undang yang ada. Jadi, Jika pemilik hak cipta adalah keturunan dari si pencipta dan jangka waktu perlindungan hak cipta itu hanya berlangsung selama 20 tahun, pemilik hak cipta tersebut tidak dapat memberikan lisensi atas karya miliknya untuk jangka waktu 30 tahun.

---

<sup>52</sup> Indonesia Australia Specialised Training Project-Phase II, *Intellectual Property Rights Short Specific Course on Copyright*, 2002, hal.61-62

## 5. Kompensasi untuk pemberi lisensi

Biaya lisensi bebas ditentukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Biaya itu dapat berupa jumlah bulat, cicilan atau persentase keuntungan yang diperoleh pemegang lisensi saat mengeksploitasi karya berhak cipta itu. Biaya tersebut juga dapat berupa gabungan keseluruhan jenis tadi.

Di samping itu, yang perlu diperhatikan juga adalah bahwa perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Larangan tersebut selaras dengan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIP's)* khususnya pasal 40 tentang Pengendalian Praktek-praktek Persaingan Curang dalam Perjanjian Lisensi, yaitu :

1. Negara anggota sepakat bahwa beberapa praktek perlisensian atau persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual yang menghambat persaingan dapat berakibat tidak baik terhadap perdagangan dan dapat menghambat proses alih dan penyebaran teknologi;  
Dengan ketentuan ini, pengertian "dengan cara yang bertentangan dengan praktek-praktek komersial yang jujur" paling kurang mempunyai arti praktek-praktek seperti wanprestasi atau kontrak wanprestasi atas kerahasiaan dan ajakan untuk melakukan wanprestasi dan termasuk diperolehnya informasi yang dirahasiakan oleh pihak ketiga yang mengetahui atau yang sepatutnya mengetahui bahwa praktek-praktek tersebut terjadi dalam rangka memperoleh informasi tersebut.
2. Tidak satupun ketentuan dalam persetujuan ini yang menghalangi negara anggota untuk menetapkan di dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya praktek-praktek perlisensian atau persyaratan-persyaratan yang dalam hal-hal tertentu merupakan penyalahgunaan dari hak kekayaan intelektual yang berakibat tidak baik terhadap persaingan dalam pasar terkait;

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan lain yang tertuang dalam persetujuan ini, negara anggota dapat menetapkan langkah-langkah untuk mencegah atau mengendalikan praktek-praktek tersebut, seperti antara lain persyaratan untuk balik memberikan hak eksklusif, persyaratan untuk mencegah diajukan sanggahan mengenai keabsahan dari pemaksaan paket lisensi, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan dari negara anggota.

3. Negara anggota wajib melakukan atas permintaan, konsultasi dengan negara anggota lain yang mempunyai dasar untuk menduga bahwa pemilik suatu hak kekayaan intelektual yang merupakan warga atau penduduk dari negara anggota kepada siapa permintaan konsultasi diajukan telah melakukan praktek-praktek yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan dari negara anggota yang mengajukan permintaan konsultasi tentang hal yang diatur dalam bagian ini dan dengan maksud untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan dimaksud, tanpa praduga apapun terhadap tindakan yang diambil berdasarkan hukum dan kebebasan penuh untuk mengambil keputusan dari masing-masing negara anggota. Negara anggota kepada siapa permintaan konsultasi diajukan wajib mempertimbangkan secara menyeluruh dan dengan niat baik dan wajib menyediakan kesempatan untuk berkonsultasi dengan negara anggota yang mengajukan permintaan konsultasi serta wajib bekerja sama melalui penyediaan informasi perihal masalah yang diajukan yang dimiliki oleh negara anggota tersebut, dengan memperhatikan hukum nasional yang berlaku dan kesepakatan yang memuaskan semua pihak mengenai pengamanan kerahasiaannya oleh negara anggota yang mengajukan permintaan konsultasi;
4. Negara anggota yang warganya atau penduduknya di gugat di dalam wilayah negara anggota lain sehubungan dengan tuduhan pelanggaran hukum dan peraturan mengenai perundang-undangan dari negara anggota lain tersebut tentang masalah yang diatur dalam bagian ini, atas permintaan harus diberikan kesempatan untuk berkonsultasi dengan negara anggota lain tersebut sesuai dengan persyaratan yang diuraikan dalam ayat 3 di atas.

Itikat baik para pihak dalam kontrak tidak selamanya dapat menghilangkan perbedaan pendapat diantara pihak-pihak yang bersangkutan. Selalu ada saja hal-hal yang tidak dipikirkan terlebih

dahulu waktu terjadinya perundingan apa yang akan timbul di kemudian hari. Setelah kontrak dilaksanakan, selalu ada perbedaan penafsiran terhadap pasal-pasal dalam ketentuan umum. Dibuat beberapa pengertian atau definisi mengenai istilah, yang sering berulang-ulang di temukan di dalam kontrak, agar istilah<sup>53</sup> tersebut dipakai secara tetap.

Kewajiban pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tersebut secara substansial memiliki perbedaan dengan kewajiban pencatatan perjanjian lisensi merek, paten maupun desain industri. Hal ini dilatarbelakangi oleh konsep dasar lahirnya hak dari masing-masing bidang hak kekayaan intelektual tersebut. Di bidang merek, paten maupun desain industri lahirnya atau timbulnya hak setelah diajukan permohonan dan diberikan oleh negara, sedangkan hak cipta lahirnya hak sejak suatu ide itu dituangkan dalam bentuk nyata. Sehingga untuk mengadministrasikan pencatatan pendaftaran lisensi merek, paten maupun desain industri dapat dilakukan berdasarkan register pendaftaran yang ada, apabila belum terregister di kantor merek, paten maupun desain industri, hal tersebut tidak dapat dilakukan. Di samping itu kewajiban pencatatan pendaftaran perjanjian

---

<sup>53</sup> Bandingkan dengan WIPO, *Licensing Guide (Geneva 1977)*, hal.46, yang menyebutkan bahwa : Umumnya dalam suatu kontrak lisensi terdapat istilah :  
"Basic technology, Patent, trademarks, licence improvement, development, technique service and assistance, field of use activity, product, component, plant, start up date equipment, standart quality and territory, net selling price, year and accounting year, party and parties, direct or indirect control, third person, date or effective date, during the term of agreement".

lisensi dibidang merek, paten maupun desain industri dapat dengan mudah dilakukan pemeriksaan, pengawasan maupun pengujian apakah merugikan perekonomian negara atau tidak.

Berbeda dengan kewajiban pencatatan perjanjian lisensi di bidang hak cipta, walaupun hak cipta yang akan dilisensikan belum teregister di kantor hak cipta berdasarkan undang-undang Hak Cipta Indonesia dapat dilakukan pencatatan perjanjian lisensinya, namun hal tersebut belum menjamin kebenaran obyek yang dilisensikan apakah benar-benar milik si pemberi lisensi, masih berapa lama jangka waktu perlindungan hak ciptanya, apakah hak ciptanya benar-benar mengandung suatu orisinalitas tidak, maupun apakah hak cipta yang dilisensikan sudah milik umum atau publik domein.

Sebagaimana diungkapkan oleh Windiaprana Ramelan, bahwa walaupun perjanjian lisensi tidak didaftarkan di kantor Hak Cipta, disamping Peraturan Pemerintah tentang Pencatatan Perjanjian Lisensinya belum ada, juga perjanjiannya sudah mempunyai kekuatan hukum atau mengikat antara para pihak. Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa perjanjian yang dibuat sudah merupakan suatu aturan bagi pihak-pihak yang membuatnya. Hal ini selaras dengan ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Ketentuan kewajiban pencatatan perjanjian lisensi dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 tidak dapat terlepas dengan pengaturan tentang perjanjian atau kontrak secara umum di



dalam sistem hukum perdata di Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata , yaitu dalam Buku III dari pasal 1233 sampai dengan pasal 1864. Menyangkut adanya ketentuan yang mewajibkan suatu perjanjian lisensi dicatatkan di Kantor Hak Cipta agar mempunyai kekuatan hukum terhadap pihak ketiga, dapat penulis analisa dari ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang berlakunya suatu perjanjian atau kontrak.

Berlakunya perjanjian atau kontrak pada azasnya hanya mengikat pihak-pihak yang membuat perjanjian saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 sampai dengan pasal 1318 dan pasal 1340 KUHPerdata. Pasal 1315 menyebutkan bahwa:<sup>54</sup>

pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan dirinya atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji dari pada untuk dibayar sendiri. Namun di dalam pasal 1316 menyebutkan bahwa meskipun demikian adalah diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seorang **pihak ketiga** dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu, dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap siapa yang telah menanggung pihak ketiga itu atau yang telah berjanji, untuk menyuruh pihak ketiga tersebut menguatkan sesuatu, jika pihak ini menolak memenuhi perikatannya.

Asas berlakunya perjanjian atau kontrak tersebut di atas oleh undang-undang diberikan suatu pengecualian yaitu mengenai janji bagi

---

<sup>54</sup> Bandingkan dengan Setiawan S., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung 1977, Hal. 52, yang menyebutkan bahwa ;  
Pasal 1316 yang mengatur persetujuan untuk menanggung atau menjamin pihak ketiga untuk berbuat sesuatu, sebenarnya bukan merupakan pengecualian dari pasal 1315. Karena seseorang yang menanggung pihak ketiga untuk berbuat sesuatu, mengikatkan dirinya atas suatu kewajiban terhadap lawannya dalam persetujuan, bahwa manakala pihak ketiga tidak melakukan apa yang diharapkan daripadanya ia akan membayar ganti rugi. Dalam hal ini pihak ketiga menurut hukum tidak terikat oleh persetujuan tersebut.

kepentingan pihak ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 1317

KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa :

Lagipun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji yang seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya.

Suatu persetujuan atau perjanjian yang menyangkut pula Janji terhadap pihak ketiga tersebut menurut pasal 1340 ayat (2) KUHPerdata, tidak boleh merugikan atau menguntungkan pihak ketiga, kecuali mengenai apa yang telah diatur dalam pasal 1317 KUHPerdata. Jadi suatu persetujuan pada azasnya, tidak boleh menimbulkan hak maupun kewajiban terhadap pihak ketiga, kecuali jika dibuat suatu janji bagi kepentingan pihak ketiga. Janji bagi kepentingan pihak ketiga adalah suatu janji yang oleh para pihak dituangkan dalam suatu persetujuan, di mana ditentukan bahwa pihak ketiga akan mendapatkan hak atas suatu prestasi.

Berdasarkan uraian pasal 1315 sampai dengan pasal 1318 dan 1340 KUHPerdata tersebut di atas dengan tegas mengatur mengenai suatu perjanjian atau persetujuan itu tidak hanya berlaku bagi pihak pertama dan pihak kedua saja, tetapi berlaku pula terhadap pihak ketiga, apabila pihak ketiga tersebut dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian. Dengan demikian adanya ketentuan yang

mewajibkan pencatatan perjanjian lisensi agar berlaku terhadap pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, bertentangan dengan ketentuan pasal 1317 dan pasal 1340 KUHPerdata tersebut di atas.

Pertentangan tersebut terlihat bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak tetap mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, apabila para pihak yang membuat perjanjian tersebut menghendakinya sedangkan menurut pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga apabila tidak dicatatkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Sehingga apabila ketentuan yang mewajibkan pencatatan perjanjian lisensi hanya dengan alasan "agar berlaku terhadap pihak ketiga", ketentuan tersebut tidaklah akan berlaku dengan efektif, dengan kata lain hanya tinggal peraturan belaka dan bertentangan pula dengan pasal 1338 KUHPerdata.

Apabila memang perjanjian lisensi dikehendaki sebagai suatu keharusan atau kewajiban untuk dilakukan pencatatan dengan alasan sebagai filter atau pengawasan sebagaimana diatur dalam pasal 47 ayat (1)<sup>55</sup>, di samping juga untuk menambah penerimaan negara bukan pajak, karena pencatatan lisensi dibebani biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2001, maka hal

---

<sup>55</sup> Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta berbunyi Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

tersebut dapatlah diterima, namun apabila kewajiban pencatatan perjanjian lisensi didasarkan alasan agar mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, hal tersebut bertentangan dengan substansi perjanjian itu sendiri. Oleh karena itu sebaiknya pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dihapuskan saja.

Berdasarkan alasan seperti tersebut dalam pasal 47 ayat (1), maka apabila perjanjian lisensi hak cipta mencantumkan atau mengandung suatu ketentuan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia maka pendaftaran Perjanjian lisensi tersebut harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Republik Indonesia.

Di dalam praktek pun sudah banyak sekali pelaksanaan perjanjian lisensi di bidang hak cipta, namun belum ada satu perjanjian lisensi pun yang sudah diajukan ke Kantor Hak Cipta untuk dilakukan pencatatan. Hal tersebut dikarenakan, disamping sejak diaturnya kewajiban pencatatan perjanjian lisensi di dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 sampai dengan diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta belum dibuatkan

peraturan pelaksanaan<sup>56</sup> tentang Pencatatan perjanjian Lisensi Hak Cipta juga karena para pihak sudah merasa aman terhadap perjanjian lisensi yang dibuatnya.

Apabila dibuat suatu perbandingan antara perjanjian lisensi dengan pendaftaran hak cipta, dapatlah dikemukakan bahwa perjanjian lisensi merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan pencatatan sedangkan pendaftaran hak cipta itu sendiri bukan merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Pendaftaran hak cipta yang bukan merupakan kewajiban, sudah dilengkapi peraturan pelaksanaan, bahkan sejak tahun 1987 telah ada Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan, yang mengatur tentang tata cara pendaftaran hak cipta termasuk di dalamnya prosedur, persyaratan formalitas, serta dilengkapi dengan formulir permohonan, tanda terima serta surat bukti pendaftaran, sedangkan pencatatan perjanjian lisensi yang merupakan kewajiban untuk dilakukan pencatatan belum dilengkapi peraturan

---

<sup>56</sup> Bandingkan dengan Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata., *Pembaharuan Undang-undang Hak Cipta (1997)*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, Hal. 28-29, yang menyebutkan bahwa : Adanya ketentuan lebih lanjut tentang pencatatan perjanjian lisensi akan diatur dengan Keputusan Presiden, disinilah terletak aspek yang lemah daripada Undang-undang Pembaharuan Hak Cipta. Bahwa masih digantungkan kepada suatu Keputusan Presiden untuk dapat dilaksanakannya dalam praktek. Ternyata seringkali Keputusan Presiden ini lebih lama sekali tidak dikeluarkan. Pengalaman yang serupa telah disaksikan berkenaan dengan Peraturan pelaksanaan dari pada pendaftaran sistem lisensi yang telah diakui dalam undang-undang merek tahun 1992 No.19. Hingga sekarang undang-undang ini sudah berjalan hampir 5 tahun sejak dikeluarkannya dalam tahun 1992. Tetapi masih belum juga kunjung peraturan pemerintah yang mengatur pendaftaran lisensi ini pada kantor merek. Akibatnya hingga sekarang permohonan untuk dapat mendaftar tidak dapat dilayani oleh Kantor Merek. Padahal pendaftaran dari perjanjian lisensi diharuskan supaya dapat berlaku terhadap pihak ketiga.

pelaksanaan sebagaimana dikehendaki oleh undang-undang Hak Cipta.

Di samping itu, ketentuan perjanjian lisensi yang merupakan kewajiban untuk dilakukan pencatatan tidak diikuti pula satu pasal pun yang mengatur tentang ancaman/sanksi bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, sehingga ketentuan tersebut seolah-olah hanya merupakan suatu himbauan saja. Hal ini akan berpengaruh tidak ditaatinya ketentuan tentang kewajiban pencatatan lisensi oleh masyarakat.

Dengan kata lain, walaupun suatu perjanjian lisensi di bidang hak cipta tidak dicatatkan di Kantor Hak Cipta, perjanjian tersebut tetap berlaku terhadap pihak ketiga, kalau memang pihak ketiga tersebut dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian atau persetujuan. Di samping itu, memang sifat dari perjanjian lisensi itu sendiri adalah merupakan lingkup hukum keperdataan yang substansi perjanjiannya menyangkut pihak-pihak yang berkepentingan saja, sehingga apabila perjanjiannya sudah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1320 dan pasal 1338 KUHPerdara, maka perjanjiannya sah adanya. Untuk itu, kewajiban pencatatan perjanjian lisensi hanyalah akan menambah beban administrasi bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian.

Dalam hal pendaftaran perjanjian lisensi, menurut hasil penelitian tentang Kontrak Nasional dan Internasional Alih Teknologi

oleh Tim Peneliti BPP Teknologi dan Badan Pembinaan Hukum Nasional yang diketuai Ir. Rahadi Ramelan<sup>57</sup>, dilaporkan bahwa dalam hal pendaftaran perjanjian lisensi, 56% menyatakan tidak perlu adanya registasi atau pendaftaran terhadap perjanjian lisensi alih teknologi dan 44% menyatakan perlu adanya pendaftaran (dalam hal ini Departemen Perindustrian 50%, BKPM 25%, BPP Teknologi 12,5%, Departemen Kehakiman 12,5%).

Dari hasil penelitian tersebut dapatlah digunakan sebagai perbandingan antara kewajiban pencatatan perjanjian lisensi dibidang Hak Kekayaan Industri (Paten, Merek, Desain Industri) dimana pemilik-pemiliknya sudah diketahui dengan jelas karena hak yang diperoleh dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal HKI, yang hampir 70% responden menyatakan bahwa tidak perlu adanya pencatatan perjanjian lisensi, sedangkan dengan Hak Cipta pemiliknya masih sulit diketahui karena lahirnya hak atas hak cipta secara otomatis, yaitu sejak suatu ide dituangkan dalam bentuk yang nyata, sehingga pelaksanaan pencatatan perjanjian lisensinya pun juga sulit untuk dilaksanakan.

Disamping uraian tersebut di atas, untuk menentukan timbulnya hak bagi pihak ketiga terdapat tiga teori, yaitu :<sup>58</sup>

#### 1. Teori penawaran

---

<sup>57</sup> Tim Peneliti BPP Teknologi dan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Laporan Penelitian Kontrak Nasional dan Internasional Alih Teknologi, Penerbit Departemen Kehakiman, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1991, Jakarta.

<sup>58</sup> Bandingkan dengan Setiawan S., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung 1977, Hal. 55

Menurut teori ini janji untuk pihak ketiga dianggap sebagai suatu penawaran dari seseorang yang menjanjikan sesuatu untuk kepentingan pihak ketiga. Selama pihak ketiga belum menyatakan menerima penawaran tersebut, penawaran itu masih dapat dicabut kembali. Janji hak pihak ketiga baru timbul setelah penawaran diterima.

2. Teori pernyataan yang menentukan sesuatu hak

Menurut teori ini, hak pihak ketiga terjadi pada saat dibuatnya persetujuan antara pihak yang menjanjikan sesuatu untuk kepentingan pihak ketiga dan pihak yang mempunyai kewajiban terhadap pihak ketiga. Janji tersebut masih dapat ditarik kembali dan ini akan menghapuskan hak pihak ketiga. Penerimaan oleh pihak ketiga meniadakan hak untuk mencabut janji tersebut.

3. Teori pernyataan untuk memperoleh hak

Teori ini mengemukakan bahwa hak pihak ketiga baru terjadi setelah pihak ketiga menyatakan kehendaknya untuk menerima janji tersebut.

Hoge Raad menganut teori yang terakhir.

Berdasarkan ketiga teori tersebut diatas, suatu perjanjian akan mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Dengan demikian berdasarkan teori penawaran bahwa perjanjian lisensi hak cipta baru timbul setelah penawaran diterima oleh pihak ketiga, sedangkan berdasarkan teori pernyataan yang menentukan ssuatu hak, perjanjian



lisensi hak cipta akan mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga terjadi pada saat dibuatnya persetujuan antara pemberi lisensi dan penerima lisensi dan berdasarkan teori yang ketiga yaitu teori pernyataan untuk memperoleh hak, perjanjian lisensi hak cipta akan mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga setelah pihak ketiga tersebut menyatakan kehendaknya untuk menerimanya.

Menurut ***Tomi Suryo Utomo***,<sup>59</sup> mengemukakan bahwa tentang kewajiban pencatatan perjanjian lisensi, sebenarnya ada dua pendapat mengenai ketentuan tersebut. Sebagian berpendapat bahwa ketentuan pasal tersebut seharusnya tidak perlu dicantumkan dalam undang-undang, karena perjanjian lisensi adalah bagian dari hukum perdata dan terlepas dari campur tangan pemerintah. Sebaliknya pihak lain berpendapat bahwa pencatatan perjanjian lisensi murni bersifat administratif dan bukan berkaitan dengan pembeberan isi (substansi) perjanjian. Oleh karena itu tidak masalah jika perjanjian lisensi didaftarkan. Di samping itu jika perjanjian dicatat dapat dijadikan sebagai alat kontrol bagi pemerintah terhadap pelaksanaan perjanjian tersebut (ini dikaitkan dalam ayat (1) peraturan lisensi yang tidak boleh merugikan perekonomian Indonesia), Tomi pun memilih pendapat yang kedua.

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan *Tomi Suryo Utomo* pada tanggal 29 Juni 2002, Beliau adalah seorang Dosen di Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta dan sekaligus sebagai Dosen Pengajar HKI di Asian Law Group serta sedang meneliti pembaharuan hukum hak cipta di Indonesia. Disamping itu Beliau sedang menyelesaikan studi doctoral di Amerika Serikat dengan konsentrasi bidang Hak Kekayaan Intelektual. Jawaban dikirim melalui Email dengan alamat utomo [ts@yahoo.com](mailto:ts@yahoo.com). tanggal 29 Juni 2002.

Lebih lanjut Tomi, mengemukakan bahwa bagi para pihak yang melakukan perjanjian lisensi mempunyai keuntungan yang diperoleh yaitu mereka dapat mengontrol tindakan pihak lain yang potensial merugikan dirinya. Kerugian hampir tidak ada, kalau pun ada paling-paling mereka harus meluangkan waktu untuk mencatatkan perjanjian tersebut. Tetapi sepanjang pencatatan itu sendiri memiliki mekanisme yang jelas, tidak ada ruginya bagi para pihak untuk mencatatkan perjanjian lisensinya.

Pengaturan lisensi di beberapa negara menurut hasil penelitian Ibrahim Idham<sup>60</sup>, disebutkan bahwa di India yang wajib didaftarkan adalah lisensi di bidang hak kekayaan Industri khususnya paten. Perjanjian lisensi teknologi di India dinilai oleh Menteri Perindustrian dan Direktorat Jenderal Perkembangan Teknik. Mereka menilai setiap pendaftaran perjanjian lisensi teknologi, apakah memenuhi syarat untuk kenaikan produksi, memperhatikan tujuan pengganti impor dan kemungkinan perluasan ekspor. Juga diuji apakah perencanaan cukup baik dan apakah teknologi bersangkutan telah ada atau dibutuhkan di India.

Di Argentina, umumnya pihak pemilik program komputer, jika hendak melisensikan haknya kepada suatu perusahaan, terlebih dahulu ingin mengetahui apakah di negara tersebut telah ada undang-undang alih teknologi. Demikian pula masalah pelaksanaan perjanjian

---

<sup>60</sup> Ibrahim Idham., *Hak atas Kekayaan Intelektual dan masalah Perlisensian.*, Disertasi untuk memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum pada Universitas Indonesia, Hal.190-198

lisensi, mereka mewajibkan pendaftaran kontrak lisensi terlebih dahulu, sebelum disetujui dan berlaku di negara tersebut. Sekiranya terjadi dalam pelaksanaan undang-undang hak kekayaan industri dan hak cipta sesuatu yang merugikan bangsa dan negaranya, maka undang-undang alih teknologi akan bertindak sebagai klep pengaman, karena dapat menyingkirkan berlakunya undang paten dan hak cipta tersebut.

Perjanjian lisensi program komputer harus mendapat persetujuan dan didaftarkan di kantor pendaftaran teknologi Argentina. Persetujuan diberikan sesudah terlebih dahulu diperiksa pasal-pasal dalam perjanjian oleh kantor Pendaftaran dan tidak ada yang bertentangan dengan "*normal practises*" sebagai dua pihak yang bebas dari royalti yang disetujui dianggap wajar (*bears a reasonable relationship*) terhadap teknologi yang dilisensikan. Jika pihak Argentina merupakan mayoritas dalam perusahaan, di mana pihak asing memiliki saham kurang dari 49%, maka persetujuan pemerintah tidak diperlukan terlebih dahulu mengenai lisensi program komputer, melainkan memerlukan pendaftaran untuk keperluan statistik.

Walaupun undang-undang alih teknologi tidak mengatur cara dan syarat lisensi tersebut, jika mereka berpendapat royalti tidak wajar atau tujuan perjanjian lisensi tidak mengenai alih teknologi, pejabat pemerintah dapat menolak permintaan pendaftaran tersebut (walaupun hanya untuk kepentingan statistik). Jika perjanjian lisensi termasuk dalam ruang lingkup undang-undang alih teknologi dan tidak

didaftarkan. Perjanjian tetap berlaku antara kedua belah pihak dan akan berpengaruh terhadap pajak (*income Tax and emergency Income Tac*) . Royalti tidak akan dikurangi oleh penerima lisensi dan pembayaran kepada pemberi lisensi tunduk pada 45 % *withholding tax*, pengganti 18% standar *withholding tax*.

Pengaturan lisensi di Brazilia, *National Institute of Industrial Property* (INPI) adalah instansi yang berwenang melakukan pendaftaran, pencatatan dan menyetujui perjanjian lisensi paten, teknologi yang tidak dipatenkan, know how dan bantuan teknik. INPI berwenang meneliti perjanjian lisensi program komputer, menyetujui atau menerima. INPI menilai suatu persetujuan lisensi mengenai program komputer yang tidak dipatenkan sebagai suatu penjualan, bukan sebagai sekedar lisensi teknologi. Untuk melindunginya diadakan perjanjian rahasia perdagangan (*trade secrets*). Perjanjian itu berlaku selama berlaku perjanjian tersebut yang umumnya selama 5 tahun. Setelah habis masa berlaku lisensi, INPI akan menilai penerima lisensi sebagai pemilik program komputer dan masih mungkin memperpanjang masa berlaku perjanjian rahasia sampai dua tahun lagi.

INPI akan menolak memberi persetujuannya jika perjanjian lisensi dianggap merugikan perekonomian negara atau penerima lisensi, umpamanya jika terdapat klausula yang menetapkan bahwa perbaikan (*improvement*) pemberi lisensi yang dikembangkan oleh

penerima lisensi tidak menerima bayaran apa-apa (*free of charge*). Juga kalau pembatasan yang tidak dibenarkan terlampaui banyak, pembatasan kegiatan penelitian dalam keikutsertaan menyelesaikan persengketaan. Jika terjadi pelanggaran terhadap program komputer milik pihak ketiga yang sedang dipakai oleh penerima lisensi, INPI juga membatasi royalti yang harus di bayar oleh penerima lisensi Brazilia 5% dari nilai jual bersih produk yang menggunakan *Know how* yang dilisensikan. Ukuran yang digunakan dalam menolak lisensi program komputer selalu dengan alasan demi kepentingan perekonomian negara dan jika penggunaan program komputer tidak ada hubungan langsung dengan *manufacturing*.

Pengaturan lisensi di Meksiko, dalam Perundang-undangan di Meksiko dengan tegas memasukkan program komputer diantara perjanjian lisensi teknologi yang harus didaftarkan dan mendapat persetujuan sebelum mempunyai kekuatan hukum, dikecualikan dari pendaftaran dan persetujuan :

1. Program yang berfungsi untuk rekreasi dan hiburan;
2. Sistem operasi ke dalam produk yang tidak berfungsi pada komputer di mana panjang kata-kata intern suatu kata tidak melampaui 8 bit dan kapasitas memori sentral melampaui 48 K.

Perjanjian lisensi program komputer antara distributor Meksiko dan/atau pemakai harus mendaftarkan di kantor Pendaftaran

Teknologi untuk mendapat persetujuan dan pendaftaran dalam waktu 60 hari setelah penandatanganan perjanjian lisensi.

Pencatatan perjanjian lisensi di beberapa negara, menurut Tomi Suryo Utomo<sup>61</sup> mengemukakan bahwa kebanyakan negara-negara berkembang cenderung untuk mencantumkan kewajiban pencatatan perjanjian lisensi dengan maksud untuk melindungi kepentingan negaranya yang sedang membangun dari kepentingan pihak asing yang memiliki *bargaining power* yang besar. Lebih lanjut **Simon Butt**<sup>62</sup>, mengemukakan bahwa di beberapa negara seperti Thailand juga memberikan ketentuan kewajiban pencatatan perjanjian lisensi.

## 2.2. Pendaftaran Hak Cipta

Konsep dasar perlindungan hak cipta adalah merupakan dasar dari dianutnya suatu ketentuan pendaftaran hak cipta yang dituangkan dalam Undang-undang hak Cipta Indonesia, baik Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 maupun undang-undang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, dengan sistem deklaratif atau fakultatif. Berbeda dengan cabang hak kekayaan intelektual lainnya

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Tomi Suryo Utomo pada tanggal 29 Juni 2002, Beliau adalah seorang Dosen di Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta dan sekaligus sebagai Dosen Pengajar HKI di Asian Law Group serta sedang meneliti pembaharuan hukum hak cipta di Indonesia. Disamping itu Beliau sedang menyelesaikan studi doktoral di Amerika Serikat dengan konsentrasi bidang Hak Kekayaan Intelektual. Jawaban dikirim melalui Email dengan alamat utomo\_\_ts@yahoo.com, tanggal 29 Juni 2002.

seperti paten, merek maupun desain industri, ketiganya menganut sistem pendaftaran yang konstitutif, yaitu bahwa timbulnya hak atas paten, hak atas merek maupun hak atas desain industri itu harus melalui permohonan negara dan apabila permohonan tersebut dikabulkan barulah timbul hak-hak tersebut.

Sistem deklaratif dalam pendaftaran hak cipta tersebut secara tegas diatur dalam ketentuan pasal 35 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 yang menyebutkan bahwa Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Dengan kata lain adalah bahwa pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak suatu ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Hal ini berarti suatu ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi.

Penyelenggaraan pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum ciptaan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya di Kantor Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual dan setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari Daftar Umum Ciptaan tersebut dengan dikenai biaya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2001.

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Simon Butt, Beliau adalah seorang Dosen di Asian Law Group bidang HKI dan berkewarganegaraan Australia, jawaban dikirim melalui Email [sbutt@ozemail.com.au](mailto:sbutt@ozemail.com.au) tanggal 23 Juni 2002

Dengan sistem deklaratif tersebut, Undang-undang hak cipta menegaskan pula bahwa pendaftaran ciptaan dalam daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang didaftar. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang menyelenggarakan pendaftaran tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang didaftar. Sehingga pasal 5 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 memberikan ketentuan bahwa kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum ciptaan pada Direktorat Jenderal atau orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.

Anggapan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tersebut, menurut **Insan Budi Maulana**<sup>63</sup> mengemukakan bahwa dengan adanya "anggapan " sebagai pencipta maka secara tidak langsung akan timbul pula "anggapan adanya hak cipta". Dalam praktek "anggapan" itu menjadi kabur bahkan lenyap karena si pendaftar akan mengklaim dirinya sebagai "pencipta sesungguhnya dan yang berhak atas perlindungan hak cipta". Lebih dari itu ia akan memanfaatkan seluruh perlindungan yang ada pada Undang-undang Hak Cipta. Meskipun, pasal 30 Undang-undang Hak Cipta menyatakan bahwa pendaftaran ciptaan dalam daftar Umum Ciptaan tidak

---

<sup>63</sup> **Insan Budi Maulana**, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, Hal.156-157



mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang didaftar, namun ketentuan tersebut menjadi hampa. Karena pencipta yang mendaftarkan ciptaannya walaupun dilakukan dengan cara yang tidak etis bahkan mungkin melanggar hak orang lain, apalagi apabila hal itu dilakukan lebih dulu dibandingkan pihak lain, maka ia akan merasa bahwa dengan "Surat Pendaftaran Ciptaan" itu telah memiliki hak cipta dan berhak untuk mengajukan tindakan kepada pihak lain yang mungkin lebih berhak atas ciptaan tersebut.

Lebih lanjut ***Insan Budi Maulana***, menyebutkan bahwa dengan demikian, tidak tampak lagi pandangan yang sebenarnya bahwa pendaftaran itu baru merupakan "anggapan adanya hak cipta" dan bukan merupakan adanya hak. Kekeliruan persepsi semacam itu, mulai berkembang tidak hanya dikalangan masyarakat awam tetapi juga di kalangan penegak hukum pada saat ini, misalnya pihak kepolisian. Karena pihak kepolisian sebagai pihak penyidik akan ragu untuk melindungi pencipta, apabila ia menerima laporan pengaduan adanya pelanggaran hak cipta jika pencipta itu tidak dapat menunjukkan Surat Pendaftaran Ciptaan. Walaupun pencipta itu dengan bukti-bukti lainnya telah secara jelas mampu menunjukkan adanya hak namun hal itu tidak dapat membantunya. Karena selama ini pihak kepolisian sebagai penyidik akan selalu menanyakan Surat Bukti Pendaftaran.

Berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh **Adi Supanto**, bahwa setiap pencipta atau pemegang hak cipta yang mendapatkan setiap ciptaan tentu mempunyai tujuan agar ciptaan tersebut mendapat perlindungan hukum. Apabila suatu ciptaan telah didaftar, maka surat bukti pendaftaran ciptaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan lebih mudah pembuktian siapa penciptanya<sup>64</sup>. Namun ketentuan pasal 5 Undang-undang Hak Cipta menentukan lain, yaitu bahwa pendaftaran itu baru merupakan anggapan hukum saja, sehingga apabila ada pihak lain dapat membuktikan sebaliknya, maka pihak tersebut sebagai penciptanya.

Lebih lanjut Adi Supanto mengemukakan bahwa, pendaftaran bukan merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta, sehingga pendaftaran ciptaan tidak mutlak harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan, karena tanpa didaftarkan pun suatu Ciptaan tetap dilindungi oleh hukum. Hal ini menunjukkan bahwa sifat pendaftaran adalah bersifat fakultatif (kebolehan) artinya pencipta boleh mendaftarkan ciptaannya, atau boleh tidak mendaftarkan dan apabila tidak mendaftarkan tidak ada sanksi hukumnya. Walaupun tidak ada kewajiban (keharusan) untuk mendaftarkan ciptaan, namun pendaftaran perlu dilakukan mengingat tujuan pendaftaran ciptaan adalah untuk memudahkan pembuktian hak cipta dalam hal terjadi

---

<sup>64</sup> Adi Supanto., *Sistem dan Prosedur Pendaftaran Ciptaan di Indonesia.*, makalah disampaikan pada Pelatihan Administrasi di bidang Hak Cipta, Paten dan Merek, tanggal 5-9 Oktober 1999.

sengketa di kemudian hari. Perlu diingat bahwa ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya maka pihak itulah yang mendapat perlindungan hukum.

Di dalam undang-undang hak cipta tidak memberikan perlindungan yang mutlak kepada orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan. Apabila terjadi persengketaan hak cipta dan ternyata ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya, maka harus dimohonkan agar pengadilan membatalkan pendaftarannya, sehingga dapat menghapuskan kekuatan hukum pendaftaran ciptaan yang bersangkutan. Disamping itu bagi seorang pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya ke Departemen Kehakiman akan membawa keuntungan bagi yang bersangkutan, sehingga segi positif pendaftaran ciptaan itu akan dapat dirasakan, yaitu :

1. Pemohon, baik si pencipta maupun pemegang hak cipta mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat digunakan sebagai bukti permulaan/sementara;
2. Apabila terjadi sengketa mengenai hak cipta, pada umumnya lebih kuat dari pada ciptaan yang belum terdaftar, minimal pembuktian lebih mudah;
3. Pengalihan hak cipta/pewarisan dan sebagainya, prosedur tertulisnya akan lebih mudah dan lebih mudah dan dan lebih mantap apabila telah terdaftar daripada yang belum terdaftar.

Selaras dengan konsep dasar perlindungan hak cipta, bahwa pada prinsipnya hak cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, tetapi dalam hal terjadi sengketa di pengadilan mengenai ciptaan yang terdaftar dan yang tidak terdaftar serta apabila pihak-pihak yang berkepentingan dapat membuktikan kebenarannya, hakim dapat menentukan pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian tersebut. Di sinilah dituntut adanya kejelian hakim dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa serta dibutuhkan pengetahuan dan wawasan yang memadai dari seorang hakim di bidang hak cipta.

Sistem deklaratif sebagaimana dianut oleh Undang-undang Hak cipta Indonesia tersebut, menurut Sudargo Gautama<sup>65</sup> mengemukakan bahwa Sistem tersebut sangat berlainan dengan Undang-undang Merek Indonesia yaitu perlindungan hanya diberikan pada suatu merek jika telah didaftarkan di dalam Daftar Umum Merek. Jadi pendaftaran dalam sistem hukum merek adalah konstitutif sedangkan sistem yang dianut dalam Undang-undang Hak Cipta adalah hanya merupakan pendaftaran dengan sistem deklaratif. Tidak ada keharusan bahwa karena pendaftaran inilah lahir atau terciptalah hak cipta ini. Kiranya hal ini masih terdapat salah paham . Banyak orang mengira bahwa Hak Cipta terwujud jika didaftarkan pada Daftar Umum Hak Cipta di Departemen Kehakiman. Pada hal tidak demikian halnya.

---

<sup>65</sup> Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata., *Pembaharuan Undang-undang Hak Cipta (1997)*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, Hal. 24

Berdasarkan laporan akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Dagang Hak Milik Intelektual<sup>66</sup>, menyebutkan bahwa Pendaftaran ciptaan tidak merupakan kewajiban untuk memperoleh hak cipta. Namun demikian, dianjurkan kepada pencipta untuk mendaftarkan ciptaannya, sebab tanda (sertifikat) pendaftaran ciptaan dapat dijadikan bukti di pengadilan jika timbul sengketa di kemudian hari mengenai ciptaan tersebut. Oleh karena itu fungsi pendaftaran ciptaan adalah sebagai alat bukti di pengadilan jika timbul sengketa baik perdata maupun tindak pidana Hak Cipta. Dengan demikian ciptaan yang tidak didaftar akan lebih sulit dan lebih memakan waktu untuk pembuktian hak ciptanya daripada ciptaan yang didaftarkan.

Walaupun pendaftaran hak cipta bukan merupakan suatu kewajiban untuk memperoleh hak atas hak cipta, namun apabila dilihat dalam tabel permohonan pendaftaran ciptaan yang masuk di Direktorat Jenderal hak Kekayaan Intelektual seperti tersebut di atas selama 12 tahun terakhir yaitu dari tahun 1991 sampai dengan tahun 2002 terdapat permohonan pendaftaran sebanyak 30.928 buah dengan perincian sebanyak 19.332 buah permohonan didaftar dan sebanyak 7.500 buah permohonan di tolak , sisanya masih dalam proses penyelesaian. Apabila diambil rata-rata pertahun permohonan yang masuk sebanyak 2.530 buah permohonan pendaftaran. Kenyataan ini menunjukkan adanya upaya bagi pencipta maupun

---

<sup>66</sup> Sri Redjeki Hartono, sebagai Ketua Tim Kompendium Bidang Hukum Dagang, *Laporan Akhir Hak Milik Intelektual*, Jakarta 1996/1997.

pemegang hak cipta secara sedini mungkin mempersiapkan alat bukti, bahwa dirinyalah sebagai pencipta atau pemegang hak cipta.

Kenyataan tersebut tidak menutup kemungkinan adanya manipulasi oleh pendaftar yang tidak jujur sebagaimana diungkapkan oleh Insan Budi Maulana tersebut di atas. Namun apabila terjadi kenyataan seperti itu biarlah pihak pengadilan yang memutuskan atau menentukan kebenaran tentang hal tersebut dan hal itu selaras dengan sistem pendaftaran<sup>67</sup> yang dianut oleh Undang-undang Hak Cipta yaitu deklaratif atau adanya satu anggapan hukum saja.

Anggota TRIP's dan pihak yang menandatangani Konvensi Bern harus secara otomatis memberikan perlindungan atas materi hak cipta. Sejumlah negara seperti Amerika Serikat memiliki sistem pendaftaran untuk hak cipta. Tetapi, guna memenuhi ketentuan TRIP's dan memperoleh perlindungan atas hak cipta, pendaftaran tersebut haruslah bersifat sukarela dan tidak dianggap sebagai suatu kewajiban. Prinsip ini tercantum dalam Undang-undang Hak Cipta Indonesia. Simbol hak cipta – © - biasanya digunakan untuk mengidentifikasi pemegang hak cipta dan mengingatkan masyarakat bahwa karya tersebut memperoleh perlindungan hak cipta. Pemegang hak cipta dapat menuliskan peringatan atas hal ini pada karya-karya

---

<sup>67</sup> Dalam undang-undang hak cipta mengenai system pendaftaran ciptaan dapat dilihat dalam penjelasan umum butir 3 (tiga) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 yang menyatakan bahwa :  
Demikian dalam undang-undang ini dianut system pendaftaran seperti juga yang dipergunakan dalam pendaftaran tanah, pada umumnya apabila terjadi sengketa kepada hakim diserahkan kewenangan untuk mengambil keputusan.

mereka karena sama sekali tidak ada prosedur formal mengenai hal ini.

Konsep dasar lahirnya hak atas hak cipta sebagaimana dianut oleh *Bern Convention*, TRIPs, maupun Undang-undang Hak Cipta Indonesia sangat berbeda dengan konsep dasar lahirnya hak atas hak cipta yang ditentukan dalam *Universal Copyright Convention (UCC)* yang dianut oleh Amerika Serikat. Di dalam pasal III UCC menetapkan bahwa suatu negara peserta perjanjian yang menetapkan dalam undang-undang nasionalnya syarat-syarat tertentu sebagai formalitas bagi timbulnya hak cipta, seperti wajib simpan (*deposit*), pendaftaran (*registration*), akta notaris atau bukti pembayaran royalti dari penerbit (*payments of fee*), akan dianggap merupakan bukti timbulnya hak cipta, dengan syarat pada ciptaan bersangkutan dibutuhkan tanda C dan dibelakangnya tercantum nama nama pemegang hak cipta kemudian disertai tahun penerbitan pertama kali.

Wajib Simpan (*deposit*) sebagaimana didiatur dalam UU tersebut, di Indonesia juga dikenal dengan istilah wajib serah simpan karya cipta yang diatur tersendiri dan terpisah dengan undang-undang hak cipta yaitu Undang-undang nomor 4 Tahun 1990 tentang Wajib Serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Kewajiban ini ditujukan kepada penerbit, perekam, orang atau badan yang mengimpor karya cetak dan karya rekam mengenai Indonesia, serta warga negara Republik Indonesia yang karyanya diterbitkan atau direkam di luar

negeri. Adapun lembaga yang menerima penyerahan setiap karya cetak dan karya rekam adalah perpustakaan nasional dan perpustakaan daerah. Penerbit setiap menerbitkan suatu karya cetak, selambat-lambatnya tiga bulan setelah penerbitan harus menyerahkan dua eksemplar. Demikian pula perusahaan rekaman, wajib menyerahkan sebuah rekaman untuk setiap judul karya rekam selambat-lambatnya tiga bulan setelah proses perekaman.

Di Inggris kewajiban serah simpan karya cipta ini di kenal dengan istilah "*legal deposit* atau *deposit regulation for publication and scrips*" yang diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, juga terdapat dalam "*the Bristish library Act 1972*". Para penerbit wajib menyerahkan dalam jangka waktu sebulan setelah penerbitan, berupa satu salinan setiap cetakan yang diterbitkan, tetapi dimungkinkan bisa menyerahkan sebanyak 5 salinannya atau lebih. Adapun mengenai bidang karya cipta film juga wajib diserahkan untuk disimpan oleh negara. Di Amerika Serikat juga ketentuan wajib serah simpan diatur dalam undang-undang. Penerbit wajib menyerahkan dua salinan dalam jangka waktu tiga bulan setelah penerbitan dan diserahkan kepada perpustakaan konggres. Ketentuan kewajiban tersebut, baik di Inggris maupun di Amerika Serikat, bila diabaikan hanya dikenakan sanksi denda, juga tidak mempengaruhi status hak cipta atas karya tersebut<sup>68</sup>.

---

<sup>68</sup> Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah., *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia (edisi Revisi)*, Tahun 1997, Hal. 101-102.



Pada dasarnya, keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari pendaftaran dalam konteks Indonesia dimaksudkan untuk membantu membuktikan kepemilikan. Adalah bijak mendaftarkan ciptaan bernilai komersial atau penting dalam situasi tertentu karena seringkali muncul kesulitan untuk membuktikan kepemilikan di pengadilan. Ketidakmampuan untuk membuktikan kepemilikan secara meyakinkan sangat menentukan dalam kasus-kasus hak cipta di Indonesia. Suatu kasus menarik yang berkaitan dengan sengketa kepemilikan hak cipta atas dua lagu terkenal dalam bahasa Batak di Sumatera Utara.<sup>69</sup>

#### Tilo-Tilo : Kasus Lagu-lagu Batak<sup>70</sup>

Pada tahun 1942, Ismail Hutajulu menulis dua lagu dalam bahasa Batak yang berjudul "Tilo-tilo" dan "Alatipang". Lagu ini menjadi sangat terkenal di tengah-tengah masyarakat Batak, Pada tahun 1948, Ismail menemukan sebuah kaset rekaman kompilasi lagu-lagu produksi Lolypop Records yang memuat dua lagu ciptaannya tadi. Kaset tersebut dapat dibeli oleh masyarakat umum. Di kaset tersebut, huruf "NN" (tanpa nama) tertera di sebelah judul lagu-lagunya. Lagu itu sendiri dinyanyikan oleh Christine Panjaitan. Hutajulu pun menghubungi Lolypop. Namun, perusahaan rekaman tersebut tidak mengakui kesalahan mereka sehingga Hutajulu mengajukan tuntutan atas Lolypop Record ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

---

<sup>69</sup> Indonesia Australia Specialised Training Project-Phase II, *Intellectual Property Rights Elementary*, 2002, hal.162-163

<sup>70</sup> Indonesia Australia Specialised Training Project-Phase II, *Intellectual Property Rights Elementary*, 2002, hal.67

Ismail menghendaki hakim untuk :

4. menyatakan dirinya sebagai pencipta lagu-lagu tersebut;
5. menyatakan bahwa Lolypop telah melanggar hukum;
3. mengharuskan Lolypop memberinya kompensasi Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau masing-masing lagu Rp.30.000.000,-
4. (tiga puluh juta rupiah) atas perekaman dan produksi lagu-lagu Ismail tanpa seijinnya;
5. memerintahkan Lolypop untuk menarik kaset-kaset yang memuat lagu-lagu tersebut dari peredaran;
6. memerintahkan Lolypop untuk membayarnya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari sampai proses penarikan kaset dari peredaran selesai.

Pengadilan Negeri (putusan No.230/Pdt.G/1988/PN Jakarta Selatan, 7 April 1989) menyetujui bahwa bukti-bukti yang diajukan memang mengindikasikan Ismail Hutajalu sebagai penulis lagu-lagu tersebut. Ismail telah membuat transkrip lagu dan menunjukkan transkrip tersebut di Pengadilan. Pengadilan menganggap Lolypop telah merekam, memproduksi dan menjual kaset-kaset tadi yang berisikan lagu Alatipang tanpa seijin Ismail.

Lolypop mengklaim bahwa lagu-lagu tersebut tidak diketahui pengarangnya. Karenanya, tidak ada bukti yang menunjukkan perusahaannya telah mengkopi dan memproduksi lagu "Tilo-tilo". Walau demikian, Pengadilan memerintahkan Lolypop untuk memberikan ganti rugi Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) kepada Ismail (setengah yang diminta oleh Ismail), menarik kaset-kaset yang memuat lagu-lagu Ismail dari peredaran dan membayar Ismail

Rp,100.000,- (seratus ribu rupiah), per hari sampai proses penarikan kaset dari peredaran selesai.

Lolypop mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Tetapi Pengadilan Tinggi Jakarta (Putusan No. 452/Pdt/1989/PR DKI, tanggal 5 Desember 1989) mendukung putusan hakim Pengadilan Negeri. Lolypop pun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung (dalam Putusan N.2266/Pdt/1990, tanggal 29 Oktober 1996) menyatakan bahwa bukti yang ditunjukkan Ismail tidaklah cukup karena bukti tersebut "hanyalah catatan" yang menjadi "awal bukti penulisan lagu". Karenanya, pengadilan menyatakan bahwa bukti tersebut tidaklah cukup untuk dipakai sebagai bukti bahwa Ismail sebagai memang pencipta lagu-lagu tadi. Jika terdapat bukti tambahan atas transkrip lagu tadi, Ismail mungkin memiliki dasar hukum yang kuat dalam kasus gugatan ini. Dua saksi di pengadilan ini bahkan mengklaim bahwa lagu itu telah terkenal sebelum tahun 1940 (Ismail sendiri mengklaim telah menulis lagu-lagunya itu pada tahun 1942), tetapi saksi-saksi tadi menyatakan tidak tahu-menahu tentang pencipta lagu-lagu dalam sengketa ini. Pengadilan kemudian mengetahui bahwa Lolypop bukanlah perusahaan rekaman pertama yang merekam lagu-lagu tadi-perusahaan lain, Remaco, telah merekamnya pada tahun 1960. Dengan demikian pengadilan menyatakan bahwa lagu-lagu tadi diklasifikasikan sebagai lagu rakyat, lagu masyarakat Batak. Karena

lagu tersebut dianggap sebagai lagu rakyat, perekaman lagu tersebut oleh Lolypop dan klaim mereka bahwa lagu tersebut tidak diketahui penciptanya, tidak melanggar hukum hak cipta, Mahkamah Agung pun membatalkan putusan hukum dari pengadilan yang berada di tingkat bawah.

Pada tingkat kasasi tersebut Mahkamah Agung memberikan pertimbangan bahwa *judex factie* kurang mempertimbangkan dan menilai secara seksama fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, kesimpulan *judex factie* mengenai terbuktinya dalil penggugat, ditarik dari kesimpulan surat bukti P-1 dan P-2 dihubungkan dengan surat bukti P-3 dan P-4, dari surat bukti tersebut *judex factie* menyimpulkan suatu keyakinan bahwa pencipta lagu yang dipersengketakan adalah penggugat, pada hal jika surat bukti P-1 dan P-2 tersebut diuji dengan ketentuan pasal 1871, pasal 1874 maupun pasal 1878 KUH Perdata; paling-paling surat-surat bukti tersebut dikonstruksikan secara analog dengan ketentuan pasal 1883 KUHPerdata, yakni, berupa catatan biasa dan paling tinggi nilai kekuatan pembuktiannya hanya sekedar sebagai pembuktian dengan tulisan, sehingga semua alat bukti yang dikemukakan *judex factie* belum mencapai batas minimal pembuktian untuk membuktikan dalil gugatan, bahwa penggugat adalah pencipta lagu-lagu yang disengketakan.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi N. Simanungkalit dan M.P. Siagian bahwa kedua lagu nahasa Batak tersebut sudah dikenal masyarakat sejak tahun 1940. Para saksi menerangkan, bahwa tidak diketahui dengan pasti siapa pencipta yang sebenarnya, sehingga lagu-lagu tersebut disebut NN (No Name), dan lebih digolongkan sebagai lagu rakyat. Pengadilan kemudian mengetahui bahwa PT. Lolyop Records bukanlah perusahaan rekaman pertama yang merekam lagu-lagu tersebut, perusahaan lain Remaco, telah merekamnya pada tahun 1960. Dengan demikian, pengadilan menyatakan lagu-lagu tersebut dapat diklasifikasikan sebagai lagu rakyat. Dengan demikian tindakan tergugat tidak dapat dianggap melanggar hak cipta penggugat.

### **3. Penyelesaian Sengketa Lisensi**

Di dalam penyelesaian sengketa lisensi bidang Hak Cipta, harus dibedakan dengan penyelesaian pelanggaran di bidang Hak Cipta. Penyelesaian Sengketa lisensi menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan apa yang disepakati di dalam perjanjian lisensi, penyelesaiannya masuk di dalam lingkup hukum keperdataan sedangkan penyelesaian pelanggaran hak cipta menyangkut obyek dari perjanjian lisensi itu sendiri yaitu hak cipta, yang penyelesaiannya di samping masuk di dalam lingkup hukum keperdataan juga masuk

dalam hukum pidana sebagaimana di atur di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Bagi pihak penerima lisensi sangat dimungkinkan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar perjanjian lisensi maupun melanggar hak cipta. Hal tersebut dikarenakan hak cipta yang merupakan obyek lisensi, di samping mengandung hak ekonomi (perbanyakan dan pengumuman) juga terkandung hak moral di dalamnya, sehingga apabila penerima lisensi dalam melaksanakan perjanjian lisensi melanggar hak moral, maka pencipta atau ahli warisnya dapat melakukan gugatan ganti rugi ke pengadilan niaga maupun melalui tuntutan pidana.

Mekanisme penyelesaian sengketa dapat muncul dalam berbagai bentuk, secara umum forum penyelesaian sengketa yang tersedia dapat digolongkan dalam dua bentuk, yaitu forum litigasi melalui pengadilan dan forum non litigasi yang berada di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau sering disebut *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa kooperatif, yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi terhadap konflik atau sengketa yang bersifat *win-win* (menang-menang).

Di dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, hanya mengatur tentang penyelesaian sengketa yaitu melalui Pengadilan Niaga dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan arbitrase

maupun upaya tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak cipta. Masalah penyelesaian sengketa lisensi tidak secara tegas dinyatakan di dalam undang-undang tersebut, apakah sengketa lisensi itu merupakan obyek dari Pengadilan Niaga atau dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap suatu klausula penyelesaian sengketa yang dituangkan dalam pasal perjanjian yang dibuat oleh para pihak untuk menentukan pilihan hukum.

Apabila sengketa lisensi merupakan obyek dari sengketa yang harus diselesaikan di Pengadilan Niaga, maka suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak memuat pilihan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri akan berakibat bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ketentuan inilah yang kurang dipahami oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian lisensi, khususnya lisensi di bidang hak cipta, di samping pengetahuan hukumnya kurang di pahami juga latar belakang merekalah yang menyebabkan ketentuan tersebut tidak diketahuinya.

Seperti terlihat dalam pasal 11 Draf perjanjian yang dibuat oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia dengan PT. Indosiar Visual Mandiri, bahwa apabila terjadi perselisihan dan setelah melalui musyawarah tidak disepakati oleh para pihak, maka kedua belah pihak menunjuk Pengadilan Negeri sebagai tempat untuk menyelesaikannya.

### **3.1. Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan**

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan Niaga berdasarkan Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 tersebut merupakan langkah baru yang harus ditempuh oleh para pihak dalam upaya menyelesaikan sengketa bidang hak cipta termasuk di dalamnya masalah lisensi. Berdasarkan Undang-undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, Penyelesaian sengketa dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Adapun tenggang waktu penyelesaiannya tidak diatur secara tegas di dalamnya.

Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002 tersebut telah terbentuk pada tahun 1999 melalui Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Semarang. Salah satu pertimbangan pembentukan Pengadilan Niaga tersebut adalah untuk meningkatkan pemerataan dan mempermudah masyarakat baik secara perorangan atau badan usaha dalam menyelesaikan sengketa dibidang perniagaan secara adil, cepat, terbuka dan efektif.



Pengadilan Niaga<sup>71</sup> pada Pengadilan Negeri **Ujung Pandang** meliputi daerah hukum wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya. Daerah Hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri **Medan** meliputi wilayah Propinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi dan Daerah Istimewa Aceh. Daerah Hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri **Surabaya** meliputi wilayah Propinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Adapun Daerah Hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri **Semarang** meliputi wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Terhadap sengketa dibidang perniagaan yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan-Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Medan, Surabaya dan Semarang pada saat Keputusan Presiden tersebut ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun terhadap sengketa yang telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

---

<sup>71</sup> Lihat Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Semarang, yang diundangkan pada tanggal 18 Agustus 1999.

Jakarta Pusat, dilimpahkan kepada Pengadilan Niaga yang sesuai dengan daerah hukum masing-masing<sup>72</sup>.

Setelah berlakunya Keputusan Presiden tersebut, maka daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung dan Kalimantan Barat. Dengan demikian Pengadilan Niaga yang telah ada sebanyak 5 (lima) Pengadilan yang masing-masing mempunyai wilayah daerah hukum. Menurut Nuraslam Bustaman<sup>73</sup>, setelah terbentuknya Pengadilan Niaga tahun 1999, di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat belum pernah menangani kasus-kasus gugatan ganti rugi khususnya di bidang Hak Cipta.

Upaya hukum yang dilakukan pihak-pihak yang dirugikan dalam pelanggaran hak cipta, disamping dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga di daerah hukum masing-masing, juga dapat melakukan gugatan penetapan sementara. Di Amerika Serikat dan negara hukum lainnya<sup>74</sup>, kebanyakan pelanggaran atas hak cipta dihadapi dengan tuntutan ganti rugi, di samping juga gugatan putusan sela. Gugatan putusan sela ini di Indonesia dikenal dengan Gugatan Penetapan Sementara.

---

<sup>72</sup> Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 97 tahun 1999, *Op.cit*, hal. 5

<sup>73</sup> Wawancara dengan Nur Aslam Bustaman, seorang hakim dari Pengadilan Niaga Di Pengadilan negeri Jakarta Pusat.pada tanggal 6 Maret 2003

<sup>74</sup> Indonesia Australia Specialised Training Project-Phase II, *Intellectual Property Rights Elementary*, 2002, hal.179

Di daerah yurisdiksi hukum *Common Law*,<sup>75</sup> Putusan sela umumnya dihasilkan pengadilan dalam keadaan dimana tindakan atas pelanggaran hak cipta sangat diperlukan. Di banyak negara, penerapan hal ini dimungkinkan terjadi tanpa sepengetahuan pihak pelanggar guna mencegah kerusakan parah atas hak-hak pemegang hak cipta. Salah satu putusan sela tersebut dikenal dengan nama putusan "*Anton Piller*". Dalam putusan ini, pengadilan memberikan alasan kepada suatu pihak untuk mencari dan menyita barang-barang dan dokumen yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta. Putusan sela lain di kenal dengan nama putusan "*John Doe*" di mana putusan tersebut mengijinkan penyitaan atas barang dibuat oleh kelas tergugat yang teridentifikasi (*identifiable class of defendants*), dan bukan melawan orangnya. Bentuk putusan sela lainnya adalah "*Mareva*". Putusan ini mencegah pihak pelanggar hak cipta untuk menjual aset guna menghilangkan kemungkinan dikenai hukuman.

Persyaratan umum untuk putusan hukum macam ini sebagai berikut :

- a. bahwa penggugat harus mendemonstrasikan kasus *facie prima* yang kuat;
- b. kepentingan yang seimbang (*the balance of convenience*) harus diserahkan kepada kepentingan penggugat, dan

---

<sup>75</sup> Indonesia Australia Specialised Training Project-Phase II, *Op.cit. hal.179-180*

- c. kerugian yang terjadi tidak boleh seimbang dengan ganti rugi yang di dapat.

Putusan sela mungkin dihasilkan setelah penundaan proses pengadilan. Hal ini mensyaratkan tergugat untuk menunda kegiatan-kegiatannya sebagaimana yang dikeluhkan oleh tergugat, sampai sesi dengar final dari kasus tersebut. Di Indonesia belum pernah terjadi adanya putusan sela atau dikenal dengan penetapan sementara pengadilan. Namun, mengingat Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 mengatur tentang penetapan sementara<sup>76</sup>, maka pengadilan harus siap untuk menerima gugatan penetapan sementara tersebut sehingga dituntut seorang hakim mempunyai pengetahuan yang cukup guna menghadapi kemungkinan tersebut.

Adagium bahwa tiap orang dianggap telah mengetahui hukum sebagai salah satu pertimbangan hakim yang digunakan dalam memberikan putusan Nomor : 40/PDT.G/2001/PN.JKT.PST tanggal 27 September 2001 tersebut, adalah sangatlah tepat untuk menyatakan tergugat melakukan tindakan dengan kesalahan dan sengaja. Di samping tergugat tidak memiliki lisensi untuk menggunakan atau

---

<sup>76</sup> Pasal 67 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengatur mengenai penetapan sementara pengadilan, yang menyebutkan bahwa atas permintaan pihak yang merasa dirugikan, pengadilan niaga dapat memberikan surat penetapan dengan segera dan efektif untuk :

- a. mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta atau Hak Terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi;
- b. menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti;

mengkomersilkannya, tergugat pun sepatutnya mengetahui siapa pencipta maupun pemegang hak cipta atas program *MICROSOFT SOFTWARE dan MICROSOFT OFFICE 2000*. Hal ini dilatarbelakangi bahwa Tergugat dalam usahanya bergerak dibidang komputer, sehingga Tergugat mengetahui benar siapa pencipta maupun pemegang hak atas program tersebut.

Tindakan Tergugat tersebut juga melanggar hak-hak yang dimiliki oleh penggugat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 pasal 45 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Pemegang Hak Cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 2. Pasal 2 Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 menyebutkan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan Penggugat yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan dinyatakan bahwa Penggugat tidak pernah memberikan hak atau lisensi kepada Tergugat untuk melakukan tindakan atau perbuatan seperti diatur dalam pasal 2 undang-undang hak cipta tersebut di atas. Keberadaan Penggugat sebagai suatu

- 
- c. meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas Hak Cipta atau Hak Terkait dan hak pemohon

badan hukum asing untuk melakukan gugatan tentang hak cipta di Indonesia, Undang-undang Hak Cipta Indonesia memberikan perlindungan terhadap hak-hak Penggugat. Hal ini dapat di lihat dalam Bab XV Ketentuan Penutup pasal 76 yang menyatakan bahwa Undang-undang Hak Cipta Indonesia berlaku terhadap :

- a. semua ciptaan warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b. semua ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan badan hukum Indonesia yang diumumkan untuk pertama kali di Indonesia;
- c. semua ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia dan bukan badan hukum Indonesia, dengan ketentuan :
  - negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan Hak Cipta dengan Negara Republik Indonesia;
  - negaranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta.

Berdasarkan pasal 76 huruf c (i) Undang-undang hak cipta Indonesia, *Microsoft Corporations* sebagai badan hukum yang didirikan tunduk pada hukum negara Amerika Serikat mendapatkan perlindungan di Indonesia karena antara Indonesia dan Amerika Serikat melakukan perjanjian Bilateral. Lebih lanjut ditegaskan dalam

---

tersebut memenag sedang dilanggar.

pasal 2 ayat 1 *agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America on Copyright Protection* yang telah mendapatkan pengesahan dan persetujuan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1989.

Demikian juga berdasarkan pasal 76 huruf c (ii) Undang-undang Hak Cipta Indonesia, Microsoft Corporation mendapatkan perlindungan di Indonesia karena Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama menjadi anggota perjanjian multilateral yaitu *Agreement Establishing The World Trade Organisation* (persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang telah disahkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 dan sama menjadi anggota *Bern Convention for The Protection of Literary and Artistic Work* yang telah diratifikasi dan disahkan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997.

Disamping melanggar Undang-undang Hak Cipta, Tergugat pun juga melanggar ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf (c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1989 tentang Perlindungan Konsumen di mana pelaku usaha dilarang menawarkan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan /atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, ciri-ciri kerja aksesori tertentu dari pemiliknya. Tidak adanya informasi yang jelas mengenai keabsahan dari program yang secara tidak sah diinstal oleh Tergugat tersebut dapat

memberikan kesan kepada konsumen seolah-olah perangkat lunak yang terdapat dalam perangkat keras komputer yang di jual tergugat adalah asli dan sah serta dilengkapi ciri-ciri dan aksesori tertentu sebagaimana lazimnya *MICROSOFT SOFTWARE* yang sah dan asli.

Keabsahan program *MICROSOFT SOFTWARE* dan *MICROSOFT ACCES 2000* yang dijual atau dilisensikan oleh Pemegang hak selalu diikuti oleh buku petunjuk, Piringan Cakram (*Compact Disc/CD*) asli yang memuat sistem perangkat lunak untuk keperluan "*back up*", perjanjian lisensi antara pembeli dengan Pemegang Hak sebagai pemilik hak cipta (*End User License Agreement for MICROSOFT SOFTWARE*), kardus/kotak pembungkus dengan desain dan merek serta logo atau lambang pemegang hak, Kartu Pendaftaran Microsoft (*Microsoft Registration Card*), Keterangan Jaminan dan Garansi serta Sertifikat Keaslian (*Certificate of Authenticity*) dari Pemegang Hak. Disamping itu dilengkapi pula jaminan bantuan teknis (*technical support*) dari penggugat untuk menjamin berfungsinya *MICROSOFT SOFTWARE* tersebut.

Andi Alfian Mallarangeng, PH.D, dalam memberika keterangan ahli pada perkara tersebut, mengemukakan bahwa pelanggaran yang terjadi secara berulang-ulang yang dilakukan oleh suatu kelompok dalam masyarakat akan menimbulkan suatu norma baru yang hanya dapat menguntungkan satu kelompok tertentu dan tidak dapat dijadikan sebagai norma dan dapat bertentangan dengan norma yang



lebih besar yaitu hukum yang berlaku. Di samping itu pelanggaran hak cipta itu bertentangan dengan kepentingan bangsa secara keseluruhan, untuk itu jika pemerintah Indonesia tidak berusaha menghentikan pelanggaran/mengambil tindakan terhadap pelanggar maka negara kita akan dikucilkan dalam politik internasional karena negara kita dianggap negara yang tidak melindungi hak cipta. Lebih lanjut Malarangeng mengemukakan bahwa dilindunginya hak cipta, maka akan menguntungkan ekonomi negara, karena pemerintah dapat langsung memungut pajak suatu industri software.

Keterangan ahli yang disampaikan oleh Malarangeng tersebut didukung pula oleh keterangan ahli yang lain yaitu Hendry Sulistyo Budi, yang mengemukakan bahwa Hard disk loading itu merupakan salah satu pelanggaran hak cipta karena melakukan pemasangan/penginstalan suatu perangkat lunak komputer ke dalam perangkat keras komputer tanpa ijin dari pemegang hak. Tindakan Hard Disk Loading tidak dapat dibenarkan meskipun di dasarkan karena tingginya harga perangkat lunak komputer yang menyebabkan terhambatnya proses pencerdasan bangsa. Proses pencerdasan bangsa tidak selayaknya dilakukan dengan "mencuri" hak cipta orang lain.

Perbanyakan/penginstalan dengan cara tidak sah tersebut tidak saja merugikan konsumen, akan tetapi juga akan merusak nama baik atau reputasi Pemegang Hak dan akan menciptakan penilaian yang

salah oleh konsumen terhadap keaslian dan keabsahan produk *MICROSOFT SOFTWARE* dan *MICROSOFT ACCES 2000* , karena apabila terjadi kerusakan atau ketidaksempurnaan pemasangan atas perangkat lunak tersebut yang tanpa hak dicopy/diinstal oleh Tergugat, Pemegang Hak yang akan menanggung akibat tersebut. Di samping itu tindakan Tergugat yang di nilai telah memenuhi 4 (empat) unsur perbuatan melawan hukum oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya, adalah sudah tepat karena berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.

Wirjono Prodjodikoro, menyebutkan bahwa penggunaan istilah "perbuatan melanggar hukum" adalah agak sempit, kalau diingat, bahwa yang dimaksudkan istilah ini tidak hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain di luar bidang hukum, namun, secara tidak langsung dapat dikatakan melanggar hukum. Yang dimaksudkan peraturan lain ini ialah, peraturan di lapangan kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun.<sup>77</sup>

Sifat dari yang dimaksudkan dengan istilah "perbuatan melanggar hukum" ialah, bahwa perbuatan itu mengakibatkan

---

<sup>77</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum, Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, (Bandung : Penerbit Mandar Maju, 2000), hal 6 dan 7

kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat. Dan kegoncangan ini tidak hanya terdapat, apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar, melainkan juga, apabila peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan dan sopan-santun dalam masyarakat dilanggar. Maka tergantunglah dari nilai hebatnya kegoncangan itu, apakah peraturan hukum menuntut kegoncangan itu, meskipun hanya mengenai perkosaaan peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan atau sopan-santun, harus dicegah sekeras seperti mencegah suatu perbuatan yang langsung melanggar hukum.<sup>78</sup>

Dari rumusan pasal 1365 dapat terlihat bahwa suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur di bawah ini :<sup>79</sup>

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechtmatig)

Perbuatan melawan hukum menurut Arrest 1919, merupakan sesuatu perbuatan melanggar hukum, jika melanggar hak orang lain yang merupakan hak subyektif yaitu hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan dan nama baik.

2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian

Kerugian itu harus bersifat kerugian material atau kerugian immaterial. Pasal-pasal 1246 sampai dengan pasal 1248 KUHPdt mengenai ganti kerugian dalam hal wanprestasi tidak dapat diterapkan secara langsung pada perbuatan melawan hukum ,

---

<sup>78</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.* hal. 7

melainkan dibuka kemungkinan penerapan secara analogis. Dalam pasal-pasal mengenai ganti kerugian akibat wanprestasi kerugian itu meliputi tiga unsur, antara lain, biaya, kerugian yang sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan (bunga). Sedangkan ukuran yang dipakai adalah uang. Dalam perbuatan melawan hukum, unsur-unsur kerugian dan ukuran penilaiannya dengan uang dapat diterapkan secara analogis. Dengan demikian, perhitungan ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum didasarkan pada kemungkinan adanya tiga unsur tersebut, dan kerugian itu dihitung dengan sejumlah uang.

3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan

Pengertian kesalahan di sini adalah pengertian dalam hukum perdata, bukan dalam hukum pidana. Kesalahan dalam pasal 1365, mengandung semua gradasi dari kesalahan dalam arti "sengaja" sampai pada kesalahan dalam arti "tidak sengaja" (lalai).

4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Adanya hubungan kausal dapat disimpulkan dari kalimat pasal 1365 "perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian". Kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan orang itu. Jika tidak ada perbuatan, tidak ada akibat yaitu kerugian. Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan adalah

---

<sup>79</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal.252

sebab dari suatu kerugian, perlu diikuti teori "*adequate veroorzaking*" dari von Kries. Menurut teori ini, yang dianggap sebagai sebab adalah perbuatan yang menurut pengalaman manusia normal sepatutnya diharapkan menimbulkan akibat, dalam hal ini kerugian. Jadi, antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan langsung.

### **3.2. Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase**

Penyelesaian sengketa hak cipta, khususnya sengketa lisensi tidak jarang diselesaikan oleh para pihak yang terkait di luar pengadilan yaitu melalui alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase maupun dengan cara damai. Pihak-pihak tersebut tiak menginginkan sengketa yang terjadi diselesaikan melalui pengadilan. Para pengusaha<sup>80</sup> lebih suka menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dari pada ke pengadilan. Hal ini dilakukan antara lain, untuk menghindarkan masalah prosedur pengadilan yang panjang, menyita waktu dan menghabiskan biaya serta energi.

Para pelaku bisnis yang terlibat dalam perjanjian lisensi dibidang hak cipta senantiasa mengharapkan kontrak yang mereka buat akan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian, dalam perjalanan waktu tidak menutup kemungkinan terjadi sengketa diantara mereka, meskipun hal ini sebenarnya sama sekali tidak diharapkan. Seperti halnya dalam penyusunan perjanjian yang dituangkan dalam

---

<sup>80</sup> Hendra Tanu Admadja, *Op.cit*, hal. 275

kontrak bisnis yang perlu menekankan konsep *win-win solution*, maka dalam hal terjadi sengketa tentunya perlu diupayakan penyelesaian yang terbaik. Suatu penyelesaian sengketa yang cepat, efektif dan efisien.

Sudah menjadi kesadaran umum mengenai tidak efektif dan efisiennya proses penyelesaian sengketa melalui proses litigasi. Bahkan belakangan muncul kritik bahwa proses penyelesaian sengketa melalui penadilan bersifat buang waktu dan mahal. Bagi dunia bisnis proses yang demikian jelas akan mengakibatkan bonafiditas dan kredibilitas rendah serta ekonomi biaya tinggi (*hight Cost Economy*). Karenanya penyelesaian sengketa melalui pengadilan tetap merupakan upaya "*ultimum remidium*". Pengadilan dipandang sebagai "*the last resort*", sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan.<sup>81</sup>

Dalam penyelesaian sengketa bisnis diantara mereka maka penyelesaian yang terbaik dan ideal adalah pola penyelesaian *win-win solution*, yaitu melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Pola ADR ini dipandang para pihak sama-sama terlindungi. Kredibilitas maupun bonafiditas para pihak tetap terjaga, selain itu mengapa ADR dipandang sebagai pilihan terbaik (*the best choice*), adalah :<sup>82</sup>

- a. bersifat "*informal*"
- b. penyelesaian secara "kooperatif" oleh para pihak yang bersengketa;

---

<sup>81</sup> M. Yahya Harahap., *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum* (buku kesatu), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 160

<sup>82</sup> M. Yahya Harahap., *op cit.*, hal. 169

- c. biaya "murah" (*nominal cost* atau *zero-cost*);
- d. penyelesaian "cepat" (*quick*);
- e. menyelesaikan sengketa serta memperbaiki hubungan "masa depan" (*the future*);
- f. penyelesaian secara "kompromi" (*compromise*);
- g. hasil yang dicapai sama-sama "menang" (*win-win*);
- h. hubungan semakin "mesra";
- i. "tidak antagonistik" serta tidak ada dendam;
- j. pemenuhan secara "sukarela".

Dalam kerangka kontrak "*win-win solution*" maka sejak awal pembuatan kontrak sampai pelaksanaannya, serta apabila kemungkinan terjadi sengketa di antara para pihak hendaknya senantiasa dihindari hal-hal yang dapat merusak pola kemitraan yang terbingkai dalam kontrak, sehingga upaya penyelesaian sengketa yang terjadi di antara para pihak juga diarahkan pada pola penyelesaian "*win-win solution*".<sup>83</sup>

Menurut Nader dan Todd<sup>84</sup> ada beberapa kemungkinan penyelesaian sengketa yang dapat ditemukan dalam berbagai masyarakat di dunia, yakni adjudikasi, arbitrase, mediasi, negosiasi, paksaan, penghindaran, dan dibiarkan saja. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa menurut Nader dan Todd ini dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok utama, yakni yang dilakukan oleh

<sup>83</sup> Agus Yuda Hernoko., *Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Standar, (Pengembangan Konsep Win-Win Solution sebagai Alternatif Baru dalam Kontrak Bisnis)*, yang diedit oleh Dr. Sarwini.,SH.,MS dan L. Budi Kagramanto, SH.,MH.,MM dalam *Puspa Ragam Informasi dan Problematika Hukum*, penerbit Karya Abditama, Surabaya, Oktober 2000, hal 109.

<sup>84</sup> L. Nader & H.F. Todd, *The Disputing Process-Law in Ten Societies*, Columbia University Press, New York, 1978, Hal. 9-10; Bandingkan juga dengan T.O. Ihromi (penyunting), *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 1993, hal.210-213.

salah satu pihak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa saja, dan yang melibatkan pihak ketiga.

Penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga meliputi penyelesaian yang berbentuk adjudikasi, arbitrase dan mediasi. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa ini mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah bahwa ketiga bentuk penyelesaian ini bersifat triadik karena melibatkan pihak ketiga. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa adjudikasi merupakan penyelesaian yang dilakukan oleh pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk campur tangan, dan ia dapat melaksanakan keputusan yang telah ditentukan tanpa memperhatikan apakah kehendak para pihak. Berbeda dengan adjudikasi, arbitrase merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak ketiga dan keputusannya disetujui oleh pihak-pihak yang bersengketa. Sedangkan mediasi adalah bentuk penyelesaian yang melibatkan pihak ketiga untuk membantu pihak-pihak yang bersangkutan untuk mencapai persetujuan.

Di dalam negosiasi, bentuk penyelesaian sengketa hanya dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa model ini disebut penyelesaian sengketa diadik untuk menghasilkan suatu keputusan atau persetujuan tanpa campur tangan atau bantuan pihak ketiga. Biasanya penyelesaian sengketa model ini tidak berdasarkan peraturan yang ada melainkan berdasarkan aturan yang mereka buat sendiri. Sedangkan penyelesaian sengketa secara



sepihak oleh salah satu pihak dapat berbentuk membiarkan saja, penghindaran, dan paksaan. Membiarkan saja merupakan bentuk penyelesaian dimana salah satu pihak yang merasa dirugikan tidak melakukan upaya hukum. Penghindaran adalah penyelesaian sengketa dimana salah satu pihak melakukan pembatasan atau pemutusan hubungan dengan pihak lawan. Sedangkan paksaan merupakan penyelesaian sengketa dimana salah satu pihak memaksakan hasil akhir ada pihak lawan lewat berbagai ancaman atau penggunaan kekuatan riil.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui negosiasi melibatkan para pihak yang bersengketa secara langsung untuk menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi. Konsultasi dan pemberian pendapat hukum melibatkan secara bersama-sama para pihak yang bersengketa dengan pihak yang memberikan konsultasi atau pendapat hukum. Pemberian konsultasi dan pendapat hukum dapat diberikan dalam suatu pertemuan bersama maupun sendiri-sendiri oleh masing-masing pihak yang bersengketa dengan konsultan atau ahli hukumnya sendiri.

Selanjutnya mediasi dan konsiliasi melibatkan eksistensi pihak ketiga yang berfungsi menghubungkan kedua belah pihak yang bersengketa, di mana dalam mediasi fungsi pihak ketiga dibatasi hanya sebagai penyambung lidah, sedangkan dalam konsiliasi, pihak ketiga terlibat secara aktif dalam memberikan usulan solusi atas

sengketa yang terjadi. Pada akhirnya arbitrase merupakan suatu bentuk peradilan swasta dengan arbiter sebagai hakim swasta, yang memutuskan untuk kepentingan kedua belah pihak yang bersengketa.<sup>85</sup>

Istilah "alternatif" dalam ADR walaupun terkesan sebagai mekanisme tandingan terhadap penyelesaian melalui pengadilan, namun tidak bermakna bahwa ADR dapat menggantikan pengadilan (*litigation*). Kemungkinan ADR ada dua, yakni disponsori oleh swasta dan pengadilan. Ada beberapa tawaran yang justru menjadi daya tarik ADR yakni *pertama*, ADR dipercaya dapat menghasilkan "*win-win solution*" bagi para pihak yang bersengketa. Pada ADR ditawarkan bahwa pihak yang berselisih sendiri menguasai jalannya penyelesaian perkara, dan dalam hal meminta bantuan pihak ketiga, maka perantara ini adalah ahli dalam masalah yang dipersengketakan (yang sering sangat sulit dan rumit dari segi teknis). *Kedua*, apa juga yang diharapkan para pihak yang bersengketa adalah cepatnya pemberian keputusan, sehingga tidak berlarut-larut masalahnya (apalagi yang berhubungan dengan perjanjian lisensi di bidang hak cipta yang dampaknya dirasakan oleh para pihak yang membuat perjanjian serta lingkup masalahnya merupakan masalah keperdataan). *Ketiga*, dalam hal keadilan, yang dicari oleh para pihak adalah "rasa keadilan kedua

---

<sup>85</sup> Gunawan Waidjaja, *Loc.Cit.* Hal. 123-124

belah pihak” dan bukan “keadilan menurut hukum atau undang-undang belaka”.<sup>86</sup>

Penyelesaian sengketa secara damai terhadap pelanggaran hak cipta dapat di lihat pada lagu Mars Perjuangan “*Bambu Runcing*” , yaitu diselesaikan pada saat berlakunya *Auteurswet* 1912. Lagu “*Bambu Runcing*” selalu dikumandangkan oleh Radio Republik Indonesia (RRI) Surakarta sebagai lagu pembuka, yang dimainkan Radio Orkestra Surakarta (ROS) pimpinan Kamsidi. Demikian juga dengan lagu “*Harapan Bangsa*” yang dikenal sebagai lagu Mars PON ke-1 di Solo. P. Siagian menerbitkannya dalam kumpulan 83 lagu-lagu perjuangan berjudul “*Indonesia Cintaku*” Nama Kamsidi sebagai pencipta dan pembuatan aransemen serta daldjono sebagai pembuat syair bukan tidak tercantum di buku itu, namun sengaja dibalik penulisannya, seolah-olah salah cetak, dengan demikian Siagian merasa tidak perlu membayar honor.

Keluarga Kamsidi merasa dirugikan, karena terlebih dahulu membuat surat kuasa sebagai pengikat. Di dalam surat kuasa yang disodorkan Siagian, tercantum ketentuan :”Memberikan kuasa untuk mengurus hingga selesai hak cipta (*copyright*) lagu-lagu ciptaan Kamsidi yang diterbitkan oleh penerbit tanpa perlu ada ijin dari ahli waris penciptanya. Berdasarkan surat kuasa tersebut, siagian antara lain, menerbitkan buku yang berisi lagu-lagu terkenal dengan

---

<sup>86</sup> Lihat Mardjono Reksodiputro, *Legal Institutions and Alternative Dispute Resolution*”, hasil penelitian yang disajikan pada Seminar Nasional Menyongsong Pembangunan Hukum Era –

mndatangi penerbit-penerbit yang yang pernah menerbitkan lagu-lagu wajib nasional untuk meminta honor. Kalau tidak diberikan, Siagian akan menuntut ke Pengadilan.

Dengan bukunya, Siagian merasa berjasa mengumpulkan lagu-lagu nasional yang berserakan. Siagian juga merasa sudah mendapat persetujuan dari keluarga Kamsidi untuk menerbitkan lagu-lagu itu dengan memberi honor sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tanpa kuitansi. Penyelesaian kasus tersebut diselesaikan secara damai dimana ahli waris pencipta lgu tersebut bersedia menerima kompensasi sebesar 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Dalam sengketa lisensi yang diselesaikan dengan cara damai dapat dilihat dari beberapa kasus yang diperoleh Hendra Tanu Atmadja melalui wawancara dengan PT. Aquarius Musikindo, seperti berikut :

PT. Aquarius Musikindo adalah pemegang lisensi dari EMI pada tahun 1990. Lagu "The Hollis" untuk mana PT. Aquarius Musikindo mendapat lisensi dari EMI, kemudian diedarkan oleh PT. Indo Semar Sakti tanpa persetujuan yang bersangkutan. Ribuan kaset lagu tersebut telah digandakan tanpa kesengajaan, karena artis yang menyanyikan atau haknya membingungkan. Penggandaan lagu tersebut diketahui oleh PT. Aquarius Musikindo sebagai pemegang lisensi dari EMI, kemudian PT. Aquarius musikindo menghubungi

adalah "*Long Way Home*", "*Sweet Chain*", "*Lesser of Two Evils*" "*What Price and From the Beginning*"

Selain kasus-kasus yang diselesaikan secara damai di atas, juga ada kasus yang diselesaikan melalui *Badan Arbitrase* yang diprakarsai oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), sehubungan dengan lagu "*Mutiara yang Hilang*" ciptaan Agus Muhadi yang diselesaikan oleh Arbitrase Ad.Hoc Yayasan Karya Cipta Indonesia dengan Putusan Arbitrase No.003/IV/Ad.Hoc/98/YKCI/IV/1998.<sup>87</sup>

Sejak tahun 1957, lagu tersebut telah dinyanyikan oleh kelompok murid SMEP Denpasar di RRI Denpasar. Pada tahun 1968, menurut pengakuan Yessy Wenas, lagu "*Mutiara yang Hilang*" adalah ciptaannya sendiri Dodo. Lagu tersebut pada tahun 1978 direkam di piringan hitam oleh PT. Remaco, dan dinyanyikan oleh Erni Johan. Sengketa diserahkan kepada Badan Arbitrase Ad Hoc YKCI. Putusan Badan Arbitrase itu menyatakan bahwa Agus Muhadi adalah pencipta asli dari lagu "*Mutiara yang Hilang*", sehingga ia berhak atas hak ciptanya. Segala penghasilan yang diperoleh dari lagu tersebut harus diserahkan kepada Agus Muhadi. Penyelesaian sengketa hak cipta di atas yang diselesaikan secara arbitrase merupakan kasus pertama dan satu-satunya yang terjadi di Indonesia.

Upaya-upaya penyelesaian sengketa melalui pilihan alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase tersebut merupakan suatu

---

<sup>87</sup> Hendra Tanu Admaja, *Loc.cit.* Hal.283

adalah "*Long Way Home*", "*Sweet Chain*", "*Lesser of Two Evils*" "*What Price and From the Beginning*"

Selain kasus-kasus yang diselesaikan secara damai di atas, juga ada kasus yang diselesaikan melalui *Badan Arbitrase* yang diprakarsai oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), sehubungan dengan lagu "*Mutiara yang Hilang*" ciptaan Agus Muhadi yang diselsaikan oleh Arbitrase Ad.Hoc Yayasan Karya Cipta Indonesia dengan Putusan Arbitrase No.003/IV/Ad.Hoc/98/YKCI/IV/1998.<sup>87</sup>

Sejak tahun 1957, lagu tersebut telah dinyanyikan oleh kelompok murid SMEP Denpasar di RRI Denpasar. Pada tahun 1968, menurut pengakuan Yessy Wenas, lagu "*Mutiara yang Hilang*" adalah ciptaannya sendiri Dodo. Lagu tersebut pada tahun 1978 direkam di piringan hitam oleh PT. Remaco, dan dinyanyikan oleh Erni Johan. Sengketa diserahkan kepada Badan Arbitrase Ad Hoc YKCI. Putusan Badan Arbitrase itu menyatakan bahwa Agus Muhadi adalah pencipta asli dari lagu "*Mutiara yang Hilang*", sehingga ia berhak atas hak ciptanya. Segala penghasilan yang diperoleh dari lagu tersebut harus diserahkan kepada Agus Muhadi. Penyelesaian sengketa hak cipta di atas yang diselesaikan secara arbitrase merupakan kasus pertama dan satu-satunya yang terjadi di Indonesia.

Upaya-upaya penyelesaian sengketa melalui pilihan alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase tersebut merupakan suatu

---

<sup>87</sup> Hendra Tanu Admaja, *Loc.cit.* Hal.283

Posisi pihak lisensi dalam menyelesaikan perselisihan yang timbul juga sangat lemah, hal ini tercermin dengan peran aktif Ahli Hukum Indonesia dalam Arbitrase Internasional itu sendiri, mayoritas hanya sebagai konsultan.

Pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan terutama sengketa lisensi, pada umumnya dipengaruhi oleh sikap dan perilaku para pihak. Sikap dan perilaku tersebut dipengaruhi oleh budaya hukum masing-masing pihak dalam kelompok masyarakat. Menurut Friedman<sup>89</sup>, Budaya hukum merupakan bagian komponen dari sistem hukum, di samping komponen substansi yang berupa aturan-aturan, baik yang tertulis (misalnya saja undang-undang) maupun yang tidak tertulis (misalnya saja kaedah-kaedah dalam hukum kebiasaan), sedangkan komponen yang lain dari sistem hukum adalah komponen struktural yaitu lembaga-lembaga yang berkaitan erat dengan sistem hukum seperti saja lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, kepolisian dan lembaga-lembaga lainnya.

Para pihak dalam menentukan pilihan penyelesaian sengketa melalui ADR menurut teori Struktural-Fungsional<sup>90</sup>, bahwa tindakan para pihak tersebut sangat ditentukan oleh nilai-nilai budaya yang dipegang oleh para pihak yang melakukan perjanjian lisensi. Bagi teori ini, tindakan seseorang pada suatu sisi terbentuk oleh struktur-struktur

---

<sup>88</sup> Tim Peneliti BPP Teknologi dan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Laporan Penelitian Kontrak Nasional dan Internasional Alih Teknologi, Penerbit Departemen Kehakiman, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1991, Jakarta.

<sup>89</sup> Lawrence Friedman, *ibid*, Hal. 15

Posisi pihak lisensi dalam menyelesaikan perselisihan yang timbul juga sangat lemah, hal ini tercermin dengan peran aktif Ahli Hukum Indonesia dalam Arbitrase Internasional itu sendiri, mayoritas hanya sebagai konsultan.

Pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan terutama sengketa lisensi, pada umumnya dipengaruhi oleh sikap dan perilaku para pihak. Sikap dan perilaku tersebut dipengaruhi oleh budaya hukum masing-masing pihak dalam kelompok masyarakat. Menurut Friedman<sup>88</sup>, Budaya hukum merupakan bagian komponen dari sistem hukum, di samping komponen substansi yang berupa aturan-aturan, baik yang tertulis (misalnya saja undang-undang) maupun yang tidak tertulis (misalnya saja kaedah-kaedah dalam hukum kebiasaan), sedangkan komponen yang lain dari sistem hukum adalah komponen struktural yaitu lembaga-lembaga yang berkaitan erat dengan sistem hukum seperti saja lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, kepolisian dan lembaga-lembaga lainnya.

Para pihak dalam menentukan pilihan penyelesaian sengketa melalui ADR menurut teori Struktural-Fungsional<sup>90</sup>, bahwa tindakan para pihak tersebut sangat ditentukan oleh nilai-nilai budaya yang dipegang oleh para pihak yang melakukan perjanjian lisensi. Bagi teori ini, tindakan seseorang pada suatu sisi terbentuk oleh struktur-struktur

---

<sup>88</sup> Tim Peneliti BPP Teknologi dan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Laporan Penelitian Kontrak Nasional dan Internasional Alih Teknologi, Penerbit Departemen Kehakiman, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1991, Jakarta.

<sup>89</sup> Lawrence Friedman, *ibid*, Hal. 15



jahat. Sengketa-sengketa perdata diselesaikan melalui musyawarah, konsiliasi dan mediasi.<sup>91</sup>

Bagi Jepang, Cina dan Korea mempunyai pandangan terhadap perjanjian juga tidak sama dengan pandangan yang dimiliki oleh masyarakat Barat. Kontrak tidak lebih sebagai simbol dari kerjasama, bukan "dokumen hukum", sehingga dapat diubah setiap saat, manakala kondisi dan situasi mengalami perubahan. Hubungan bisnis lebih diletakkan kepada hubungan kepercayaan (personal) dari pada hubungan hukum. Menurut orang Jepang dalam bisnis : "*Trust the people rather than paper*".

Sikap dan perilaku tersebut merupakan budaya hukum<sup>92</sup> masyarakat Timur, terutama Jepang, Cina dan Korea. Lebih lanjut dikatakan bahwa kendatipun budaya hukum sebagai konsep yang eksplisit baru muncul sekitar tahun 1960-an, namun, jejaknya dapat dilacak sampai ke masa lampau yang jauh. Umpamanya sikap dasar perusahaan Jepang dan latar belakang budaya Jepang dalam menghadapi permasalahan terutama perselisihan adalah sebagai berikut :

---

<sup>91</sup> Erman Radjaguguk, *Peran Hukum Kontrak Internasional dalam Perdagangan Bebas*, Makalah disampaikan pada Seminar tentang Kesiapan Hukum Nasional menghadapi Perdagangan Bebas BPHN, Departemen Kehakiman bekerjasama dengan Kantor Menko Ekuwasbang (ELIPS), Jakarta 5 Maret 1997 dan dimuat dalam Majalah Hukum Nasional, Nomor 2 Tahun 1998.

<sup>92</sup> Satjipto Rahardjo, *Peningkatan Wibawa Hukum Melalui Pembinaan Budaya Hukum*, Makalah disampaikan dalam seminar Pembangunan Bidang Hukum Repelita VII, yang diselenggarakan oleh Badan pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1 – 5 Juli 1997, Hal. 2 – 3.

jahat. Sengketa-sengketa perdata diselesaikan melalui musyawarah, konsiliasi dan mediasi.<sup>91</sup>

Bagi Jepang, Cina dan Korea mempunyai pandangan terhadap perjanjian juga tidak sama dengan pandangan yang dimiliki oleh masyarakat Barat. Kontrak tidak lebih sebagai simbol dari kerjasama, bukan "dokumen hukum", sehingga dapat diubah setiap saat, manakala kondisi dan situasi mengalami perubahan. Hubungan bisnis lebih diletakkan kepada hubungan kepercayaan (personal) dari pada hubungan hukum. Menurut orang Jepang dalam bisnis : "*Trust the people rather than paper*".

Sikap dan perilaku tersebut merupakan budaya hukum<sup>92</sup> masyarakat Timur, terutama Jepang, Cina dan Korea. Lebih lanjut dikatakan bahwa kendatipun budaya hukum sebagai konsep yang eksplisit baru muncul sekitar tahun 1960-an, namun, jejaknya dapat dilacak sampai ke masa lampau yang jauh. Umpamanya sikap dasar perusahaan Jepang dan latar belakang budaya Jepang dalam menghadapi permasalahan terutama perselisihan adalah sebagai berikut :

---

<sup>91</sup> Erman Radjaguguk, *Peran Hukum Kontrak Internasional dalam Perdagangan Bebas*, Makalah disampaikan pada Seminar tentang Kesiapan Hukum Nasional menghadapi Perdagangan Bebas BPHN, Departemen Kehakiman bekerjasama dengan Kantor Menko Ekkuwasbang (ELIPS), Jakarta 5 Maret 1997 dan dimuat dalam Majalah Hukum Nasional, Nomor 2 Tahun 1998.

<sup>92</sup> Satjipto Rahardjo, *Peningkatan Wibawa Hukum Melalui Pembinaan Budaya Hukum*, Makalah disampaikan dalam seminar Pembangunan Bidang Hukum Repelita VII, yang diselenggarakan oleh Badan pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1 – 5 Juli 1997, Hal. 2 – 3.

1. yang diutamakan adalah keharmonisan bersama dan kepercayaan, pepatah Jepang mengatakan "keharmonisan diantara orang-orang adalah lebih penting dibanding keuntungan dalam kedudukan;
2. semangat kompromi, yaitu, keputusan melalui negosiasi lebih penting dari pada perselisihan yang dilakukan;
3. menyelesaikan kemanfaatan dari dua pihak dibandingkan dengan kemanfaatan maksimum untuk setiap pihak;
4. perusahaan berkeyakinan selalu ada ruang untuk melakukan kompromi-kompromi pada setiap persengketaan.

Pilihan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dituangkan dalam setiap pembuatan perjanjian lisensi di bidang hak cipta adalah merupakan suatu pilihan yang tepat. Di samping pilihan tersebut sangat dimungkinkan oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, juga terhadap keputusan apapun yang dihasilkannya akan ditaati oleh para pihak yang bersengketa sebagai putusan yang bersifat final.

Oleh karena itu agar pilihan alternatif penyelesaian sengketa tersebut dapat berfungsi dengan baik sesuai kehendak para pihak, maka perumusan klausula alternatif penyelesaian sengketa harus dibuat sebaik mungkin dengan menghindari atau menghilangkan celah-celah hukum sebanyak mungkin. Perumusan yang baik akan mencegah berlarutnya proses penyelesaian sengketa alternatif serta memberikan kepastian pelaksanaan kesepakatan maupun putusan yang dicapai, diperoleh atau diambil sehubungan dengan pranata alternatif penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

Dari apa yang telah diuraikan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, pada akhirnya penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Lisensi dibidang hak cipta harus dibedakan dengan pemindahan hak atas hak cipta. Keduanya terdapat kemiripan yang kadang-kadang sulit untuk dibedakan. Di dalam pemindahan hak atas hak cipta, pada dasarnya pemegang hak melepaskan pengawasan ekonomi atas hak cipta kepada pemegang hak cipta selanjutnya, sedangkan lisensi di bidang hak cipta, pada dasarnya pemegang hak atas hak cipta dapat mengontrol pengawasan ekonomi atas hak cipta tersebut. Di dalam mekanisme lisensi dibidang hak cipta pelaksanaannya dilakukan melalui suatu perjanjian secara tertulis antara pemberi dan penerima lisensi. Namun di dalam pelaksanaan tersebut antara obyek hak cipta yang satu dengan  
◦ obyek hak cipta yang lain terdapat suatu perbedaan. Perbedaan ini, dikarenakan adanya karakteristik yang berbeda-beda dari masing-masing obyek hak cipta (Lagu/musik, Penerbitan buku maupun Program komputer). Di dalam Lagu/musik dan penerbitan buku lebih menonjolkan nilai komersialisasi sedangkan di dalam program komputer menekankan pada penggunaan program komputer. Mengingat masalah lisensi yang secara umum diatur di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002

tentang Hak Cipta, maka untuk memberikan pedoman dan kemudahan bagi pemberi dan penerima lisensi,

- A. Perlu dibuatkan suatu Petunjuk pelaksanaan (Juklak) atau Petunjuk Teknis (Juknis) tentang Mekanisme Lisensi di bidang Hak Cipta. Di dalam Petunjuk Pelaksanaan maupun Petunjuk Teknis tersebut diperinci satu-persatu tentang jenis-jenis lisensi eksklusif atau non eksklusif, hak dan kewajiban para pihak dan syarat-syarat minimum yang harus dituangkan dalam perjanjian terhadap obyek-obyek hak cipta sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- B. Di dalam mekanisme lisensi di bidang hak cipta, pembayaran imbalan atau royalti adalah merupakan suatu konsekuensi logis yang harus dilakukan oleh penerima lisensi kepada pemberi lisensi (pemegang hak cipta). Hal ini dikarenakan penerima lisensi mendapatkan keuntungan-keuntungan materiil dari pengeksploitasian hak ekonomi atas hak cipta. Jenis-jenis pembayaran imbalan atau ganti rugi dari penerima lisensi kepada pemberi lisensi terdapat berbagai macam cara yang berbeda-beda antara obyek hak cipta yang satu terhadap obyek hak cipta yang lain, antara lain di dalam lagu/musik dikenal dua macam cara yaitu **Sistem Royalti** dan **Sistem flat**, di dalam penerbitan buku dikenal beberapa cara, yaitu dengan **Sistem prosentase**, **Sistem termin**, **Sistem Bagi Hasil** dan **Sistem Lepas** atau **penjualan Hak Cipta**. Berbeda dengan sistem pembayaran yang

dilakukan di dalam mekanisme lisensi program komputer, di sini penerima lisensi membayar sejumlah harga per-program komputer yang digunakan untuk satu *Personal Computer (PC)*, sehingga dapat dikatakan bahwa penerima lisensi dibidang program komputer hampir mirip dengan ketentuan sewa menyewa dalam hukum perdata. Hak-hak yang dimiliki oleh penerima lisensi hanyalah menggunakan program komputer untuk satu *Personal Computer*. Dengan demikian ketentuan besarnya jumlah royalti yang harus dibayarkan kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi sebagaimana diatur di dalam pasal 45 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yaitu ***berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi***, sangatlah sulit dilaksanakan apabila harus berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi. Hal ini dikarenakan, bahwa tidak semua obyek hak cipta sudah terbentuk organisasi profesi yang menanganinya. Oleh karena itu, ketentuan tersebut sebaiknya dihapuskan saja, cukup ***berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak***.

2. Terhadap Ketentuan kewajiban pencatatan perjanjian lisensi dan pendaftaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 terdapat suatu prinsip yang berbeda, yaitu :

A. Bahwa kewajiban pencatatan perjanjian lisensi tidak dapat terlepas dengan pengaturan tentang perjanjian atau kontrak secara umum di dalam sistem hukum perdata di Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata , yaitu dalam Buku III dari pasal 1233 sampai dengan pasal 1864. Berlakunya perjanjian atau kontrak pada azasnya hanya mengikat pihak-pihak yang membuat perjanjian saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 sampai dengan pasal 1318 dan pasal 1340 KUHPerdata. Asas berlakunya perjanjian atau kontrak tersebut di atas oleh undang-undang diberikan suatu pengecualian yaitu mengenai janji bagi kepentingan pihak ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 1317 KUHPerdata,

Suatu persetujuan atau perjanjian yang menyangkut pula Janji terhadap pihak ketiga tersebut menurut pasal 1340 ayat (2) KUHPerdata, tidak boleh merugikan atau menguntungkan pihak ketiga, kecuali mengenai apa yang telah diatur dalam pasal 1317 KUHPerdata. Jadi suatu persetujuan pada azasnya, tidak boleh menimbulkan hak maupun kewajiban terhadap pihak ketiga, kecuali jika dibuat suatu janji bagi kepentingan pihak ketiga. Janji bagi kepentingan pihak ketiga adalah suatu janji yang oleh para pihak dituangkan dalam suatu persetujuan, di mana ditentukan bahwa pihak ketiga akan mendapatkan hak atas suatu prestasi.

Berdasarkan uraian pasal 1315 sampai dengan pasal 1318 dan 1340 KUHPerdara tersebut di atas dengan tegas mengatur mengenai suatu perjanjian atau persetujuan itu tidak hanya berlaku bagi pihak pertama dan pihak kedua saja, tetapi berlaku pula terhadap pihak ketiga, apabila pihak ketiga tersebut dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian. Dengan demikian adanya ketentuan yang mewajibkan pencatatan perjanjian lisensi agar berlaku terhadap pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, bertentangan dengan ketentuan pasal 1317 dan pasal 1340 KUHPerdara tersebut di atas.

Pertentangan tersebut terlihat bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak tetap mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, apabila para pihak yang membuat perjanjian tersebut menghendakinya sedangkan menurut pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga apabila tidak dicatatkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Sehingga apabila ketentuan yang mewajibkan pencatatan perjanjian lisensi hanya dengan alasan "agar berlaku terhadap pihak ketiga", ketentuan tersebut tidaklah akan berlaku dengan efektif, dengan kata lain hanya tinggal peraturan belaka dan bertentangan pula dengan pasal 1338 KUHPerdara.



Apabila memang perjanjian lisensi dikehendaki sebagai suatu keharusan atau kewajiban untuk dilakukan pencatatan dengan alasan sebagai filter atau pengawasan sebagaimana diatur dalam pasal 47 ayat (1), di samping juga untuk menambah penerimaan negara bukan pajak, karena pencatatan lisensi dibebani biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2001, maka hal tersebut dapatlah diterima, namun apabila kewajiban pencatatan perjanjian lisensi didasarkan alasan agar mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, hal tersebut bertentangan dengan substansi perjanjian itu sendiri. Oleh karena itu sebaiknya pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 dihapuskan saja.

Di samping itu, ketentuan perjanjian lisensi yang merupakan kewajiban untuk dilakukan pencatatan tidak diikuti pula satu pasal pun yang mengatur tentang ancaman/sanksi bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, sehingga ketentuan tersebut seolah-olah hanya merupakan suatu himbauan saja. Hal ini akan berpengaruh tidak ditaatinya ketentuan tentang kewajiban pencatatan lisensi oleh masyarakat.

Dengan kata lain, walaupun suatu perjanjian lisensi di bidang hak cipta tidak dicatatkan di Kantor Hak Cipta, perjanjian tersebut tetap berlaku terhadap pihak ketiga, kalau memang pihak ketiga

tersebut dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian atau persetujuan. Di samping itu, memang sifat dari perjanjian lisensi itu sendiri adalah merupakan lingkup hukum keperdataan yang substansi perjanjiannya menyangkut pihak-pihak yang berkepentingan saja, sehingga apabila perjanjiannya sudah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1320 dan pasal 1338 KUHPerdota, maka perjanjiannya sah adanya. Untuk itu, kewajiban pencatatan perjanjian lisensi hanyalah akan menambah beban administrasi bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian.

- B. Ketentuan pendaftaran hak cipta sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta bukan merupakan suatu kewajiban untuk memperoleh hak atas hak cipta, hal ini selaras dengan prinsip dasar lahirnya hak cipta yaitu lahirnya hak cipta sejak suatu ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata dan bukan karena pendaftaran. Oleh karena itu, pendaftaran ciptaan tidak mutlak harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan, karena tanpa didaftarkan pun suatu Ciptaan tetap dilindungi oleh hukum. Hal ini menunjukkan bahwa sifat pendaftaran adalah bersifat fakultatif (kebolehan) artinya pencipta boleh mendaftarkan ciptaannya, atau boleh tidak mendaftarkan dan apabila tidak mendaftarkan tidak ada sanksi hukumnya. Walaupun tidak ada kewajiban (keharusan) untuk mendaftarkan

ciptaan, namun pendaftaran perlu dilakukan mengingat tujuan pendaftaran ciptaan adalah untuk memudahkan pembuktian hak cipta dalam hal terjadi sengketa di kemudian hari. Namun demikian, untuk menghindari adanya persepsi yang salah dan adanya kemungkinan manipulasi oleh pendaftar yang tidak jujur, maka istilah "**pendaftaran**" sebaiknya diganti dengan istilah "**pencatatan**" , sehingga masyarakat akan terhindar dalam memberikan persepsi terhadap istilah pendaftaran sebagaimana digunakan dalam pendaftaran Paten, Merek dan Desain Industri.

3. Penyelesaian sengketa lisensi dapat muncul dalam berbagai bentuk, secara umum forum penyelesaian sengketa yang tersedia dapat digolongkan dalam dua bentuk , yaitu forum litigasi melalui pengadilan dan forum non litigasi yang berada di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau sering disebut *Alternative Dispute Resolution (ADR)* merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa kooperatif, yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi terhadap konflik atau sengketa yang bersifat *win-win* (menang-menang) . Di dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 menunjuk Pengadilan niaga untuk menyelesaikan masalah pelanggaran di bidang hak cipta, namun masalah lisensi tidak secara tegas di sebutkan dalam undang-undang tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Admadja, Hendra Tanu., *Hak Cipta Musik dan Lagu*, Promosi Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Maret 2003.
- Ashshofa, Burhan, SH., *Metode Penelitian Hukum*, Bineka Cipta, 1998;
- Asian Law Group Pty. Ltd., Indonesia Australia Specialised Training Project Phase II, Short Course in Intellectual Property Right's (Elementary);
- Badan Pembinaan Hukum Nasional., *Aspek-aspek Hukum Dari Pengalihan Tehnologi*, Penerbit Bina Cipta 1978;
- Bainbridge, David., *Intellectual Property*, Fourth Edition
- Barnawi, Jenny., SH., LLM., *Penelitian Perbandingan Hukum Belanda dalam Hukum Kontinental (Belanda) dan Hukum Inggris/Amerika*
- BHN., *Himpunan Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Perdata Tahun 1982/1983 dan 1983/1984*, BPHN 1985;
- BPHN, *Laporan Akhir Penelitian Pengaruh Konglomerasi terhadap Perkembangan Hukum Ekonomi di Indonesia*, 1991/1992;
- BPHN, Penelitian tentang *Perbandingan Hukum Benda dengan Hukum Continental (Belanda) dan Hukum Inggris/Amerika*, Januari 1994;
- BPHN, Penelitian tentang *Aspek Hukum Perjanjian Build, Operate and Transfers (BOT)*, 1994/1995;
- Butt, Peter., *Concise Australian Legal Dictionary*, Butterworths, Second Edition
- Chaterine Colston., *Principles of Intellectual Property Law*, Cavendish Publishing Limited London.
- Craib, Ian, *Teori Social Modern : dari Parson sampai Hebermas*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Damian, Eddy., Dr., SH., *Hukum Hak Cipta menurut beberapa Konvensi Internasional, UU Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, Alumni Bandung 1999;
- David W, Stewart., *Secondary Research, Information Source and Methods*, Soge Publications, Newbury Park, London, 1984.
- DGIP, Department of Justice and Human Right Republic of Indonesia., *Annual Report 2000*;
- DGIP, Department of Justice of The Republic of Indonesia., *Annual Report 1998*

- Direktorat Jenderal HKI, Departemen Kehakiman dan HAM RI., *Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan Peraturan Pelaksanaannya*;
- Direktorat Jenderal HKI, Dep. Kehakiman dan HAM RI, *Susunan dalam Satu Naskah Undang-undang Hak Cipta*;
- Direktorat Jenderal HKI, Departemen Kehakiman dan HAM RI, *Buku Panduan tentang Hak Atas kekayaan Intelektual (Pertanyaan dan Jawaban)* Maret 1999;
- Djojohadikusumo, Sumitro., *Indonesia dalam Perkembangan Dunia, Kini dan Masa Datang*, LP3ES 1986;
- Djumhana, Muhamad., Drs.,SH., dan R. Djubaedillah, SH., *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktek di Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1993;
- Djumhana, Muhamad., Drs.,SH., dan R. Djubaedillah, SH., *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktek di Indonesia (Edisi Revisi)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1997
- Drahos, Peter., *A Philosophy of Intellectual Property*, Darmonth Publishing, (Aldershot,Brookfield USA, Singapore, Sydney), 1986.
- Elise T., Sulistini, SH dan Drs. Rudy T. Erwin, SH., *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-perkara Perdata*, Bina Aksara 1987;
- Fakrullah, Udan Arif, SH.,MH., dan H. Hadi Wuryan, SH., CN.,MH., *Hukum Ekonomi Buku Ke Satu*, Peneribk Karya Abditama 1997;
- Friedman., Lawwrence M., *The Legal System : A Social Science Prespective*, Russel Foundation, 1975.
- Fuady, Munir., *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Gautama, Sudargo, Prof, Mr., Dr., *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional, TRIP's, GATT, Putaran Uruguay 1994*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1994;
- Gautama, Sudargo., *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Resco, Bandung 1990.
- Giddens, *Control Problem in Social Theory*, Millan Education Ltd, London, 1993.
- Goldstein, Paul (I), *Copyrights Highway, The Law and Lore of Copyright from Gutenberg to The Celestial Jukebox*, Hill and Wang, 1994.
- Goldstein, Paul, *Hak Cipta Dahulu, Kini dan Esok*, Penerjemah Masri maris, Yayasan

- Obor Indonesia, Jakarta 1997;
- Hartono, Soenaryati., *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1982.
- Hartono, Sri Rejeki (Ketua Tim Kompendium Bidang Hukum Dagang), *Laporan Akhir Hak Milik Intelektual*, Jakarta 1996/1997
- Hartono, Sunaryati C F G., Prof. Dr., SH., *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20*, Penerbit Alumni 1994 Bandung;
- Hernoko, Agus Yuda, *Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Standar* (Pengembangan Konsep-konsep win-win solution sebagai Alternatif Baru dalam Bisnis, diedit oleh Dr. Sarwini, SH.,MS dan L. Budi Kagramanto dalam 'Puspa Ragam Informasi dan Problematika Hukum', Penerbit Karya Abditama, Surabaya, Oktober 2000.
- [http:// www.copyright.org.au](http://www.copyright.org.au)
- Idham, Ibrahim., SH.,MH., *Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Masalah Perlisensian*, Desertasi untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum pada Universitas Indonesia.
- Ihromi ,T.O. (penyunting), *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 1993
- Indonesia Australia Specialised Training Project-Phase II, *Intellectual Property Rights*, Short Course on Copyright, 2002.
- Johnson, Doyle Paul., *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Terjemahan Robert M.,Z., Lawang, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 1990.
- Kartadjaemena, *GATT/WTO dan Hasil Uruguay Round*, Universitas Indonesia-Press 1997;
- Kase FJ., *Copyright Thought in Countinental Europe : Its Development, Legal Theories and Philosophy*, 1995.
- Kesowo, Bambang, SH.,LLM., *Pengantar Umum mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*;
- Macpherson, C.B., *Pemikiran dasar tentang Hak Milik*, University of Toronto Press 1978;
- Maulana, Insan Budi., SH.,LLM., *Sukses Bisnis melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1997;
- Maulana, Insan Budi., SH.,LLM., *Implikasi Hukum Perjanjian TRIP's terhadap IPR : Revisi Undang-Undang Paten, Merek dan Hak Cipta serta Pengaruhnya terhadap Kegiatan Ekonomi*, Jakarta Maret 1997;

- Meriam Darus Badruzaman**, *Aneka Hukum Bisnis*, Penerbit Alumni 1994.
- Moleong, Lexy J**, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994.
- Mouzelis, N.**, *Restructuring Structuration Theory*, *Sociological Review*, Vol. 7, 1986
- Muhammad, Abdul Kadir.**, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Mulyadi, Kartini., SH**, *Hukum Kontrak Internasional dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Hukum Nasional*;
- Nasution S.**, *Metode Research*, Jemmars, Bandung, 1982
- Nazif, Amru Hydari.**, *Catatan Singkat yang disampaikan kepada Direktur Hak Cipta, Desain Industri, DTLST dan RD pada tanggal 15 April 2002*, Karyawan LIPI, Anggota Sentra HKI LIPI.
- Njatrijani, Rinitami.**, *Pembangunan Hukum dalam Rangka Menuju Era Industrialisasi (Khususnya Bidang Hukum Kontrak)*, yang dimuat dalam Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang berjudul Masalah-masalah hukum Edisi IV/Januari-Maret 1999.
- Nuridin, Zarkasyi.**, *Kearah Standarisasi Pembuatan Surat Perjanjian Penerbitan*, Artikel di dalam Majalah Dwi Bulanan Berita Buku No. 44 Th. V Juli 1993, IKAPI
- Ongko, Helen Theorupun.**, *Kontrak Lisensi Hak Kekayaan Intelektual*, Nopember 1999.
- Paloma, Margaret M.**, *Sosiologi Kontemporer*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta 1994.
- Paster, Gary Good**, *Panduan Negosiasi dan Mediasi*, Seri Dasar Hukum Ekonomi 9, ELLIP's;
- Peter E.,Dr.,LLD & Peter Butt BA.LLM.**, *Concise Australian Legal Dictionary*, Butter Worths Second Rdition 1998;
- Ranuwihardjo, Sukadji**, *Beberapa Aspek tentang Ketegaran Fungsi dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Industri di Indonesia*, Universitas Gadjahmada;
- Ritzer, Gorge.**, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Terjemahan Alimandan, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.
- Saidin.**, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1995
- Saleh, Ismail.**, Surat Nomor H.UM.01.06-12 Tanggal 13 Januari 1993 Perihal Pengelolaan Musik

- Salim, Peter Drs., dan Yenny Salim., *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Edisi Pertama, Penerbit Modern English Press, Jakarta 1991.
- Sanafiah, Faisal, *Penelitian Kualitatif*, Dasar-dasar dan Aplikasi Yayasan Asih, Malang, 1990.
- Sanusi Bintang., *Hukum Hak Cipta*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Satrio J., *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Buku I, 2001, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sembiring, Sentosa., *Aspek-aspek Yuridis dalam Penerbitan Buku*, Bina Cipta, Bandung 1987.
- Setiawan S., *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung 1977
- Simorangkir, J.C.T., SH., *Undang-undang Hak Cipta 1982 (UHC 1982)*, Penerbit Djambatan;
- Soekotjo Hadiwinoto, SH.,LLM., *Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*;
- Soemitro, Rony Hanitijo., *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Soemitro, Rony Hanitijo., *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Cetakan Kedua, Jakarta, 1985.
- Soemitro, Rony Hanitijo., *Studi Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.
- Soerjono Soekanto, Prof, Dr, SH, MA dan R. Otje Salman, SH., *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta 1987;
- Sofwan, Sri Soedewi Masjhcoen., *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Stewart, Mckeough., *Intellectual Property in Australia 2<sup>nd</sup> edition*, Butterworth
- Subekti R, Prof, SH., dan R. Tjitro Sudiro., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita 1978;
- Subekti R, Prof, SH., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Penerbit PT. Intermasa, Cetakan ke XVI tahun 1982;
- Subekti, Prof, SH., *Hukum Perjanjian*, Penerbit Intermasa, 1998;
- Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata., *Pembaharuan Undang-undang Hak Cipta (1997)*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.



- Sunandar, Taryana, SH., *Penulisan Karya Ilmiah tentang Aspek-Aspek Hukum dari Agreement on TRIP's GATT*, BPHN Departemen Kehakiman RI, 1993/1994;
- Sungguno, Bambang, SH.,MS, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta 1997;
- Susila, Agus Brata, SH., MA., *Peranan Hukum Nasional dan Budaya Hukum Indonesia dalam Kontrak Internasional di Era Globalisasi*, Kertas Kerja Pertemuan Ilmiah BPHN, Jakarta 6 Maret 1997;
- Tim Peneliti BPP Teknologi dan BPHN., , *Laporan Penelitian Kontrak Nasional dan Internasional Alih Teknologi* Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen kehakiman, Jakarta, 1991
- The International Bureau of WIPO., *Possibility of Establishing an ASEAN Regional Copyright Collective Management System*, May 2002.
- Tobias, Maricis Yan., *Copyrights Protection of Indigenous Expressions*, Philiphina 2001
- White, Margaret and Lyn Tan., *Legal Studies*, Case Book, 1990;
- Widjaja, Gunawan., *Lisensi, Seri Hukum Bisnis*, PT.Raja Grafindo Persada, 2001
- WIPO, *Licensing Guide* (Geneva 1977)
- WIPO, Organisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual Dunia, *Perjanjian Hak Cipta dengan Pernyataan-pernyataan yang telah Disepakati dalam Konferensi Diplomatik dan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Bern (1971)*, Jenewa 1997;
- WIPO, *WIPO Glossary of Terms of The Law of Copyrights and Neighboring Rights*, 1980.
- WIPO., *Agreement Between The WIPO and WTO (1995)*;
- WIPO., *Licensing Guide for Developing Countries*, Genewa 1977;
- Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melangar Hukum, Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2000
- [www.kci.or.id](http://www.kci.or.id)., *Lisensi Hak Cipta Sedunia*
- Yahya Harahap M., *Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum (buku kesatu)*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Yashiro Takahashi Professor., *Technology Transfer and Licensing*, JPO.,I.Y, 1999
- Yayasan Karya Cipta Indonesia., *Pedoman Singkat untuk Anggota*, Jakarta

**Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, *Hukum Kontrak Internasional, Jurnal Hukum Bisnis Volume 2, 1997;***

**Yellow Orchid Creation CV., *Terjemahan Resmi Bern Convention, Jakarta, 1999***

### **MAKALAH DAN JURNAL**

**Budi, Henry Soelistyo., SH.,LLM., *Beberapa Aspek Hukum Dalam Perlindungan Hak Cipta*, makalah disampaikan pada Seminar Sehari Pekan Seni dalam Rangka HUT Institut Kesenian Jakarta (IKJ), Jakarta, tanggal 30 Juni 1997.**

**Budi, Henry Soelistyo., SH.,LLM., *Beberapa Catatan Menyambut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.*, Makalah disampaikan pada Seminar Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Undang-undang Hak Cipta Tahun 2002, tanggal 15 Agustus 2002)**

**Gautama, Sudargo, Prof, Dr. Mr., *Kontrak Internasional*, Makalah disampaikan pada Pertemuan Ilmiah mengenai Perkembangan Hukum Kontrak dalam Praktek Bisnis di Indonesia, Februari 1993;**

**Radjaguguk, Erman, Prof.,Dr.,SH.,LLM.,*Peran Hukum Kontrak Internasional dalam Perdagangan Bebas*, Makalah disampaikan pada Seminar tentang Kesiapan Hukum Nasional Menghadapi Perdagangan Bebas, Jakarta 5 Maret 1997**

**Setiawan, SH., MH., *Beberapa Catatan tentang Perjanjian Franchise*, Makalah yang disajikan pada Pertemuan Ilmiah tentang Perkembangan Hak Kontrak dalam Praktek Bisnis di Indonesia, Jakarta 22-23 Pebruari 1993;**

**Sigit, Arry Ardanta., *Perlindungan Paten (Prosedur Permintaan paten Dampaknya bagi Pengembangan Industri Nasional dan Peranan penegakan Hukum dalam Penyelenggaraan sistem Paten)*, Makalah disajikan dalam pelatihan untuk Pengajar HaKI, 1996.**

**Simandjuntak Walter., *Perlindungan Hak Cipta di Indonesia*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Indonesia Australia Specialised Training Project, yang diselenggarakan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual .**

**Sinungan, Ansori.,SH.,LLM., *Penegakan Hukum, Litigasi dan Lisensi Hak kekayaan Intelektual*, Makalah disampaikan pada Training of Trainer (TOT), Pengelola Gugus HKI Perguruan Tinggi Semarang, 12 Juli 2000.**

**Soebagijo Soemadihardjo, SH., Drs., *Kontrak-Kontrak yang Diadakan oleh Pemerintah (Governn.ent Contract)*, Makalah disampaikan paa Pertemuan Ilmiah mengenai Perkembangan Hukum Kontrak dalam Praktek Bisnis di Indonesia, Februari 1993;**

**Soebagjo, Felit O., *Perkembangan Asas-asas Hukum Kontrak dalam Praktek Bisnis selama 25 Tahun Terakhir*, Pertemuan Ilmiah BPHN Jakarta Pebruari 1993;**

**Pohan, Amrul Partomuan, SH., LLM, *Penggunaan Kontrak Baku (Standard Contract) dalam Praktek Bisnis di Indonesia*, Makalah yang disajikan pada Pertemuan Ilmiah tentang Perkembangan Hak Kontrak dalam Praktek Bisnis di Indonesia, Jakarta 22-23 Pebruari 1993;**

**Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, *Jurnal Hukum Bisnis Volume 6, 1999***

**Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Permasalahan Hukum Jaminan, *Jurnal Hukum Bisnis Volume 9, 1999;***

-----, Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right.

-----, Buletin Karya Cipta Indonesia, Edisi Khusus Mechanical Rights, Nomor 4, Edisi Nopember 1998.

-----, Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri bandung.

-----, Lithuania, Law on Copyright and Related Rights (N0.VIII-1185 of May 18, 1999, as Amended by Law No. VIII-1886, of July 20, 2000.)

-----, *Terjemahan Auteurswet 1912*, Undang-undang Hak Cipta 1912, Stb.1912 Nomor 600, Undang-undang tanggal 23 September 1912.